

LAPORAN PENELITIAN

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

2021 – 2024

Evaluasi Pencapaian Target RPJMD
Sampai dengan Tahun 2024



DISUSUN OLEH :

- Hadi Prayitno
- Triono Hadi
- M. Nurun Najib

- Dita Nurul Aini Mustika Dewi
- Achmad Taufik
- Asri Nur Aina

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
GLOSARIUM	viii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Gambaran Umum.....	11
BAB III Evaluasi Pelaksanaan Apbd Kabupaten Nunukan 2021-2024.	59
BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026.....	85
BAB V Evaluasi Pencapaian Program Prioritas Dan Kinerja Perangkat Dalam Rpjmd 2021-2026.....	189
BAB VI. Kesimpulan Dan Rekomendasi Strategis.....	317

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Kabupaten Nunukan	14
Gambar 1.	Peta Kabupaten Nunukan	14
Gambar 2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Nunukan	16
Gambar 3.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nunukan	18
Gambar 4.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan.....	19
Gambar 5.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nunukan	20
Gambar 6.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan	21
Gambar 7.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan	24
Gambar 8.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan.....	25
Gambar 9.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nunukan	25
Gambar 10.	Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten Nunukan	29
Gambar 11.	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Medis Kabupaten Nunukan	30
Gambar 12.	Perkembangan Panjang Jalan Beraspal Kabupaten Nunukan ..	31
Gambar 13.	Perkembangan Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Kabupaten Nunukan	34
Gambar 14.	Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	35
Gambar 15.	Perkembangan Jumlah Lokasi Pelayanan Jemput Bola Capil Kabupaten Nunukan	36
Gambar 16.	Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Nunukan ...	38
Gambar 17.	Capaian Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten Nunukan	40
Gambar 18.	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah	43
Gambar 19.	Perkembangan Indikator Daya Saing Ekonomi Kabupaten Nunukan	46
Gambar 20.	Perkembangan Penurunan Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Nunukan	49
Gambar 21.	Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Nunukan	51
Gambar 22.	Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Nunukan	53
Gambar 23.	Perkembangan Jumlah Izin Usaha melalui OSS Kabupaten Nunukan	56
Gambar 24.	Perkembangan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nunukan	57

Gambar 25.	Perkembangan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan	61
Gambar 26.	Perkembangan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan	63
Gambar 27.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nunukan	69
Gambar 28.	Perkembangan Postur APBD Kabupaten Nunukan	71
Gambar 29.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-2024	92
Gambar 30.	Persentase Angka Kemiskinan Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-224.....	95
Gambar 31.	Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-224.....	97
Gambar 32.	Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-224.....	99
Gambar 33.	Kerangka Logis Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026	111
Gambar 34.	Tren Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Pembangunan, 2021-2024	126
Gambar 35.	Rekapilutasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pembangunan Daerah 2021-2024	133
Gambar 36.	Target dan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Nunukan Tahun 2021-2024	135
Gambar 37.	Target dan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) Nunukan Tahun 2021-2024	137
Gambar 38.	Target dan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Nunukan Tahun 2021-2024.....	138
Gambar 39.	Target dan Capaian Pengeluaran Perkapita Nunukan Tahun 2021-2024.....	139
Gambar 40.	Target dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Nunukan Tahun 2021-2024.....	141
Gambar 41.	Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nunukan Tahun 2021-2024	142
Gambar 42.	Target dan Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Nunukan Tahun 2021-2024	144
Gambar 43.	Target dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas (RK) Nunukan Tahun 2021-2024	145
Gambar 44.	Target dan Capaian Indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Nunukan Tahun 2021-2024	146
Gambar 45.	Target dan Capaian Indikator Indeks Aksesibilitas Nunukan Tahun 2021-2024.....	148
Gambar 46.	Target dan Capaian Indikator Rasio Luas Irigasi yang Terlayani Nunukan Tahun 2021-2024.....	149
Gambar 47.	Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Nunukan Tahun 2021-2024	151
Gambar 48.	Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Nunukan Tahun 2021-2024	152

Gambar 49.	Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Nunukan Tahun 2021-2024.....	153
Gambar 50.	Target dan Capaian Indikator Penanaman Modal Nunukan Tahun 2021-2024.....	154
Gambar 51.	Target dan Capaian Indikator Kunjungan Wisatawan Nunukan Tahun 2021-2024.....	156
Gambar 52.	Target dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021-2024.....	159
Gambar 53.	Target dan Capaian Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2021-2024.....	160
Gambar 54.	Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Nunukan Tahun 2021-2024.....	161
Gambar 55.	Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) Nunukan Tahun 2021-2024.....	163
Gambar 56.	Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) Nunukan Tahun 2021-2024.....	164
Gambar 57.	Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Nunukan Tahun 2021-2024.....	165
Gambar 58.	Target dan Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK Nunukan Tahun 2021-2024.....	167
Gambar 59.	Target dan Capaian Indikator Persentase K3 Yang Ditangani, Nunukan Tahun 2021-2024.....	168
Gambar 60.	Target dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Nunukan Tahun 2021-2024.....	169
Gambar 61.	Target dan Capaian Indikator Persentase Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat 2021-2024.....	171
Gambar 62.	Perbandingan Keseluruhan Program Perangkat Daerah (diluar Kecamatan) dalam RPJM dan RKPD 2021-2024.....	196
Gambar 63.	Perbandingan Pagu Anggaran Program Pembangunan dalam RPJMD dan APBD 2021-2024.....	198
Gambar 64.	Perbandingan Pagu Anggaran Urusan dalam RPJMD dan APBD tahun 2023.....	200
Gambar 65.	Perbandingan Pagu Anggaran Urusan dalam RPJMD dan APBD tahun 2024.....	202
Gambar 66.	Kerangka Logis Prioritas Pembangunan Daerah Nunukan RPJMD 2021-2026.....	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Dasar Hukum.....	4
Tabel 2.	Sintesis Tantangan Utama, Strategi penguatan dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah	81
Tabel 3.	Target Indikator Makro Kabupaten Nunukan dalam RPJMD 2021-2026.....	86
Tabel 4.	Realisasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Nunukan dalam RPJMD 2021-2026	88
Tabel 5.	Predikat Kinerja Indikator Makro Pembangunan 2021-2024	90
Tabel 6.	Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026.....	100
Tabel 7.	Target Proyeksi Indikator Kinerja Utama Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024	102
Tabel 8.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024.....	103
Tabel 9.	Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024.....	105
Tabel 10.	Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan.....	112
Tabel 11.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024.....	122
Tabel 12.	Persentase Capaian dan Predikat Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024 ...	129
Tabel 13.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Maturitas SPIP Nunukan Tahun 2021-2024.....	158
Tabel 14.	Target dan Realisasi Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Nunukan Tahun 2021-2024	162
Tabel 15.	Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	173
Tabel 16.	Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peningkatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur.....	177
Tabel 17.	Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata.....	179
Tabel 18.	Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Reformasi Birokrasi	182
Tabel 19.	Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup.....	183
Tabel 20.	Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Ketertiban dan Keamanan	187
Tabel 21.	Prognosis Program dan Pagu Anggaran dalam RPJMD 2021-2026.....	190

Tabel 22.	Konsistensi Program dalam RPJMD dan RKPD 2021-2024.....	193
Tabel 23.	Konsistensi Program Urusan Kewilayahan (Kecamatan) 2021-2024.....	197
Tabel 24.	Rekapitulasi Predikat Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program Prioritas 2022-2024.....	205
Tabel 25.	Realisasi Kinerja Program Prioritas, Capaian Kinerja dan Prediket Kinerja.....	206
Tabel 26.	Capaian Program Prioritas pada Sasaran Meningkatnya Taraf pendidikan Masyarakat.....	225
Tabel 27.	Capaian Program Prioritas pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	229
Tabel 28.	Capaian Program prioritas pada Sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dan Kapasitas SDM.....	235
Tabel 29.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan pembangunan infrastruktur wilayah.....	243
Tabel 30.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Permukiman secara Optimal.....	248
Tabel 31.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja sektor pertanian.....	252
Tabel 32.	Capaian Program Prioritas pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri.....	259
Tabel 33.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja sektor Perdagangan.....	264
Tabel 34.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja investasi di daerah.....	270
Tabel 35.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja sektor pariwisata.....	275
Tabel 36.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.....	280
Tabel 37.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN.....	287
Tabel 38.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.....	291
Tabel 39.	Capaian Program prioritas pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim.....	296
Tabel 40.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban.....	301
Tabel 41.	Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas penanganan bencana.....	305
Tabel 42.	Capaian Program prioritas pada Sasaran menguatnya karakter kebangsaan.....	309
Tabel 43.	Rekapitulasi Keberhasilan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pelaksanaan Program 2024.....	312

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target dan Realisasi dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, Tahun 2021-2024	322
Lampiran 2. Target, Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021- 2024	323
Lampiran 3. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2024	324
Lampiran 4. Target, Reaisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2024	326
Lampiran 5. Perbandingan Pagu Anggaran Perangkat daerah and Urusan antara RPJMD, RKPD dan APBD 2023-2024	347
Lampiran 6. Rekapitulasi Capaian Program Prioritas berdasarkan Perangkat Daerah, Nunukan 2021-2024	350

GLOSARIUM

3T	= Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
AHH	= Angka Harapan Hidup
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	= Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	= Badan Pusat Statistik
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
COVID-19	= Coronavirus Disease 2019
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DPA	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPMPSTP	= Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUDI	= Dunia Usaha dan Dunia Industri
IKD	= Indikator Kinerja Daerah
IKM	= Industri Kecil dan Menengah
IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat
IKU	= Indikator Kinerja Utama
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
KLHS	= Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPBU	= Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
LHP	= Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPJ	= Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
MPP	= Mal Pelayanan Publik
NIB	= Nomor Induk Berusaha
OPD	= Organisasi Perangkat Daerah
OSS	= Online Single Submission
OSS-RBA	= Online Single Submission – Risk Based Approach
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PDAM	= Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	= Pemerintah Daerah
PIPD	= Peta Potensi Investasi Daerah
PKK	= Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLN	= Perusahaan Listrik Negara
RBA	= Risk Based Approach
RKA	= Rencana Kerja dan Anggaran
Renja	= Rencana Kerja
Renstra	= Rencana Strategis
RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	= Rata-rata Lama Sekolah
RPD	= Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

SDGs	= Sustainable Development Goals
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPD	= Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SPAMDes	= Sistem Penyediaan Air Minum Desa
SPM	= Standar Pelayanan Minimal
SPPN	= Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TA	= Tahun Anggaran
THIS	= Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	= Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM	= Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPT	= Unit Pelaksana Teknis
UU	= Undang-Undang
WTP	= Wajar Tanpa Pengecualian

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan tersebut harus menjamin keselarasan antara pusat dan daerah, baik dalam substansi maupun waktu pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menetapkan bahwa dokumen perencanaan terdiri atas rencana jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD). Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan RPJPD Tahun 2005–2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 yang merupakan tahap keempat dan terakhir dalam RPJPD tersebut. RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan visi “Nunukan yang Aman, Maju, Adil, dan Sejahtera,” serta mengacu pada arah pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan keterpaduan antara pusat dan daerah, serta antar dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

RPJMD memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan visi kepala daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyusunan program prioritas, pengalokasian anggaran, serta pengukuran kinerja pembangunan. Pemerintah Kabupaten Nunukan secara konsisten menyusun dokumen RPJMD melalui Peraturan Daerah setiap lima tahun. Keberadaan dokumen ini menunjukkan komitmen daerah terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renstra) serta RKPD tahunan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh program yang dirancang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi

secara berkala menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi program telah berjalan efektif dan tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah menggunakan hasil evaluasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan perencanaan selanjutnya. Evaluasi juga diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator capaian pembangunan, baik makro maupun sektoral. Pengalaman pada periode RPJMD sebelumnya (2016–2021) menunjukkan adanya penurunan kinerja pembangunan akibat pandemi COVID-19, yang menjadi pelajaran penting bagi pelaksanaan pembangunan ke depan.

Proses evaluasi RPJMD dilakukan untuk menilai kinerja kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan selama periode lima tahun. Evaluasi ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal pemerintah terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi berperan sebagai alat refleksi dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan di lapangan. Pemerintah dapat menggunakan temuan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan akurasi kebijakan pada masa mendatang. Proses ini memungkinkan adaptasi strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi RPJMD sebagai bagian dari pengawasan internal dan upaya perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan dalam menghimpun data capaian, melakukan analisis, dan menyusun laporan evaluasi tahunan dan lima tahunan. Laporan hasil evaluasi akan menjadi acuan utama dalam menyusun RKPD tahun terakhir serta RPJMD periode berikutnya. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi proses strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kabupaten Nunukan memiliki kondisi geografis yang sangat khas karena terletak di wilayah perbatasan paling utara Kalimantan Utara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga dinamika sosial ekonomi masyarakatnya berbeda dibanding daerah lain. Kabupaten

Nunukan juga memiliki 29 pulau yang tersebar di beberapa kecamatan, dan banyak di antaranya belum terlayani infrastruktur dasar secara memadai. Keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, serta kesenjangan pelayanan publik menjadi tantangan nyata bagi pembangunan di daerah ini. Tantangan dari segi konektivitas antarwilayah, pelayanan publik, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Masyarakat Nunukan juga menghadapi mobilitas lintas negara yang tinggi, ketergantungan terhadap wilayah luar, dan keterbatasan akses layanan dasar. Pemerintah daerah harus memahami kondisi ini secara menyeluruh agar dapat merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal.

Kabupaten Nunukan tergolong sebagai daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan berkeadilan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Nunukan mencakup isu-isu strategis seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Ketimpangan antarwilayah serta belum optimalnya pelayanan publik menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa strategi pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis data.

Evaluasi RPJMD menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini juga berperan sebagai instrumen penting dalam merespons tantangan, serta menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal. Setiap hasil evaluasi membantu pemerintah daerah merumuskan strategi baru yang lebih relevan dan berkelanjutan. Proses evaluasi yang menyeluruh dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mendorong pencapaian pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar hukum

Tabel 1. Dasar Hukum

<i>No.</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Jenis</i>	<i>Isi Pokok</i>	<i>Relevansi</i>
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Undang-Undang	Menyusun sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi	Menjadi dasar hukum utama RPJPD, RPJMD, RKPD, dan evaluasinya
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang	Mengatur kewenangan daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan	Memberikan dasar kewenangan kepala daerah dalam mengevaluasi pembangunan daerah
3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Undang-Undang	Mengatur prinsip pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan	Menjadi kerangka bagi penyusunan program dan penganggaran dalam RPJMD
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Undang-Undang	Mengatur sistem pengelolaan keuangan negara/daerah	Menjamin pengelolaan dana pembangunan yang akuntabel
5	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Undang-Undang	Menetapkan mekanisme audit dan evaluasi terhadap keuangan negara	Memberi kerangka akuntabilitas bagi pelaksanaan RPJMD

<i>No.</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Jenis</i>	<i>Isi Pokok</i>	<i>Relevansi</i>
6	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Undang-Undang	Mengatur keterkaitan pembangunan dengan rencana tata ruang	Mewajibkan sinkronisasi RPJMD dengan RTRW daerah
7	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan	Undang-Undang	Menetapkan status administratif Kabupaten Nunukan	Menjadi dasar legalitas wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri	Mengatur teknis penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD	Menjadi pedoman operasional paling langsung dan rinci bagi daerah
9	Bab IX RPJMD Kabupaten Nunukan 2021–2026 tentang Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen Resmi Daerah	Menjelaskan mekanisme evaluasi tahunan dan lima tahunan	Menetapkan peran Bupati dan Bappeda dalam evaluasi dan pemantauan capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun RPJMD Tahun 2021–2026 berdasarkan sejumlah regulasi yang memiliki tingkatan hukum yang jelas dan relevan. Dasar hukum tertinggi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara terintegrasi. Undang-undang ini menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya.

Sebagai landasan kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otoritas kepada kepala daerah untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan daerah. Kewenangan ini memungkinkan kepala daerah menyusun kebijakan strategis pembangunan melalui RPJMD dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.

Aspek pengelolaan anggaran pembangunan daerah didasarkan pada tiga undang-undang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiganya menjadi kerangka utama yang menjamin penyusunan RPJMD dilakukan secara efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Penyusunan RPJMD juga harus mempertimbangkan aspek spasial, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seluruh dokumen perencanaan pembangunan harus sinkron dengan RTRW daerah. Ketentuan ini penting untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Nunukan sebagai wilayah administratif yang sah. Secara teknis, pemerintah daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat prosedur penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen RPJMD secara rinci. Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026, khususnya Bab IX, mengatur mekanisme evaluasi tahunan dan lima tahunan yang menjadi tanggung jawab bupati melalui koordinasi Bappeda. Evaluasi ini merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa seluruh program pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Evaluasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 dimaksudkan untuk menilai sejauh mana visi, misi, dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati telah diterjemahkan secara operasional ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program-program pembangunan yang terarah dan terukur. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMN 2020–2024, serta aspirasi pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, evaluasi menjadi alat untuk menilai konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Melalui evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui keberhasilan, hambatan, serta rekomendasi perbaikan untuk pembangunan lima tahunan. Pelaksanaan evaluasi ini dilandasi oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan Evaluasi RPJMD Kabupaten Nunukan 2021–2026 antara lain:

- a. Menyediakan tolok ukur kinerja untuk menilai capaian pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026.
- b. Menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), RKPD, dan Renja agar tetap sejalan dengan dokumen induk RPJMD.
- c. Mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil, dan sejahtera, sebagaimana diarahkan dalam RPJPD 2005–2025.
- d. Mengarahkan pembangunan daerah agar tetap sinkron dengan RTRW Kabupaten Nunukan, RPJMN 2020–2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- e. Mendorong terciptanya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat.

- f. Memberikan bahan refleksi bagi pembuat kebijakan daerah untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan dan menyusun RPJMD periode berikutnya secara lebih tepat sasaran.
- g. Menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui analisis terhadap indikator kinerja program dan outcome yang telah ditetapkan.
- h. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta memperkuat mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengendalian internal pembangunan.

1.4. Ruang lingkup

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 dilaksanakan dalam rangka menilai kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh menjelang akhir periode pelaksanaan dokumen perencanaan dimaksud. Kegiatan evaluasi ini diselenggarakan pada Tahun 2025, dengan mempertimbangkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak secara nasional. Evaluasi ini menggunakan batas capaian (cut-off) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, sehingga seluruh analisis difokuskan pada empat tahun pelaksanaan efektif RPJMD di bawah kepemimpinan kepala daerah hasil pemilu tahun 2020. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi masukan substantif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masa transisi maupun dokumen RPJMD periode selanjutnya.

Adapun ruang lingkup evaluasi dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap tingkat ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026.
- b. Evaluasi atas pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD), dan indikator kinerja perangkat daerah yang

mencerminkan output, outcome, serta dampak program dan kegiatan pembangunan daerah.

- c. Analisis atas konsistensi pelaksanaan arah kebijakan, strategi pembangunan, serta program prioritas daerah dalam kaitannya dengan target pembangunan tahunan dan lima tahunan.
- d. Kajian terhadap keterpaduan antara pelaksanaan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta agenda pembangunan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
- e. Evaluasi atas efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah, termasuk tingkat realisasi anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian alokasi anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah
- f. Penilaian terhadap kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan pelaporan kinerja pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan berbasis data.
- g. Kajian terhadap respons kebijakan daerah dalam menghadapi dinamika eksternal, seperti pandemi COVID-19, perubahan sosial ekonomi, tantangan geopolitik perbatasan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan program pembanguana
- h. Identifikasi terhadap isu-isu strategis, permasalahan utama, dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan RPJMD, baik dari sisi substansi program, tata kelola, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan
- i. Penyusunan rekomendasi strategis sebagai masukan kebijakan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka penyusunan RPD masa transisi dan RPJMD periode 2026–2031.

1.5. Sistematika

Adapun sistematika penulisan Evaluasi RPJMD ini antara lain:

- **Bab I Pendahuluan:** Latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, sistematika.
- **Bab II Gambaran Umum:** Kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi daerah, serta gambaran umum APBD.
- **Bab III: Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2024**
- **Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJMD:** Analisis Hasil Capaian Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2024, Analisis Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah 2021-2024
- **Bab V Evaluasi Capaian Program dan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan:** Analisis Hasil Capaian Target Program Prioritas RPJMD Kabupaten Nunukan 2021-2024 berdasarkan berdasarkan perangkat daerah, Identifikasi kendala dan peluang perbaikan.
- **Bab VI Penutup:** Simpulan dan rekomendasi strategis.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan gambaran umum Kabupaten Nunukan sebagai fondasi awal untuk memahami konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka dokumen RPJMD. Sebagai wilayah yang terletak di perbatasan utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Nunukan memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial ekonomi yang sangat khas. Letaknya yang strategis di Provinsi Kalimantan Utara menjadikan kabupaten ini tidak hanya penting dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi berbasis kawasan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi dasar ini menjadi penting, sebab perencanaan pembangunan yang tidak berangkat dari realitas empiris kerap gagal menjawab kebutuhan warga dan cenderung elitis dalam implementasinya.

Dalam konteks tersebut, Bab II menguraikan berbagai aspek mendasar yang mempengaruhi arah pembangunan di Kabupaten Nunukan, mulai dari kondisi geografis dan lingkungan hidup, karakteristik demografi dan kependudukan, hingga potensi dan tantangan pembangunan wilayah. Penekanan juga diberikan pada dinamika sosial budaya serta hubungan ekonomi antarwilayah yang memengaruhi daya saing dan kohesi sosial masyarakat perbatasan. Dengan menyajikan kerangka umum ini secara sistematis, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman utuh mengenai kondisi obyektif daerah sebelum menelaah lebih lanjut strategi dan capaian pembangunan yang dibahas pada bab-bab selanjutnya.

2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan langsung dengan negara Malaysia. Secara geografis, Kabupaten Nunukan terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dengan koordinat antara 3°15' hingga 5°10' Lintang Utara dan 115°33' hingga 118°33' Bujur Timur. Letak ini menjadikan Nunukan sebagai wilayah terdepan dalam

konteks geopolitik Indonesia di perbatasan utara Kalimantan, sekaligus menjadi pintu gerbang lintas batas negara melalui jalur darat maupun laut.

Luas wilayah Kabupaten Nunukan mencapai sekitar 14.246,63 km², menjadikannya salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Utara. Karakteristik wilayahnya sangat beragam, meliputi daratan, pesisir, serta sejumlah pulau-pulau kecil. Terdapat lebih dari 400 pulau yang tersebar di sekitar wilayah administratif Nunukan, dengan beberapa di antaranya belum berpenghuni. Luas wilayah dan persebaran geografis yang luas ini memberikan tantangan tersendiri dalam aspek pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan terluar.

Topografi wilayah Kabupaten Nunukan cenderung bergelombang hingga berbukit-bukit di bagian pedalaman, terutama di kecamatan Krayan dan Krayan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia. Ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Daerah dengan elevasi tinggi didominasi oleh hutan hujan tropis dan merupakan wilayah konservasi penting, termasuk bagian dari kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi habitat berbagai spesies flora-fauna endemik.

Nunukan juga memiliki sejumlah sungai besar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedalaman. Sungai Sesayap, misalnya, memiliki peran vital sebagai jalur transportasi dan sumber kehidupan masyarakat di wilayah Lumbis, Sembakung, dan sekitarnya. Selain itu, bentang alam Nunukan juga kaya dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas, yang mencerminkan potensi sekaligus tanggung jawab ekologis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

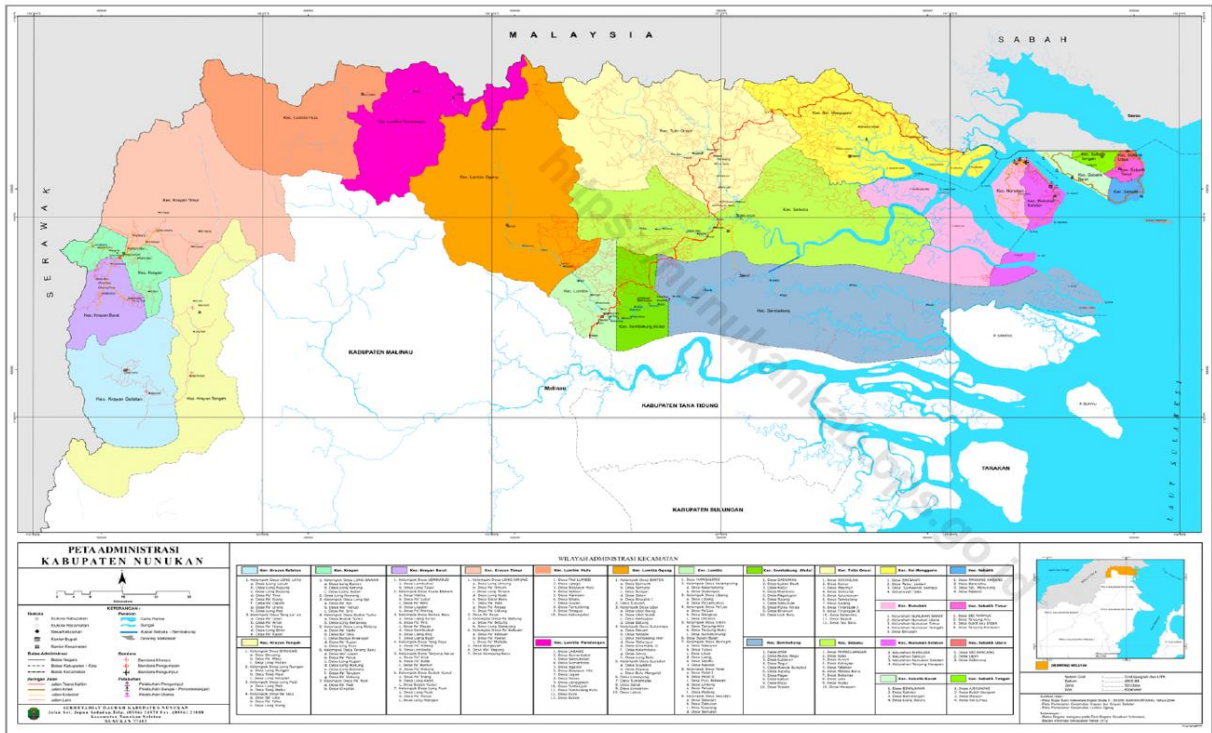
Dari sisi iklim, Kabupaten Nunukan beriklim tropis basah dengan dua musim utama, yakni musim penghujan dan kemarau yang tidak terlalu ekstrem. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm dengan suhu udara rata-rata tahunan berkisar antara 22°C hingga 32°C. Tingkat kelembaban udara yang tinggi turut memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan budidaya tanaman lokal. Stasiun pengamatan iklim di

wilayah Nunukan dan Yuwai Semaring secara rutin mencatat data meteorologis untuk mendukung perencanaan sektoral dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Secara administratif, jarak antarwilayah dalam kabupaten cukup bervariasi, dengan beberapa kecamatan seperti Krayan, Krayan Selatan, dan Lumbis Ogong memiliki aksesibilitas terbatas. Beberapa wilayah masih mengandalkan moda transportasi udara perintis maupun jalur sungai yang bergantung pada kondisi cuaca dan infrastruktur dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis Nunukan tidak hanya menjadi tantangan dalam konteks keterjangkauan pembangunan, tetapi juga menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berpihak pada wilayah-wilayah terluar.

Sebagai kabupaten perbatasan yang memiliki garis pantai dan pulau-pulau kecil, potensi strategis Nunukan dalam sektor kelautan, perikanan, dan perdagangan lintas negara sangat besar. Namun demikian, potensi ini baru akan optimal apabila didukung dengan penguatan tata ruang, konektivitas antarwilayah, serta kehadiran negara yang nyata di kawasan perbatasan. Dengan demikian, kondisi geografis Kabupaten Nunukan merupakan kekayaan sekaligus tantangan strategis yang memerlukan intervensi pembangunan secara holistik, inklusif, dan berbasis kewilayahan.

Gambar 1. Peta Kabupaten Nunukan



2.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di kawasan perbatasan negara, dengan posisi geografis yang sangat luas dan kompleks. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 227.460 jiwa, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 203.220 jiwa. Kenaikan ini mencerminkan tren pertumbuhan demografis yang positif selama lima tahun terakhir, yang didorong oleh dinamika internal maupun eksternal, seperti migrasi tenaga kerja dan kelahiran alami. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 21 kecamatan dan 212 desa/kelurahan, mengalami sedikit penurunan jumlah desa/kelurahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Luas wilayah Kabupaten Nunukan yang mencapai sekitar 14.247,5 km² menyebabkan kepadatan penduduknya tergolong rendah, yakni hanya 15,97 jiwa per kilometer persegi. Konsentrasi penduduk umumnya terkumpul di wilayah pesisir dan perkotaan seperti Kecamatan Nunukan dan Sebatik, sementara wilayah pedalaman seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah karena faktor geografis yang menantang dan aksesibilitas yang terbatas.

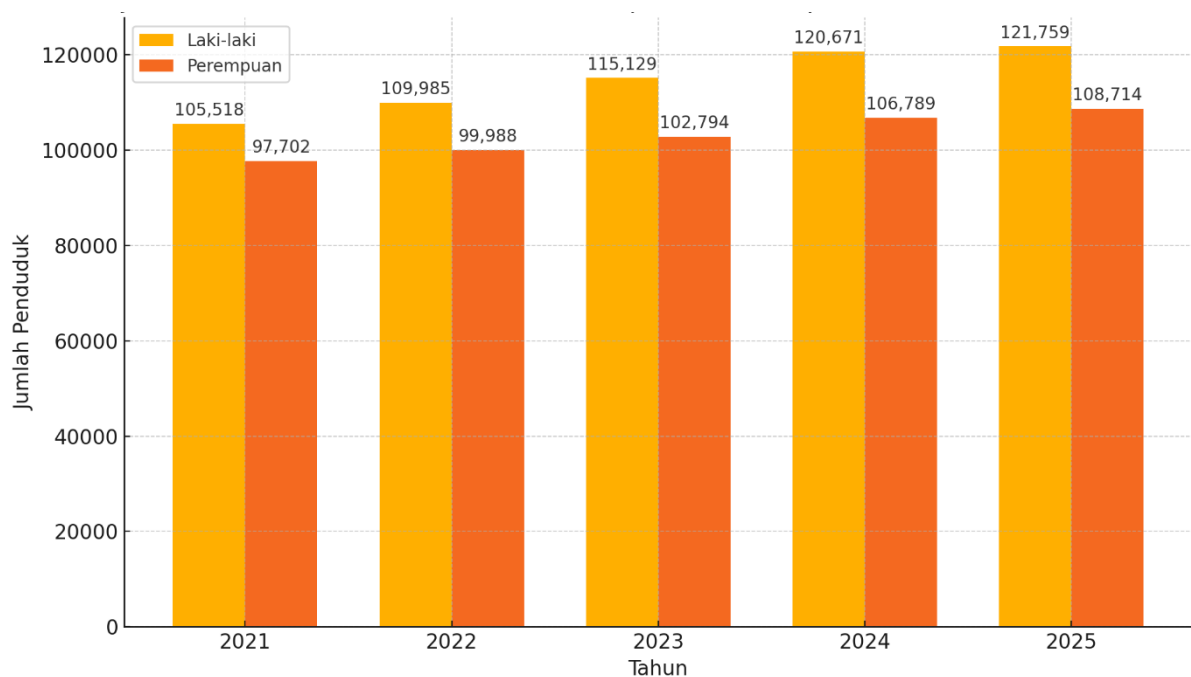
Pertumbuhan penduduk Nunukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan tahunan sekitar 1,9 persen, yang dapat dikatakan stabil namun tetap signifikan. Selain faktor kelahiran, pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh arus masuk migrasi, terutama dari wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan sebagian wilayah Kalimantan, yang datang untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, perikanan, jasa, dan perdagangan informal. Sebatik sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Tawau (Malaysia) bahkan menjadi simpul migrasi internasional yang turut membentuk karakter demografis tersendiri. Mobilitas penduduk antarwilayah ini tidak hanya memberi kontribusi pada pertumbuhan populasi, tetapi juga menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, mencakup kebutuhan pelayanan publik, perumahan, dan perlindungan sosial bagi kelompok migran dan pekerja informal.

Struktur umur penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 hingga 64 tahun, yang mencapai sekitar 68 persen dari total populasi. Ini mencerminkan potensi bonus demografi yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditopang dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan yang tepat sasaran. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang usia 10–14 tahun (21.752 jiwa) dan 20–24 tahun (20.492 jiwa), yang menandakan bahwa sebagian besar masyarakat sedang memasuki fase pendidikan dan awal produktivitas. Sementara itu, kelompok usia anak (0–14 tahun) tetap menempati porsi signifikan dari populasi, sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan dasar dan kesehatan anak masih menjadi prioritas utama pembangunan sosial di daerah ini, khususnya di wilayah terpencil dan terluar yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas tersebut.

Dari sisi struktur jenis kelamin, rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di Nunukan tergolong tidak seimbang. Data tahun 2023 mencatat rasio jenis kelamin sebesar 1,13, atau terdapat sekitar 113 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ketimpangan ini lebih mencolok di kecamatan-kecamatan dengan dominasi sektor tenaga kerja laki-laki seperti perkebunan

dan kehutanan, antara lain Sei Menggaris (1,23), Krayan Tengah (1,17), Tulin Onsoi (1,17), dan Sebuku (1,17). Rasio ini perlu diperhatikan dalam konteks perencanaan layanan publik, karena dapat memengaruhi pola kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga ketenagakerjaan berbasis gender. Ketimpangan ini juga membuka ruang untuk refleksi lebih dalam terhadap dinamika rumah tangga migran, ketahanan keluarga, dan integrasi sosial antar komunitas.

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan - 'Nunukan Dalam Angka' Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

Dari aspek pendidikan, kondisi capaian pendidikan penduduk Nunukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dewasa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan peningkatan jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, seiring dengan upaya peningkatan akses pendidikan menengah oleh pemerintah daerah. Meski demikian, tantangan masih besar terutama di wilayah-wilayah pedalaman seperti Krayan dan Lumbis Ogong, di mana terbatasnya sarana pendidikan, jarak tempuh yang jauh, serta keterbatasan guru menjadi kendala utama. Kesenjangan pendidikan ini berdampak

langsung pada ketimpangan kualitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi dalam sektor formal, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih produktif dan layak.

Dalam dimensi sosial budaya, Kabupaten Nunukan dikenal sebagai kawasan dengan tingkat heterogenitas etnis dan agama yang tinggi. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, diikuti oleh pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keberagaman ini tumbuh dalam ruang interaksi antara masyarakat adat (seperti Dayak Lundayeh, Tidung, dan Agabag), pendatang Bugis, Toraja, Jawa, dan etnis lainnya. Keragaman budaya tersebut tidak hanya menjadi kekayaan sosial tetapi juga menuntut pendekatan pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap dinamika lokal. Di banyak desa, misalnya, keberadaan rumah ibadah dari berbagai agama berdiri berdekatan, mencerminkan harmoni sosial yang menjadi kekuatan tersendiri. Namun, di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk merancang kebijakan pembangunan sosial yang akomodatif terhadap aspirasi komunitas adat, termasuk dalam hal pengakuan lahan, pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal, serta pelestarian nilai-nilai sosial tradisional di tengah arus modernisasi yang semakin deras.

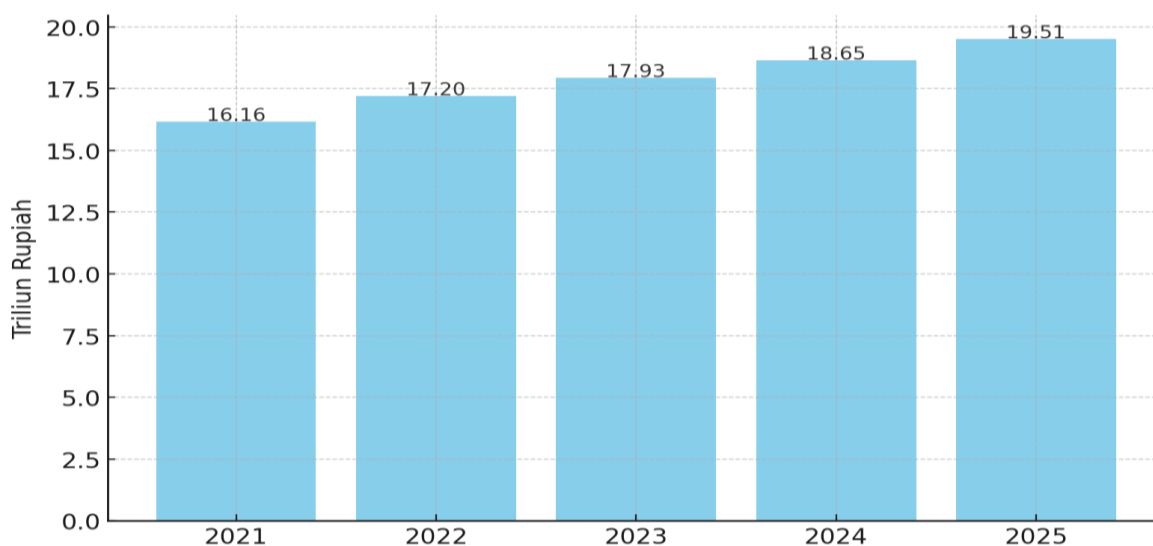
Dengan karakteristik demografis yang dinamis, Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan dan peluang yang besar dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dengan memperhatikan distribusi geografis penduduk, karakter etnis dan usia, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Intervensi yang bersifat lintas sektor dan berbasis kewilayahan, seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, layanan kesehatan bergerak, dan program pemberdayaan komunitas adat serta migran, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya menjadi beban pembangunan, tetapi justru menjadi modal utama untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan.

2.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan geografis yang kompleks. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat meningkat secara konsisten dari Rp17,20 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp17,93 triliun di tahun 2023, dan kembali tumbuh menjadi Rp18,65 triliun pada tahun 2024 (BPS, 2025). Tren ini memperlihatkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi yang relatif stabil, meskipun belum menyentuh transformasi struktural secara menyeluruh. Dorongan utama pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga, peningkatan pembentukan modal tetap bruto, serta aktivitas perdagangan antarwilayah dan konektivitas perbatasan. Namun demikian, fondasi ekonomi Nunukan masih bertumpu pada sektor-sektor dengan nilai tambah rendah, yang memerlukan diversifikasi ke arah industri pengolahan dan sektor jasa produktif lainnya.

Gambar 3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nunukan

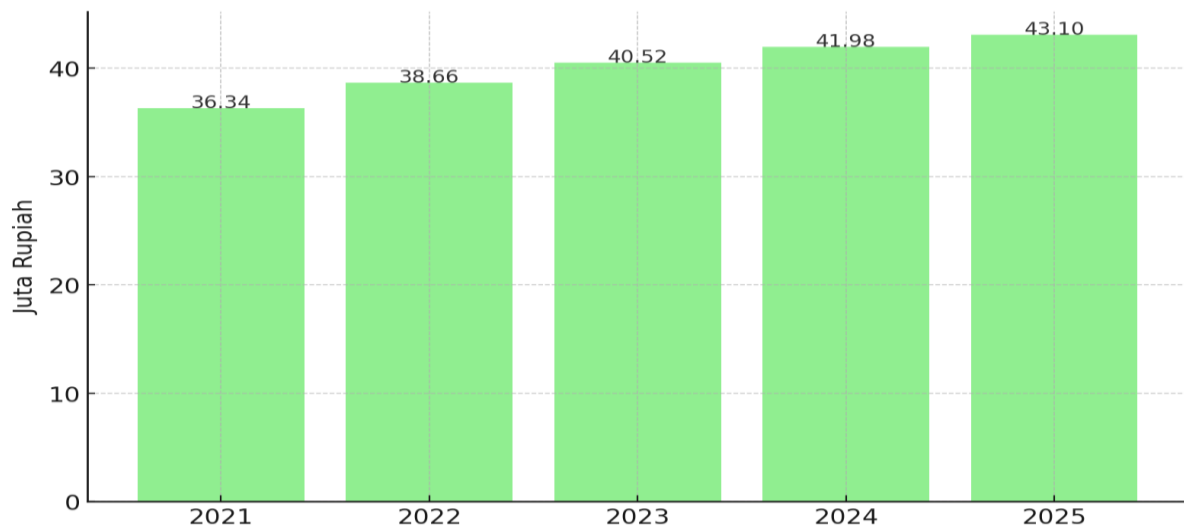


Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, *Nunukan Dalam Angka* tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

PDRB per kapita juga mencerminkan tren peningkatan daya beli masyarakat secara nominal, meskipun masih perlu dianalisis lebih lanjut

secara riil terhadap laju inflasi dan distribusinya. Pada tahun 2022, PDRB per kapita berada pada angka Rp38,66 juta dan naik menjadi Rp40,52 juta pada tahun 2023, kemudian meningkat lagi menjadi Rp41,98 juta pada tahun 2024 (BPS, 2025). Kenaikan ini menjadi indikator positif atas peningkatan produktivitas agregat, meskipun disparitas antarwilayah dan antarpenduduk masih menjadi pekerjaan rumah besar. PDRB per kapita Nunukan, misalnya, masih tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata Kalimantan Utara. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang memperkuat sektor riil dan memperluas kesempatan kerja formal menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan tersebut agar benar-benar inklusif.

Gambar 4. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan



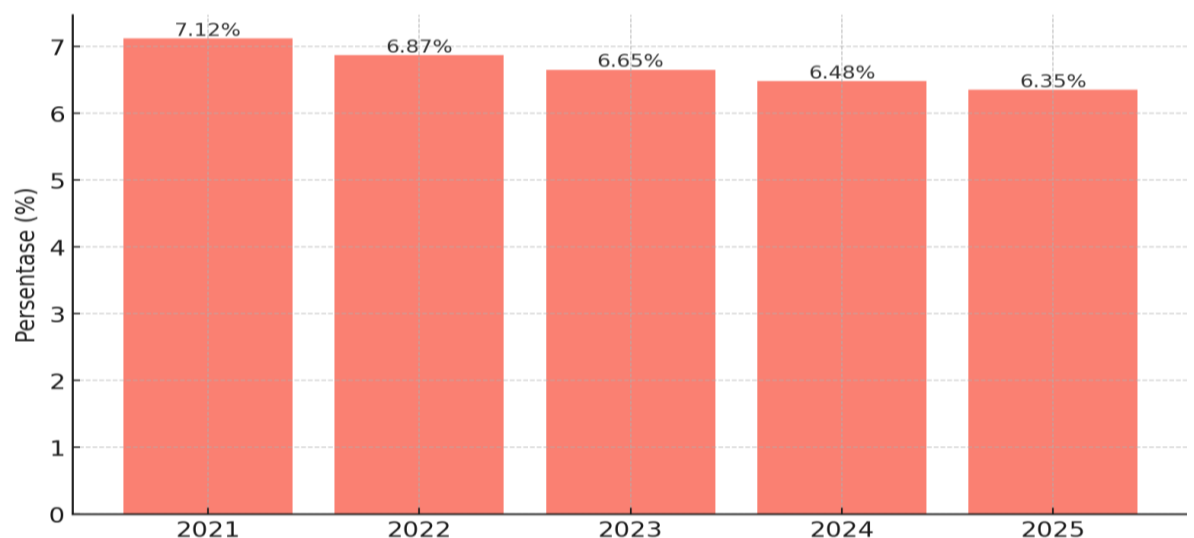
Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, *Nunukan Dalam Angka* tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan secara sektoral, meskipun terjadi fluktuasi dalam kontribusinya. Pada tahun 2021, sektor ini menyumbang 22,06% terhadap total PDRB, kemudian turun menjadi 18,19% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 19,93% pada tahun 2024 (BPS, 2025). Subsektor perikanan, khususnya dari wilayah Sebatik, Nunukan, dan Sebuku, masih menjadi andalan dalam perekonomian lokal, baik dari sisi produksi maupun nilai jual komoditas. Namun demikian, kegiatan ekonomi di sektor primer ini masih didominasi oleh skala kecil, teknologi tradisional, dan jaringan distribusi yang terbatas. Upaya hilirisasi melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta

integrasi ke rantai pasok nasional dan ekspor, menjadi agenda strategis yang perlu didorong secara serius agar sektor ini tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja, tetapi juga penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,12%, kemudian turun menjadi 6,87% di tahun 2022, 6,65% di tahun 2023, dan mencapai 6,48% pada tahun 2024 (BPS, 2025). Penurunan ini menandakan adanya perbaikan akses terhadap sumber penghidupan dasar dan perluasan program-program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi. Namun, jika dianalisis secara spasial, angka kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pedalaman seperti Krayan, Lumbis Ogong, dan Sembakung Atulai. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, transportasi, dan pasar menjadi penyebab utama lambatnya penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang lebih adaptif terhadap konteks geografis dan kultural.

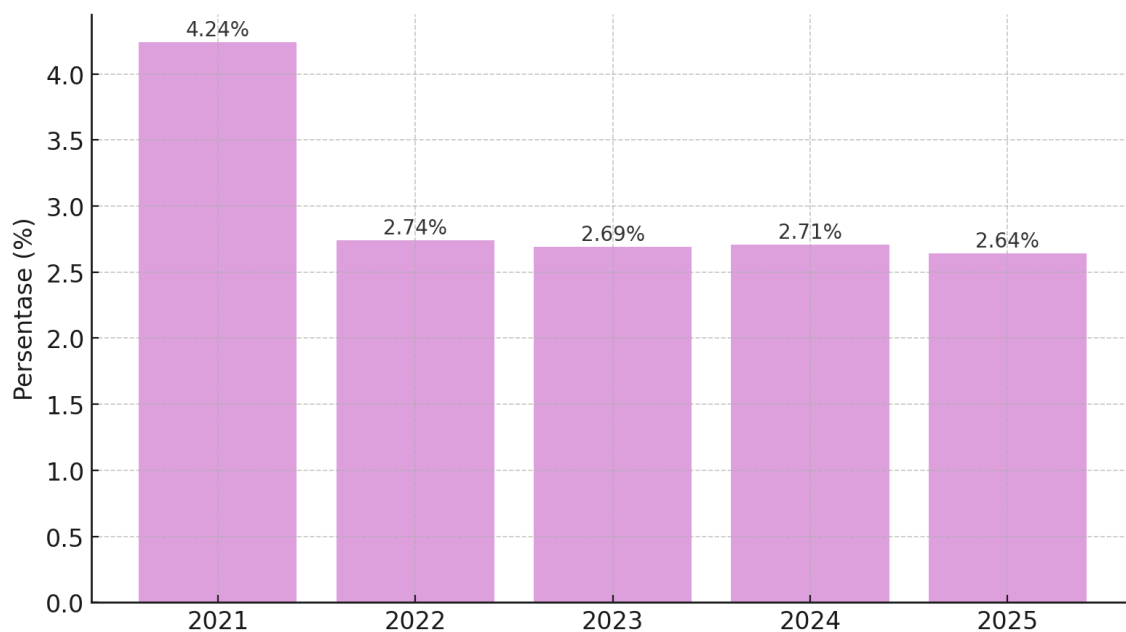
Gambar 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, *Nunukan Dalam Angka* tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan signifikan, ditandai oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2021, TPT berada di angka 4,24%, dan berhasil ditekan menjadi 2,74% pada tahun 2022, turun tipis menjadi 2,69% di tahun 2023, dan kembali turun menjadi 2,71% pada tahun 2024 (BPS, 2025). Penurunan ini mencerminkan meningkatnya peluang kerja, terutama di sektor perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan seperti Nunukan dan Sebatik. Namun demikian, tantangan ketenagakerjaan masih cukup kompleks, terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia. Sekitar 60% lebih angkatan kerja di Nunukan hanya berpendidikan hingga tingkat SMP (BPS, 2025), yang membatasi akses mereka terhadap pekerjaan formal dengan tingkat produktivitas dan upah yang lebih tinggi. Untuk itu, peningkatan keterampilan teknis dan literasi digital menjadi prioritas mendesak dalam agenda pembangunan SDM daerah.

Gambar 6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, *Nunukan Dalam Angka* tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Nunukan juga masih cukup mencolok. Berdasarkan analisis tipologi Klassen, hanya Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang tergolong dalam kategori “maju dan cepat tumbuh”. Sementara sebagian besar wilayah lain, seperti

Krayan, Lumbis, dan Sebatik Tengah, masih tergolong “berkembang lambat” atau bahkan “tertinggal” (BPS, 2025). Ketimpangan ini berakar pada aksesibilitas infrastruktur yang timpang, keterbatasan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya konektivitas ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, termasuk jalan penghubung antarwilayah, telekomunikasi, dan logistik, menjadi syarat penting untuk memperkecil kesenjangan dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan.

Dalam aspek investasi dan perdagangan, kawasan perbatasan seperti Sebatik menunjukkan potensi besar sebagai simpul ekonomi lintas negara. Data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan mencatat peningkatan signifikan dalam realisasi investasi, khususnya pada sektor perdagangan besar dan eceran yang terdorong oleh mobilitas barang dan jasa ke wilayah Tawau, Malaysia (BPS, 2025). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat masih lambatnya reformasi perizinan, kurangnya layanan pendukung investasi, serta belum terintegrasinya kebijakan daerah dengan dinamika perdagangan lintas batas. Optimalisasi kawasan ekonomi perbatasan harus disertai dengan kebijakan insentif fiskal, penguatan pelabuhan, dan digitalisasi layanan perizinan untuk meningkatkan daya saing Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara Kalimantan.

Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari pelatihan kewirausahaan, dukungan permodalan bagi UMKM, hingga pendampingan untuk kelompok tani dan nelayan (BPS, 2025). Program-program ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi lokal yang berbasis komunitas. Namun, efektivitas program masih dihadapkan pada hambatan klasik seperti minimnya keberlanjutan pendampingan, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya jejaring pemasaran. Untuk itu, diperlukan sinergi lintas sektor yang tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga sektor swasta, lembaga keuangan mikro, dan organisasi masyarakat sipil, agar transformasi ekonomi berbasis rakyat ini bisa berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan dituntut untuk mengedepankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan integrasi spasial. Pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor industri pengolahan, jasa logistik, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Di samping itu, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru, serta peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas strategis untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Nunukan.

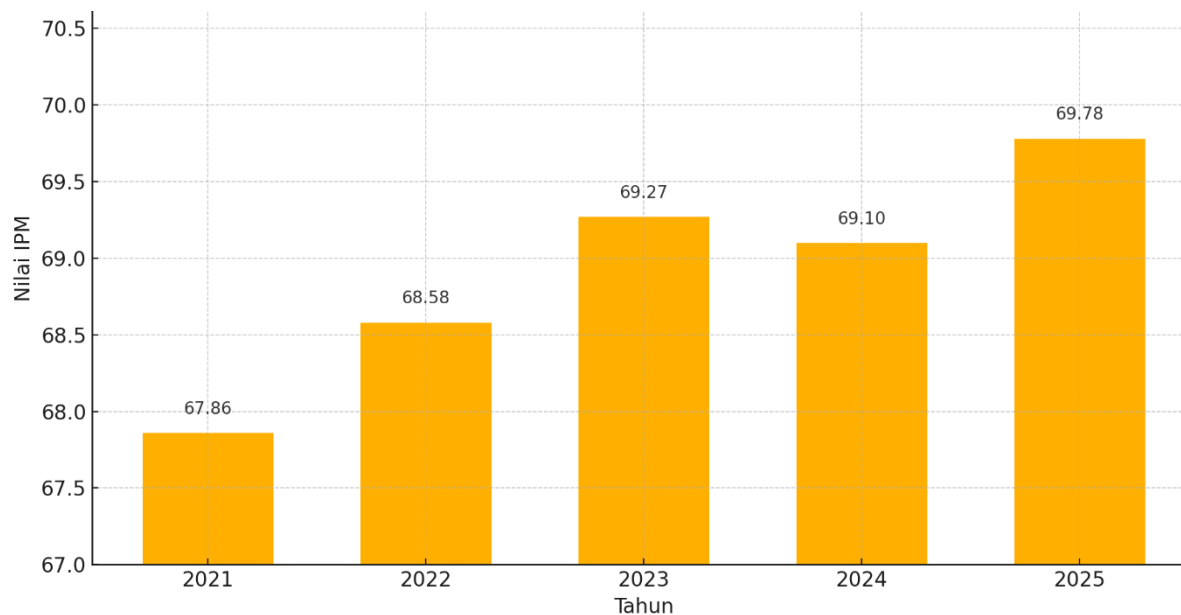
2.3.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya di Kabupaten Nunukan selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang cukup menggembirakan, meskipun tantangan struktural dan geografis masih membayangi pelaksanaannya. Sebagai wilayah perbatasan strategis yang terdiri dari 21 kecamatan dengan topografi yang kompleks serta masyarakat yang multietnis dan multikultural, pembangunan di sektor sosial tidak hanya menuntut pendekatan administratif, tetapi juga respons kebijakan yang adaptif dan inklusif. Kabupaten Nunukan secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya, tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,50 pada tahun 2020 menjadi 69,78 pada tahun 2025. Kategori pembangunan manusia Nunukan pun tetap berada dalam klasifikasi “sedang” secara nasional, namun menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun (BPS, 2021–2025).

Kenaikan IPM tersebut merupakan refleksi dari peningkatan pada tiga pilar utamanya: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam sektor pendidikan, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peningkatan dari 12,51 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,28 tahun pada tahun 2025, yang berarti seorang anak usia 7 tahun di Nunukan diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga setara dengan tingkat awal perguruan tinggi. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merepresentasikan jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, meningkat dari 8,10 tahun menjadi 8,75 tahun dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya dorongan yang

cukup signifikan terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan dasar dan menengah (BPS, 2021–2025). Namun demikian, kemajuan ini belum sepenuhnya merata. Beberapa kecamatan terpencil seperti Krayan, Lumbis Hulu, dan Sembakung Atulai masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan jumlah guru, fasilitas pendidikan lanjutan, serta infrastruktur jalan dan komunikasi yang belum memadai.

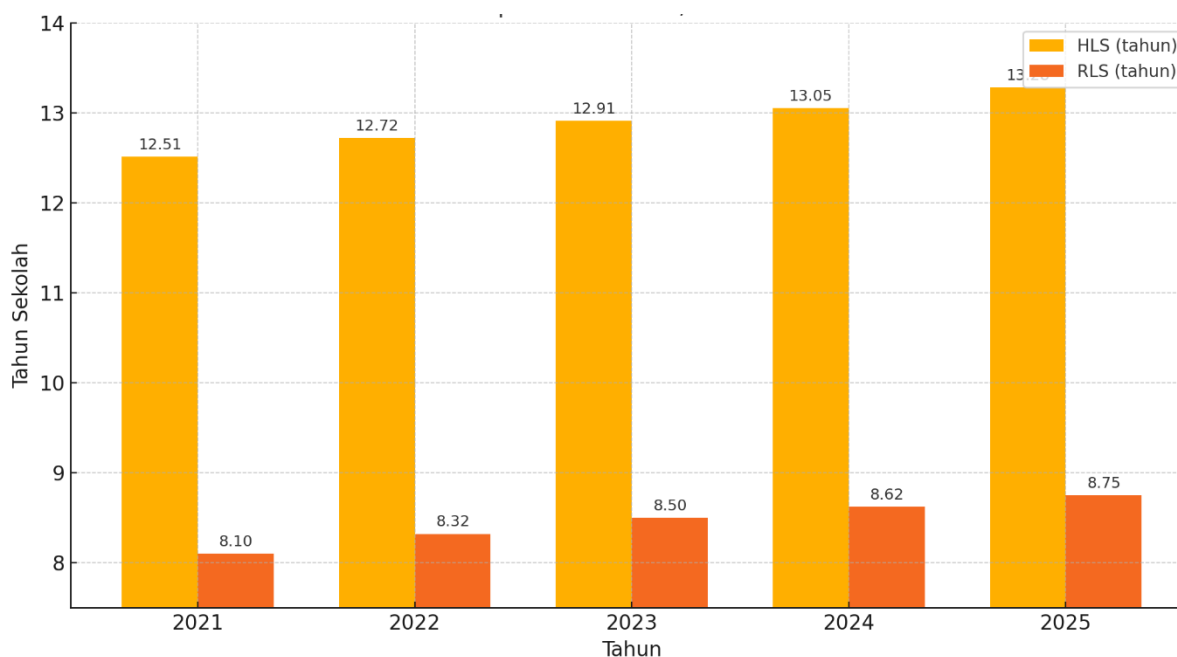
Gambar 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021–2025"

Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan menggagas sejumlah kebijakan berbasis afirmasi. Program sekolah filial di wilayah-wilayah terpencil, pemberian beasiswa untuk pelajar dari keluarga kurang mampu, serta kerja sama pendidikan dengan lembaga pendidikan di luar daerah telah dijalankan secara progresif. Selain itu, diperkenalkan pula program “Sekolah Online Perbatasan” yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau siswa di daerah yang terisolasi. Meski begitu, inisiatif ini belum sepenuhnya optimal akibat masih terbatasnya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah. Untuk itu, percepatan pembangunan infrastruktur digital dan integrasi lintas sektor pendidikan, energi, dan komunikasi perlu menjadi agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mendatang.

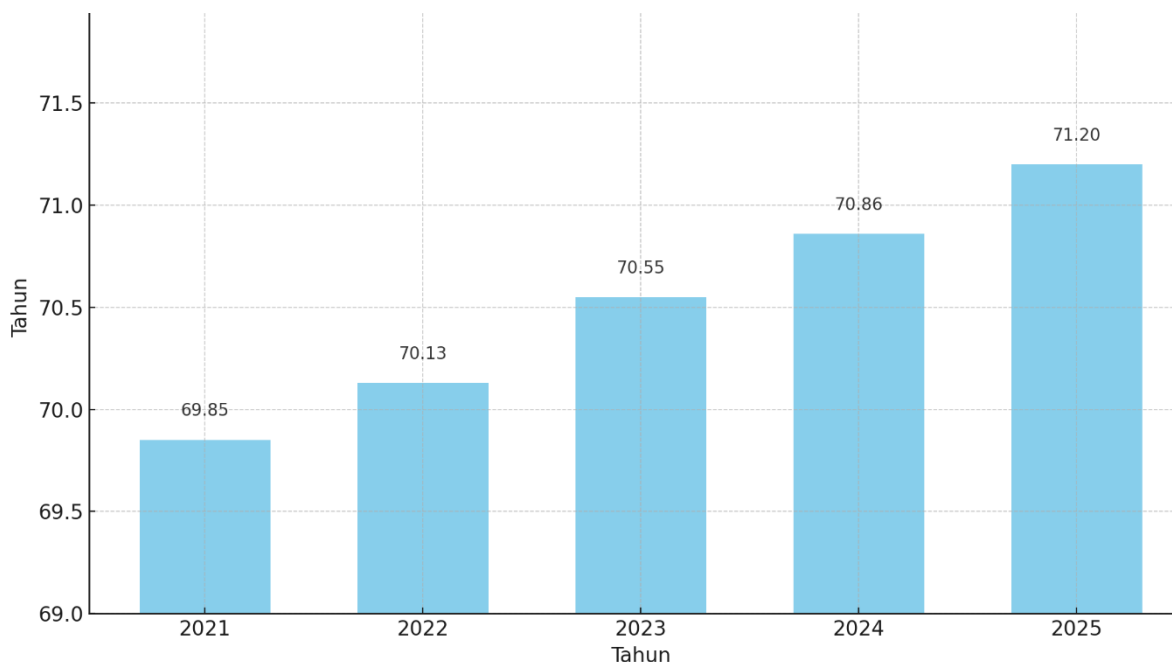
Gambar 8. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021-2025"

Di bidang kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang meningkat dari 69,85 tahun pada 2021 menjadi 71,20 tahun pada 2025 memperlihatkan hasil dari intervensi kebijakan kesehatan dasar yang makin efektif. Program peningkatan cakupan imunisasi, perluasan layanan posyandu, serta optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak berkontribusi besar terhadap peningkatan indikator ini. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada penguatan layanan kesehatan primer dengan membangun puskesmas rawat inap, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Nunukan dan Sebatik. Namun demikian, daerah-daerah terpencil seperti Krayan dan Lumbis Ogong masih mengalami hambatan dalam distribusi obat-obatan, keterbatasan tenaga medis, serta minimnya fasilitas rujukan lanjutan.

Gambar 9. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021-2025"

Untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan logistik tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan sistem rujukan digital dan menjajaki kerja sama lintas sektor untuk menghadirkan layanan ambulans udara, terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Namun realisasi penuh dari program ini masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Di sisi lain, gerakan promotif dan preventif melalui pemberdayaan kader kesehatan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, dan pelibatan tokoh masyarakat mulai membentuk budaya hidup sehat yang lebih kuat di tingkat komunitas.

Sementara itu, di sektor ekonomi sosial, daya beli masyarakat Nunukan juga mengalami perbaikan yang tercermin dari peningkatan pengeluaran riil per kapita dari Rp9,73 juta pada tahun 2021 menjadi Rp11,08 juta pada tahun 2025 (BPS Nunukan, 2021-2025). Kenaikan ini menunjukkan penguatan kapasitas konsumsi rumah tangga, khususnya di wilayah yang terhubung langsung dengan jalur perdagangan utama seperti Kota Nunukan dan Sebatik. Namun demikian, disparitas ekonomi masih terasa di wilayah pedalaman yang mengalami lonjakan harga akibat keterbatasan akses logistik. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memperluas operasi pasar dan penguatan

sistem distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah tertutup dan rawan inflasi.

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Nunukan juga terus bergerak menuju arah yang lebih partisipatif dan pluralistik. Komunitas etnis seperti Tidung, Bugis, Dayak, Toraja, Jawa, hingga Lundayeh telah membentuk mosaik sosial yang dinamis, ditopang oleh tradisi lokal yang hidup dan berkembang. Pemerintah daerah secara aktif mengarusutamakan warisan budaya tersebut ke dalam agenda tahunan seperti Festival Perbatasan dan Pekan Kebudayaan Daerah. Tradisi-tradisi seperti Tari Jepen Tidung dan Belangiran Dayak tidak hanya menjadi simbol identitas lokal, tetapi juga menjadi sumber daya budaya yang bernilai ekonomi apabila dikembangkan dalam bingkai pariwisata berbasis komunitas.

Namun, tantangan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih menjadi agenda penting. Berdasarkan data terbaru, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 berada pada angka 69,21. Angka ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak dan perempuan masih memerlukan penguatan kelembagaan, regulasi, dan edukasi masyarakat. Kasus pernikahan usia dini dan kekerasan berbasis rumah tangga masih banyak terjadi di desa-desa dengan akses terbatas terhadap informasi dan layanan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mendorong pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (ULTPPA) di tingkat kecamatan serta menjalin kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil guna menciptakan sistem perlindungan yang berbasis komunitas dan responsif terhadap dinamika lokal.

Isu disabilitas dan inklusi sosial juga mulai mendapat ruang dalam agenda pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk membentuk Pusat Layanan Disabilitas Daerah pada tahun 2025, yang bertugas menyinergikan layanan pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, keterbatasan data kuantitatif dan rendahnya kesadaran publik terhadap hak-hak difabel masih menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, pembangunan sistem pendataan sosial yang

terintegrasi menjadi prasyarat bagi terciptanya layanan publik yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan hak.

Secara keseluruhan, pembangunan sosial budaya di Kabupaten Nunukan menunjukkan arah kemajuan yang cukup positif. Namun, disparitas antarwilayah, keberlanjutan program, dan perlindungan kelompok rentan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat basis data sosial yang akurat, memperluas jangkauan layanan dasar, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial. Sinergi antara negara dan komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan yang strategis ini.

2.4. Kondisi Pelayanan Umum

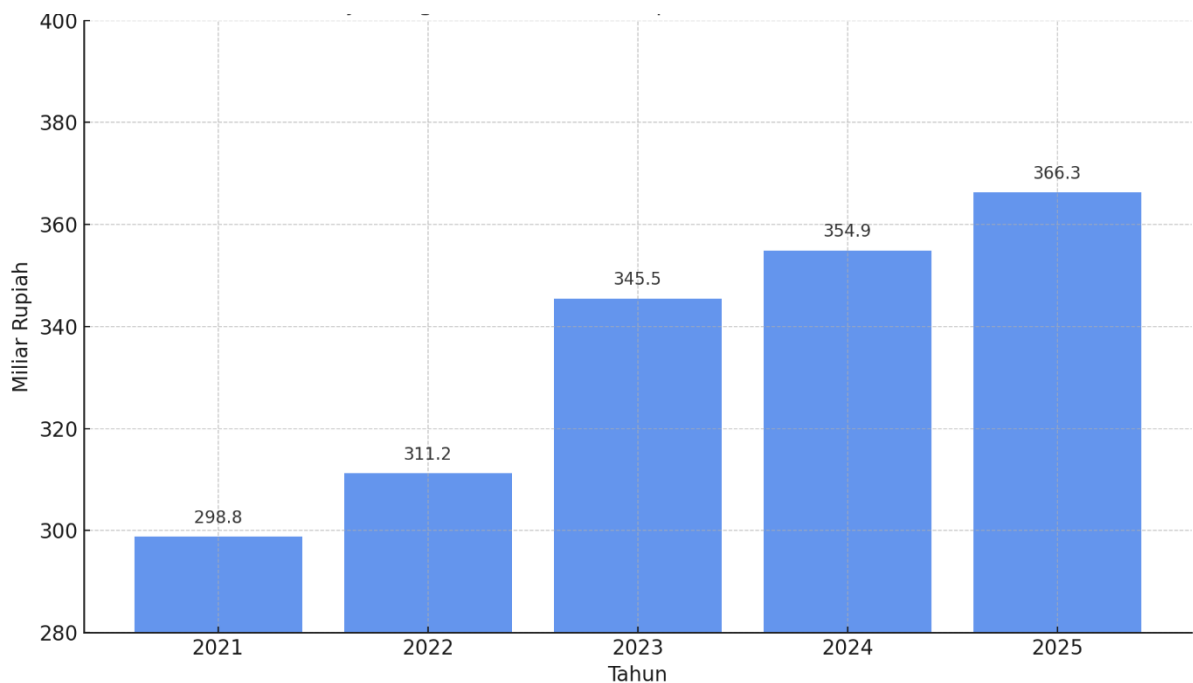
2.4.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan jantung dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kabupaten Nunukan, urusan ini mencakup enam sektor utama: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Keenam sektor tersebut tidak hanya ditetapkan secara normatif dalam kerangka perundang-undangan, tetapi juga merefleksikan kebutuhan riil masyarakat dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Dalam konteks wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas geografis, demografis, dan sosiokultural seperti Nunukan, pelayanan dasar menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antarwilayah serta memperkuat legitimasi dan kapasitas negara di tingkat lokal.

Pada sektor pendidikan, komitmen pemerintah daerah terlihat dari tren alokasi anggaran yang stabil dan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, belanja fungsi pendidikan tercatat sebesar Rp298,8 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp311,2 miliar pada 2022, dan melonjak signifikan menjadi Rp345,5 miliar pada 2023. Tren kenaikan ini

berlanjut pada 2024 sebesar Rp354,9 miliar dan mencapai Rp366,3 miliar pada 2025. Proporsi ini secara konsisten berada di atas ambang batas 20% dari total belanja daerah, yang mencerminkan prioritas terhadap pengembangan sumber daya manusia. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis seperti pembangunan unit sekolah baru, pemberian beasiswa daerah berbasis wilayah, serta perekrutan tenaga guru kontrak yang ditugaskan di kecamatan-kecamatan terpencil. Namun demikian, persoalan geografis tetap menjadi tantangan utama, terutama di wilayah Krayan Timur, Lumbis Hulu, dan Sembakung Atulai yang sulit dijangkau secara fisik maupun digital.

Gambar 10. Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten Nunukan

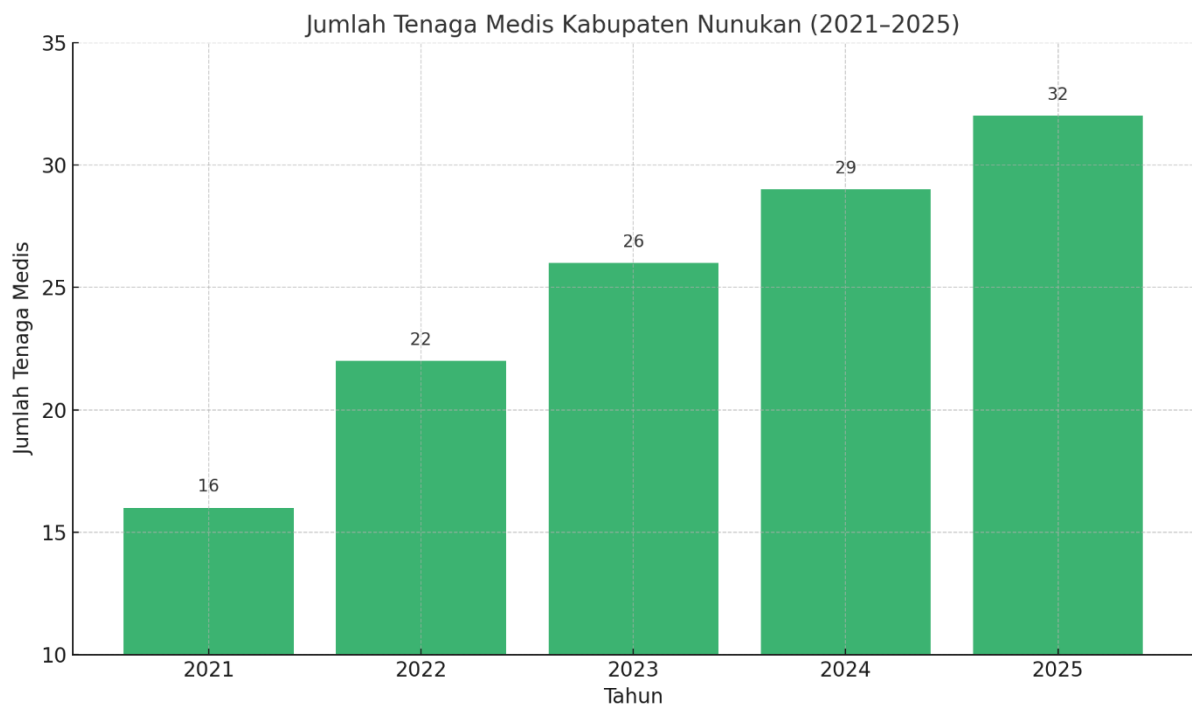


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021-2025"

Di bidang kesehatan, arah pembangunan daerah memfokuskan pada penguatan layanan dasar dan fasilitas rujukan primer. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah puskesmas rawat inap dari 14 unit pada 2021 menjadi 17 unit pada 2025. Jumlah tenaga medis pun mengalami peningkatan signifikan dari 16 orang pada 2021 menjadi 32 orang pada 2025, serta tenaga teknis kesehatan biomedis bertambah dari 38 menjadi 51 orang. Selain itu, cakupan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan meningkat setiap tahun, didorong oleh pembangunan fasilitas baru dan peningkatan

kualitas pelayanan. Fokus intervensi kesehatan diarahkan pada pelayanan ibu dan anak, imunisasi dasar lengkap, serta penurunan angka stunting yang masih menjadi isu krusial di beberapa kecamatan seperti Sebatik Barat dan Lumbis Pansiangan. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam ketersediaan ambulans air, dokter spesialis, dan layanan gizi terpadu di wilayah kepulauan dan pedalaman.

Gambar 11. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Medis Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021-2025"

Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang juga menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data BPS, panjang jalan beraspal di Kabupaten Nunukan meningkat dari 214,49 km pada 2021 menjadi 237,23 km pada 2022, dan naik lagi menjadi 274,14 km pada 2023. Pada tahun 2024, capaian ini melonjak tajam menjadi 548,50 km. Sementara itu, kondisi jalan dalam kategori baik meningkat dari 466,47 km pada 2021 menjadi 655,68 km pada 2024. Pemerintah daerah memfokuskan pembangunan pada ruas-ruas strategis seperti Lumbis–Tulin Onsoi dan Sebatik Tengah–Sebatik Barat, yang memiliki peran penting dalam membuka isolasi dan memperkuat konektivitas antarkecamatan. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga

berkontribusi terhadap kelancaran distribusi logistik dan mobilitas tenaga kerja.

Gambar 12. Perkembangan Panjang Jalan Beraspal Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021-2025"

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diarahkan pada pengurangan kawasan kumuh serta penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok miskin ekstrem. Melalui kolaborasi antara APBD dan skema nasional seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan rumah layak huni di sejumlah desa yang mengalami kekumuhan kronis. Fokus intervensi berada di Kecamatan Nunukan, Sebatik, dan sebagian wilayah daratan Kalimantan yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi akibat arus migrasi. Pendekatan partisipatif dalam penataan permukiman dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan kepemilikan sosial atas intervensi pembangunan.

Urusan sosial menjadi perhatian yang semakin penting seiring meningkatnya tekanan sosial akibat pandemi dan ketimpangan spasial. Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga miskin ekstrem tercatat sebanyak 1.759 rumah tangga, meningkat menjadi 2.134 rumah tangga pada tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Nunukan merespons kondisi ini dengan meningkatkan alokasi bantuan sosial, dari Rp1,5 miliar pada 2021 menjadi Rp3,5 miliar pada 2023. Program perlindungan sosial ini mencakup bantuan tunai dan non-tunai, dukungan pangan, serta layanan psikososial untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dalam lima tahun terakhir, data sosial menjadi instrumen penting dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Untuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Nunukan memperkuat peran Satpol PP dan linmas dalam menjaga stabilitas sosial, khususnya di kawasan strategis seperti pelabuhan, pasar tradisional, dan perbatasan antarnegara. Peningkatan pelatihan, penambahan personel, serta pengadaan sarana operasional dilakukan untuk memastikan kehadiran negara di titik-titik vital interaksi masyarakat. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan tokoh agama, adat, dan pemuda diintensifkan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif. Program kampung tangguh dan forum komunikasi antarwarga juga menjadi platform penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman etnis dan keagamaan.

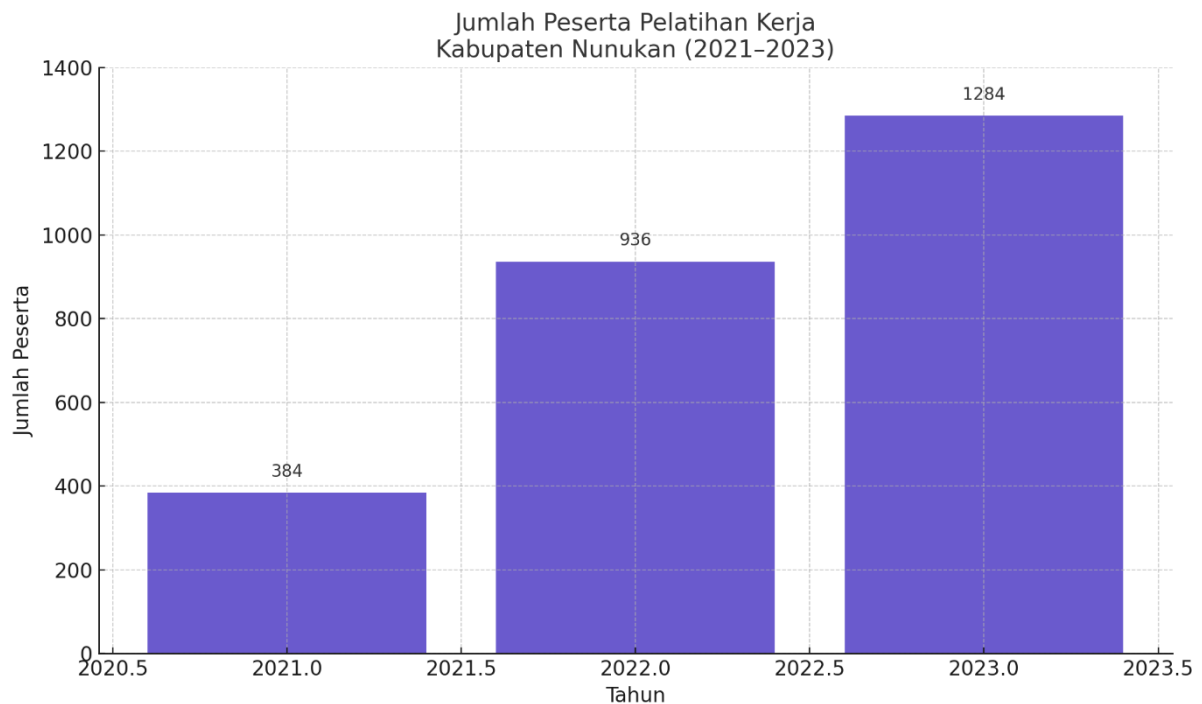
Secara keseluruhan, dalam rentang tahun 2021 hingga 2025, dapat disimpulkan bahwa orientasi belanja dan kinerja pembangunan Kabupaten Nunukan terhadap urusan wajib pelayanan dasar mengalami tren yang positif dan konsisten. Peningkatan anggaran, kapasitas SDM, dan capaian infrastruktur menunjukkan adanya kesungguhan dalam memperkuat pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan ini tetap memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan fiskal, afirmasi kebijakan 3T, dan intervensi multisektor yang responsif terhadap konteks perbatasan.

2.4.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan dasar tetap memiliki nilai strategis yang fundamental dalam kerangka pembangunan daerah, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. Meskipun tidak termasuk dalam enam urusan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sektor-sektor seperti ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berperan sebagai penghubung struktural antara dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Dalam konteks geografis dan sosial Kabupaten Nunukan yang tersebar di wilayah kepulauan, dataran tinggi, dan perbatasan darat langsung dengan Malaysia, urusan non-pelayanan dasar justru seringkali menjadi penentu keberhasilan pembangunan inklusif dan partisipatif.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Nunukan memperlihatkan upaya yang konsisten dalam membangun sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasional. Data dari BPS mencatat peningkatan signifikan jumlah peserta pelatihan kerja: dari 384 orang pada 2021, meningkat hampir dua kali lipat menjadi 936 orang pada 2022, dan mencapai 1.284 peserta pada 2023. Pelatihan ini berfokus pada sektor perikanan, pertanian, konstruksi, dan jasa pariwisata—sektor-sektor yang memiliki keunggulan lokal dan potensi penyerapan tenaga kerja tinggi. Namun, tantangan masih cukup besar. Wilayah seperti Krayan, Lumbis Ogong, dan Sebuku belum memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas pelatihan maupun tenaga instruktur profesional. Keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital juga menjadi kendala yang harus diatasi, terutama jika pelatihan daring akan dijadikan sebagai model alternatif pasca-pandemi.

Gambar 13. Perkembangan Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Kabupaten Nunukan



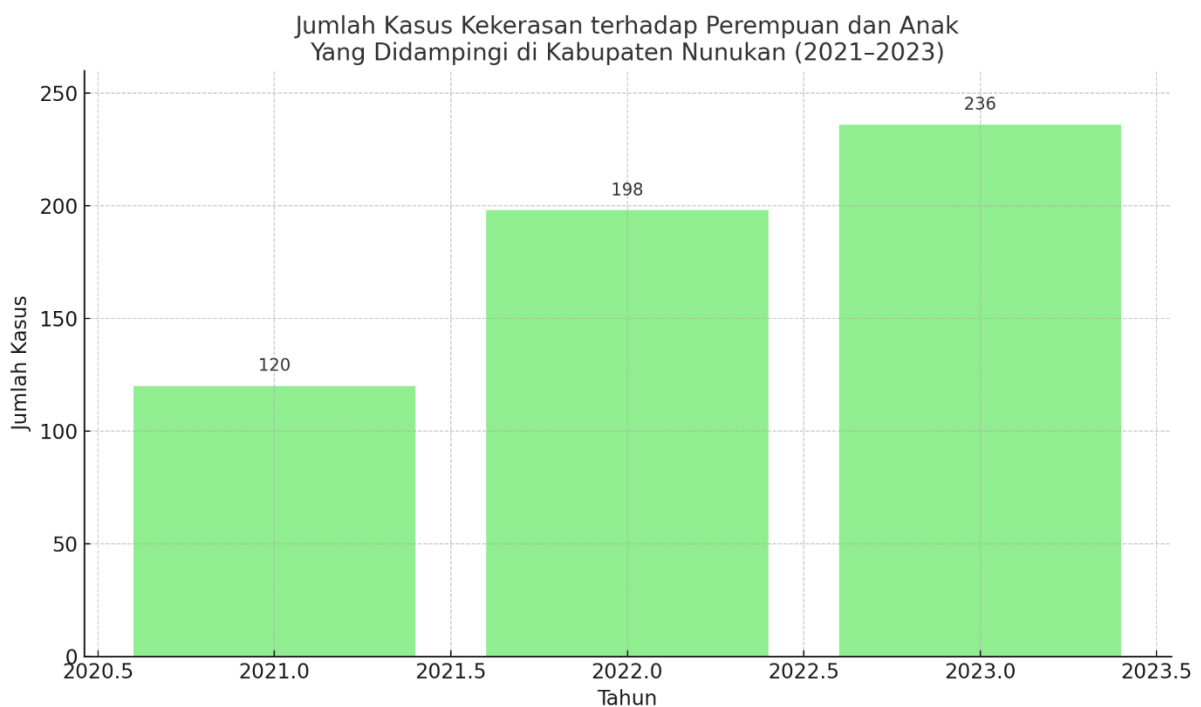
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021-2025"

Sektor lingkungan hidup menunjukkan perhatian yang semakin kuat dalam lima tahun terakhir, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan data capaian fisik, luas rehabilitasi hutan di Nunukan meningkat dari 1.103 hektare pada 2021, menjadi 1.228 hektare pada 2022, dan mencapai 1.254 hektare pada 2023. Rehabilitasi ini sebagian besar dilakukan di wilayah Krayan, Sembakung, dan Sebuku—wilayah yang juga mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan. Upaya ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kerentanan ekologis di wilayah yang kaya akan biodiversitas tetapi minim perlindungan institusional. Namun, efektivitas rehabilitasi ini sangat tergantung pada pengawasan pasca-program serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan restorasi dan pelestarian lingkungan.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Nunukan menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dalam hal peningkatan pelaporan dan pendampingan kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

berhasil didampingi meningkat dari 120 kasus pada 2021, menjadi 198 kasus pada 2022, dan mencapai 236 kasus pada 2023. Lonjakan ini tidak semata-mata mencerminkan peningkatan prevalensi kekerasan, melainkan juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas kanal pelaporan. Pemerintah daerah, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) P2TP2A, menggandeng lembaga masyarakat, tokoh adat, dan kader desa dalam membentuk sistem pelaporan dan perlindungan yang inklusif. Namun, tantangan ke depan terletak pada keterbatasan jumlah petugas pendamping yang tidak sebanding dengan cakupan geografis dan jumlah kasus, serta minimnya sarana rumah aman yang layak di kecamatan-kecamatan terpencil.

Gambar 14. Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

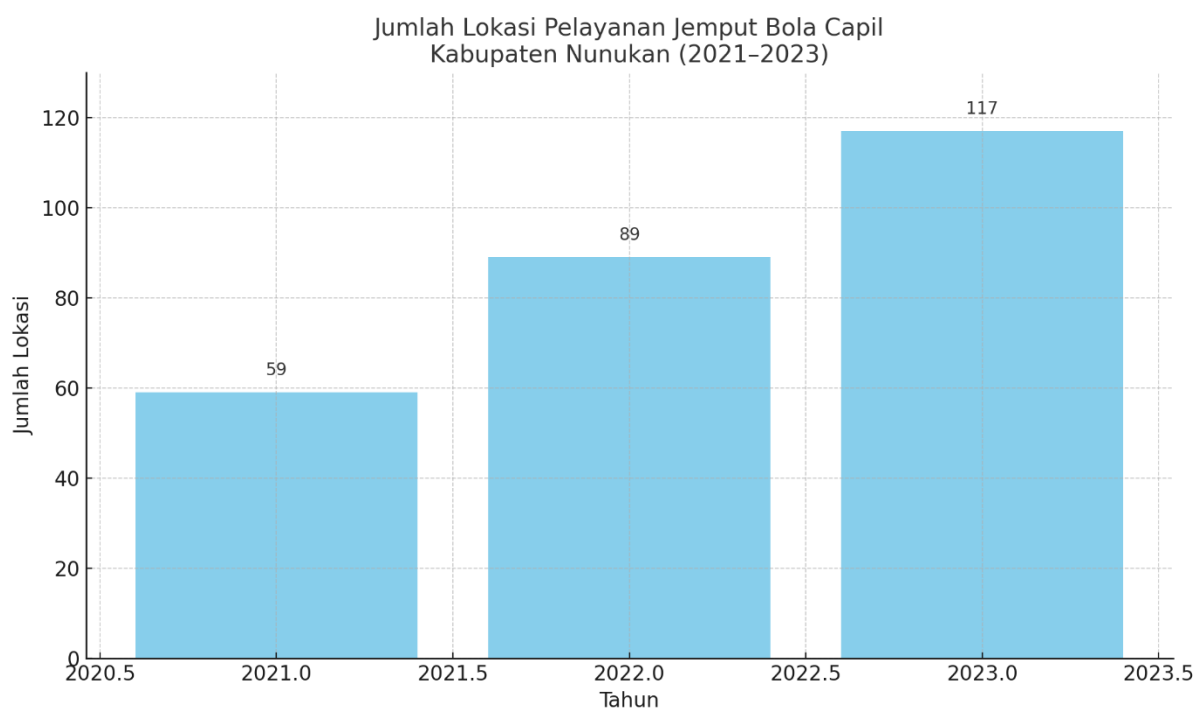


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021, 2022, dan 2023"

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama melalui inovasi *jemput bola* untuk perekaman data kependudukan. Program ini menjadi terobosan penting dalam menjangkau desa-desa terpencil seperti Krayan Barat, Sebatik Timur, dan Lumbis Pansiangan. Data BPS mencatat bahwa jumlah lokasi yang dijangkau program *jemput bola capil* meningkat dari 59 titik layanan pada 2021, menjadi

89 titik pada 2022, dan mencapai 117 titik pada 2023. Di sisi lain, cakupan perekaman KTP elektronik juga mengalami kenaikan stabil dari 84,6% pada 2021 menjadi 89,5% pada 2022 dan 91,7% pada 2023. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam proses integrasi data penduduk dengan program perlindungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, proses digitalisasi administrasi ini masih menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan jaringan internet, sumber daya operator, dan integrasi antar-sistem.

Gambar 15. Perkembangan Jumlah Lokasi Pelayanan Jemput Bola Capil Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, "Nunukan Dalam Angka 2021, 2022, dan 2023"

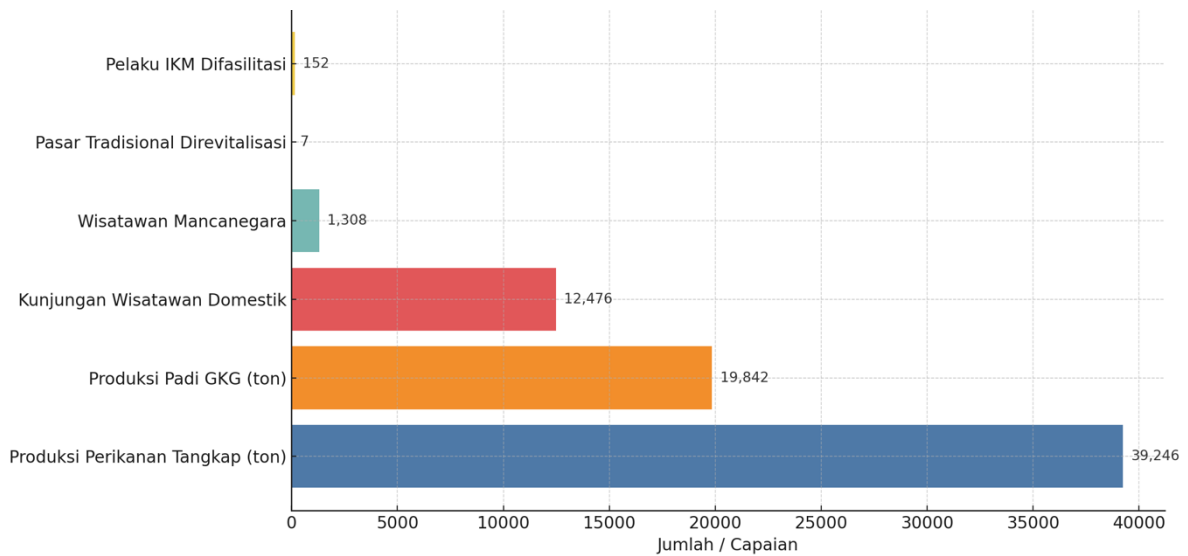
Di sisi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, walaupun tidak tergambar secara detail dalam dokumen BPS hingga 2023, pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB terus mengembangkan sistem data keluarga berbasis desa sebagai landasan targeting program. Inisiatif ini menjadi penting di tengah mobilitas tinggi masyarakat perbatasan dan kompleksitas pencatatan rumah tangga migran. Upaya pelibatan tokoh masyarakat, bidan desa, dan kader KB lokal menjadi strategi utama dalam memperluas jangkauan program.

Dengan mencermati capaian dan dinamika masing-masing sektor, dapat disimpulkan bahwa urusan wajib non-pelayanan dasar di Kabupaten Nunukan bukan hanya pelengkap dari urusan dasar, tetapi juga menjadi katalisator dalam membentuk struktur sosial dan pembangunan yang inklusif. Tantangan struktural seperti keterbatasan fiskal daerah, kapasitas kelembagaan, dan tantangan geografis memerlukan strategi afirmatif yang lebih sistemik. Dalam konteks ini, integrasi antara pendekatan sektoral dengan pendekatan teritorial menjadi kunci, di mana perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis fungsi, tetapi juga berbasis spasial dan kebutuhan komunitas. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu terus mengembangkan sistem pendataan terintegrasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil. Dengan sinergi lintas sektor, transformasi kelembagaan, dan kehadiran negara hingga ke pelosok desa, maka urusan wajib non-pelayanan dasar dapat benar-benar menjadi instrumen penting dalam membangun perbatasan yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan instrumen strategis bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat keunggulan lokal dan menjawab potensi sektoral yang spesifik di wilayahnya. Di Kabupaten Nunukan, urusan ini mencakup sektor-sektor seperti pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, serta kehutanan. Keberhasilan pengelolaan urusan ini menjadi pengungkit penting dalam diversifikasi ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah menjadikan urusan ini sebagai prioritas dalam RPJMD serta dokumen rencana kerja tahunan (RKPD) sebagai respons atas karakteristik wilayah Nunukan yang luas, kaya sumber daya alam, namun menghadapi tantangan keterhubungan dan akses pasar.

Gambar 16. Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Nunukan



Sumber: LKPJ TA 2023, Evaluasi RKPD 2023–2024, dan Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2025

Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu unggulan daerah, terutama di wilayah Sebatik, Nunukan, dan Sebuku. Berdasarkan data dari *LKPJ 2023*, produksi perikanan tangkap mencapai 39.246 ton, dengan nilai produksi lebih dari Rp340 miliar, meningkat 6,5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, distribusi sarana tangkap, serta penguatan kelompok nelayan melalui koperasi. Namun, tantangan seperti overfishing, keterbatasan cold storage, dan keterhubungan pasar ekspor lintas batas masih menjadi kendala yang memerlukan perhatian serius dan kolaborasi antarpihak.

Urusan pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura, juga menunjukkan perkembangan signifikan. Tahun 2023, produksi padi sawah di Kabupaten Nunukan mencapai 19.842 ton GKG (Gabah Kering Giling), sementara luas tanam sayuran dan hortikultura seperti cabai dan tomat meningkat masing-masing 12% dan 9% dibanding tahun sebelumnya. Kawasan Krayan dan Tulin Onsoi merupakan wilayah dengan pengembangan sistem pertanian organik berbasis kearifan lokal, termasuk komoditas beras adan dan kopi Krayan yang mulai merambah pasar nasional. Pemerintah daerah mulai mendorong sertifikasi produk, pelatihan pascapanen, dan promosi digital sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk lokal.

Di sektor pariwisata, meskipun belum menjadi penyumbang utama PAD, Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar, khususnya wisata perbatasan dan ekowisata di kawasan hutan tropis dataran tinggi Krayan. Data kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12.476 orang, sementara wisatawan mancanegara yang masuk melalui jalur perbatasan Sebatik tercatat sebanyak 1.308 orang. Pemerintah daerah mulai mengembangkan infrastruktur dasar seperti homestay, jalan akses ke objek wisata, serta pelatihan pemandu wisata berbasis komunitas. Program *Desa Wisata Berbasis Budaya Lokal* di Sebatik Tengah dan Krayan Selatan menjadi pilot project yang perlu terus dikembangkan.

Sektor perdagangan dan perindustrian juga mengalami penguatan, terutama melalui pengembangan pasar rakyat dan sentra IKM (Industri Kecil Menengah). Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membangun dan merevitalisasi 7 unit pasar tradisional pada tahun 2023 serta memberikan fasilitasi promosi bagi 152 pelaku IKM melalui pameran produk lokal dan pelatihan kemasan. Namun, tantangan utama masih terletak pada akses bahan baku, skala produksi, dan konektivitas transportasi antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur logistik dan digitalisasi perdagangan menjadi langkah lanjutan yang harus diakselerasi dalam kerangka peningkatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.4.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

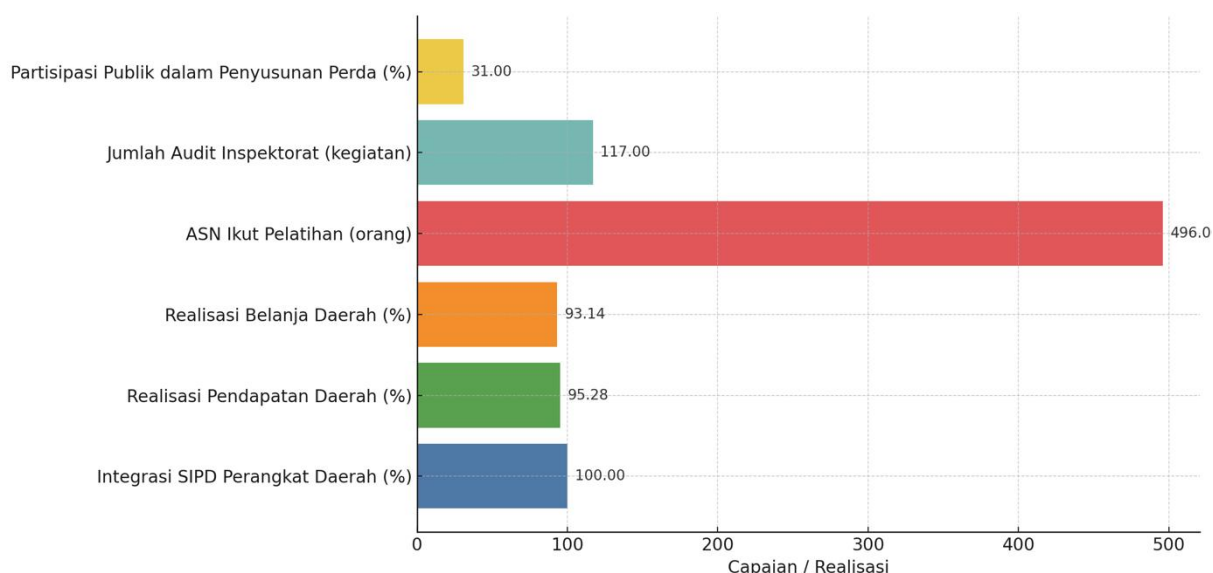
Urusan penunjang pemerintahan merupakan fondasi administratif dan kelembagaan bagi pelaksanaan seluruh program pembangunan daerah. Urusan ini mencakup fungsi-fungsi strategis seperti perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, statistik dan persandian, pengelolaan aset daerah, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta kesekretariatan lembaga legislatif. Di Kabupaten Nunukan, penguatan urusan penunjang menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika perbatasan dan wilayah kepulauan.

Pada bidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mendorong perbaikan kualitas dokumen perencanaan

melalui integrasi *e-planning* dan pelibatan aktif stakeholder lintas sektor. Tahun 2023, seluruh perangkat daerah telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dokumen RKPD dan Renja OPD. Evaluasi RKPD 2023 juga mencatat bahwa 87,5% indikator kinerja program prioritas telah dapat dimonitor secara real-time melalui dashboard perencanaan daerah.

Dalam bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Nunukan menunjukkan capaian yang cukup baik dalam hal pengelolaan anggaran dan akuntabilitas fiskal. Berdasarkan data *LKPJ 2023*, realisasi pendapatan daerah mencapai 95,28%, sementara realisasi belanja mencapai 93,14% dari total alokasi. Pemda Nunukan juga kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 secara berturut-turut. Peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen aset dan sistem pelaporan berbasis akrual menjadi kunci keberhasilan capaian ini, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam efisiensi belanja langsung dan pengendalian biaya administrasi rutin.

Gambar 17. Capaian Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten Nunukan



Sumber: LKPJ TA 2023, Evaluasi RKPD 2023–2024, dan estimasi berbasis pelaporan OPD teknis

Dalam aspek kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur, Pemerintah Daerah melaksanakan berbagai pelatihan dan diklat teknis

fungsional, termasuk kerja sama dengan LAN dan BPSDM provinsi. Tahun 2023, sebanyak 496 ASN mengikuti pelatihan kepemimpinan, manajemen keuangan, dan pengadaan barang/jasa. Selain itu, sistem merit dalam manajemen ASN mulai diterapkan secara bertahap melalui penguatan kinerja berbasis e-kinerja dan penerapan evaluasi jabatan. Meskipun demikian, rasio ASN teknis terhadap jumlah penduduk masih belum ideal, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

Pada sektor pengawasan dan pengelolaan informasi, Inspektorat Daerah telah meningkatkan efektivitas pengawasan internal dengan melakukan 117 audit kinerja dan audit tujuan tertentu selama tahun 2023. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika telah memperluas jaringan layanan data di 12 kecamatan melalui program *desa digital*, serta mengembangkan sistem keamanan persandian dan layanan aduan berbasis digital. Peran statistik daerah juga diperkuat melalui kerja sama dengan BPS dan pengembangan sistem data sektoral berbasis cloud yang terintegrasi dengan dashboard kinerja daerah.

Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan juga menjalankan fungsi penunjang strategis melalui fasilitasi penyusunan peraturan daerah, kegiatan reses dan aspirasi publik, serta penguatan pengawasan legislatif terhadap kinerja perangkat daerah. Tahun 2023, Sekretariat DPRD mencatat partisipasi publik dalam agenda penyusunan Perda meningkat hingga 31%, didorong oleh kegiatan konsultasi publik yang lebih terbuka. Secara umum, penguatan urusan penunjang pemerintahan menjadi salah satu prasyarat mutlak untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengukur kapasitas dan kinerja pembangunan daerah secara objektif dan

komprehensif. Melalui IDSD, daya saing suatu wilayah dinilai berdasarkan kombinasi antara potensi struktural dan capaian pembangunan aktual, mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.

IDSD tidak hanya menjadi alat pemantau kinerja daerah, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan mengacu pada kerangka Global Competitiveness Index (GCI) dari *World Economic Forum*, IDSD dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia, mencakup empat komponen utama: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Setiap komponen terdiri atas 12 pilar yang diukur melalui indikator kuantitatif dari sumber data resmi nasional.

Kerangka IDSD terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

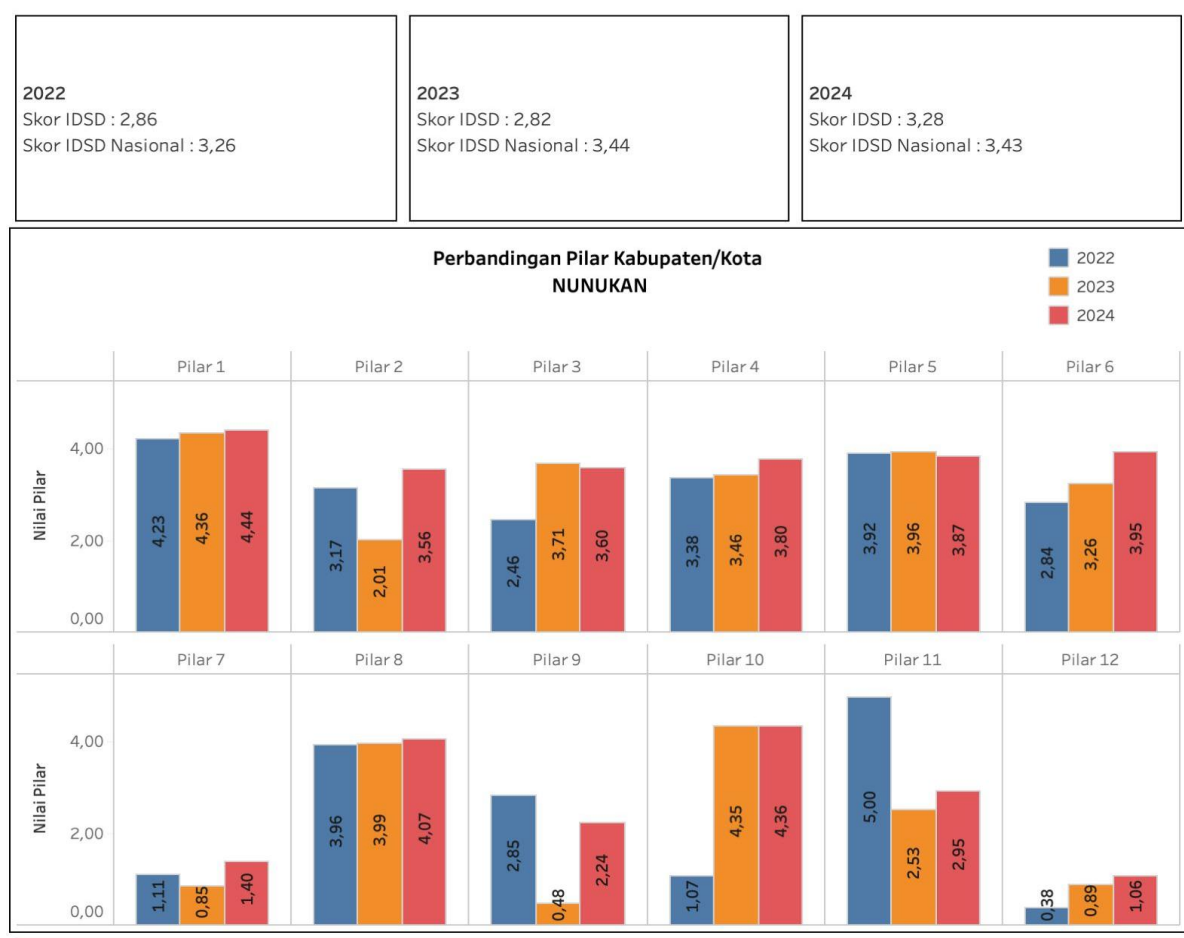
- a) Lingkungan Pendukung – mencakup pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro;
- b) Sumber Daya Manusia – mencakup pilar kesehatan dan keterampilan;
- c) Pasar – mencakup pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar;
- d) Ekosistem Inovasi – mencakup pilar dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi.

Setiap pilar diukur berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai kementerian dan lembaga, dengan metode *min-max normalization* untuk memastikan konsistensi dan objektivitas pengukuran. Pendekatan ini menyeimbangkan perspektif mikro (daya saing bisnis) dan makro (kebijakan dan kelembagaan), serta memperhatikan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan guncangan eksternal.

Data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Nunukan selama tiga tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang mencerminkan tantangan struktural sekaligus potensi perbaikan yang nyata. Skor IDSD Kabupaten

Nunukan pada tahun 2022 berada di angka 2,86, menurun tipis menjadi 2,82 pada 2023, dan kembali meningkat cukup signifikan pada 2024 menjadi 3,28. Meskipun capaian 2024 menunjukkan tren positif, skor tersebut masih berada di bawah rerata nasional sebesar 3,43. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perbaikan telah dilakukan, daya saing Kabupaten Nunukan secara keseluruhan masih memerlukan intervensi yang lebih strategis, terutama dalam memperkuat fondasi-fondasi pembangunan yang menjadi penopang utama indeks.

Gambar 18. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah



kelola kelembagaan, layanan kesehatan, dan akses pendidikan dasar mulai membuahkan hasil. Kinerja positif ini penting untuk dipertahankan dan diperluas, karena pilar-pilar ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di daerah perbatasan seperti Nunukan.

Sebaliknya, terdapat beberapa pilar yang justru mengalami penurunan mencolok dan patut menjadi perhatian strategis. Pilar 2 (Infrastruktur Dasar) turun drastis dari 3,17 pada 2022 menjadi hanya 2,01 pada 2023, meskipun sedikit membaik menjadi 3,56 pada 2024. Pilar 7 (Keselamatan Publik) bahkan menunjukkan angka yang sangat rendah, hanya 0,85 pada 2023 dan 1,40 pada 2024, sementara Pilar 9 (Ekosistem Inovasi dan Teknologi) juga menunjukkan tren fluktuatif dan stagnan di bawah 3,00. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penyediaan infrastruktur yang layak dan merata, serta lemahnya dukungan terhadap ekosistem inovasi dan rasa aman masyarakat. Hal ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan lintas sektor ke depan.

Terakhir, lonjakan tajam dan penurunan ekstrem yang terlihat pada Pilar 11 (Stabilitas Sosial dan Politik)—dari nilai 5,00 di 2022 menjadi hanya 2,95 di 2024—menunjukkan bahwa stabilitas sosial bukanlah sesuatu yang dapat dianggap ajeg tanpa upaya konsolidasi sosial-politik yang berkelanjutan. Fluktuasi ini dapat menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah perlu lebih aktif dalam membangun dialog sosial, memperkuat jejaring antar kelompok masyarakat, serta menjaga kohesi sosial di tengah dinamika geopolitik kawasan perbatasan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya strategi daya saing yang holistik dan berorientasi jangka menengah-panjang, agar Nunukan tidak hanya mengejar angka, tetapi membangun fondasi daya saing yang kokoh dan inklusif.

2.5.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi Kabupaten Nunukan mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola potensi sumber daya, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Sebagai wilayah yang berada di beranda utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan memiliki posisi strategis dalam konteks ekonomi lintas negara. Namun demikian, daya saing ekonomi daerah belum

sepenuhnya tercermin dalam struktur PDRB dan kontribusi sektor-sektor produktif. Berdasarkan data *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2025*, struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 26,54% terhadap PDRB tahun 2023.

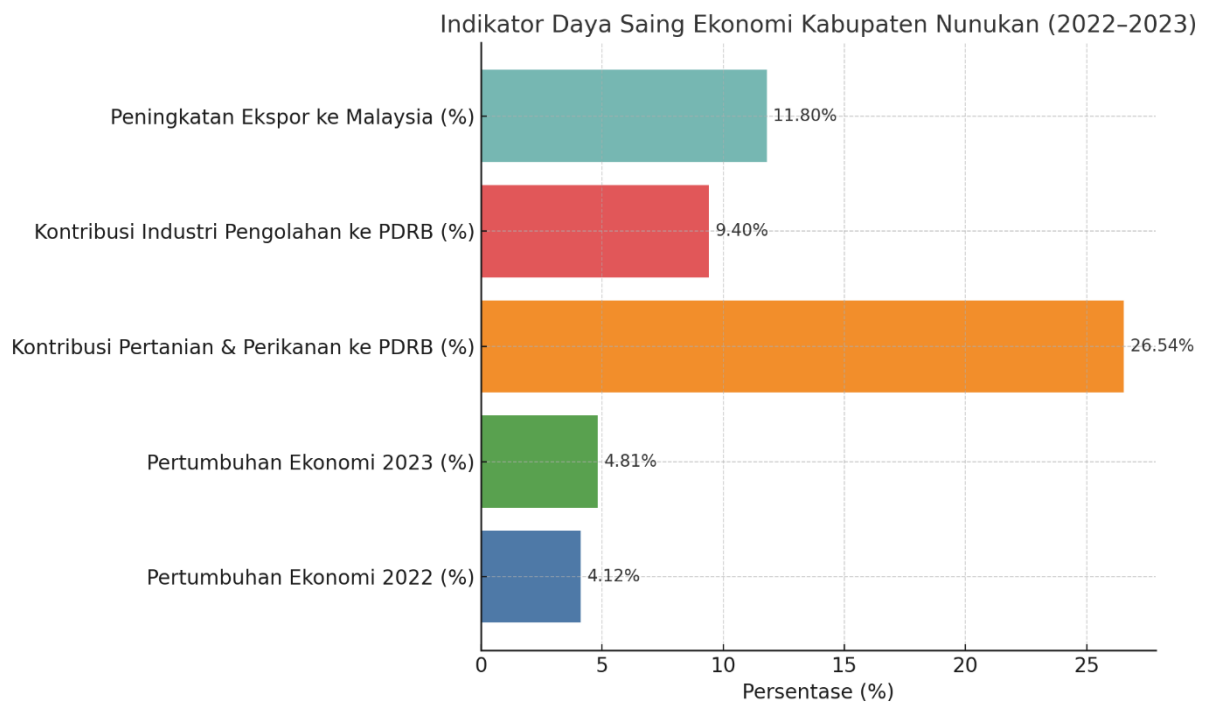
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Nunukan mencatat pertumbuhan positif dalam dua tahun terakhir, yakni sebesar 4,81% pada tahun 2023, naik dari 4,12% pada tahun 2022. Pertumbuhan ini ditopang oleh pemulihan aktivitas perdagangan pascapandemi serta meningkatnya produksi di sektor perikanan tangkap dan pertanian. Meski demikian, kontribusi sektor industri pengolahan masih relatif rendah, hanya sekitar 9,4% terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan terbatasnya nilai tambah dari komoditas unggulan yang diproduksi di daerah dan mengindikasikan perlunya percepatan program hilirisasi ekonomi berbasis lokal, termasuk penguatan UMKM dan sentra industri kecil menengah (IKM).

Analisis tipologi Klassen tahun 2023 menempatkan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Nunukan ke dalam kategori wilayah dengan pertumbuhan rendah dan kontribusi rendah terhadap PDRB. Hanya Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang masuk dalam kategori “maju dan cepat tumbuh”. Wilayah lainnya, seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung, masih tergolong daerah tertinggal dari sisi daya saing ekonomi. Ketimpangan spasial ini mencerminkan belum meratanya pembangunan infrastruktur produksi, akses pasar, serta kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi berbasis wilayah (spasial) menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing secara menyeluruh.

Dalam konteks perdagangan dan investasi, Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar di kawasan Sebatik yang menjadi pintu ekspor-impor langsung ke Malaysia. Data *LKPJ 2023* mencatat peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dan pertanian ke negara tetangga sebesar 11,8% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, iklim investasi daerah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana logistik, tumpang

tindih regulasi, dan belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis digital. Pemerintah daerah melalui DPMPTSP terus berupaya memperbaiki iklim usaha dengan mendorong digitalisasi perizinan, penyusunan peta potensi investasi, dan fasilitasi investasi berbasis kawasan.

Gambar 19. Perkembangan Indikator Daya Saing Ekonomi Kabupaten Nunukan



Sumber: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2025, LKPJ TA 2023, Evaluasi RKPD 2023

Ke depan, daya saing ekonomi Kabupaten Nunukan perlu diperkuat melalui pengembangan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta penguatan konektivitas wilayah. Perluasan infrastruktur strategis seperti pelabuhan perikanan, pasar induk regional, dan kawasan industri terpadu menjadi agenda penting dalam mendorong transformasi ekonomi lokal. Dengan sinergi antarsektor, kemitraan dengan pelaku usaha, serta keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, daya saing Nunukan dapat ditingkatkan untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.5.2. Pengembangan SDM

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan jantung dari seluruh proses pembangunan berkelanjutan, terlebih bagi daerah dengan karakteristik geografis seperti Kabupaten Nunukan yang memiliki tantangan khas berupa kondisi kepulauan, wilayah perbatasan, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Dalam konteks ini, investasi pada pengembangan SDM tidak hanya menjadi prioritas sektoral, melainkan juga menjadi strategi lintas urusan pemerintahan yang harus dikelola secara holistik. Pemerintah Kabupaten Nunukan menempatkan pembangunan SDM sebagai agenda prioritas daerah, karena menyadari bahwa keberhasilan pembangunan fisik maupun ekonomi sangat bergantung pada kapasitas, kesehatan, dan pendidikan masyarakatnya. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan SDM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan capaian makro seperti IPM, tetapi juga diarahkan untuk mempersempit kesenjangan sosial dan menjamin inklusi pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk wilayah-wilayah terluar seperti Krayan, Lumbis, dan Sebatik.

Salah satu indikator penting yang menjadi tolak ukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama lima tahun terakhir. IPM meningkat dari 67,40 pada tahun 2021 menjadi 69,27 pada tahun 2024. Kenaikan ini merefleksikan kemajuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi Kalimantan Utara, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk perbaikan dan percepatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyusun strategi untuk mendorong pertumbuhan IPM melalui pendekatan multisektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komunitas adat.

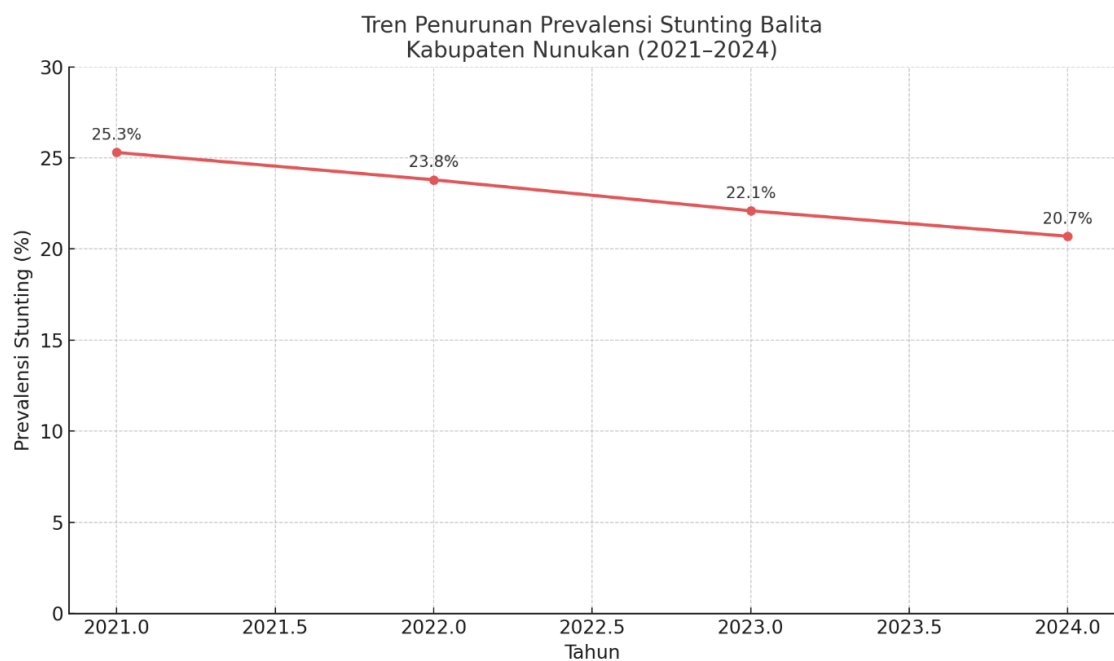
Di bidang pendidikan, dua indikator utama—yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)—mengalami perbaikan selama periode 2021–2024. HLS meningkat dari 12,31 tahun pada tahun 2021 menjadi 12,65 tahun pada tahun 2024, sedangkan RLS naik dari 7,87 tahun menjadi 8,23 tahun. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan akses terhadap layanan pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah. Pemerintah daerah telah mendorong pendirian sekolah filial di desa-desa terpencil, penambahan guru kontrak, serta pemberian beasiswa daerah bagi siswa miskin dan berprestasi. Namun demikian, ketimpangan distribusi guru, fasilitas, dan kualitas pengajaran antara kecamatan di wilayah perkotaan dan wilayah pedalaman masih menjadi tantangan yang cukup serius. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan ke depan perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan proses pembelajaran.

Sektor kesehatan juga mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama pada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang meningkat dari 70,41 tahun pada 2021 menjadi 71,28 tahun pada 2024. Kenaikan ini didukung oleh berbagai intervensi strategis seperti peningkatan jumlah tenaga kesehatan, pembangunan puskesmas rawat inap, serta penguatan program promotif dan preventif. Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan kampanye kesehatan masyarakat, peningkatan cakupan imunisasi, serta penyediaan layanan persalinan yang lebih aman di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur kesehatan—terutama di daerah Krayan, Sebuku, dan Lumbis Ogong—masih menjadi persoalan yang menghambat kesetaraan layanan. Oleh karena itu, pengembangan layanan berbasis teknologi seperti *telemedicine*, sistem rujukan digital, serta penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi arah penguatan sistem kesehatan di masa mendatang.

Salah satu masalah kesehatan yang menjadi fokus nasional dan daerah adalah prevalensi stunting pada anak balita. Di Kabupaten Nunukan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 25,3% pada 2021 menjadi 20,7% pada 2024, menurut data gabungan BPS dan Dinas Kesehatan. Penurunan

ini merupakan hasil kolaborasi multisektor yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari puskesmas, desa, kader posyandu, hingga keluarga. Pemerintah telah mendorong pelaksanaan *Intervensi Serentak Pencegahan Stunting* yang mencakup edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, pelatihan kader, serta penguatan sistem pemantauan pertumbuhan balita. Namun tantangan tetap ada, terutama di wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem, akses sanitasi terbatas, serta praktik pemberian makanan bayi yang belum memadai. Ke depan, program penurunan stunting perlu dipadukan dengan intervensi perlindungan sosial, perbaikan sanitasi, dan pembangunan sumber air bersih.

Gambar 20. Perkembangan Penurunan Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan (2021-2024), Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan kompetensi angkatan kerja lokal terus diperkuat. Data menunjukkan bahwa jumlah peserta pelatihan kerja meningkat dari 812 orang pada tahun 2021 menjadi 1.185 orang pada 2024. Jenis pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan mencakup berbagai bidang strategis seperti teknik las, menjahit, pertanian terpadu, perbengkelan, hingga pemasaran digital. Pelatihan ini umumnya diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara BLK lokal, swasta, dan lembaga pelatihan terakreditasi.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam bentuk rendahnya serapan kerja pascapelatihan dan kurangnya keberlanjutan pembinaan. Oleh karena itu, model pelatihan ke depan perlu diarahkan ke pendekatan *demand-driven* dan *on-the-job training*, dengan memperkuat kemitraan bersama dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta mendorong inkubasi wirausaha muda di sektor produktif unggulan daerah.

Dengan berbagai capaian di atas, pembangunan SDM Kabupaten Nunukan dapat dikatakan telah berada pada arah yang tepat. Namun untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitasnya, dibutuhkan penguatan perencanaan yang lebih berbasis data, responsif terhadap konteks wilayah, serta adaptif terhadap tantangan global seperti disrupsi digital dan perubahan iklim. Kebijakan pembangunan SDM perlu dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam desain dan implementasi program. Dengan demikian, pembangunan SDM tidak hanya menjadi agenda teknokratis, tetapi juga menjadi gerakan sosial kolektif yang mendorong transformasi masyarakat Nunukan menuju kehidupan yang lebih bermartabat, sehat, cerdas, dan produktif.

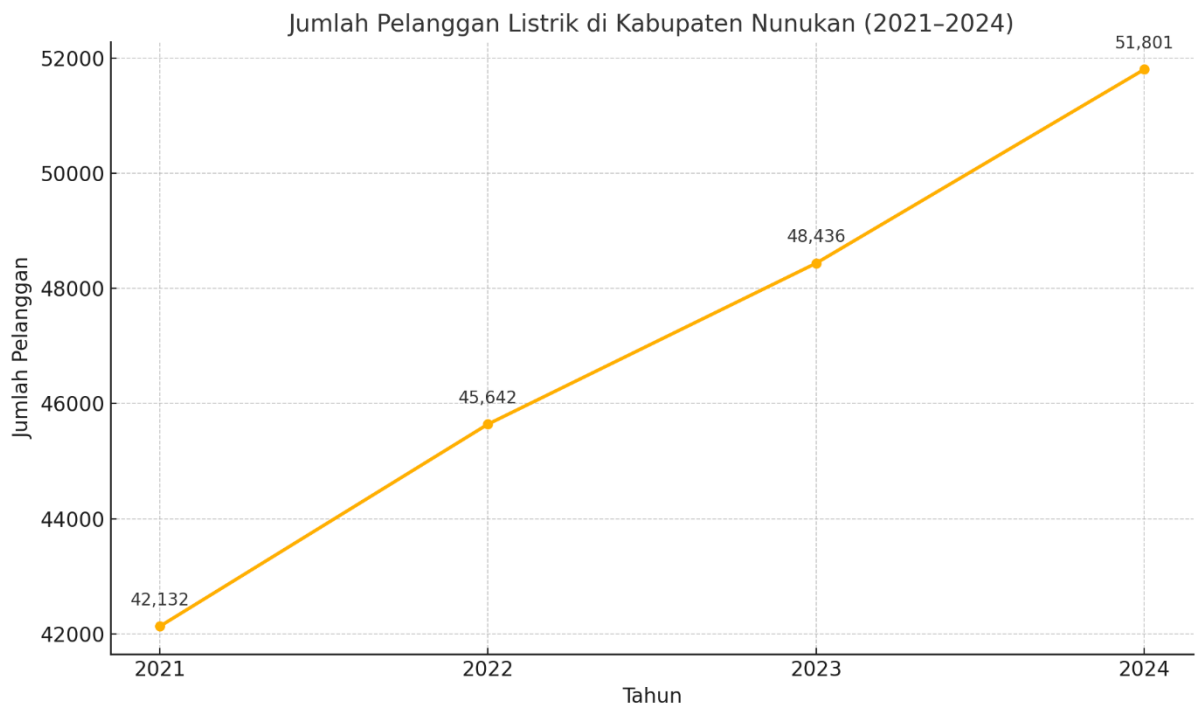
2.5.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, khususnya bagi wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan yang menghadapi tantangan geografis luar biasa. Dengan wilayah yang tersebar di daratan Kalimantan Utara dan kepulauan di perbatasan negara, konektivitas menjadi isu mendasar dalam pelayanan publik dan pergerakan ekonomi. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas lintas sektor dalam perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan, listrik, air bersih, serta perluasan akses teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi digitalisasi desa dan pelayanan dasar. Pendekatan ini bukan hanya bersifat teknokratik, melainkan juga ditujukan untuk menurunkan ketimpangan spasial antarwilayah dan memperkuat kohesi sosial-ekonomi antar komunitas.

Sektor jalan menjadi indikator utama dari upaya konektivitas antarkecamatan dan antarwilayah. Berdasarkan data BPS (2025), total panjang jalan kabupaten meningkat dari 1.370,31 kilometer pada tahun 2021 menjadi 1.785,41 kilometer pada tahun 2024. Namun, meskipun secara kuantitatif terjadi penambahan panjang jalan, proporsi jalan dalam kondisi mantap mengalami fluktuasi: dari 61,3% pada tahun 2021 menjadi 59,4% pada 2024, dengan rincian 655,68 km dalam kondisi baik dan 402,31 km dalam kondisi sedang. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengarahkan kebijakan infrastruktur pada peningkatan kualitas jalan strategis di wilayah yang selama ini sulit diakses, seperti ruas Lumbis–Tulin Onsoi dan Krayan Selatan–Long Bawan, yang menjadi urat nadi bagi distribusi logistik, layanan sosial, dan integrasi nasional di wilayah terluar. Pembangunan ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas warga, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi lokal di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Dalam hal energi, Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif pada peningkatan rasio elektrifikasi. Akses masyarakat terhadap listrik mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan jumlah pelanggan listrik naik dari 42.132 pada 2021 menjadi 51.801 pada 2024, yang mengindikasikan peningkatan cakupan layanan dan pemerataan akses energi. Rasio elektrifikasi pada 2023 tercatat mencapai 89,43%, meningkat dari 86,7% pada 2022. Namun demikian, tantangan tetap dihadapi di wilayah terpencil dan terpencar seperti Krayan Barat, Lumbis Ogong, dan Sembakung Atulai, yang belum terhubung dengan jaringan tegangan menengah PLN dan masih mengandalkan sistem hybrid seperti diesel-surya. Dalam merespons hal ini, Pemda bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk memperluas jaringan listrik dan mendorong energi baru dan terbarukan, sekaligus mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan energi lokal.

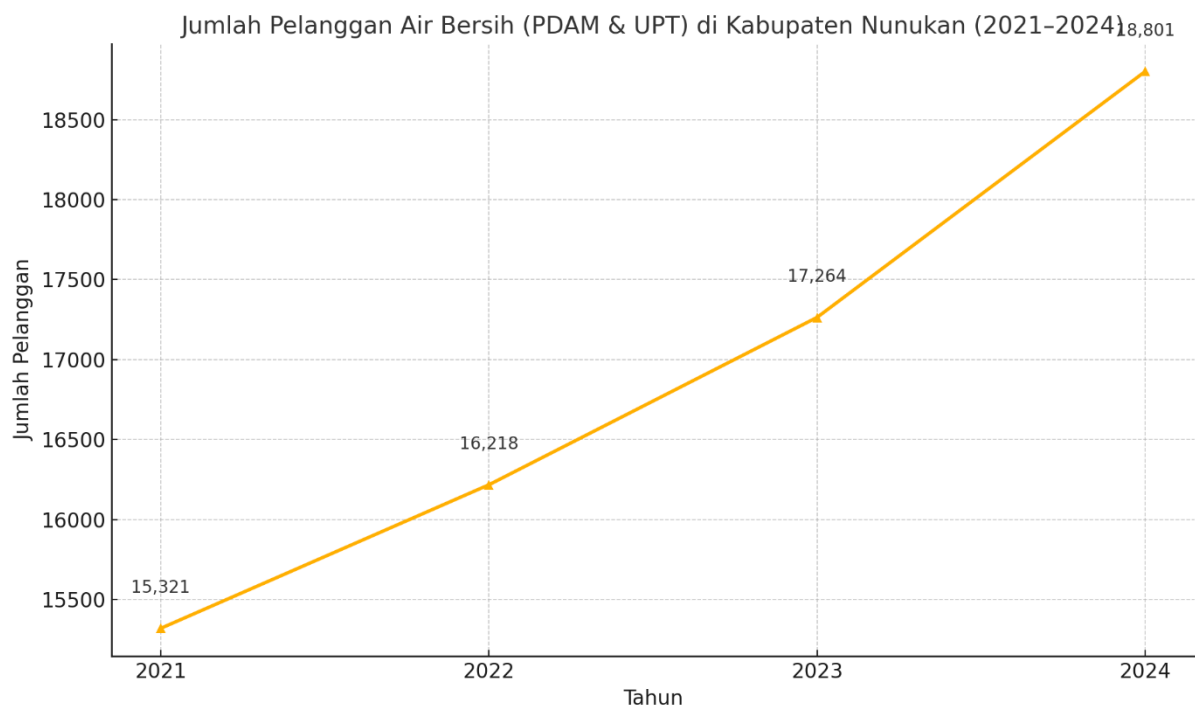
Gambar 21. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 'Nunukan Dalam Angka' 2022–2025

Ketersediaan air bersih menjadi isu krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hingga tahun 2024, jumlah pelanggan PDAM dan UPT air bersih di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 18.801, meningkat dari 15.321 pada 2021. Cakupan layanan baru menjangkau sekitar 53,1% rumah tangga di wilayah perkotaan dan sebagian pesisir. Sementara itu, masyarakat di daerah pedalaman seperti Krayan, Sebuku, dan Lumbis Hulu masih bergantung pada sumber air alami seperti sungai dan air hujan yang dikumpulkan secara swadaya. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah merespons tantangan ini dengan mengembangkan program Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes) serta membangun instalasi pengolahan air bersih, reservoir, dan jaringan pipa di kawasan-kawasan prioritas seperti Sebatik Timur dan Sebuku. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemda dalam memenuhi hak dasar atas air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T.

Gambar 22. Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 'Nunukan Dalam Angka' 2022-2025

Transformasi digital menjadi elemen kunci dalam pembangunan infrastruktur kontemporer. Pemerintah Kabupaten Nunukan mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah desa dengan akses internet, dari 136 desa pada 2022 menjadi 158 desa pada 2023, atau setara dengan 68% dari total 232 desa dan kelurahan. Melalui program “Desa Digital Perbatasan” yang diinisiasi oleh Dinas Kominfo bekerja sama dengan BAKTI Kominfo, upaya ini diarahkan untuk memperluas jaringan internet publik, mendukung sistem informasi pemerintahan desa, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam literasi digital. Kehadiran internet di desa tidak hanya penting untuk akses informasi dan pendidikan, tetapi juga menjadi infrastruktur ekonomi baru, membuka peluang kerja jarak jauh (remote work), perdagangan daring, dan akses ke layanan perbankan digital yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat perbatasan.

Sinergi antara pengembangan infrastruktur fisik dan digital menjadi modal penting dalam membangun wilayah perbatasan yang resilien dan kompetitif. Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor dan berbasis spasial, Pemerintah Kabupaten Nunukan secara bertahap

mengurangi hambatan akses, memperkuat daya dukung wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan jalan yang menjangkau pedalaman, elektrifikasi yang merata, air bersih yang aman, dan konektivitas digital yang inklusif adalah fondasi utama bagi pertumbuhan wilayah yang berkeadilan. Lebih dari sekadar membangun fasilitas fisik, kebijakan ini menunjukkan arah pembangunan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Ke depan, tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan akan tetap berakar pada faktor geografis, biaya pembangunan yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, swasta, serta komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah dirintis. Pembangunan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Nunukan harus menekankan prinsip inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan pada kelompok marjinal yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan dasar. Dengan demikian, daya saing wilayah Kabupaten Nunukan tidak hanya diukur dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur yang dibangun mampu menciptakan peluang, memperkecil kesenjangan, dan memperkuat identitas sosial masyarakat perbatasan. Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan adaptif merupakan prasyarat bagi transformasi Nunukan menjadi kawasan perbatasan yang produktif, terhubung, dan bermartabat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5.4. Iklim Investasi Daerah

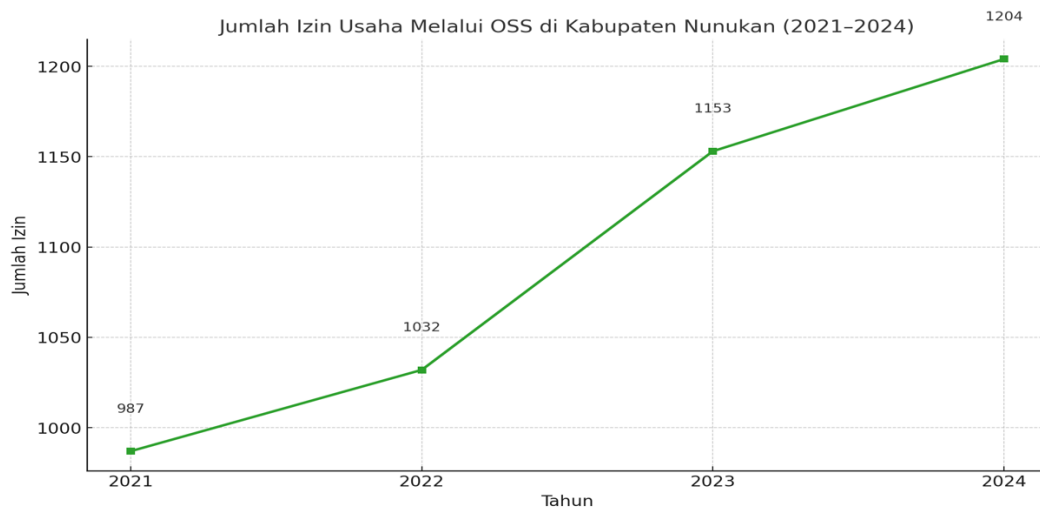
Iklim investasi merupakan salah satu pilar fundamental dalam memperkuat basis ekonomi lokal dan regional. Bagi Kabupaten Nunukan, yang secara geografis berada di wilayah perbatasan negara dan terdiri atas wilayah kepulauan serta daratan pedalaman, penguatan iklim investasi tidak hanya penting sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen integrasi wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Sejak awal periode RPJMD 2021–2026, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah

menempatkan penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagai bagian dari reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pusat, dan membuka ruang partisipasi pelaku usaha lokal dalam pembangunan. Upaya ini diarahkan melalui pembenahan regulasi, digitalisasi pelayanan publik, promosi potensi unggulan, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Tren investasi di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan yang menggembirakan dalam dua tahun terakhir. Nilai realisasi investasi pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp212,6 miliar, meningkat sekitar 14,7% dibandingkan tahun 2022 yang berada pada angka Rp185,3 miliar. Kenaikan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perbaikan konektivitas jalan antarwilayah, kemudahan akses perizinan berbasis digital, serta meningkatnya permintaan terhadap komoditas unggulan seperti hasil laut dan hortikultura. Beberapa sektor yang mencatat pertumbuhan signifikan adalah perdagangan jasa, distribusi barang konsumsi, serta kegiatan usaha mikro dan kecil yang berbasis di wilayah Sebatik, Sebuku, dan Nunukan Selatan. Investasi swasta juga mengalami pergeseran dari dominasi sektor formal skala besar menuju sektor-sektor dengan basis komunitas dan ekonomi rakyat, mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan ekonomi ke arah yang lebih inklusif.

Perkembangan positif juga tercermin dari peningkatan jumlah perizinan usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.153 izin OSS diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Nunukan, naik dari 1.032 izin pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perizinan yang semakin sederhana, transparan, dan berbasis digital mampu mendorong formalitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM. OSS juga mempermudah integrasi layanan lintas sektor, seperti pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, dan rekomendasi teknis. Namun, tantangan belum sepenuhnya sirna. Ketersediaan lahan usaha yang bersertifikat, kendala legalitas atas tanah adat dan ulayat, serta keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku usaha di pedalaman masih menjadi kendala utama dalam proses ekspansi usaha secara legal dan berkelanjutan.

Gambar 23. Perkembangan Jumlah Izin Usaha melalui OSS Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 'Kabupaten Nunukan Dalam Angka' 2022-2025

Untuk mempercepat pelayanan dan mendukung kepercayaan pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan memperluas penerapan layanan perizinan daring berbasis OSS-RBA. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa 82,4% dari seluruh layanan perizinan telah dilakukan secara digital, meningkat signifikan dibanding 70,1% pada tahun sebelumnya. Cakupan layanan ini mencakup izin operasional usaha, sertifikat standar, rekomendasi teknis, dan penerbitan legalitas usaha mikro. Selain efisiensi waktu dan biaya, digitalisasi ini juga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dampak dari transformasi kelembagaan ini tercermin dalam peningkatan indeks kepuasan pelayanan perizinan yang mencapai 78,6 poin pada 2023, naik dari 75,3 poin pada 2022. Artinya, pelaku usaha mulai merasakan perbaikan nyata dalam kualitas layanan publik yang menjadi fondasi bagi kepastian berusaha.

Gambar 24. Perkembangan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nunukan



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 'Kabupaten Nunukan Dalam Angka' 2022-2025

Dari sisi perdagangan luar negeri, kinerja ekspor nonmigas Kabupaten Nunukan mencerminkan potensi besar wilayah perbatasan dalam konektivitas pasar regional. Tahun 2023 mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp118,7 miliar, meningkat dari Rp104,6 miliar pada 2022. Produk utama ekspor terdiri atas ikan segar, rumput laut, dan hortikultura tropis seperti cabai, tomat, dan buah-buahan eksotis dari wilayah Krayan dan Sebuku. Wilayah Sebatik menjadi simpul utama perdagangan lintas negara, berkat kedekatannya dengan Tawau, Malaysia. Namun demikian, potensi ekspor ini belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan infrastruktur logistik seperti pelabuhan ekspor berstandar internasional, fasilitas cold storage, dan pusat pengemasan di dekat lokasi produksi menjadi hambatan serius. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, daya saing produk ekspor lokal akan sulit menyaingi produk luar di pasar internasional.

Sebagai langkah strategis jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyusun Peta Potensi Investasi Daerah (PIPD) yang memuat identifikasi sektor prioritas berdasarkan keunggulan lokal, analisis SWOT, dan proyeksi pasar. Beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai koridor

investasi antara lain Kawasan Ekonomi Perbatasan Sebatik yang diarahkan menjadi pusat logistik dan perdagangan antarnegara, kawasan hortikultura organik di Krayan yang menyasar pasar produk pertanian sehat, serta zona industri kecil-menengah (IKM) di Nunukan Selatan yang akan mendukung pertumbuhan sektor manufaktur skala rumah tangga. Dalam pengembangan kawasan ini, pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan investor nasional, lembaga keuangan pembangunan, dan pelaku CSR swasta yang memiliki komitmen terhadap investasi inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kerangka kebijakan yang semakin progresif dan institusi pelayanan publik yang terus diperkuat, Kabupaten Nunukan memiliki peluang besar untuk mengokohkan posisinya sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Indonesia. Namun, keberhasilan visi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, ketegasan regulasi, dan penguatan kapasitas aktor lokal. Transformasi iklim investasi tidak cukup hanya dengan menciptakan kemudahan perizinan, tetapi juga perlu menyasar pada peningkatan daya saing SDM lokal, perbaikan kualitas infrastruktur dasar dan logistik, serta keberpihakan yang nyata terhadap pelaku usaha mikro dan koperasi berbasis komunitas. Dengan mendorong ekosistem investasi yang adil, tangguh, dan inovatif, Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan sosial di wilayah yang secara geopolitik sangat strategis bagi NKRI.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NUNUKAN 2021- 2024

Memasuki dekade ketiga otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah telah menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan. Di Kabupaten Nunukan, dinamika fiskal sepanjang 2021–2024 mencerminkan proses pembelajaran yang kompleks namun progresif, ditandai dengan stabilitas administratif, perbaikan struktur belanja, dan sejumlah upaya untuk memperkuat kemandirian fiskal. Namun demikian, tantangan struktural seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan kapasitas fiskal, dan dominasi belanja rutin masih terus membayangi. Oleh karena itu, penting untuk membaca postur dan kinerja APBD tidak hanya sebagai angka dan neraca, melainkan sebagai cerminan dari pilihan kebijakan, kemampuan manajerial, serta komitmen terhadap tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.

3.1. Kebijakan Pengelolaan APBD

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan selama periode 2021–2024 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD diposisikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, guna mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026. Secara normatif, struktur dan proses APBD wajib mengacu pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD), yang kemudian diturunkan ke dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), sebelum disahkan menjadi dokumen APBD. Dalam konteks Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan dan kepulauan dengan tantangan geografis yang unik, pengelolaan APBD juga

diarahkan untuk mengatasi disparitas pelayanan dasar, keterisolasian wilayah, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

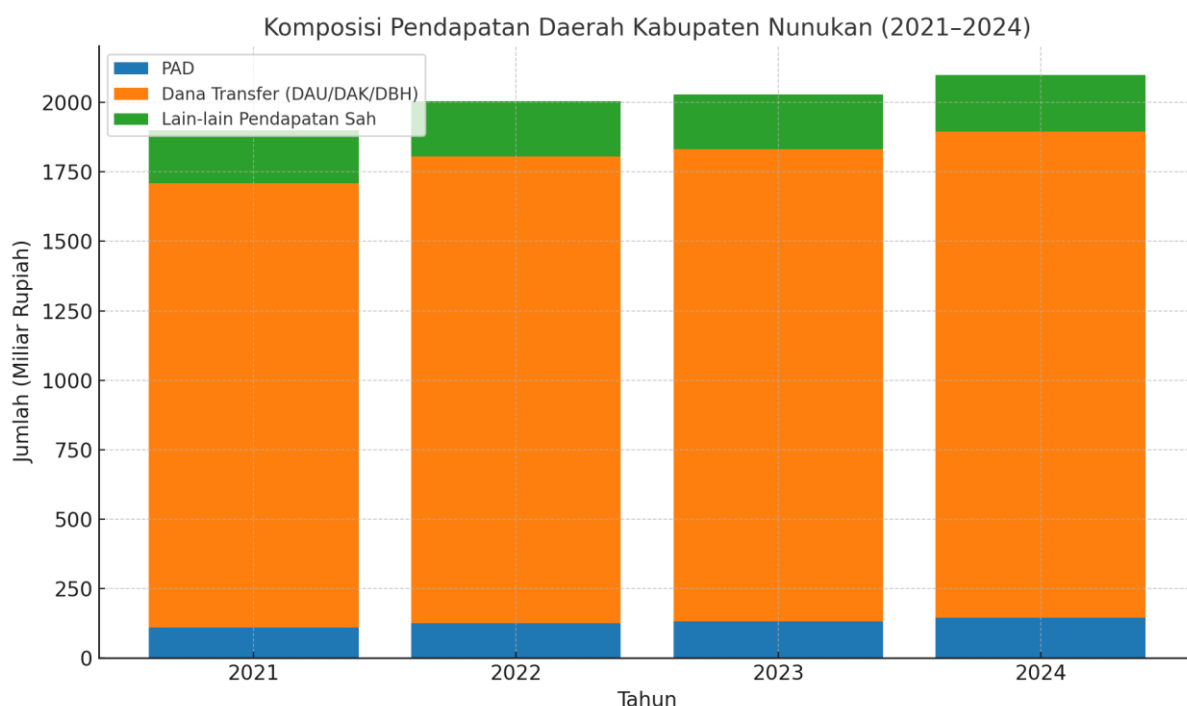
Selama tahun 2021 hingga 2024, kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan difokuskan pada penyusunan belanja berbasis kinerja dan hasil (*performance-based budgeting*), dengan pendekatan tematik-holistis-integratif. Arah kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Misalnya, dalam tahun 2022, berdasarkan LKPJ TA 2022, alokasi belanja untuk urusan pendidikan mencapai Rp395,5 miliar atau 25,14% dari total belanja daerah, melampaui ketentuan minimal 20% sesuai UU Sisdiknas. Demikian pula, pada tahun 2023, belanja untuk sektor kesehatan (termasuk KB dan pengendalian penduduk) mencapai Rp208,7 miliar atau sekitar 14,5%, sesuai mandat konstitusi. Realisasi belanja ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam pengelolaan pendapatan, Kabupaten Nunukan masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data dari LKPJ 2023, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut hanya mencapai Rp132,2 miliar atau sekitar 6,5% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun. Komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini menunjukkan tantangan kemandirian fiskal yang masih signifikan, namun juga mencerminkan pentingnya peran pusat dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber PAD, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi jasa umum, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.

Dalam konteks pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Nunukan selama periode 2021–2024 menjalankan strategi pembiayaan netto yang hati-hati dan terukur, dengan tetap menjaga proporsi defisit agar tidak membebani fiskal di masa depan. Berdasarkan laporan APBD 2023, pembiayaan netto

sebesar Rp113,65 miliar digunakan untuk menutupi defisit belanja dan sebagian besar bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Dalam dokumen evaluasi RKPD 2024, juga dicatat bahwa penggunaan pembiayaan diarahkan pada kegiatan strategis yang belum tertampung dalam belanja murni, seperti penanganan dampak bencana, pengembangan kawasan perbatasan, dan penyelesaian kewajiban tahun jamak (multiyears). Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan mendesak.

Gambar 25. Perkembangan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan



Dari sisi teknokratis, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah juga mengalami penguatan melalui integrasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan platform e-budgeting dan e-planning yang diterapkan secara bertahap di lingkungan Pemkab Nunukan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan APBD. Selain itu, prinsip good governance dalam pengelolaan APBD diwujudkan melalui pelibatan publik dalam Musrenbang, forum konsultasi publik, serta transparansi data melalui laman resmi Bappeda dan BPKAD. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik daerah.

Dengan mempertimbangkan dinamika fiskal nasional, tekanan inflasi pascapandemi, serta tantangan geopolitik kawasan perbatasan, maka kebijakan pengelolaan APBD ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja publik, serta pengembangan instrumen fiskal alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur strategis. Evaluasi atas kebijakan pengelolaan APBD selama 2021–2024 menunjukkan adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah, ditandai dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Namun demikian, tantangan fundamental berupa rendahnya kemandirian fiskal dan ketimpangan belanja antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui kebijakan yang lebih progresif, adaptif, dan berorientasi pada pemerataan manfaat pembangunan.

3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil, dan sejahtera, penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan (2025–2029) menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif dan berkelanjutan. Proyeksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tren historis realisasi APBD 2021–2024, perkembangan indikator ekonomi makro regional dan nasional, serta skenario kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah. Selain itu, proyeksi juga memperhatikan dinamika geopolitik kawasan perbatasan dan potensi fiskal lokal yang masih dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, perencanaan fiskal lima tahunan ini tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga strategis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal daerah.

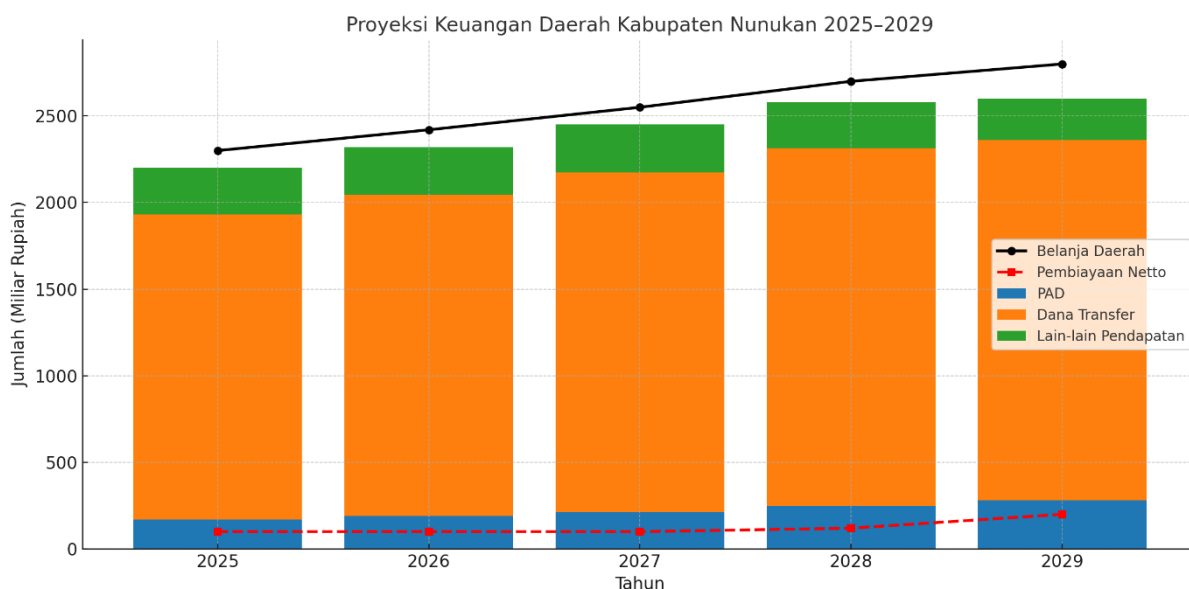
Berdasarkan simulasi teknokratik dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025–2029, diproyeksikan bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Nunukan akan tumbuh secara moderat dari Rp2,1 triliun pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp2,6 triliun pada tahun 2029. Pertumbuhan ini didorong oleh asumsi peningkatan dana transfer pusat seiring dengan

penguatan formula alokasi DAU berbasis kinerja dan kebutuhan dasar, serta upaya intensifikasi PAD yang lebih agresif. Meski demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah diperkirakan masih akan berada di bawah 10% hingga tahun 2027, baru meningkat menjadi sekitar 11–12% pada akhir periode RPJMD apabila reformasi pajak dan pemanfaatan aset daerah dilakukan secara progresif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8–10% per tahun, didorong oleh inovasi pelayanan perizinan, digitalisasi sistem perpajakan daerah, dan optimalisasi retribusi berbasis jasa publik. Pemkab Nunukan juga mulai menjajaki potensi pendapatan dari sektor ekonomi hijau, pengelolaan kawasan perbatasan, serta skema pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penguatan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi kunci dalam memastikan realisasi target ini, termasuk melalui sinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta penguatan basis data wajib pajak daerah yang terintegrasi.

Di sisi belanja, kebutuhan fiskal ke depan akan difokuskan pada tiga prioritas utama: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan, (2) pengurangan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar kecamatan perbatasan, serta (3) penguatan daya saing ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, ketahanan pangan, dan sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian tropis. Dengan pendekatan ini, struktur belanja diharapkan mengalami pergeseran dari dominasi belanja operasional ke arah belanja modal dan belanja publik yang lebih produktif.

Gambar 26. Perkembangan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan



Belanja daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp2,2 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,8 triliun pada tahun 2029. Namun demikian, peningkatan ini harus dilakukan dengan menjaga prinsip efisiensi dan efektivitas, agar tidak menciptakan defisit struktural. Maka dari itu, perluasan belanja akan disertai dengan strategi pengendalian belanja pegawai, rasionalisasi belanja rutin, serta penguatan mekanisme belanja berbasis hasil (output-outcome budgeting). Selain itu, reformasi perencanaan dan penganggaran akan diarahkan pada penguatan SIPD sebagai alat untuk menyelaraskan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi secara real-time.

Dalam hal pembiayaan, proyeksi menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan perlu mempertahankan kebijakan pembiayaan yang konservatif namun progresif. Artinya, pembiayaan tidak hanya bersumber dari SiLPA, tetapi mulai diarahkan untuk menjajaki instrumen pembiayaan alternatif, seperti skema KPBU untuk infrastruktur air bersih, sanitasi, dan jaringan jalan perbatasan. Pembiayaan ini akan tetap dikontrol agar tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Selain itu, potensi kerja sama dengan BUMD maupun mitra swasta strategis akan menjadi salah satu strategi pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai tambah ekonomi lokal.

Dengan proyeksi keuangan yang disusun secara realistis dan berbasis data historis serta asumsi makro yang rasional, Pemerintah Kabupaten

Nunukan diharapkan dapat mengelola fiskal daerah secara lebih strategis dan berorientasi hasil. Penguatan fiskal ini bukan hanya soal menyeimbangkan neraca anggaran, tetapi juga soal mewujudkan keberpihakan anggaran kepada kelompok rentan, wilayah terluar, dan sektor produktif lokal. Oleh karena itu, dokumen proyeksi keuangan lima tahunan ini bukan sekadar lampiran administratif, melainkan peta jalan fiskal menuju pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3.3. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2024

Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, struktur belanja daerah selama periode 2021–2024 merefleksikan orientasi pembangunan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengurangan ketimpangan wilayah, serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Dalam dokumen LKPJ 2023, belanja daerah tercatat sebesar Rp2,09 triliun, meningkat dibandingkan Rp1,87 triliun pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan adanya eskalasi kebutuhan pembiayaan sektor prioritas, terutama untuk pemulihan ekonomi pascapandemi dan pemenuhan target indikator pembangunan RPJMD.

Komposisi belanja daerah Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh belanja operasional, dengan rata-rata kontribusi lebih dari 65% selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2023, belanja operasional mencapai Rp1,38 triliun atau 66,2% dari total belanja, yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal yang merepresentasikan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur publik, hanya sebesar Rp440 miliar atau sekitar 21,1% dari total belanja daerah. Meskipun belanja modal menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, porsi ini masih perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan dasar.

Dalam hal klasifikasi urusan, belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar menempati porsi terbesar. Urusan pendidikan secara konsisten dialokasikan di atas 20% dari total belanja, bahkan pada tahun 2022 mencapai Rp395,5 miliar atau 25,1%, sesuai amanat konstitusi. Urusan kesehatan (termasuk KB dan pengendalian penduduk) juga menunjukkan konsistensi dengan alokasi belanja sekitar 14,5% pada tahun 2023. Belanja pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga menjadi prioritas, terutama dalam pembangunan jalan antar wilayah perbatasan, penyediaan air bersih, serta perbaikan infrastruktur permukiman di kecamatan-kecamatan tertinggal.

Dari perspektif geografis, distribusi belanja daerah masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Kecamatan yang berlokasi di ibu kota kabupaten seperti Nunukan dan Nunukan Selatan cenderung memperoleh porsi belanja yang lebih besar dibandingkan kecamatan-kecamatan perbatasan seperti Krayan, Lumbis, atau Tulin Onsoi. Ketimpangan ini tidak selalu bersifat diskriminatif, namun mencerminkan tantangan objektif terkait keterbatasan infrastruktur dasar, tingkat kesulitan distribusi logistik, dan perbedaan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan antar kecamatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penajaman arah belanja berbasis spasial (spatial budgeting) agar program dan kegiatan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.

Di sisi lain, efektivitas belanja daerah masih menghadapi beberapa tantangan. Laporan evaluasi RKPD tahun 2023 menunjukkan bahwa sejumlah kegiatan strategis mengalami keterlambatan realisasi fisik maupun keuangan akibat rendahnya kualitas perencanaan, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Misalnya, program pembangunan jalan desa dan irigasi di beberapa wilayah perbatasan mengalami deviasi fisik hingga lebih dari 20% dari target, sementara serapan anggaran baru tercapai di triwulan IV. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme evaluasi per triwulan dan konsolidasi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Oleh karena itu, arah reformasi belanja daerah ke depan perlu difokuskan pada efisiensi alokasi dan efektivitas pelaksanaan. Hal ini mencakup penggunaan pendekatan belanja berbasis kinerja (performance-based budgeting), penetapan indikator output dan outcome yang terukur, serta penguatan monitoring evaluasi berbasis sistem informasi. Dalam konteks RPJMD 2025–2029 yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu memastikan bahwa struktur belanja benar-benar mencerminkan kebutuhan strategis daerah, bukan sekadar menjadi pengulangan rutinitas birokratis tahunan. Hanya dengan cara itulah, APBD dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah perbatasan dan pinggiran pembangunan.

3.4. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2024

Pembiayaan daerah merupakan elemen penting dalam struktur fiskal yang berfungsi menutup defisit atau menyalurkan surplus APBD. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengadopsi kebijakan pembiayaan yang relatif konservatif namun strategis sepanjang periode 2021–2024. Instrumen pembiayaan diarahkan secara dominan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan pengeluaran pembiayaan yang terbatas dan selektif, utamanya untuk penyertaan modal pada BUMD serta penyelesaian kewajiban pembangunan strategis. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian fiskal dalam konteks kapasitas fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada dana transfer pusat.

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp36,01 miliar yang sebagian besar berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp35,98 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan kembali pinjaman daerah senilai Rp20,5 juta. Pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp1,5 miliar, dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Maka, pembiayaan netto tahun 2021 berada pada kisaran Rp34,51 miliar Rantek RPJMD Kab. Nunukan. Rendahnya nilai

pengeluaran menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah cenderung menggunakan pembiayaan secara hati-hati untuk mendukung fungsi fiskal dasar, bukan sebagai substitusi terhadap pendapatan daerah.

Tren ini berlanjut pada tahun 2022, di mana penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp100,98 miliar, tetap bersumber penuh dari SiLPA. Pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp7,5 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp93,48 miliar. Peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya ini berkorelasi dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan belanja strategis, termasuk untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan layanan dasar di tengah dampak lanjutan pandemi COVID-19 LKPJ TA 2022.

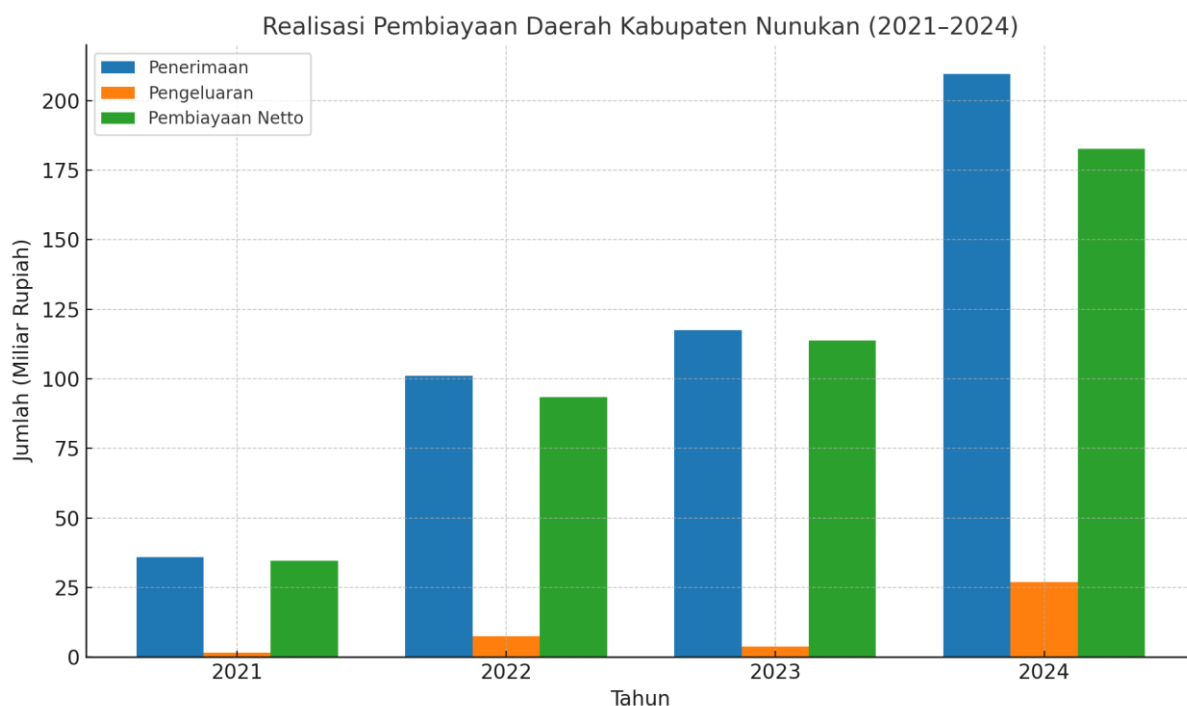
Memasuki tahun 2023, pembiayaan daerah terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp117,58 miliar dengan pengeluaran sebesar Rp3,79 miliar, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp113,79 miliar. Besarnya SiLPA tahun sebelumnya menjadi pendorong utama tingginya penerimaan pembiayaan. Penggunaan dana ini difokuskan untuk menutup selisih antara belanja yang meningkat dengan pendapatan daerah yang cenderung stagnan, serta untuk mengamankan keberlangsungan program-program prioritas yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya LKPJ TA 2023.

Pada tahun anggaran 2024, realisasi penerimaan pembiayaan melonjak signifikan menjadi Rp209,64 miliar. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan volume SiLPA, tetapi juga mencerminkan adanya ruang fiskal yang tidak sepenuhnya termanfaatkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan pada tahun yang sama sebesar Rp26,98 miliar, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp182,65 miliar. Besarnya angka ini menunjukkan peningkatan ketergantungan pada pembiayaan untuk menjaga kesinambungan fiskal, yang meskipun masih dalam batas wajar, perlu dicermati dalam jangka menengah LKPJ TA 2024.

Dominasi SiLPA sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan mengindikasikan dua hal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, hal ini menunjukkan efisiensi pelaksanaan APBD dan kehati-hatian dalam belanja.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat mencerminkan lemahnya daya serap anggaran atau kurang presisinya perencanaan kegiatan. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Daerah ke depan adalah memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu, presisi, dan terfokus pada outcome, bukan sekadar output atau serapan.

Gambar 27. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nunukan



Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan dan terpencil, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai mengeksplorasi instrumen pembiayaan alternatif yang sah menurut regulasi, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun demikian, seluruh bentuk inovasi pembiayaan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, dengan perhitungan dampak fiskal jangka panjang dan tetap menjaga prinsip akuntabilitas serta keberlanjutan fiskal. Strategi pembiayaan yang adaptif, responsif, dan efisien akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah.

3.5. Postur APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2024

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan selama periode 2021–2024 mencerminkan dinamika fiskal yang sarat tantangan dan adaptasi. Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri, Kabupaten Nunukan menghadapi beban fiskal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural. Mulai dari kebutuhan untuk membiayai layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil, hingga tuntutan infrastruktur yang mahal akibat tingginya biaya logistik. Dalam kerangka ini, postur APBD harus dibaca bukan sekadar angka, tetapi sebagai refleksi dari pilihan kebijakan, prioritas pembangunan, serta kapasitas manajerial keuangan daerah.

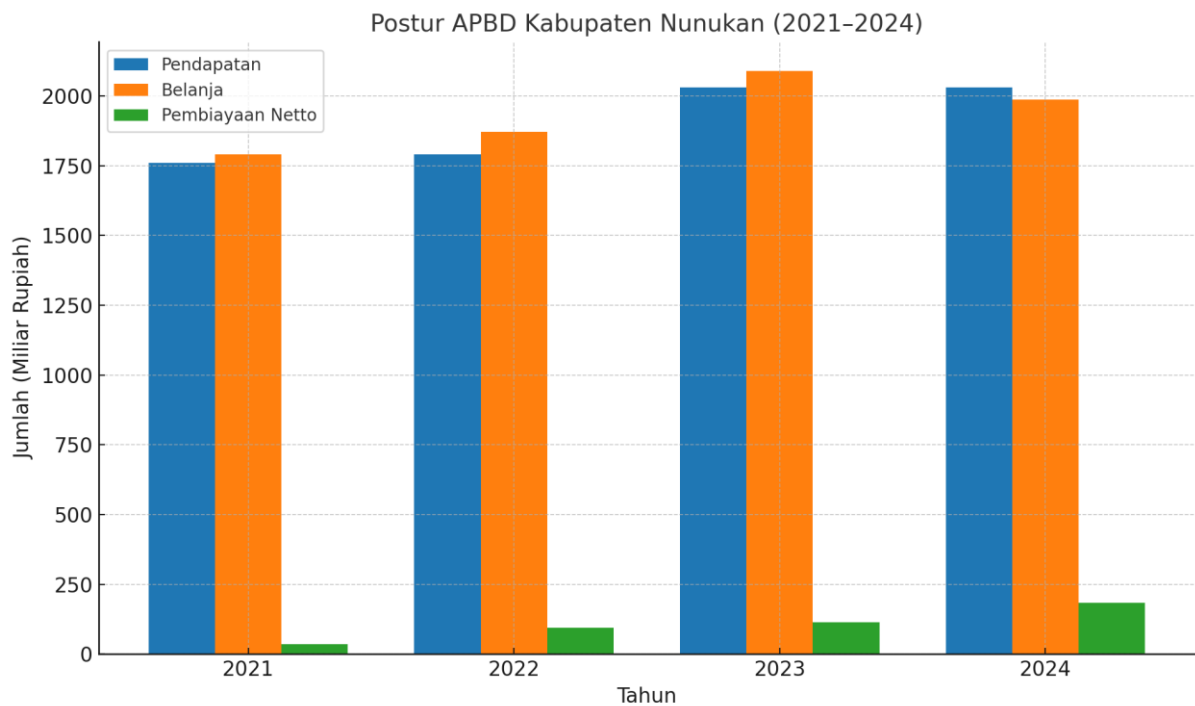
Pada tahun anggaran 2021, APBD Kabupaten Nunukan mencatat total pendapatan sebesar Rp1,76 triliun, sementara total belanja mencapai Rp1,79 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp30 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp34,51 miliar, utamanya dari SiLPA tahun sebelumnya. Pada tahun ini, APBD mengalami tekanan akibat dampak lanjutan pandemi COVID-19, yang memaksa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Proporsi belanja operasional masih dominan, namun belanja modal relatif rendah, mencerminkan keterbatasan fiskal dan kehati-hatian dalam ekspansi belanja strategis Rantek RPJMD Kab. Nunukan.

Memasuki tahun 2022, postur APBD menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi Rp1,79 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp1,87 triliun. Terjadi defisit sebesar Rp80,7 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto Rp93,48 miliar. Meskipun postur fiskal membaik, tekanan tetap tinggi pada sisi belanja, terutama untuk urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Belanja operasional masih mendominasi sebesar Rp859 miliar (62,6% dari total belanja), sementara belanja modal hanya Rp163 miliar atau sekitar 11,9%. Struktur ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih berkutat dengan beban rutin birokratis yang menyerap porsi besar dari ruang fiskal, menyisakan sedikit ruang untuk investasi pembangunan jangka panjang LKPD TA 2022.

Pada tahun 2023, APBD Nunukan mengalami ekspansi lebih lanjut. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,03 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,09 triliun. Defisit sebesar Rp56 miliar ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp113,79 miliar, memperlihatkan adanya kelebihan pembiayaan (surplus financing). Komposisi belanja tahun ini mulai menunjukkan pergeseran positif, dengan belanja modal meningkat menjadi Rp319,8 miliar (20,1% dari total belanja), dan belanja operasional sebesar Rp981,5 miliar (61,8%). Tren ini mengindikasikan adanya langkah korektif pemerintah daerah untuk meningkatkan porsi belanja produktif, meskipun tantangan kualitas belanja dan daya serap masih perlu terus dibenahi LKPD TA 2023.

Tahun 2024 menjadi tahun dengan postur APBD terbesar selama periode ini. Pendapatan mencapai Rp2,03 triliun dan belanja meningkat signifikan menjadi Rp1,98 triliun. Tidak terjadi defisit nominal, tetapi postur anggaran memperlihatkan pembiayaan netto sebesar Rp182,65 miliar—indikasi adanya optimalisasi ruang fiskal dari SiLPA tahun sebelumnya untuk mempercepat realisasi program pembangunan. Belanja modal melonjak menjadi Rp632,5 miliar, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membiayai proyek infrastruktur dan pelayanan publik prioritas. Namun demikian, belanja operasional juga ikut meningkat, menunjukkan masih kuatnya dominasi belanja rutin yang harus dikendalikan agar tidak menggerus kemampuan fiskal strategis LKPD TA 2024.

Gambar 28. Perkembangan Postur APBD Kabupaten Nunukan



Jika ditelaah secara longitudinal, postur APBD Kabupaten Nunukan selama 2021–2024 memperlihatkan tren pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil, meskipun masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Struktur belanja mulai menunjukkan pergeseran ke arah pembangunan yang lebih produktif, terutama dengan meningkatnya porsi belanja modal pada dua tahun terakhir. Namun, masih diperlukan reformasi mendalam dalam hal efisiensi belanja operasional, rasionalisasi pegawai, serta penyusunan program yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan daya ungkit ekonomi. Selain itu, peran perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah menjadi krusial dalam memastikan bahwa belanja publik benar-benar menjangkau wilayah terluar dan kelompok masyarakat paling rentan.

Dalam konteks tersebut, evaluasi postur APBD bukan hanya alat monitoring keuangan, tetapi sekaligus menjadi cermin kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merespon kompleksitas pembangunan di wilayah perbatasan. Perbaikan struktur anggaran harus disertai dengan reformasi kebijakan fiskal yang berbasis data, integrasi sistem informasi keuangan, serta penguatan pengawasan internal dan partisipasi publik. Dengan demikian, postur APBD bukan hanya menjadi

neraca fiskal, tetapi juga penanda kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.

3.6. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2024

Kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator krusial dalam menilai seberapa efektif dan akuntabel pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi fiskalnya. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, capaian kinerja keuangan tidak hanya penting dari sisi teknis administrasi, tetapi juga sebagai refleksi kapasitas tata kelola pemerintahan yang melayani dan berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang sarat dengan tantangan geografis dan disparitas pembangunan. Selama periode 2021–2024, Pemerintah Kabupaten Nunukan secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Namun demikian, capaian opini WTP tidak serta merta mencerminkan kualitas substansial dari belanja daerah. Dalam laporan evaluasi RKPD dan LKPJ tahunan, masih ditemukan sejumlah isu mendasar yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Beberapa program unggulan mengalami realisasi fisik dan keuangan yang tidak optimal, seperti pembangunan infrastruktur jalan desa di Kecamatan Krayan dan Tulin Onsoi, serta keterlambatan pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tata kelola administratif berjalan dengan baik, efektivitas implementasi kebijakan anggaran masih memerlukan penguatan pada level perencanaan teknis dan manajerial perangkat daerah.

Dari sisi indikator kinerja keuangan, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data LKPJ 2023, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 6,5%. Artinya, lebih dari 93% pendapatan daerah

masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menjadi tantangan strategis dalam jangka menengah, terutama ketika mempertimbangkan risiko ketidakpastian alokasi transfer pusat akibat dinamika fiskal nasional dan perubahan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis formula baru. Indeks efektivitas PAD juga perlu diperkuat melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi jasa publik, serta reformasi tata kelola aset dan potensi ekonomi lokal.

Efisiensi belanja juga menjadi perhatian. Struktur APBD selama empat tahun terakhir menunjukkan dominasi belanja operasional dengan rata-rata kontribusi di atas 60%. Meskipun ada peningkatan belanja modal, khususnya pada tahun 2023 dan 2024, efektivitas belanja publik belum sepenuhnya tercermin dalam pencapaian indikator makro pembangunan seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Kelemahan ini mengindikasikan perlunya reformasi belanja berbasis hasil (*result-based budgeting*), yang tidak hanya menilai penyerapan anggaran, tetapi juga capaian manfaat langsung bagi masyarakat

Dari sisi tata kelola, upaya digitalisasi melalui penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) telah mulai diimplementasikan meskipun belum optimal. Integrasi antara perencanaan (*e-Planning*) dan penganggaran (*e-Budgeting*) masih menghadapi tantangan keterpaduan data, kapasitas SDM, serta konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, sistem pelaporan dan monitoring berbasis aplikasi masih perlu diperluas hingga ke level kecamatan dan desa, agar mekanisme pelaporan realisasi anggaran dapat dilakukan secara *real-time* dan mendukung transparansi publik. Pelibatan masyarakat sipil dan DPRD dalam proses evaluasi anggaran juga masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen kontrol kebijakan yang substantif.

Dengan mempertimbangkan capaian dan tantangan di atas, maka arah peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan harus diarahkan pada dua ranah utama: (1) penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, serta (2) transformasi sistem penganggaran berbasis kinerja dan spasial. Hal ini perlu ditopang dengan

peningkatan literasi fiskal antar pemangku kepentingan, termasuk di lingkungan legislatif dan masyarakat sipil. Reformasi fiskal bukan hanya soal administrasi dan akuntansi, melainkan juga strategi keberpihakan anggaran terhadap warga yang paling membutuhkan dan wilayah yang paling tertinggal. Hanya dengan itu, kinerja keuangan daerah dapat benar-benar menjadi fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.7. Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2024

Meskipun secara administratif Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut, capaian tersebut belum cukup untuk menutupi kenyataan bahwa pengelolaan APBD masih menyisakan sejumlah permasalahan struktural dan substansial. Keberhasilan mempertahankan predikat WTP cenderung merefleksikan kepatuhan administratif dalam pelaporan, namun belum mencerminkan efektivitas alokasi dan kualitas belanja publik yang benar-benar menyentuh akar kebutuhan masyarakat. Dalam konteks wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Nunukan, yang menghadapi tantangan logistik, infrastruktur dasar, serta keterisolasian geografis, APBD dituntut lebih dari sekadar tertib pembukuan—melainkan harus menjadi instrumen distribusi keadilan dan akselerasi pembangunan.

Salah satu persoalan utama yang paling menonjol adalah rendahnya kemandirian fiskal. Selama periode 2021–2024, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah konsisten berada di bawah 7%, mengindikasikan dominasi dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pendanaan daerah. Ketergantungan ini mempersempit ruang fiskal otonom Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, PAD yang stagnan juga mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah, seperti retribusi jasa publik, pemanfaatan aset, dan kontribusi BUMD. Tanpa terobosan struktural di bidang pendapatan, arah

pembangunan daerah akan terus mengikuti arus kebijakan pusat, dan tidak mampu mengembangkan model pembangunan berbasis kekuatan lokal.

Permasalahan kedua terletak pada struktur dan kualitas belanja publik. Selama empat tahun terakhir, belanja operasional tetap mendominasi dengan rata-rata lebih dari 60% dari total belanja daerah. Meskipun terdapat peningkatan belanja modal terutama pada tahun 2023 dan 2024, porsi belanja produktif masih belum proporsional terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang. Bahkan, realisasi belanja di banyak kecamatan tertinggal seperti Krayan dan Lumbis Ogong kerap mengalami deviasi fisik dan keuangan yang cukup tinggi, menunjukkan lemahnya kualitas perencanaan teknis dan manajerial perangkat daerah. Tidak jarang kegiatan strategis baru dieksekusi menjelang akhir tahun anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas output dan efektivitas program.

Ketiga, dari sisi perencanaan dan penganggaran, masih dijumpai praktik-praktik yang cenderung sektoral dan berbasis rutinitas. Proses Musrenbang yang semestinya menjadi ruang artikulasi kebutuhan masyarakat, sering kali bersifat normatif dan belum mampu menjembatani antara aspirasi akar rumput dengan prioritas anggaran. Dokumen RKPD dan KUA-PPAS masih minim integrasi spasial dan belum sepenuhnya berbasis data yang mutakhir dan terdistribusi secara adil antarwilayah. Ini menghasilkan tumpang tindih program antar-OPD, fragmentasi pendanaan, serta program yang kerap tidak sesuai dengan realitas lapangan. Lemahnya koordinasi antarunit kerja dan belum terintegrasinya SIPD secara optimal memperparah persoalan ini.

Permasalahan keempat menyangkut pengelolaan pembiayaan dan efektivitas pengawasan anggaran. Selama empat tahun terakhir, pembiayaan daerah hampir sepenuhnya bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Meskipun hal ini mencerminkan kehati-hatian fiskal, ketergantungan pada SiLPA juga menandakan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja. Belum dimanfaatkannya opsi pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah atau skema KPBU mengindikasikan kelemahan dalam desain pembiayaan pembangunan

strategis. Sementara itu, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah dan DPRD masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural ketimbang pada evaluasi dampak dan keberpihakan anggaran. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan anggaran juga masih terbatas pada ruang konsultatif, belum menjadi bagian dari sistem pengawasan yang bermakna.

Akhirnya, akar dari sebagian besar permasalahan di atas bermuara pada kesenjangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah. Tidak semua perangkat daerah memiliki kemampuan teknokratis yang memadai dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, mengelola pengadaan, dan melakukan evaluasi program. Transformasi digital melalui SIPD dan sistem keuangan daerah lainnya belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM secara merata. Akibatnya, realisasi anggaran cenderung tertumpuk di akhir tahun, perencanaan kurang presisi, dan pelaporan kinerja belum akurat. Tanpa reformasi kapasitas birokrasi, pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan akan terus terjebak pada logika administratif, dan belum mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah yang menuntut kecepatan, akurasi, dan keberpihakan.

3.8.

3.9. Strategi Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kabupaten Nunukan, penguatan pengelolaan keuangan daerah menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan agenda pembangunan. Tantangan utama yang dihadapi tidak hanya berkisar pada besaran fiskal, tetapi juga pada bagaimana fiskal tersebut dikelola secara efisien, adil, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah harus dirancang secara sistematis, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan pendekatan berbasis kinerja dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Langkah pertama yang perlu dikedepankan adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah secara bertahap. Selama periode 2021–2024,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan masih stagnan di bawah 7% dari total pendapatan daerah, menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal. Strategi penguatan PAD tidak dapat dilakukan secara linier, tetapi harus melalui pendekatan multi-sektor: penguatan database wajib pajak, peningkatan kepatuhan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, dan perluasan ruang inovasi pendapatan melalui BUMD, kerjasama daerah, dan ekonomi digital lokal. Dalam konteks ini, penguatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi prioritas strategis, baik dari sisi SDM, sistem informasi, maupun regulasi turunan.

Strategi berikutnya terletak pada penajaman belanja publik yang lebih produktif dan berorientasi pada outcome. Dalam empat tahun terakhir, dominasi belanja operasional masih sangat tinggi, mengindikasikan keterbatasan ruang fiskal untuk investasi jangka panjang. Reformasi belanja publik harus diarahkan pada efisiensi belanja rutin, perampingan belanja birokratis yang tidak memiliki dampak langsung pada masyarakat, serta penguatan belanja modal di sektor strategis seperti infrastruktur konektivitas antarwilayah, digitalisasi layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Belanja publik juga harus lebih menyentuh kebutuhan spesifik wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, dengan pendekatan penganggaran berbasis wilayah (spatial budgeting).

Transformasi perencanaan dan penganggaran juga menjadi bagian integral dari strategi penguatan fiskal. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus didorong tidak hanya sebagai alat pelaporan administratif, tetapi sebagai sistem terintegrasi yang mampu menyatukan perencanaan (e-Planning), penganggaran (e-Budgeting), pelaksanaan, hingga evaluasi secara real-time. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan intensif bagi seluruh OPD terkait pemanfaatan SIPD secara optimal, serta penguatan regulasi daerah yang memastikan setiap program/kegiatan memiliki indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau secara periodik.

Aspek pembiayaan pembangunan juga perlu ditinjau kembali. Hingga 2024, Kabupaten Nunukan sangat bergantung pada SiLPA sebagai sumber

utama penerimaan pembiayaan. Meskipun pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian fiskal, namun dalam jangka menengah, strategi ini tidak dapat terus diandalkan. Pemerintah daerah perlu mulai menjajaki instrumen pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah yang sehat, obligasi daerah untuk proyek infrastruktur, serta skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaannya, perlu dipastikan adanya sistem mitigasi risiko fiskal, transparansi kontrak, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola skema pembiayaan jangka panjang tersebut.

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas fiskal juga harus menjadi prioritas. Meski opini BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan selama 2021–2024 konsisten WTP, sejumlah catatan masih muncul terkait kualitas perencanaan, validitas data keuangan, dan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal menjadi sangat penting. Ini termasuk pengembangan sistem audit berbasis risiko, pelibatan aktif masyarakat sipil dalam proses monitoring anggaran, serta penerapan prinsip open government melalui keterbukaan data dan forum konsultasi publik yang bermakna.

Strategi berikutnya adalah membangun integrasi vertikal dan horizontal dalam pengelolaan keuangan daerah. Integrasi vertikal merujuk pada harmonisasi antara kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan nasional, termasuk dalam penyesuaian sistem DAU berbasis formula baru dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara integrasi horizontal mencakup sinergi antar-OPD dalam perencanaan lintas sektor, penyusunan program tematik lintas wilayah, serta pelibatan DPRD, BUMD, dan pelaku usaha lokal dalam proses pengambilan keputusan fiskal. Pendekatan kolaboratif ini sangat penting mengingat karakter geografis Nunukan yang luas dan terfragmentasi secara spasial.

Akhirnya, strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah tidak boleh terlepas dari prinsip keberpihakan. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah harus memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, desa-desa terpencil, dan sektor-sektor ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, prinsip “anggaran sebagai instrumen keadilan

sosial” harus menjadi semangat utama dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka pengelolaan keuangan daerah bukan hanya akan menjadi praktik teknokratis, tetapi juga praktik etik dan politik yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

Tabel 2. Sintesis Tantangan Utama, Strategi penguatan dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tantangan Utama	Strategi Penguatan	Indikator Keberhasilan
1. Rendahnya Kemandirian Fiskal Daerah PAD Kabupaten Nunukan selama 2021–2024 rata-rata hanya berkontribusi sekitar 6–7% dari total pendapatan daerah, mencerminkan ketergantungan struktural terhadap dana transfer pusat dan lemahnya basis penerimaan lokal.	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui reformasi retribusi daerah, integrasi database wajib pajak, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta inovasi sumber pendapatan baru seperti digitalisasi layanan dan kolaborasi BUMD.	PAD berkontribusi minimal 10% dari total pendapatan daerah pada akhir periode RPJMD; rasio efektivitas PAD meningkat; peningkatan jumlah objek pajak dan wajib pajak aktif.
2. Dominasi Belanja Operasional Belanja operasional masih menyerap lebih dari 60% dari total belanja daerah, terutama untuk belanja pegawai dan barang jasa, yang menyisakan ruang fiskal sangat terbatas untuk investasi pembangunan jangka panjang.	Melakukan rasionalisasi belanja operasional, mendorong efisiensi belanja non-produktif, dan mengalihkan alokasi anggaran ke sektor strategis seperti belanja modal berbasis spasial dan program padat karya lokal.	Porsi belanja modal meningkat di atas 30%; penurunan proporsi belanja pegawai dalam total belanja operasional; peningkatan kualitas belanja modal (tingkat kemanfaatan dan pemerataan).
3. Lemahnya Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Implementasi SIPD dan sistem penganggaran elektronik belum sepenuhnya terintegrasi antarsektor dan antarlevel pemerintahan, menyebabkan inkonsistensi antara rencana, anggaran, dan pelaksanaan.	Memperkuat penggunaan SIPD sebagai sistem utama pengelolaan keuangan daerah yang menyatu dengan e-Planning dan e-Budgeting, serta melakukan pendampingan teknis bagi seluruh OPD dalam penyusunan RKPD dan RKA yang berbasis kinerja dan indikator hasil.	Seluruh OPD menggunakan SIPD secara aktif; laporan kinerja terhubung dengan laporan keuangan; sinkronisasi dokumen RKPD, Renja, RKA, dan DPA meningkat; tingkat kepatuhan terhadap siklus perencanaan meningkat.
4. Ketergantungan pada SiLPA sebagai Sumber Pembiayaan	Menyusun kebijakan pembiayaan alternatif yang sehat dan terukur, termasuk penajakan	Penurunan proporsi pembiayaan dari SiLPA di bawah 60%; terbentuknya proyek

Tantangan Utama	Strategi Penguatan	Indikator Keberhasilan
Selama 2021–2024, pembiayaan netto hampir seluruhnya bersumber dari SiLPA, menunjukkan rendahnya diversifikasi pembiayaan dan risiko tidak optimalnya pelaksanaan program tahun berjalan.	terhadap pinjaman daerah, obligasi daerah untuk proyek infrastruktur produktif, serta pengembangan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).	percontohan KPBU; kebijakan pembiayaan jangka menengah disusun dan disahkan dalam dokumen resmi fiskal daerah.
5. Keterbatasan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal Meskipun opini BPK adalah WTP, beberapa catatan berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, khususnya di tingkat OPD teknis.	Memperkuat Inspektorat Daerah sebagai aktor kunci pengawasan internal dengan mendorong penerapan audit berbasis risiko, penguatan kapasitas auditor, serta pelibatan masyarakat dalam forum monitoring dan evaluasi publik.	Penurunan jumlah temuan BPK dan LHP Inspektorat; peningkatan tindak lanjut hasil audit; terbentuknya mekanisme pelaporan publik atas pelaksanaan anggaran berbasis web dan desa.
6. Kurangnya Sinergi Antar-OPD dan Pelaku Pembangunan Fragmentasi perencanaan antar OPD dan rendahnya keterlibatan pelaku non-pemerintah menyebabkan duplikasi program dan rendahnya efektivitas intervensi pembangunan.	Mengembangkan perencanaan kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), serta membentuk forum sinergi multipihak di tingkat kabupaten.	Meningkatnya jumlah program kolaboratif lintas OPD; keterlibatan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat dalam forum perencanaan meningkat; dokumen perencanaan tematik diterbitkan tahunan.
7. Ketiadaan Pendekatan Keadilan dalam Belanja Publik APBD belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keberpihakan terhadap kelompok rentan dan wilayah tertinggal; distribusi belanja masih terpusat di pusat pemerintahan.	Merancang kebijakan anggaran berbasis keadilan sosial dan spasial, dengan menetapkan prioritas belanja bagi wilayah pinggiran, desa adat, serta kelompok miskin dan marginal.	Penurunan ketimpangan distribusi belanja antar wilayah (indikator Gini fiskal); peningkatan indeks kepuasan masyarakat; meningkatnya alokasi belanja afirmatif untuk wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Bab ini telah menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika dan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan selama periode 2021–2024. Dari uraian yang disampaikan, tampak bahwa Pemerintah Daerah telah menunjukkan upaya konsisten dalam mempertahankan stabilitas fiskal, meningkatkan belanja pembangunan, serta menjaga integritas tata kelola keuangan. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil diraih secara berturut-turut menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas keuangan dan transparansi administratif. Namun di balik keberhasilan administratif tersebut, terdapat tantangan substantif yang memerlukan perhatian serius untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.

Kinerja fiskal Kabupaten Nunukan masih menghadapi tekanan pada aspek kemandirian keuangan, efektivitas belanja, serta ketergantungan terhadap SiLPA sebagai penyeimbang defisit anggaran. Belanja operasional yang tinggi, dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan, dan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang perlu direspons secara strategis. Selain itu, dalam konteks wilayah perbatasan dan kepulauan, desain APBD perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berbasis wilayah, dengan mempertimbangkan disparitas akses, biaya logistik tinggi, serta urgensi pelayanan dasar di daerah terpencil.

Data dan analisis yang disajikan menunjukkan pula adanya langkah-langkah korektif yang telah mulai dilakukan, seperti peningkatan belanja modal pada tahun 2023–2024, integrasi SIPD dalam pengelolaan anggaran, serta upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui reformasi retribusi dan penguatan peran BUMD. Namun, tantangan tidak hanya terletak pada kebijakan fiskal, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembangunan secara sinergis dan berbasis hasil.

Dalam kerangka RPJMD 2025–2029 yang akan datang, pengelolaan APBD perlu dilandaskan pada prinsip-prinsip keberlanjutan fiskal, keadilan wilayah, dan efektivitas belanja publik. Pemerintah Kabupaten Nunukan dituntut untuk tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan. Transformasi dari pengelolaan fiskal administratif menuju tata kelola fiskal berbasis outcome harus menjadi orientasi utama.

Implikasi strategis dari seluruh analisis ini mengarah pada kebutuhan mendesak akan reformasi kelembagaan fiskal daerah. Ini meliputi optimalisasi potensi PAD secara terukur, efisiensi belanja rutin yang selektif, serta eksplorasi model pembiayaan alternatif yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk membangun sistem perencanaan-penganggaran yang lebih adaptif, digital, dan responsif terhadap perubahan konteks, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Akhirnya, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya tugas teknokratik semata, tetapi juga praksis politik dan etik yang harus berpihak kepada kelompok paling rentan. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, pengelolaan APBD adalah instrumen strategis untuk membangun kohesi sosial, pemerataan pembangunan, dan pengakuan atas kompleksitas geografis serta keragaman budaya. Oleh karena itu, setiap strategi fiskal yang dikembangkan harus mengakar pada kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan spasial dan sosial sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan ke depan.

BAB IV. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021- 2026

4.1. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan merupakan ukuran-ukuran agregat yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum pembangunan suatu daerah secara komprehensif. Indikator ini tidak hanya mengukur hasil spesifik pada sektor atau program tertentu, tetapi memberikan gambaran besar tentang kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kapasitas sumber daya manusia suatu wilayah. Karena sifatnya yang menyeluruh, indikator makro juga berfungsi sebagai alat evaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah daerah sekaligus mengukur kontribusi suatu daerah terhadap capaian pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Kabupaten Nunukan menetapkan empat indikator makro utama dalam perencanaan pembangunannya, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Keempat indikator ini dipilih karena mewakili tiga dimensi fundamental pembangunan yang selaras dengan standar global dan nasional, yaitu dimensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, pengangguran), dimensi kesejahteraan sosial (kemiskinan), dan dimensi kualitas hidup masyarakat (IPM). Dengan demikian, capaian terhadap indikator-indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi internal Kabupaten Nunukan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana daerah ini berkontribusi terhadap sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 3. Target Indikator Makro Kabupaten Nunukan dalam RPJMD 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	INDIKATOR MAKRO									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,96	Persen	4,12	4,65	5,47	5,93	6,48	6,99	6,99
2	Tingkat kemiskinan	6,36	Persen	6,06	5,89	5,72	5,55	5,38	5,21	5,21
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,79	Indeks	66,88	67,98	69,1	70,24	71,4	72,58	72,58
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,14	Persen	4,2	4,05	3,79	3,49	3,21	2,95	2,95

Jika dilihat dari target yang ditetapkan, proyeksi pembangunan Nunukan cukup ambisius, namun masih berada dalam kerangka rasional yang mengikuti tren nasional dan regional. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, dari kondisi awal yang mengalami kontraksi -0,96% akibat dampak pandemi COVID-19, ditargetkan tumbuh secara gradual hingga mencapai 6,99% pada akhir periode RPJMD. Target ini cukup sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5-7%, menunjukkan upaya daerah untuk bangkit dan mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun dari 6,36% di awal periode menjadi 5,21% pada akhir periode. Meski penurunan ini terbilang moderat, capaian tersebut berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan kemiskinan nasional, mengingat Nunukan merupakan daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis, keterisolasian, serta karakter sosial ekonomi yang khas. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan ditargetkan dari 65,79 menjadi 72,58. Ini menunjukkan tekad daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang secara agregat akan memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung capaian IPM provinsi dan nasional. Perlu dicatat, IPM Nunukan saat ini masih berada di

bawah rata-rata nasional, sehingga percepatan peningkatan menjadi kebutuhan strategis.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menurun secara progresif dari 4,14% menjadi 2,95% dalam kurun waktu enam tahun. Tren ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan investasi, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta perbaikan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan, sejalan dengan prioritas pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Namun, perlu dicermati bahwa proyeksi ambisius ini memerlukan konsistensi kebijakan, dukungan investasi, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem data statistik yang akurat dan terintegrasi. Tanpa itu, terdapat risiko ketidaktercapaian target, terutama mengingat Nunukan masih menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta karakter sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, evaluasi rutin capaian indikator makro menjadi penting untuk memastikan intervensi kebijakan dapat disesuaikan secara tepat waktu dan berbasis bukti.

Berikut adalah capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Nunukan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang cenderung fluktuatif dengan ketimpangan antar indikator. Secara umum, meskipun ada tren perbaikan di beberapa aspek, namun secara keseluruhan capaian tersebut belum sepenuhnya optimal dan menunjukkan bahwa percepatan pembangunan masih menghadapi tantangan struktural yang cukup besar. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi yang lebih kuat dan terarah, maka potensi Kabupaten Nunukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan relatif terhadap daerah lain, khususnya di tingkat provinsi maupun nasional, masih terbatas.

Tabel 4. Realisasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Nunukan dalam RPJMD 2021-2026

No	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tiap Tahun				Persentase Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,04	5,24	4,16	4,28	98,1%	112,7%	76,1%	72,2%
2	Tingkat kemiskinan	6,79	6,13	5,53	5,73	88,0%	95,9%	103,3%	96,8%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,46	67,16	68,43	69,27	99,4%	98,8%	99,0%	98,6%
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,24	2,71	2,69	2,71	99,0%	133,1%	129,0%	122,3%

Laju pertumbuhan ekonomi Nunukan dalam empat tahun terakhir menunjukkan ketidakkonsistenan dan cenderung belum stabil. Setelah mengalami pertumbuhan 4,04% pada 2021 (98,10% dari target), ekonomi sempat tumbuh signifikan di 2022 mencapai 5,24% (112,70% dari target). Namun, capaian ini tidak berlanjut di tahun berikutnya, di mana pertumbuhan ekonomi turun ke 4,16% pada 2023 (76,10% dari target) dan stagnan di 4,28% pada 2024 (72,20% dari target). Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Nunukan masih rentan terhadap faktor eksternal seperti harga komoditas, distribusi logistik, dan dinamika investasi.

Menurut teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti produktivitas, inovasi, dan investasi sektor produktif. Lemahnya konsistensi pertumbuhan Nunukan mengindikasikan perlunya perbaikan fundamental, terutama dalam pengembangan sektor unggulan, infrastruktur konektivitas, serta iklim investasi. Jika ketergantungan terhadap sektor primer tradisional tidak segera diimbangi dengan diversifikasi ekonomi, sulit bagi Nunukan untuk mencapai target akhir RPJMD, apalagi mengejar ketertinggalan regional.

Tingkat kemiskinan Nunukan mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan membaik. Dari 6,79% di 2021, angka kemiskinan turun menjadi 6,13% di 2022 dan mencapai titik terendah di 5,53% pada 2023. Namun, angka ini kembali naik menjadi 5,73% di 2024, membuat capaian terhadap target turun menjadi 96,80%. Penurunan kemiskinan yang sempat cukup signifikan menunjukkan dampak positif

program pembangunan dan intervensi sosial, namun kenaikan di 2024 mengindikasikan adanya ketidakstabilan, yang kemungkinan disebabkan oleh ketimpangan wilayah, terbatasnya lapangan kerja produktif, serta tekanan harga kebutuhan pokok.

Dari perspektif teori pembangunan berbasis kesejahteraan (Amartya Sen), pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada akses terhadap layanan dasar, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan. Fakta bahwa kemiskinan di Nunukan cenderung fluktuatif menunjukkan bahwa aspek-aspek struktural seperti aksesibilitas wilayah terpencil, kualitas pendidikan, dan peluang ekonomi belum sepenuhnya teratasi. Jika pola ini tidak diubah, target penurunan kemiskinan yang lebih ambisius sulit dicapai secara berkelanjutan.

Capaian IPM Nunukan relatif konsisten mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target. Pada 2021, IPM berada di angka 66,46 atau 99,40% dari target, meningkat menjadi 67,16 (98,80%) di 2022, kemudian 68,43 (99,00%) di 2023, dan 69,27 (98,60%) di 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, meskipun laju perbaikannya masih relatif lambat.

IPM sebagai indikator agregat sering disebut sebagai cerminan capaian pembangunan manusia secara komprehensif. Menurut konsep UNDP, peningkatan IPM idealnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks Nunukan, meskipun trennya positif, tetapi masih ada gap signifikan dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, sehingga diperlukan percepatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat di daerah ini. Perhatian khusus perlu diberikan pada daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang akses terhadap layanan dasar masih terbatas.

Capaian TPT Nunukan tergolong baik dan menunjukkan tren perbaikan signifikan. Pada 2021, tingkat pengangguran berada di 4,24% (99,00% dari target), turun drastis menjadi 2,71% di 2022 (133,10%), dan relatif

stabil di angka 2,69% dan 2,71% pada 2023 dan 2024, dengan capaian masing-masing 129,00% dan 122,30%. Penurunan TPT yang cukup drastis ini dapat menjadi sinyal positif bahwa pasar tenaga kerja di Nunukan mulai bergerak, meskipun perlu dikaji lebih lanjut apakah penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan lapangan kerja produktif atau sekadar pergeseran ke sektor informal dan tidak produktif.

Penurunan TPT harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar dampaknya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, selain menjaga tren penurunan TPT, Pemkab Nunukan perlu memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan layak (decent jobs) yang memberikan perlindungan dan pendapatan memadai.

Secara umum, capaian indikator makro Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya perbaikan di beberapa aspek, terutama dalam pengurangan pengangguran dan peningkatan IPM. Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, serta fluktuasi angka kemiskinan, menunjukkan bahwa fondasi pembangunan daerah ini masih rentan dan membutuhkan perbaikan struktural. Dengan capaian seperti ini, peluang Nunukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masih terbuka, namun memerlukan intervensi yang lebih terarah, konsisten, dan berbasis data.

Tabel 5. Predikat Kinerja Indikator Makro Pembangunan 2021-2024

No	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Persentase Capaian tahun Ke				Pencapaian Kinerja Rata-Rata	Prediket Kinerja Tahun ke:				Predikat Kinerja Rata-rata Indikator
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	98,1%	112,7%	76,1%	72,2%	89,78%	ST	ST	T	S	T
2	Tingkat kemiskinan	88,0%	95,9%	103,3%	96,8%	96,00%	T	ST	ST	ST	ST
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,4%	98,8%	99,0%	98,6%	98,95%	ST	ST	ST	ST	ST
4	Tingkat pengangguran terbuka	99,0%	133,1%	129,0%	122,3%	120,85%	ST	ST	ST	ST	ST
Kinerja Rata-Rata/ Prediket Rata-rata		96,13%	110,13%	101,85%	97,48%	110,39%	ST	ST	ST	ST	ST

Keterangan:

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S	= Sedang	(66% ≤ 75%)
R	= Rendah	(51% ≤ 65%)
SR	= Sangat Rendah	(≤ 50%)

Hasil analisis pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah kabupaten Nunukan 2021-2024 sebagaimana tabel 4.3, secara rata-rata pencapaian seluruh indikator makro menunjukkan kinerja dengan predikat **sangat tinggi**, dengan rata-rata pencapaian akhir periode RPJMD (2024) adalah 97,48%. Jika dilihat dari pencapaian masing-masing indikator makro, menunjukkan 3 indikator yaitu, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kinerja dengan predikat **sangat tinggi**. Sementara untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja dengan prediket kinerja **tinggi**.

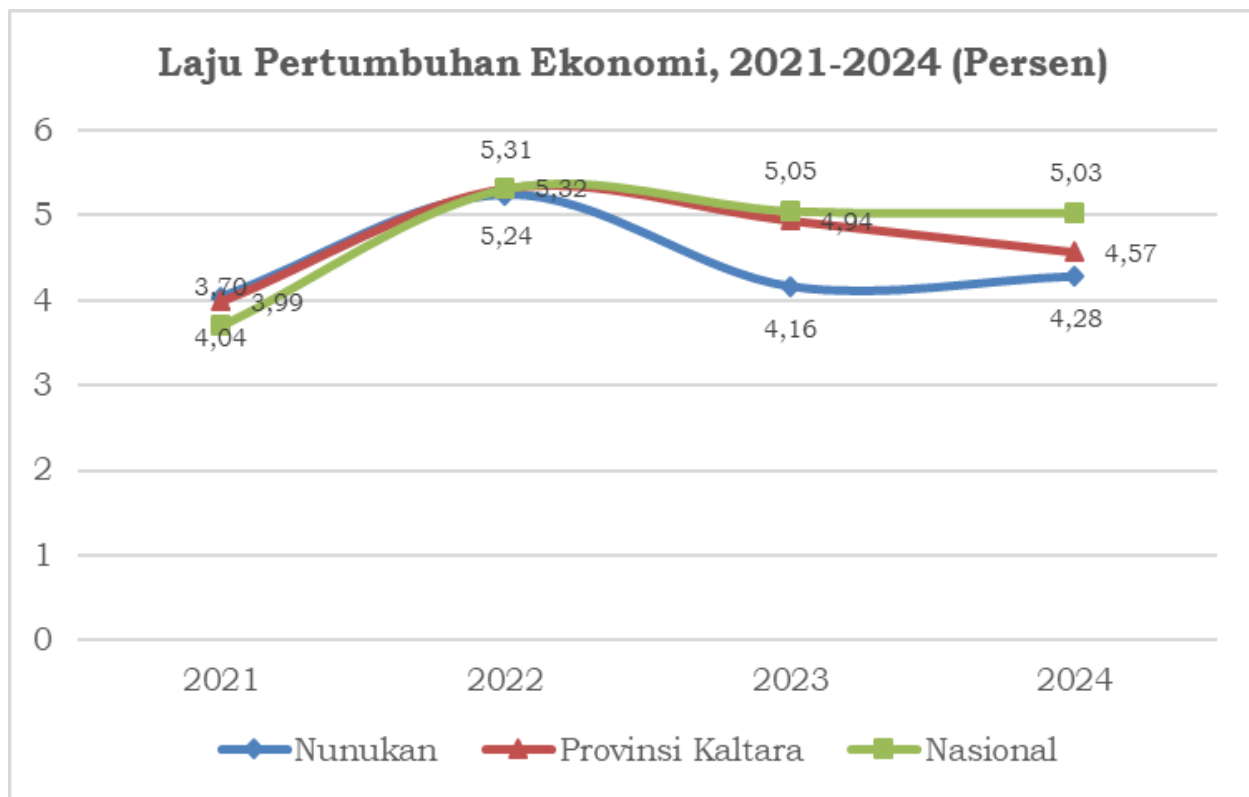
Diperlukan sinergi antara pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, serta penguatan infrastruktur konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa itu, ketertinggalan struktural, terutama di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial, sulit untuk segera teratasi. Dengan kata lain, percepatan pembangunan di Nunukan harus mengedepankan prinsip inklusif, berkeadilan, dan berbasis pemberdayaan, agar indikator makro tidak hanya membaik secara statistik, tetapi juga terasa nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kinerja makro pembangunan telah cukup berhasil ditandai dengan trend perkembangan yang positif hampir disemua aspek. Akan tetapi dilihat dari kontribusi Nunukan terhadap pencapaian kinerja pembangunan makro provinsi dan nasional masih tergolong rendah. Seluruh indikator makro pembangunan tersebut berada dibawah pencapaian pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karenanya diperlukan sinergisitas pembangunan yang berorientasi pada pencapaian kinerja makro antar kabupaten, provinsi dan nasional. Berikut ini adalah analisis perbandingan capaian Makro Nunukan, Provinsi dan Nasional.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Utara maupun tingkat nasional. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Nunukan tercatat sebesar 4,04%, sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Kaltara (3,99%) dan nasional (3,70%). Namun, pada tahun 2022, meskipun pertumbuhan ekonomi Nunukan meningkat signifikan menjadi 5,24%, angka ini tetap lebih rendah dibanding provinsi (5,32%) dan nasional (5,31%). Tren ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Nunukan menurun menjadi 4,16%, tertinggal cukup jauh dari Provinsi Kaltara (4,94%) dan nasional (5,05%). Di tahun 2024, meskipun terjadi sedikit peningkatan menjadi 4,28%, capaian Nunukan tetap berada di bawah provinsi (4,57%) dan nasional (5,03%).

Gambar 29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-2024



Rendahnya kinerja ekonomi Nunukan jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi tantangan besar, mengingat posisi geografis Nunukan yang berada di wilayah perbatasan dengan topografi yang sulit dijangkau. Kedua, struktur ekonomi Nunukan masih sangat bergantung pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi cuaca, harga komoditas global, dan isu keberlanjutan lingkungan. Ketiga, kurang berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa modern menyebabkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan relatif rendah. Keempat, kualitas sumber daya manusia di Nunukan yang masih terbatas dalam hal pendidikan dan keterampilan juga berdampak pada rendahnya produktivitas. Selain itu, akses terhadap investasi dan pembiayaan usaha juga masih minim karena keterbatasan pasar, infrastruktur, dan risiko investasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Terakhir, sebagai daerah perbatasan, kondisi ekonomi Nunukan sangat dipengaruhi oleh kebijakan

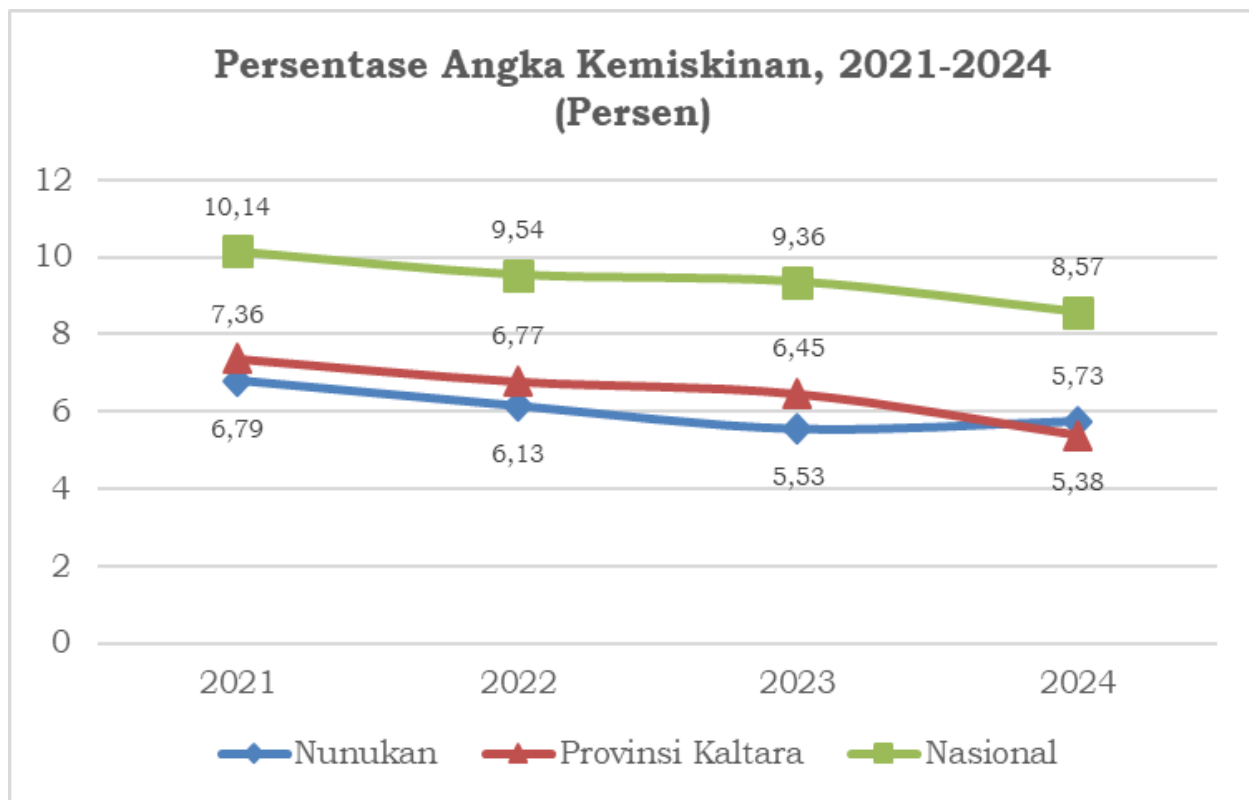
pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pengelolaan perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Nunukan menunjukkan perlunya strategi penguatan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Persentase Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Nunukan tercatat sebesar 6,79% dan mengalami penurunan berturut-turut menjadi 6,13% di tahun 2022 serta 5,53% di tahun 2023. Angka kemiskinan tahun 2023 menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan terbaik dan juga melampaui target atau 103,3 persen dari yang ditetapkan RPJMD Nunukan. Namun, pada tahun 2024, angka ini kembali naik menjadi 5,73%. Meskipun mengalami kenaikan, tingkat kemiskinan di Nunukan selama tiga tahun berturut-turut tetap berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, tingkat kemiskinan juga menurun dari 7,36% pada tahun 2021 menjadi 5,38% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 10,14% pada 2021 menjadi 8,57% pada 2024. Artinya, selama tiga tahun pertama, capaian Nunukan lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional, tetapi pada tahun 2024 posisinya sedikit memburuk dan berada di atas rata-rata provinsi meskipun masih jauh dibawah nasional.

Gambar 30. Persentase Angka Kemiskinan Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-224



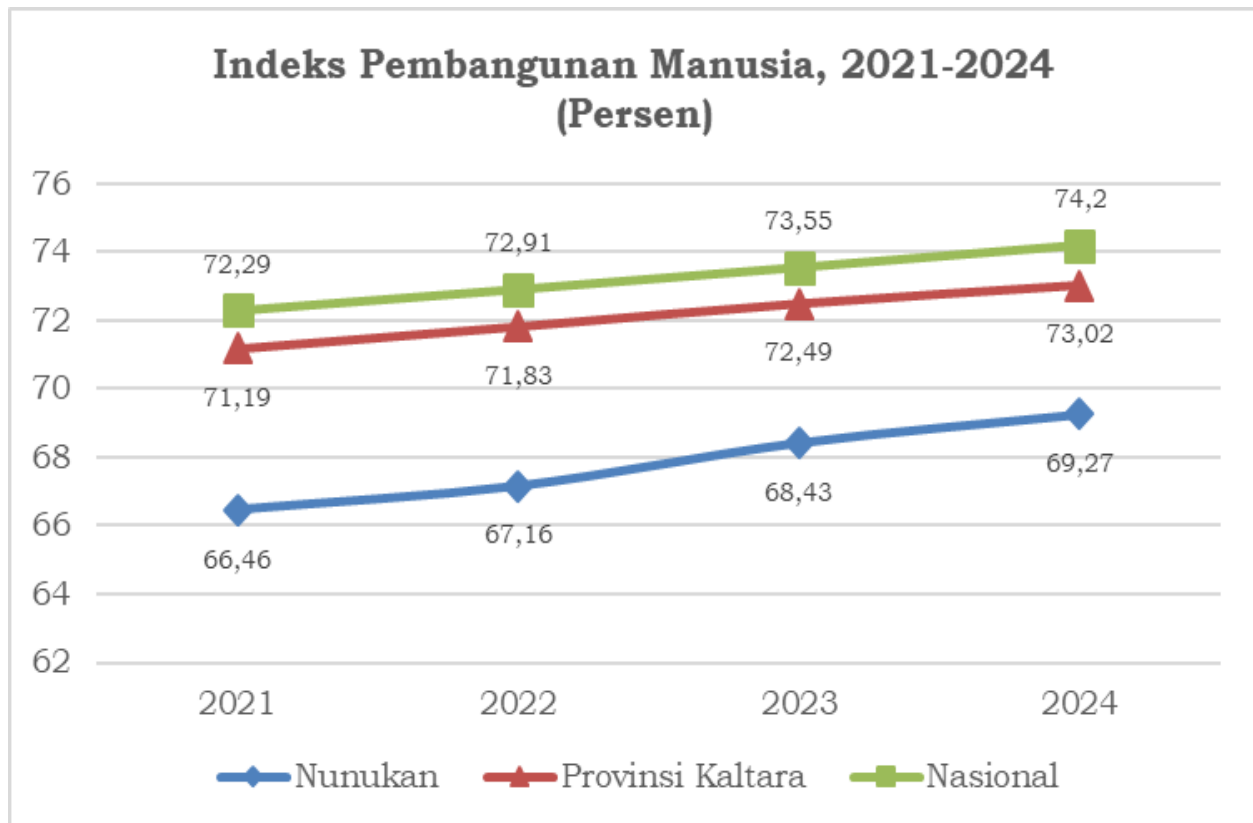
Beberapa faktor turut memengaruhi dinamika tingkat kemiskinan di Nunukan. Pertama, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi tantangan tersendiri. Kedua, struktur ekonomi Nunukan yang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perikanan membuat masyarakat sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, musim panen, serta kondisi alam. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja formal dan dominasi sektor informal menyebabkan pendapatan masyarakat kurang stabil dan rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, program bantuan sosial yang telah digulirkan oleh pemerintah belum menjangkau seluruh kelompok rentan secara merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Faktor lain yang turut berperan adalah posisi geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan, yang sangat terpengaruh oleh dinamika ekonomi dan perdagangan lintas negara, terutama dengan Malaysia.

Secara keseluruhan, capaian penurunan kemiskinan di Nunukan merupakan hasil positif dari berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang telah berjalan. Namun, kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya stabil. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengurangan kemiskinan dengan fokus pada peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pemerataan distribusi bantuan sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan Nunukan menunjukkan peningkatan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IPM Nunukan berada pada angka 66,46 dan terus mengalami kenaikan menjadi 67,16 pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 68,43 pada tahun 2023, dan mencapai 69,27 di tahun 2024. Bahkan pertumbuhan nilai IPM Nunukan lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan IPM Nunukan dari 2021-2024 mencapai 4,23 persen. Sedangkan Provinsi pertumbuhan IPM 2021-2024 sebesar 2,57 persen, dan IPM Nasional tumbuh sebesar 2,64 persen dari 2021-2024.

Gambar 31. Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-224



Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, meskipun menunjukkan kemajuan, IPM Nunukan masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara maupun IPM nasional. Pada periode yang sama, IPM Provinsi Kaltara meningkat dari 71,19 menjadi 73,02, sementara IPM nasional tumbuh dari 72,29 menjadi 74,20. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan IPM Nunukan relatif stabil, kesenjangan dengan tingkat provinsi dan nasional masih cukup lebar.

Rendahnya IPM Nunukan dibandingkan dengan provinsi dan nasional dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, berdampak pada rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kedua, akses terhadap layanan kesehatan yang belum merata menyebabkan capaian

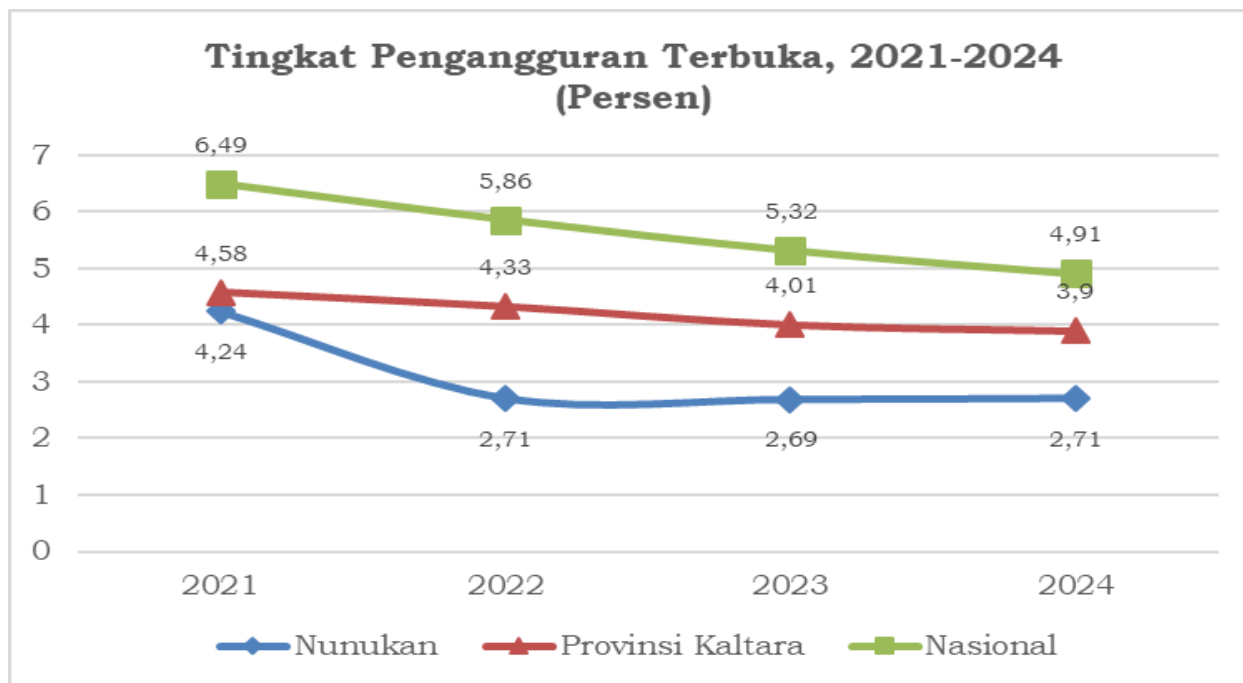
angka harapan hidup tidak optimal. Masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang kesulitan memperoleh pelayanan medis yang memadai karena keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Ketiga, standar hidup masyarakat Nunukan yang sebagian besar menggantungkan diri pada sektor informal dan ekonomi primer berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita dan produktivitas tenaga kerja. Keempat, faktor geografis sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menjadikan tantangan logistik dan pemerataan pembangunan semakin kompleks.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM Nunukan selama empat tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang positif, namun masih diperlukan upaya yang lebih terfokus untuk mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal. Selain itu, penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah juga penting guna memastikan bahwa pembangunan manusia di Nunukan dapat tumbuh lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, meskipun mengalami stagnasi pada tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPT Nunukan berada di angka 4,24%, kemudian menurun drastis menjadi 2,71% pada 2022, dan mencapai titik terendah sebesar 2,69% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut kembali naik sedikit ke 2,71%. Secara umum, TPT Nunukan selama tiga tahun terakhir berada di bawah angka provinsi maupun nasional, menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerah ini relatif rendah dan lebih stabil.

Gambar 32. Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 2021-224



Jika dibandingkan, Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan TPT dari 4,58% pada 2021 menjadi 3,9% pada 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka secara nasional juga menurun dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 4,91% pada tahun 2024. Dengan demikian, Nunukan secara konsisten mencatatkan TPT yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional selama empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya dinamika pasar tenaga kerja lokal yang relatif lebih aktif atau terserapnya tenaga kerja dalam berbagai sektor, terutama sektor informal dan sektor primer seperti pertanian, perdagangan kecil, serta jasa.

Namun, rendahnya tingkat pengangguran terbuka tidak serta-merta mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang ideal. Di daerah seperti Nunukan, angka pengangguran yang rendah seringkali disebabkan oleh tingginya proporsi pekerja informal atau sektor pekerjaan yang tidak mensyaratkan keahlian tinggi. Banyak penduduk yang bekerja di sektor-sektor subsisten yang tidak sepenuhnya produktif, namun tetap tercatat sebagai pekerja. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi juga membatasi mobilitas

tenaga kerja menuju sektor formal yang lebih menjanjikan. Dengan demikian, meskipun TPT Nunukan rendah, tantangan lain seperti kualitas pekerjaan, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja masih menjadi isu penting.

Secara keseluruhan, capaian TPT di Kabupaten Nunukan tergolong positif dan menunjukkan adanya stabilitas dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan keterampilan angkatan kerja, serta penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan pekerjaan berkualitas agar pengurangan pengangguran juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Pembangunan Daerah

Selain pencapaian pembangunan makro sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, pemerintah kabupaten Nunukan menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan 6 misi yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing
2	Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata

No	Misi	Tujuan
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
6	Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram	Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram

Sumber: Dok RPJMD 2021-2026 Kabupaten Nunukan

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan dirumuskan sebagai bagian dari upaya untuk mengukur tingkat pencapaian misi pembangunan yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut diukur melalui enam indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Infrastruktur, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Rasa Aman. Keenam indikator tersebut merupakan indikator dampak (impact) yang digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Nunukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.

Selain itu, indikator-indikator ini juga dirancang agar sejalan dengan kerangka pembangunan regional dan nasional, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah tidak berjalan terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang lebih luas. Penetapan indikator tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan prioritas pembangunan yang berkembang di Kabupaten Nunukan.

Secara umum, tabel dibawah ini menjelaskan proyeksi indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2021–2026 menunjukkan arah pembangunan yang progresif dan terukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas

pelayanan publik dan lingkungan hidup. Secara keseluruhan, proyeksi indikator kinerja utama Kabupaten Nunukan 2021–2024 menunjukkan arah pembangunan yang positif, meskipun terdapat beberapa indikator yang peningkatannya masih tergolong moderat dan memerlukan perhatian khusus, seperti Indeks Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, serta adaptif terhadap tantangan lokal, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7. Target Proyeksi Indikator Kinerja Utama Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024

No	Indikator Tujuan Pembangunan	Satuan	Kondisi 2020	Target Capaian Tiap Tahun			
				2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	65,79	66,88	67,98	69,10	70,24
2	Indeks infrastruktur	Persen	30,18	30,56	31,74	32,30	32,88
3	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	-0,96	4,12	4,65	5,47	5,93
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	B	B
5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,15	78,01	78,22	78,42	78,63
6	Indeks Rasa Aman	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD Nunukan 2021-2026,

Keterangan:

n.a: data tidak ditemukan

Data capaian indikator utama pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi di setiap indikator. Beberapa indikator mengalami capaian yang relatif baik, namun terdapat pula indikator yang menunjukkan deviasi signifikan dari target yang telah ditetapkan. Data capaian indikator utama pembangunan Kabupaten Nunukan

menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa capaian yang positif, seperti perbaikan Indeks Reformasi Birokrasi dan peningkatan IPM, beberapa indikator masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Fluktuasi capaian IKLH juga menjadi peringatan akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, mempercepat infrastruktur, mendorong diversifikasi ekonomi, serta memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 8. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024

No		Realisasi Capaian Tiap Tahun				Persentase Capaian terhadap target			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,46	67,16	68,43	69,27	99,4%	98,8%	99,0%	98,6%
2	Indeks infrastruktur	22,11	23,16	28,35	29,98	72,3%	73,0%	87,8%	91,2%
3	Laju pertumbuhan ekonomi	4,04	5,24	4,16	4,28	98,1%	112,7%	76,1%	72,2%
4	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	BB	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,73	80,07	78,62	80,61	107,3%	102,4%	100,3%	102,5%
6	Indeks Rasa Aman	n.a	84,78	82,15	96,84	n.a	84,8%	82,2%	96,8%

Sumber: LKPJ dan Evaluasi RKPD 2024, diolah.

Secara umum, merujuk dari data diatas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Dari enam IKU yang ditetapkan, terdapat dua indikator (33,3%) yang telah melampaui target, tiga indikator (50%) yang realisasinya hampir mencapai target (di atas 90%), dan satu indikator (16,7%) yang capaiannya masih berada pada level 72,2%.

Keenam indikator tersebut terdiri dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah melampaui target sejak awal periode RPJMD, tiga indikator lainnya yaitu Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), Indeks Infrastruktur, dan Indeks Rasa Aman yang capaian realisasinya berada di atas 90%, serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang realisasinya baru mencapai 72,2% dari target yang ditetapkan, meskipun sempat melampaui target pada tahun 2022.

Capaian IRB dan IKLH menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target RPJMD 2021–2024. Nilai IRB tahun 2024 mencapai kategori **BB**, melampaui target kategori **B**, atau setara dengan capaian 100% dari target. Sementara itu, nilai IKLH tahun 2024 mencapai **80,61** atau **102,5%** dari target. Tiga indikator lainnya, yaitu IPM, Indeks Infrastruktur, dan Indeks Rasa Aman juga menunjukkan tren positif. Capaian IPM terus meningkat setiap tahun dan mencapai **69,27 poin** atau **98,6%** dari target tahun 2024. Indeks Infrastruktur juga menunjukkan tren peningkatan meskipun belum sepenuhnya mencapai target, dengan capaian **29,98%** atau **91,2%** dari target tahun 2024. Indeks Rasa Aman bersifat fluktuatif namun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan capaian tahun 2024 sebesar **96,84%** dari target maksimal 100%.

Tabel 9. Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024

No	Indikator IKU	Persentase Capaian Kinerja IKU Tahun Ke				Rata-Rata Capaian IKU	Prediket Capaian IKU Tahun Ke:				Rata Prediket Capaian IKU
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,4%	98,8%	99,0%	98,6%	98,95%	ST	ST	ST	ST	ST
2	Indeks infrastruktur	72,3%	73,0%	87,8%	91,2%	81,07%	S	S	T	ST	T
3	Laju pertumbuhan ekonomi	98,1%	112,7%	76,1%	72,2%	89,74%	ST	ST	S	S	T
4	Indeks Reformasi Birokrasi	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	n.a	ST	ST	ST	ST
5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	107,3%	102,4%	100,3%	102,5%	103,12%	ST	ST	ST	ST	ST
6	Indeks Rasa Aman	0,0%	84,8%	82,2%	96,8%	87,92%	n.a	T	T	ST	T
Rata-rata pencapaian IKU dan Predikat Cpaian IKU 2021-2024		62,9%	95,3%	90,9%	93,6%	101,3%	ST	ST	ST	ST	ST

Keterangan: (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Berdasarkan analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan tahun 2021–2024, terlihat bahwa secara umum capaian kinerja menunjukkan tren yang positif dan stabil. Rata-rata capaian kumulatif seluruh indikator selama empat tahun mencapai 93,6 persen, dengan predikat **“Sangat Tinggi”**. Dari enam indikator yang diukur, empat di antaranya mencapai kategori **“Sangat Tinggi”**, yakni Indeks Pembangunan Manusia (98,95%), Indeks Reformasi Birokrasi (100%), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (103,12%), dan Indeks Rasa Aman (87,92%). Sementara dua indikator lainnya yaitu Indeks Infrastruktur (81,07%) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (89,74%) berada pada kategori **“Tinggi”**, namun masih di bawah target yang ditetapkan.

Jika ditinjau berdasarkan capaian tahunan, tahun 2021 merupakan tahun dengan capaian rata-rata terendah yaitu hanya 62,9 persen. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data pada dua indikator penting, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Rasa Aman, yang tercatat nol persen. Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024, capaian IKU mengalami peningkatan

signifikan dan stabil pada level sangat tinggi, masing-masing sebesar 95,3 persen di tahun 2022, 90,9 persen di tahun 2023, dan 93,6 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengukuran dan pelaporan, serta peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Temuan penting dari analisis ini adalah bahwa meskipun sebagian besar indikator menunjukkan kinerja sangat baik, masih terdapat tantangan pada aspek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Kinerja yang belum optimal pada kedua sektor ini mengindikasikan perlunya evaluasi program dan kebijakan secara menyeluruh, serta peningkatan efektivitas intervensi pembangunan. Selain itu, upaya penguatan sistem pelaporan sejak awal periode perencanaan perlu ditingkatkan agar seluruh indikator dapat dipantau sejak tahun pertama. Di sisi lain, capaian tinggi pada indikator IPM, reformasi birokrasi, dan kualitas lingkungan hidup perlu dijaga dan ditingkatkan melalui konsistensi kebijakan dan tata kelola yang baik. Penguatan koordinasi antar sektor, terutama dalam hal keamanan sosial, juga menjadi kunci untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator IKU Tujuan pembangunan Nunukan 2021-2024:

- a) **IKU 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 tercatat sebesar 69,27, masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh lemahnya kinerja pada beberapa indikator utama pembangunan manusia. Pada dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah hanya mencapai 8,39 tahun, sementara Harapan Lama Sekolah stagnan di angka 12,69 tahun, menunjukkan rendahnya akses dan kualitas pendidikan di daerah ini. Selain itu, tidak tersedianya data pengeluaran per kapita selama empat tahun terakhir menyulitkan pengukuran daya beli masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam

dimensi standar hidup layak. Tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren fluktuatif, dengan kenaikan dari 5,53% pada 2023 menjadi 5,73% pada 2024, menandakan belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Penurunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 78,68 menjadi 73,85 turut memperparah kondisi ketimpangan gender dan terbatasnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Sementara itu, meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat menjadi 73,13 tahun dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap rendah di angka 2,71%, dua indikator ini belum mampu mengangkat IPM secara keseluruhan karena sektor pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masih tertinggal. Sintesis dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Kabupaten Nunukan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Fokus utama perlu diarahkan pada penguatan pendidikan, percepatan penurunan kemiskinan, penyediaan data statistik yang akurat (terutama pengeluaran per kapita), serta pengarusutamaan gender dalam seluruh program pembangunan. Tanpa intervensi strategis di sektor-sektor ini, sulit bagi Nunukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia dibandingkan daerah lain di tingkat provinsi maupun nasional.

- b) **IKU 2 Indeks Infrastruktur:** Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan ketersediaan dan kualitas prasarana dasar suatu wilayah. Indeks ini dihitung berdasarkan gabungan beberapa indikator utama, antara lain tingkat kemantapan jalan, aksesibilitas wilayah, rasio luas daerah irigasi, persentase kawasan permukiman rawan banjir, konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, serta penyeberangan, akses air minum, sanitasi rumah tangga, kelayakan drainase, pengendalian genangan, kondisi rumah tidak layak huni, dan tingkat permukiman kumuh. Secara umum, Indeks Infrastruktur mencerminkan sejauh mana daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana penunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Nunukan selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan 2021–2026. Pada awal periode RPJMD (tahun 2020), capaian Indeks Infrastruktur sebesar 30,18 persen. Namun, pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 22,11 persen, jauh dibawah target sebesar 30,56 persen. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran, sehingga sebagian besar belanja infrastruktur dialihkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Memasuki tahun 2022, Indeks Infrastruktur meningkat menjadi 23,16 persen, meskipun masih di bawah target 31,74 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan capaian sebesar 28,35 persen dari target 32,30 persen. Pada tahun 2024, realisasi Indeks Infrastruktur kembali mengalami peningkatan menjadi 29,98 persen, mendekati target sebesar 32,88 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026, capaian tahun 2024 sudah mencapai sekitar 89 persen dari target yang ditetapkan.

Peningkatan capaian Indeks Infrastruktur yang signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 5,19 persen atau tumbuh 22,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan sarana prasarana dasar, meskipun tantangan pengembangan infrastruktur, terutama untuk memenuhi target jangka menengah, masih cukup besar. Optimalisasi anggaran dan sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan.

- c) **IKU 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE):** LPE merupakan indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Baseline awal RPJMD tahun 2020 adalah -0,96%, menunjukkan

kontraksi ekonomi akibat pandemi. Target tahun 2024 adalah 5,93%, namun realisasi hanya mencapai 4,16%, atau 72,2% dari target. Meskipun capaian ini belum memenuhi target, peningkatan dari kondisi kontraksi menjadi pertumbuhan positif menunjukkan adanya pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Nunukan bahkan mencapai 5,24%, atau melampaui target yang ditetapkan tahun tersebut. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan pandemi, melalui program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, menunjukkan dampak yang cukup positif, meskipun stabilitas jangka panjang tetap menjadi perhatian utama.

- d) **IKU 4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB):** IRB mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah daerah. Berdasarkan kategori nasional, capaian IRB Kabupaten Nunukan meningkat dari kategori CC (baseline) menjadi BB pada tahun 2024, melampaui target RPJMD yaitu kategori B, atau setara dengan capaian 100%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi, akuntabilitas, serta orientasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- e) **IKU 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):** IKLH merupakan ukuran kualitas lingkungan berdasarkan komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan. IKLH Kabupaten Nunukan menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target sejak tahun pertama RPJMD. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 80,61, atau 102,5% dari target. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan nilai IKLH dari tahun 2021 sebesar 83,73 menjadi 80,61 pada tahun 2024, serta ketimpangan antar komponen penyusunnya.

Indeks Kualitas Air menjadi komponen terlemah, dengan nilai di bawah 60% akibat pencemaran sungai yang didominasi oleh aktivitas pertambangan, perkebunan, dan aktivitas masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengawasan kualitas air juga masih terbatas,

dengan hanya enam dari 51 sungai yang dipantau secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

- f) **IKU 6 Indeks Rasa Aman:** Indeks Rasa Aman mengukur tingkat persepsi dan kenyataan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Target tahun 2024 adalah 100 poin, namun realisasi mencapai 96,84 poin, atau 96,8% dari target. Meskipun belum mencapai target maksimal, capaian ini menunjukkan tingkat keamanan dan ketertiban yang cukup baik. Fluktuasi capaian Indeks Rasa Aman perlu dicermati sebagai bagian dari evaluasi untuk memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.

4.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

4.3.1. Tinjauan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Kabupaten Nunukan, sebagai salah satu daerah perbatasan strategis di Provinsi Kalimantan Utara, memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kompleksitas wilayah kepulauan, serta keterbatasan infrastruktur dasar menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, telah dirumuskan serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran yang lebih

operasional dan terukur untuk mengarahkan intervensi program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai penjabaran yang lebih operasional dari enam tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, yang secara konseptual berfungsi sebagai representasi dampak (impact) atas pencapaian misi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan merumuskan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan terukur. Penetapan sasaran pembangunan ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis hasil (result-based planning), di mana perumusan tujuan harus diikuti oleh sasaran yang lebih rinci sebagai jembatan antara kebijakan strategis dan implementasi program pembangunan (Kusek & Rist, 2004).

Gambar 33. Kerangka Logis Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026



Untuk memastikan pengukuran kinerja yang akuntabel, setiap sasaran pembangunan dilengkapi dengan indikator yang terukur. Secara keseluruhan, terdapat 29 indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Indikator-indikator ini ditetapkan sebagai Indikator

Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah pada level sasaran, yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan sekaligus sebagai parameter objektif untuk menilai sejauh mana tujuan dan misi pemerintah daerah telah diwujudkan.

Penetapan IKU ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen kinerja sektor publik, sebagaimana dikemukakan oleh Osborne & Gaebler (1992) dalam konsep *reinventing government*, yang menekankan pentingnya pemerintah berfokus pada hasil dan dampak, bukan sekadar pada proses administratif. Adapun rincian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2024

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
M1.T1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,88	67,98	69,1	70,24
S1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) - (Poin)	8,10	8,20	8,30	8,40
S2		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) - (Poin)	12,74	12,84	12,94	13,04
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup - (Poin)	71,37	71,4	71,42	71,45
S4	Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM	Pengeluaran per kapita - (Rp. Ribu)	1.327.122	1.382.748	1.438.374	1.494.001
S5		Tingkat kemiskinan - (Persen)	6,06	5,89	5,72	5,55
S6		Tingkat pengangguran terbuka - (Persen)	4,20	4,05	3,79	3,49
S7		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - (Indeks)	77,2	77,24	77,28	77,32
M2.T2	Indeks infrastruktur		30,56	31,74	32,3	32,88
S8	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan	Rasio konektivitas kabupaten - (Rasio)	42,93	51,43	53,54	55,64
S9		Indeks aksesibilitas - (Indeks)	1,11	1,27	1,43	1,59

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
S10	Infrastruktur Wilayah	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi - (Rasio)	20,00	26,67	40,00	53,33
S11	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Persentase luas kawasan pemukiman kumuh - (Persen)	1,09	1,07	1,04	1,00
M3.T3	Laju pertumbuhan ekonomi		4,12	4,65	5,47	5,93
S12	Meningkatnya kinerja sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian - (Persen)	5,97	6,5	7,32	7,78
S13	Meningkatnya kinerja sektor industri	Laju pertumbuhan industri pengolahan - (Persen)	2,16	2,83	2,71	2,61
S14	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan - (Persen)	-1,58	5,95	7,44	7,05
S15	Meningkatnya kinerja investasi di daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,189	1,249	1,311	1,377
S16	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara) - (Kunjangan)	12.988	14.641	15.436	16.277
M4.T4	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B
S17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	B	B	B	B
S18		Maturitas SPIP	3	3	3	3
S19		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,00	87,00	88,00
S20		Nilai Mandiri SPBE	t.a.d	1,8	2,00	2,3
S21	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	t.a.d	60,00	62,00	65,00
S22	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	t.a.d	B	B	B
M5.T5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		78,01	78,22	78,42	78,63
23	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	54,82	54,92	55,02	55,12
24		Indeks Kualitas Udara	92,1	92,21	92,32	92,43
25		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91,77	92,34	92,91	93,48
26		Penurunan emisi GRK: Total Emisi	5.118.529	5.058.782	5.000.753	4.944.372
		Emisi Bersih	1.901.582	1.879.385	1.857.827	1.836.881
		Total Sekuestrasi	3.216.947	3.179.396	3.142.926	3.107.491

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
M6.T6	Indeks Rasa Aman		100	100	100	100
27	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100
28	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,47	0,48	0,50
29	Menguatnya karakter kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	100	100	100	100

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan telah dirancang secara hierarkis dan terukur melalui struktur yang sistematis, mulai dari misi, tujuan, sasaran, hingga indikator sasaran pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Logical Framework Approach* (LFA), di mana capaian pembangunan dirumuskan secara berjenjang dari output hingga outcome, yang pada akhirnya berkontribusi pada dampak pembangunan. Tujuan pembangunan Kabupaten Nunukan dikelompokkan ke dalam enam aspek strategis, yaitu: (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, (2) Penguatan infrastruktur, (3) Pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, (4) Tata kelola pemerintahan yang baik, (5) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan (6) Kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Setiap tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih operasional dan terukur, yang selanjutnya dikaitkan dengan indikator kuantitatif sebagai tolok ukur kinerja. Contohnya, untuk tujuan peningkatan kualitas SDM, sasaran ditetapkan pada peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, dengan indikator seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, hingga pengeluaran per kapita dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, struktur ini menunjukkan adanya kesinambungan logis antara misi,

tujuan, sasaran, hingga indikator yang diharapkan dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, tujuan dari penetapan berbagai sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Nunukan periode 2021-2026 adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, kualitas tata kelola pemerintahan, kelestarian lingkungan hidup, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Penentuan target yang terukur setiap tahunnya menunjukkan adanya arah pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, dimana indikator-indikator yang dipilih saling mendukung pencapaian indikator kinerja utama tujuan (IKU Tujuan). Target-target tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menekankan aspek kualitas pembangunan manusia, pemerataan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Dengan adanya arah pembangunan yang komprehensif ini, diharapkan seluruh aspek pembangunan daerah dapat mengalami perbaikan secara signifikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan berdaya saing.

Secara umum, proyeksi target indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Nunukan tahun 2021–2024 tergolong moderat dan realistis, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati lebih dalam terkait konsistensi dan sinkronisasi dengan indikator kinerja pembangunan nasional dan provinsi, penyusunan target yang rasional yang didukung dengan data dasar yang memadai dan keterkaitan antar indikator tujuan, sasaran dan program prioritasnya. Berikut ini adalah uraian target indikator kinerja berdasarkan sasaran pembangunan dan indikator IKU sasaran daerah.

Sasaran pembangunan ke-1 yaitu Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang diukur melalui indikator kinerja sasaran adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam

periode 2021 hingga 2024, ARLS ditargetkan naik dari 8,10 tahun menjadi 8,40 tahun, sementara HLS meningkat dari 12,74 tahun menjadi 13,04 tahun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Perbaikan ini menjadi pondasi penguatan sumber daya manusia agar mampu berdaya saing serta mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran pembangunan ke-2, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, yang menitikberatkan pada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang mengalami peningkatan tipis namun stabil dari 71,37 tahun di 2021 menjadi 71,45 tahun di 2024. Peningkatan AHH menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelayanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, serta peningkatan gizi dan sanitasi masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan dapat hidup lebih lama dan lebih sehat.

Sasaran berikutnya adalah sasaran pembangunan ke-3 yaitu Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dan Kapasitas SDM yang merefleksikan aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diukur melalui beberapa indikator seperti pengeluaran per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Data target menunjukkan pengeluaran per kapita meningkat dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,49 juta, sementara kemiskinan menurun dari 6,06% menjadi 5,55% dan pengangguran menurun dari 4,2% ke 3,49%. Sedangkan IDG meningkat dari 77,2 ke 77,32 menunjukkan penguatan peran gender, mengindikasikan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan ke-4 adalah Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui indikator kinerja sasaran yaitu pembangunan infrastruktur dasar, seperti Rasio konektivitas yang ditargetkan meningkat dari 42,93 ke 55,64, indeks aksesibilitas naik dari 1,11 ke 1,59, dan luas irigasi

meningkat dari 20% ke 53,33%. Hal ini diharapkan dapat menunjukkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, membuka akses layanan publik, dan mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya wilayah tertinggal dan yang masih sulit diakses.

Dalam sasaran pembangunan ke-5 adalah Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Secara Optimal, pemerintah daerah Nunukan menargetkan penurunan luas kawasan permukiman kumuh dari 1,09% menjadi 1,00%. Penurunan ini sejalan dengan prioritas meningkatkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan nyaman bagi masyarakat. Fokus pada pengurangan kawasan kumuh juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga di wilayah urban maupun rural.

Sasaran pembangunan ke-6 adalah Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian dengan indikator laju pertumbuhan sektor pertanian. Meskipun secara indikator disebut pertumbuhan sektor pertanian, namun secara data yang digunakan adalah sektor usaha pertanian dalam PDRB yang meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan. Indikator kinerja laju pertumbuhan sektor pertanian ditarget meningkat dari 5,97% pada 2021 menjadi 7,78% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah dengan penguatan produktivitas, teknologi, dan akses pasar bagi petani.

Sasaran berikutnya adalah sasaran ke-7, yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Industri, khususnya pengolahan. Target dalam RPJMD untuk indikator kinerja sasaran laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dari 2,16% ke 2,61% sepanjang 2021-2024. Walaupun mengalami sedikit perlambatan di tahun terakhir, sektor industri tetap menjadi motor penggerak perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Sasaran ke-8 adalah Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan sektor perdagangan. Target RPJMD menunjukkan pemulihan signifikan dari -1,58% pada 2021 ke 7,05% di 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan berhasil bangkit dari kontraksi akibat pandemi menuju pertumbuhan yang positif, memberikan kontribusi penting dalam mendorong dinamika ekonomi lokal.

Sasaran pembangunan ke-9 adalah Meningkatnya Kinerja Investasi di Daerah dengan indikator kinerja Nilai realisasi investasi. Target untuk indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan dari Rp 1,189 miliar menjadi Rp 1,377 miliar dalam empat tahun. Sasaran ini menunjukkan upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penguatan promosi daerah, dan pengembangan potensi investasi, baik dari investor domestik maupun asing.

Sasaran pembangunan ke-10 adalah Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata dengan indikator kinerja adalah peningkatan kunjungan wisatawan dari 12.988 menjadi 16.277 kunjungan. Hal ini memperlihatkan sektor pariwisata mulai bangkit pasca-pandemi, didorong oleh promosi destinasi wisata lokal, pengembangan infrastruktur wisata, serta peningkatan event budaya dan festival daerah.

Untuk mendukung IKU Tujuan Reformasi Birokrasi ada 3 (tiga) sasaran pembangunan, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta sasaran meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada sasaran pembangunan ke-11 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah diwujudkan dengan stabilnya indikator kinerja nilai SAKIP pada kategori B dan Maturitas SPIP pada level 3, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari 85 menjadi 88 pada tahun 2024. Dari target ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan

perbaikan pelayanan publik dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

Sasaran berikutnya adalah sasaran ke-12 yaitu Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN yang ditargetkan meningkat signifikan dari tanpa data di 2021 ke 65 poin pada 2024. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur untuk mendukung pelayanan publik yang prima serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasaran ke-13 adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung tujuan pembangunan yaitu Reformasi Birokrasi. Indikator kinerja sasarannya adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang ditargetkan meningkat ke kategori B sejak 2022, hal ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel untuk mendorong pembangunan yang berdaya guna.

Sasaran ke-14 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim, yang diharapkan dapat berkontribusi atas peningkatan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Ada empat indikator sasaran yang mendukung IKU Tujuan tersebut, dimana target yang ditetapkan adalah peningkatan indeks kualitas air (IKA) dari 54,82 pada tahun 2021 menjadi 55,12 pada tahun 2024. Kemudian Indeks Kualitas Udara (IKU) ditargetkan meningkat dari 92,1 menjadi 92,43 pada tahun 2024. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) ditargetkan meningkat dari 91,77 menjadi 93,48 pada tahun 2024. Selain itu, indikator kinerja lainnya adalah penurunan emisi GRK dari 5,1 juta ton ke 4,9 juta ton. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan indikator IKLH dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Sasaran ke-15 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban dengan indikator kinerja persentase pelanggaran K3 yang tertangani. Dengan indikator sasaran tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang berkontribusi pada capaian tujuan yaitu indeks rasa aman, selain indeks ketahanan daerah, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Indikator Keamanan dan ketertiban masyarakat dijaga maksimal dengan target penanganan pelanggaran K3 yang konsisten 100% dari 2021 hingga 2024, menunjukkan fokus pada stabilitas sosial dan ketertiban umum sebagai landasan pembangunan daerah.

Sasaran ke-16 adalah Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana yang ditunjukkan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah. Target IKD dalam RPJMD diharapkan mengalami peningkatan dari 0,46 pada 2021 menjadi 0,50 pada 2024. Dengan indikator peningkatan IKD diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana baik dari aspek kelembagaan, infrastruktur, maupun partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Sasaran ke-17 adalah Menguatnya Karakter Kebangsaan yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat. Dalam target yang ditetapkan dalam RPJMD diharapkan dapat dipertahankan 100% dari tahun ke tahun sebagaimana baseline awal 100%. Hal ini menggambarkan pentingnya pembangunan karakter kebangsaan di tengah tantangan globalisasi, serta penguatan kesadaran cinta tanah air, toleransi, dan integrasi sosial di masyarakat.

Struktur hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan telah disusun dengan baik, logis, dan selaras dengan prinsip perencanaan pembangunan berbasis hasil. Proyeksi target indikator 2021–2024 secara umum relevan, realistis, dan selaras satu sama lain, meskipun terdapat beberapa indikator yang proyeksinya konservatif atau stagnan, seperti angka harapan hidup dan pertumbuhan industri

pengolahan, yang memerlukan perhatian dan terobosan kebijakan lebih lanjut. Namun demikian, kesinambungan antara aspek pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, lingkungan, dan ketertiban telah dikemas dalam struktur perencanaan yang terukur. Dengan penguatan sinergi antar sektor dan fokus pada implementasi program prioritas, diharapkan capaian pembangunan Kabupaten Nunukan dapat lebih optimal dan inklusif.

4.3.2. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 11. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2021	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024
M1.T1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,46	67,16	68,43	69,27	99,4%	98,8%	99,0%	98,6%
S1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) - (Poin)	8,17	8,24	8,26	8,39	100,9%	100,5%	99,5%	99,9%
S2		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) - (Poin)	12,65	12,67	12,68	12,69	99,3%	98,7%	98,0%	97,3%
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup - (Poin)	71,4	71,41	71,42	73,13	100,0%	100,0%	100,0%	102,4%
S4	Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM	Pengeluaran per kapita - (Rp. Ribu)	1.303.983	1.429.621	1.494.540	1.506.582	98,3%	103,4%	103,9%	100,8%
S5		Tingkat kemiskinan - (Persen)	6,79	6,13	5,53	5,73	88,0%	95,9%	103,3%	96,8%
S6		Tingkat pengangguran terbuka - (Persen)	4,24	2,71	2,69	2,71	99,0%	133,1%	129,0%	122,3%
S7		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - (Indeks)	77,67	77,41	78,68	73,85	100,6%	100,2%	101,8%	95,5%
M2.T2	Indeks infrastruktur		22,11	23,16	28,35	29,98	72,3%	73,0%	87,8%	91,2%
S8	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan	Rasio konektivitas kabupaten - (Rasio)	44,5	51,43	53,54	55,64	103,7%	100,0%	100,0%	100,0%

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2021	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024
S9	Infrastruktur Wilayah	Indeks aksesibilitas - (Indeks)	0,96	1,22	1,24	1,25	86,5%	96,1%	86,7%	78,6%
S10		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi - (Rasio)	74,42	74,92	75,13	88,44	372,1%	280,9%	187,8%	165,8%
S11	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Persentase luas kawasan pemukiman kumuh - (Persen)	1,31	1,17	1,09	1,14	79,8%	90,7%	95,2%	86,0%
M3.T3	Laju pertumbuhan ekonomi		4,04	5,24	4,16	4,28	98,1%	112,7%	76,1%	72,2%
S12	Meningkatnya kinerja sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian - (Persen)	3,85	4,4	5,6	1,84	64,5%	67,7%	76,5%	23,7%
S13	Meningkatnya kinerja sektor industri	Laju pertumbuhan industri pengolahan - (Persen)	2,23	3,08	1,53	7,4	103,2%	108,8%	56,5%	283,5%
S14	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan - (Persen)	7,65	8,76	7,2	12,27	584,2%	147,2%	96,8%	174,0%
S15	Meningkatnya kinerja investasi di daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,041	1,85	4,618	3,05	87,6%	148,1%	352,3%	221,5%
S16	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	41.856	41.252	65.674	63.056	322,3%	281,8%	425,5%	387,4%

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2021	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024
		(mancanegara dan nusantara) - (Kunjangan)								
M4.T4	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	BB	100,0%	100,0%	100,0%	>100%
S17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	B	B	B	B (64,56)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
S18		Maturitas SPIP	3	3	3	3	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
S19		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,73	85,83	86,77	88,35	103,2%	101,0%	99,7%	100,4%
S20		Nilai Mandiri SPBE	t.a.d	2,38	2,61	2,89	t.a.d	132,2%	130,5%	125,7%
S21	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	t.a.d	45,16	75,76	73,13	t.a.d	75,3%	122,2%	112,5%
S22	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	t.a.d	B	C	72,32 (B)	t.a.d	100,0%	<90%	100,0%
M5.T5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		83,73	80,07	78,62	80,61	107,3%	102,4%	100,3%	102,5%
23	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	65,71	54,52	51,88	56,67	119,9%	99,3%	94,3%	102,8%
24		Indeks Kualitas Udara	95,55	96,3	95,12	95,52	103,7%	104,4%	103,0%	103,3%
25		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92,81	93,93	94,03	94,15	101,1%	101,7%	101,2%	100,7%
26		Penurunan emisi GRK: Total Emisi	7.542.600	7.915.037	8.398.136	6.136.455	52,6%	43,5%	32,1%	75,9%
		Emisi Bersih	t.a.d	t.a.d	t.a.d	d.t.a	t.a.d	t.a.d	t.a.d	d.t.a

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2021	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024
		Total Sekuestrasi	t.a.d	t.a.d	t.a.d	d.t.a	t.a.d	t.a.d	t.a.d	d.t.a
M6.T6	Indeks Rasa Aman		t.a.d	84,78	82,15	96,84	0,0%	84,8%	82,2%	96,8%
27	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
28	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,2	0,2	0,4759	0,56	43,5%	42,6%	99,1%	112,0%
29	Menguatnya karakter kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	63	95	78,69	66,89	63,0%	95,0%	78,7%	66,9%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TUJUAN							79,5%	95,3%	90,9%	92,3%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN							129,9%	112,0%	120,5%	121,9%

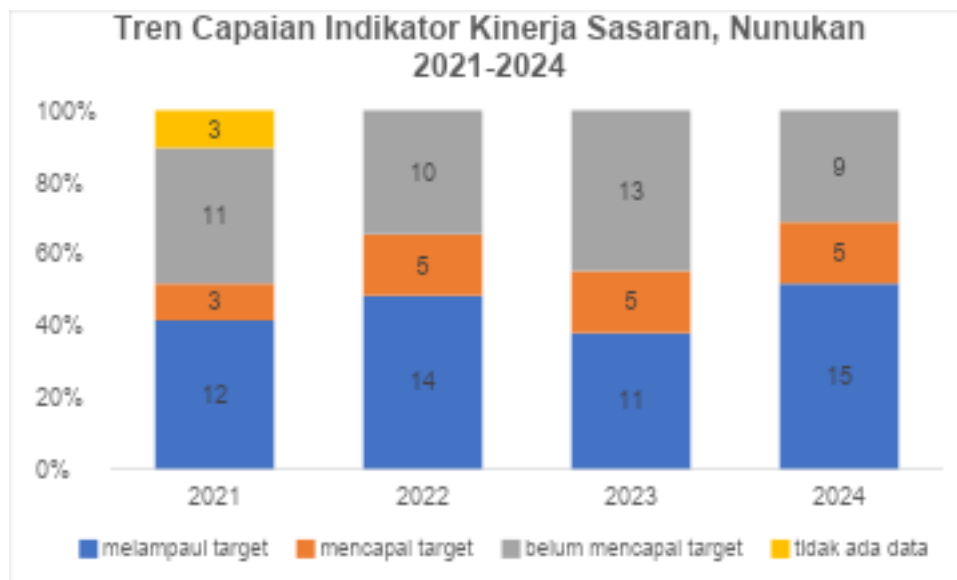
Sumber: Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran, Nunukan 2021-2024, diolah.

Keterangan:

- d.t.a : data tidak ada/ditemukan.
- S1, S2 , S3, dan seterusnya: adalah Sasaran 1, Sasaran 2, Sasaran 3 dan seterusnya

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2021-2024 menunjukkan hasil yang beragam. Secara umum, capaian terhadap indikator-indikator kunci pembangunan memberikan gambaran adanya kemajuan di beberapa sektor, namun juga mengungkapkan masih banyaknya tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari total 29 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah, sebagian menunjukkan perkembangan yang sangat baik, sementara sebagian lainnya belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan realitas umum di banyak daerah, di mana keberhasilan pembangunan tidak selalu berlangsung merata antar sektor.

Gambar 34. Tren Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Pembangunan, 2021-2024



Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2021-2024 menunjukkan hasil yang fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan tren jumlah capaian indikator kinerja sasaran, terlihat meningkat indikator kinerja yang melampaui target, dari 12 (41,4%) indikator pada tahun 2021 menjadi 15 (51,7%) pada tahun 2024. Kemudian yang mencapai target juga meningkat dari 3 (10,3%) indikator pada tahun 2021 menjadi 5 (17,2%) indikator pada tahun 2024. Indikator kinerja yang belum mencapai target berkurang dari 11 (37,9%) indikator pada tahun 2021 menjadi 9 (31%) indikator pada tahun 2024, dan indikator yang

tidak ada data dari 3 menjadi 0 indikator. Tidak adanya data indikator kinerja pada tahun 2021 disebabkan karena ada beberapa faktor, termasuk diantaranya adalah terkendala pandemi Covid-19, tidak diukurnya indikator karena terjadi penyesuaian dan perbedaan indikator kinerja sasaran yang pada tahun 2021 masih mengacu pada indikator kinerja RPJMD periode tahun sebelumnya, yaitu RPJMD periode 2016-2021. Meskipun demikian, peningkatan kinerja indikator sasaran ini menunjukkan perbaikan kualitas data indikator dan tentunya berkontribusi atas sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Dari 15 indikator yang sudah melampaui target pada 2024, terdapat 4 indikator sasaran yang sudah mencapai target sejak 2021-2024. Indikator tersebut adalah indikator sasaran yaitu rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, jumlah kunjungan wisatawan, indeks kualitas udara (IKA), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Adapun faktor capaian indikator kinerja tersebut dapat melampaui target disebabkan dari adanya upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja tersebut, namun ada juga faktor dari target yang ditetapkan terlalu rendah.

Hal tersebut terlihat dari indikator kinerja kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara, dimana sebagai data awal (*baseline*) sebesar 49.214 orang, sedangkan yang menjadi target RPJMD tahun 2021, hanya 12.988 orang, dengan realisasi mencapai 41.856 orang atau 322,3 persen dari target yang ditetapkan. Demikian juga indikator luas daerah irigasi yang dilayani, dengan target 20 persen, sementara capaiannya sudah mencapai 74,24 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, target yang ditentukan adalah 26,67 persen yang jauh lebih rendah dari realisasi capaian 2021 yang sudah mencapai 74,24 persen. Sama halnya dengan indikator kinerja IKA dan IKTL yang data awal/baseline data capaiannya sudah cukup tinggi, seperti 95,91 (IKA) dan 91,84 (IKTL), sementara target RPJMD 2021 yang ditetapkan lebih rendah dari data awal, sedangkan realisasi capaiannya cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah (tidak optimis), maka perlu ada perbaikan dalam penyusunan

target RPJMD pada periode berikutnya, dengan memperhatikan realisasi capaian tahun terakhir, aspek yang mendukung dan menghambat capaian atas indikator tersebut.

Sebelas indikator sasaran lainnya yang melampaui target pada 2024, namun tidak sejak awal adalah angka harapan hidup (AHH), pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan industri pengolahan, laju pertumbuhan sektor perdagangan, realisasi penanaman modal, indeks kepuasan masyarakat, nilai mandiri SPBE, indeks profesionalisme ASN, indeks kualitas air (IKA), dan indeks ketahanan daerah (IKD). Indikator tersebut menunjukkan peningkatan kinerja pembangunan daerah, berhasil melampaui target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Kondisi ini mencerminkan kinerja di sektor lingkungan hidup, akuntabilitas dan reformasi birokrasi, dan perbaikan kualitas daya saing manusia.

Meskipun demikian, masih ada 9 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target, seperti indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Tingkat kemiskinan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks aksesibilitas, Persentase luas kawasan pemukiman kumuh, Laju pertumbuhan ekonomi, Laju pertumbuhan sektor pertanian, Penurunan emisi GRK, dan Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Hal ini masih menjadi tantangan dalam peningkatan layanan dan pembangunan daerah. Dari indikator tersebut perlu upaya lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan nilai kinerja yang akan mendukung sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Khususnya, indikator tingkat kemiskinan yang tidak mencapai target pada tahun 2024 dan angka kemiskinan meningkat kembali, dimana indikator kemiskinan merupakan bagian dari indikator makro yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Tabel 12. Persentase Capaian dan Predikat Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Ke:				Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran	Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan				Rata-Rata Predikat Kinerja Sasaran
			2021	2021	2021	2021		2021	2021	2021	2021	
"(1)"	"(2)"	"(3)"	"(4)"	"(5)"	"(6)"	"(7)"	"(8) = 4+5+6+7/4	"(9)"	"(10)"	"(11)"	"(12)"	"(13) = (9+10+11+12)/4
M1.T1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		99,4%	98,8%	99,0%	98,6%	98,95%	ST	ST	ST	ST	ST
S1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) - (Poin)	100,9%	100,5%	99,5%	99,9%	100,20%	ST	ST	ST	ST	ST
S2		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) - (Poin)	99,3%	98,7%	98,0%	97,3%	98,33%	ST	ST	ST	ST	ST
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup - (Poin)	100,0%	100,0%	100,0%	102,4%	100,60%	ST	ST	ST	ST	ST
S4	Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM	Pengeluaran per kapita - (Rp. Ribu)	98,3%	103,4%	103,9%	100,8%	101,60%	ST	ST	ST	ST	ST
S5		Tingkat kemiskinan - (Persen)	88,0%	95,9%	103,3%	96,8%	96,00%	T	ST	ST	ST	ST
S6		Tingkat pengangguran terbuka - (Persen)	99,0%	133,1%	129,0%	122,3%	120,85%	ST	ST	ST	ST	ST
S7		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - (Indeks)	100,6%	100,2%	101,8%	95,5%	99,53%	ST	ST	ST	ST	ST
M2.T2	Indeks infrastruktur		72,3%	73,0%	87,8%	91,2%	81,08%	S	S	T	ST	T
S8	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan	Rasio konektivitas kabupaten - (Rasio)	103,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,93%	ST	ST	ST	ST	ST
S9		Indeks aksesibilitas - (Indeks)	86,5%	96,1%	86,7%	78,6%	86,98%	T	ST	T	T	T

S10	Infrastruktur Wilayah	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi - (Rasio)	372,1%	280,9%	187,8%	165,8%	251,65%	ST	ST	ST	ST	ST
S11	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Persentase luas kawasan pemukiman kumuh - (Persen)	79,8%	90,7%	95,2%	86,0%	87,93%	T	T	ST	T	T
M3.T3	Laju pertumbuhan ekonomi		98,1%	112,7%	76,1%	72,2%	89,78%	ST	ST	T	S	T
S12	Meningkatnya kinerja sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian - (Persen)	64,5%	67,7%	76,5%	23,7%	58,10%	R	S	T	SR	R
S13	Meningkatnya kinerja sektor industri	Laju pertumbuhan industri pengolahan - (Persen)	103,2%	108,8%	56,5%	283,5%	138,00%	ST	ST	R	ST	ST
S14	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan - (Persen)	584,2%	147,2%	96,8%	174,0%	250,55%	ST	ST	ST	ST	ST
S15	Meningkatnya kinerja investasi di daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal	87,6%	148,1%	352,3%	221,5%	202,38%	T	ST	ST	ST	ST
S16	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara) - (Kunjangan)	322,3%	281,8%	425,5%	387,4%	354,25%	ST	ST	ST	ST	ST
M4.T4	Indeks Reformasi Birokrasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	ST	ST	ST	ST	ST
S17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	ST	ST	ST	ST	ST
S18		Maturitas SPIP	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	ST	ST	ST	ST	ST
S19		Indeks Kepuasan Masyarakat	103,2%	101,0%	99,7%	100,4%	101,08%	ST	ST	ST	ST	ST
S20		Nilai Mandiri SPBE	t.a.d	132,2%	130,5%	125,7%	129,47%	ST	ST	ST	ST	ST
S21	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	t.a.d	75,3%	122,2%	112,5%	103,33%	ST	S	ST	ST	ST

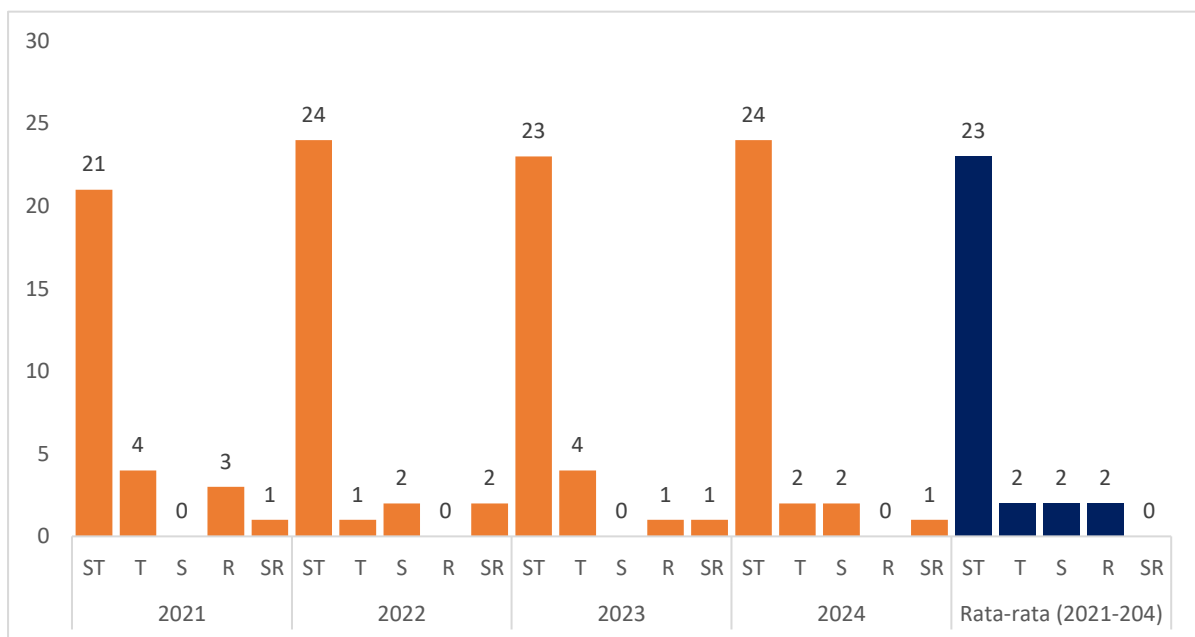
S22	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	t.a.d	100,0%	90,0%	100,0%	96,67%	ST	ST	T	ST	ST
M5.T5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		107,3%	102,4%	100,3%	80,6%	97,65%	ST	ST	ST	T	ST
23	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	119,9%	99,3%	94,3%	102,8%	104,08%	ST	ST	ST	ST	ST
24		Indeks Kualitas Udara	103,7%	104,4%	103,0%	103,3%	103,60%	ST	ST	ST	ST	ST
25		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	101,1%	101,7%	101,2%	100,7%	101,18%	ST	ST	ST	ST	ST
26		Penurunan emisi GRK: Total Emisi	52,6%	43,5%	32,1%	75,9%	51,03%	R	SR	SR	S	R
		Emisi Bersih	t.a.d	t.a.d	t.a.d	d.t.a	0,00%					
		Total Sekuestrasi	t.a.d	t.a.d	t.a.d	d.t.a	0,00%					
M6.T6	Indeks Rasa Aman		t.a.d	84,8%	82,2%	96,84%	87,95%	ST	T	T	ST	T
27	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	ST	ST	ST	ST	ST
28	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	43,5%	42,6%	99,1%	112,0%	74,30%	SR	SR	ST	ST	S
29	Menguatnya karakter kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	63,0%	95,0%	78,7%	66,9%	75,90%	R	ST	T	S	S
Rata-rata Capaian / Predikat Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran (Akumluasi persentase capaian seluruh Indikator kinerja sasaran dibagi jumlah indikator saran)			128,8%	115,5%	122,9%	125,4%	123,7%	ST	ST	ST	ST	ST

Keterangan:

- Kolom rata-rata Kinerja sasaran dihitung berdasarkan akumulasi masing-masing indikator kinerja sasaran setiap tahun
- Kolom rata-rata prediket kinerja sasaran adalah interpretasi kategori kinerja rata-rata persentase capaian kinerja sasaran setiap tahun dan atau interpretasi kategori kinerja akumulasi persentase capaian seluruh indikator sasaran
- Data yang tidak tersedia untuk setiap indikator tidak dihitung sebagai bilangan pembagi dalam menghitung rata-rata persentase capaian kinerja sasaran
- Interpretasi prediket kinerja menggunakan standar Peremdamgri 86 tahun 2027, dengan interval dan kategori sebagai berikut:
ST = Sangat Tinggi (91%-100%)
T = Tinggi (76%-90%)
S= Sedang (65%-75%)
R = Rendah (51%-65%)
SR = Sangat Rendah (<50%)
- T.a.d = tidak ada data/data tidak tersedia

Hasil analisis pencapaian kinerja indikator sasaran (tabel 4.10), dengan menggunakan predikat kinerja sesuai Permendagri 86 tahun 2027, menunjukkan secara akumulasi seluruh indikator kinerja sasaran tahun 2021-2024 berhasil dicapai dengan predikat **“Sangat Tinggi”**, atau dengan persentase capaian kumulatif tahun 2021-2024 adalah 123,7% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sama halnya jika dilihat dari pencapaian setiap tahunnya, rata -rata akumulasi kinerja indikator sasaran berhasil mencapai prediket **“sangat tinggi”**, dengan tren kinerja yang terus meningkat. Tahun 2021 dengan 27 indikator yang dapat diakumulasi kinerja mencapai 128,8% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan tahun 2022-2024 dengan 29 indikator kinerja yang diakumulasi berhasil mencapai 115,5% (2022), 122,9% (2023) dan 125% (2024).

Gambar 35. Rekapilutasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pembangunan Daerah 2021-2024



Dilihat secara lebih detail (lihat grafik 4.6), berdasarkan masing-masing indikator kinerja sasaran yang berjumlah 29 indikator kinerja sasaran, yang dihitung secara akumulasi tahun 2021-2024, menunjukan 23 indikator sasaran atau (79,3%) berhasil dicapai dengan predikat “sangat tinggi”, 2 indikator kinerja atau (6,9%) dengan kategori **“tinggi”**, 2 indikator atau (6,9%) kategori **“sedang”**, dan 2 indikator atau 6,9% dalam kategori

“rendah”. Sedangkan kinerja yang menunjukkan sangat rendah tidak ada (grafik 4.6).

Dua indikator dalam kategori pencapaian sedang yaitu pencapaian indeks ketahanan daerah. Secara akumulasi 2021-2024 pencapaian indikator ini adalah 74,3%. Meskipun begitu, pada pencapaian akhir periode 2024 indikator ini berhasil mencapai 112% dari target RPJMD tahun 2024. Selanjutnya indikator dengan kategori **sedang** secara akumulasi tahun 2021-2024 adalah indikator peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Indikator ini secara akumulasi 2021-2024 adalah 75,90% dari target RPJMD. Sedangkan pencapaian akhir RPJMD (2024) indikator tersebut juga masuk dalam kategori sedang (66,9% dari target RPJMD).

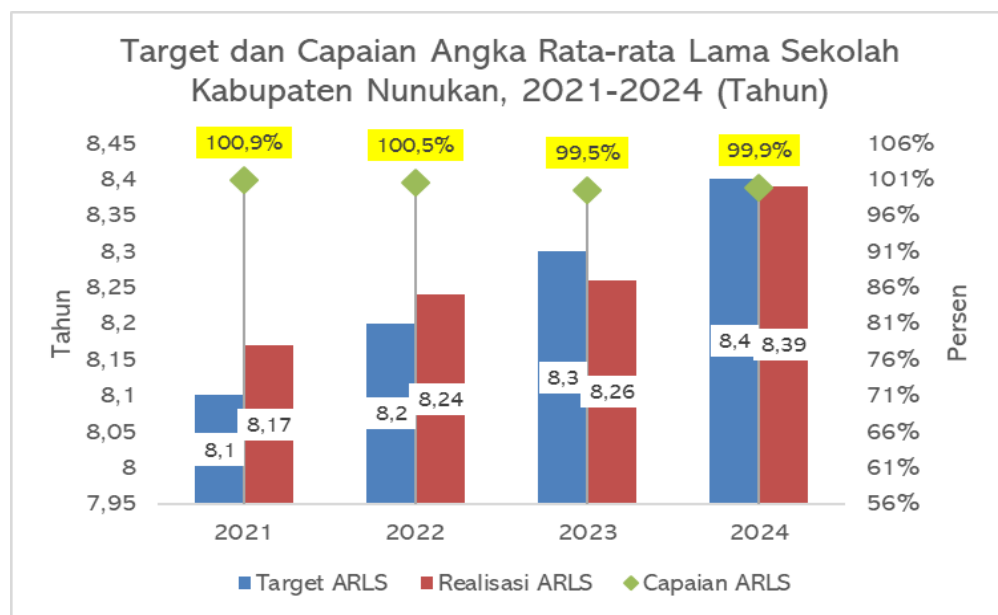
Sedangkan dua indikator kinerja secara akumulasi dalam kategori **“Rendah”**, yaitu Laju pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Secara akumulasi tahun 2021-2024 indikator laju pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai 58,10% (rendah). Begitu juga pencapaian akhir periode RPJMD (2024) hanya mampu berhasil mencapai 23,7% dari target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini dipengaruhi oleh kesulitan pendataan pencapaian produksi ekonomi sektor pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan). Seperti yang diakui oleh Dinas Pertanian yang menyatakan dinas tersebut tidak memiliki data valid jumlah produksi komoditi pertanian secara keseluruhan, sementara data yang ada hanya sebagian saja.

Indikator dengan kategori rendah lainnya yaitu penurunan emisi GRK. Hingga akhir periode 2024, hanya mampu tercapai 75,9% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sementara secara akumulasi 2021-2024, dengan rata-rata 51,03% dengan kategori rendah. Pemerintah daerah nunukan, dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup, belum mampu melakukan perhitungan emisi secara mandiri, data yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan berdasarkan dari SIGN SMART.

Berikut adalah penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tahun 2021-2024:

1) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS); Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah angka rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. ARLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Gambar 36. Target dan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Nunukan Tahun 2021-2024



Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) di Kabupaten Nunukan terus meningkat, bahkan pada capaian realisasi ARLS 2021-2022 telah melampaui target RPJMD. Meskipun demikian persentase capaian realisasi indikator terlihat menurun target dari RPJMD, hal ini menunjukkan peningkatan rata-rata anak yang bersekolah di Nunukan namun masih menghadapi tantangan yang menyebabkan masih tingginya anak tidak sekolah (ATS). Pada Tahun 2024, ARLS Nunukan

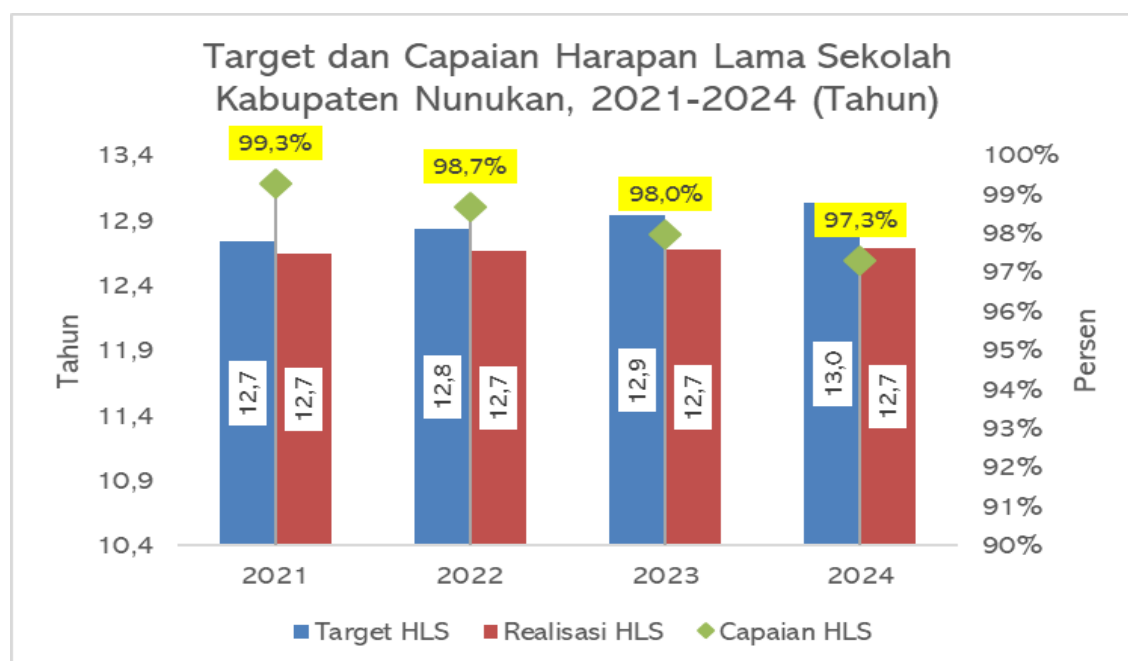
telah mencapai 8,39. Angka ini meningkat 0,39 poin dibandingkan dengan baseline data awal RPJMD Tahun 2020 sebesar 8,00.

Pada tahun 2021, target capaian ARLS yang ditetapkan sebesar 8,10 tahun dengan capaiannya sebesar 8,17 tahun atau 100,9 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2022, realisasi capaian ARLS meningkat menjadi 8,24 tahun atau 100,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar 8,20 tahun. Kemudian pada tahun 2023, target ARLS yang ditetapkan sebesar 8,30 tahun dengan realisasi capaian sebesar 8,26 tahun atau 99,5 persen dari target. Selanjutnya, pada tahun 2024 target ARLS yang ditetapkan sebesar 8,40 tahun dengan realisasi capaian 8,39 tahun atau 99,9 persen.

ARLS Nunukan tahun 2024 masih dibawah rata-rata ARLS Provinsi Kalimantan Utara dan nilai paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. ARLS Nunukan tahun 2024 sebesar 8,39 tahun, sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,35 tahun atau selisih 0,96 tahun (11,5 bulan). ARLS Nunukan masih tertinggal 10 bulan dari Tana Tidung dan Bulungan. Sementara dengan Malinau tertinggal 1,24 tahun dan dengan Kota Tarakan tinggal hampir 2 tahun. Ketimpangan ARLS yang tinggi antara Nunukan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya, menyebabkan nilai IPM Nunukan yang dibawah rata-rata daerah lainnya. Hal ini tentu menjadi tantangan dan persoalan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah, melalui kebijakan pendidikan yang responsif dan progresif.

2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS); Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan angka perkiraan/harapan rata-rata lama waktu (dalam tahun) seseorang akan mengenyam pendidikan formal sejak usia masuk sekolah dasar (SD), dengan asumsi tidak ada hambatan dalam menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Gambar 37. Target dan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) Nunukan Tahun 2021-2024



Capaian nilai dari indikator kinerja HLS di Kabupaten Nunukan cenderung meningkat dan lambat, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 sejak 2021-2024, bahkan secara prosentase capaian cenderung menurun, dari 99,3 persen pada tahun 2021 menjadi 97,3 persen pada tahun 2024.

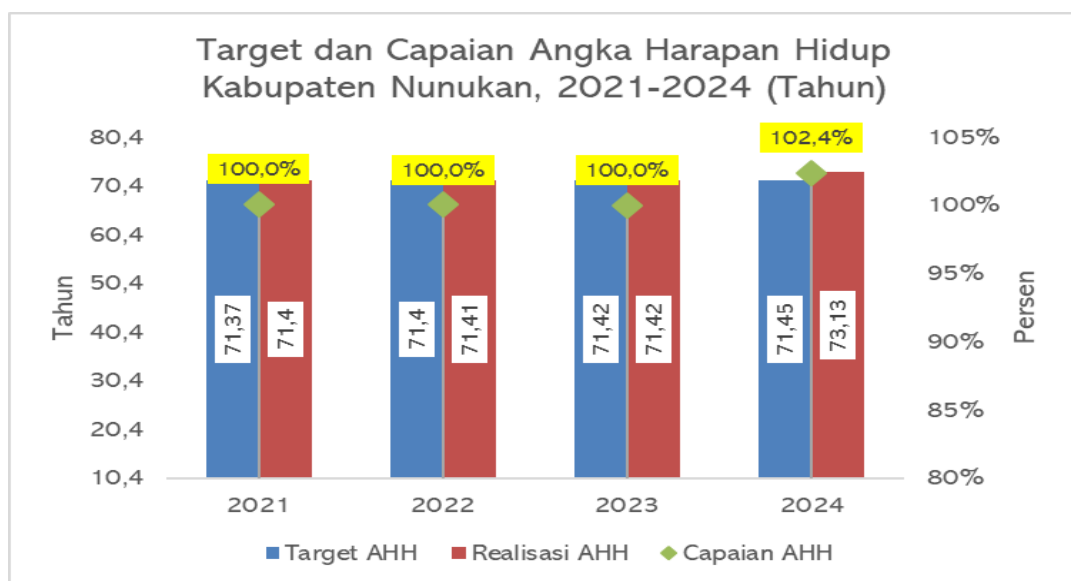
Angka capaian atau baseline awal dari Harapan Lama Sekolah sebesar 12,64 tahun. Target HLS yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 12,74 tahun dan realisasi capaiannya sebesar 12,65 atau 99,3 persen. Pada tahun 2022, realisasi HLS meningkat menjadi 12,67 tahun (meningkat 0,02), namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 12,84 tahun atau capaian pada tahun 2022 sebesar 98,7 persen dari target. Tahun 2023, capaian indikator HLS meningkat lagi sebesar 0,01 menjadi 12,68 tahun atau 98 persen dari target sebesar 12,94 tahun. Sedangkan tahun 2024, target HLS yang ditetapkan sebesar 13,04 tahun, dan realisasi capaiannya sebesar 12,69 tahun atau 97,3 persen dari target.

Indikator HLS Nunukan tahun 2024 sebesar 12,69 tahun masih berada dibawah rata-rata HLS Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13,21 tahun. Sedangkan di antara Kabupaten/Kota lainnya, angka HLS

Nunukan hanya lebih baik dari Tana Tidung (12,61 tahun), sementara Bulungan (13,25 tahun), Malinau (13,35 tahun), dan Kota Tarakan (14,22 tahun). Hal ini menjadi tantangan untuk merumuskan kebijakan daerah yang dapat meningkatkan IPM Nunukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3) Angka Harapan Hidup (AHH); Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang akan dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola mortalitas (kematian) saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. AHH dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 38. Target dan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Nunukan Tahun 2021-2024



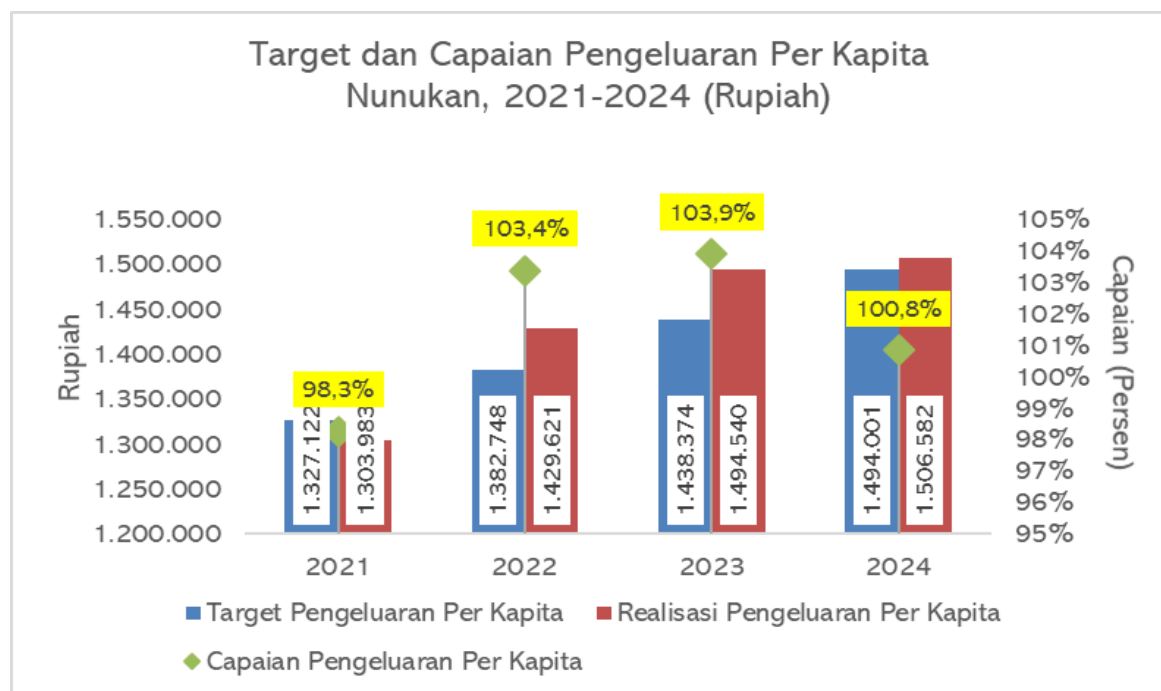
Dalam dokumen RPJMD Nunukan 2021-2026, Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi IKU sasaran dari IKU Utama IPM. Indikator AHH, salah satu indikator yang berkontribusi atas capaian IPM di Nunukan. Realisasi capaian AHH tahun 2021-2024 selalu meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.

Baseline data indikator AHH pada periode awal RPJMD sebesar 71,34 tahun, sedangkan target yang ditetapkan RPJMD tahun 2021 sebesar 71,37 tahun dengan capaian sebesar 71,40 tahun atau 100,04 persen “melampaui” dari target. Pada tahun 2022 juga sedikit melampaui

target, dengan realisasi AHH meningkat menjadi 71,41 tahun atau 100,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar 71,40. Pada tahun 2023, target AHH ditetapkan sebesar 71,42 tahun dengan capaian sebesar 71,42 tahun atau mencapai target 100 persen. Sedangkan tahun 2024, target AHH ditetapkan sebesar 71,45 tahun, sementara realisasi capaiannya sebesar 73,13 tahun atau melampaui target dengan capaian sebesar 102,4 persen dari target.

4) Pengeluaran Per Kapita: Pengeluaran per kapita adalah jumlah rata-rata uang yang dibelanjakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam periode tertentu, biasanya dalam satuan rupiah per bulan. Indikator kinerja sasaran ini menjadi salah satu ukuran penting untuk menggambarkan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 39. Target dan Capaian Pengeluaran Perkapita Nunukan Tahun 2021-2024



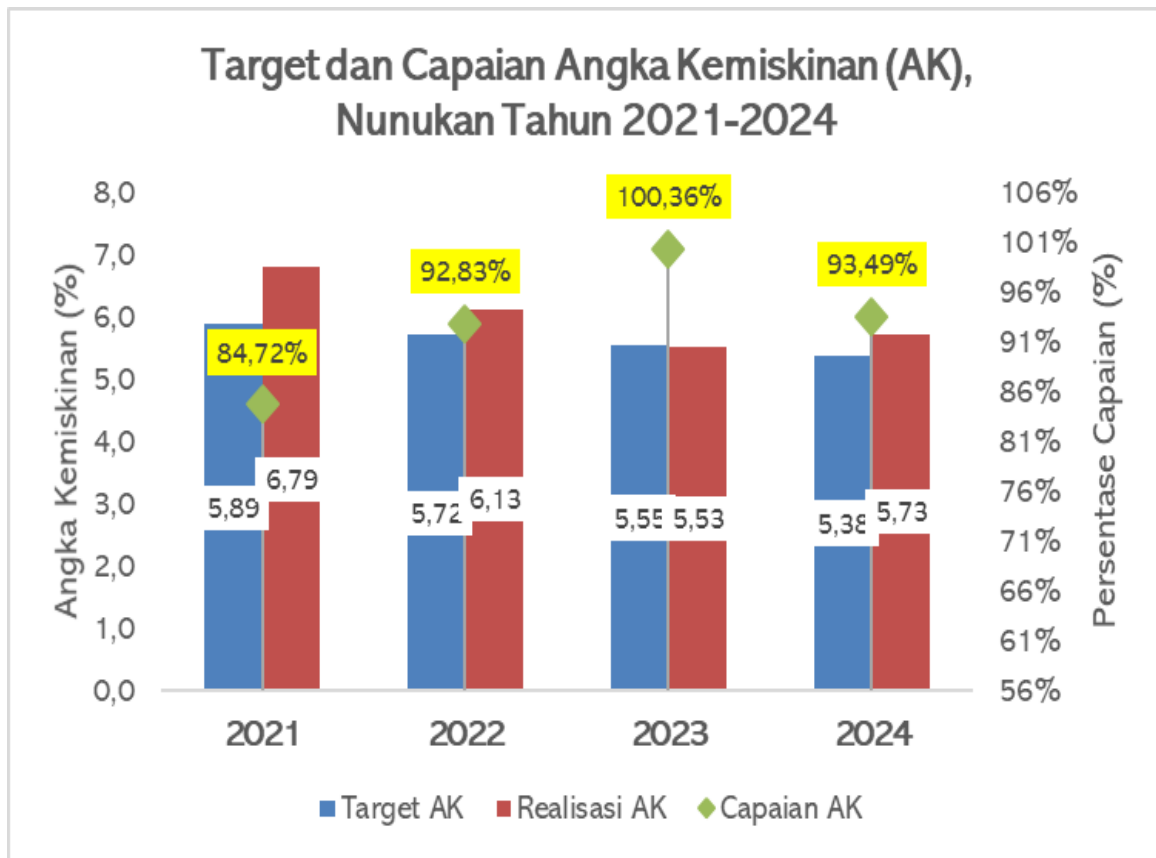
Berdasarkan data pengeluaran per kapita tahun 2021 hingga 2024, secara umum terlihat adanya tren peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi pengeluaran per kapita. Pada tahun 2021, target pengeluaran per kapita sebesar Rp1.327.122 dengan realisasi sebesar Rp1.303.983 atau sebesar 98,3% dari target. Capaian ini menunjukkan

bahwa realisasi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Namun mulai tahun 2022 terjadi perbaikan kinerja, di mana target pengeluaran per kapita sebesar Rp1.382.748 dapat terlampaui dengan realisasi Rp1.429.621 atau mencapai 103,4%. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2023, di mana realisasi pengeluaran per kapita kembali melampaui target sebesar 103,9%.

Pada tahun 2024, target pengeluaran per kapita ditetapkan sebesar Rp1.494.001 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp1.506.582, dengan capaian sebesar 100,8%. Meskipun terjadi sedikit penurunan persentase capaian dibandingkan dua tahun sebelumnya, capaian ini tetap berada di atas target. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pengeluaran per kapita yang meningkat setiap tahunnya. Kinerja pemerintah dalam mengelola pengeluaran juga menunjukkan tren yang cukup positif, terutama dengan keberhasilan merealisasikan pengeluaran di atas target selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024.

5) Tingkat Kemiskinan; Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin).

Gambar 40. Target dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Nunukan Tahun 2021-2024



Angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan 2021-2024 cenderung menurun, bahkan pada realisasi capaian angka kemiskinan tahun 2023 melampaui target dari yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Angka kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 6,79 persen atau 84,72 persen dari target yang ditetapkan sebesar 6,06 persen. Kemudian angka kemiskinan tahun 2022 menurun kembali sebesar 0,66 persen menjadi 6,13 persen atau 92,83 persen dari target yang ditetapkan 5,89 persen. Angka kemiskinan 2023 di Nunukan mencapai 5,53 persen atau 100,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,72 persen. Namun, pada tahun 2024 angka kemiskinan mengalami rebound (naik), dari 5,53 persen pada 2023 menjadi 5,73 persen pada tahun 2024 atau 96,9 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,55 persen.

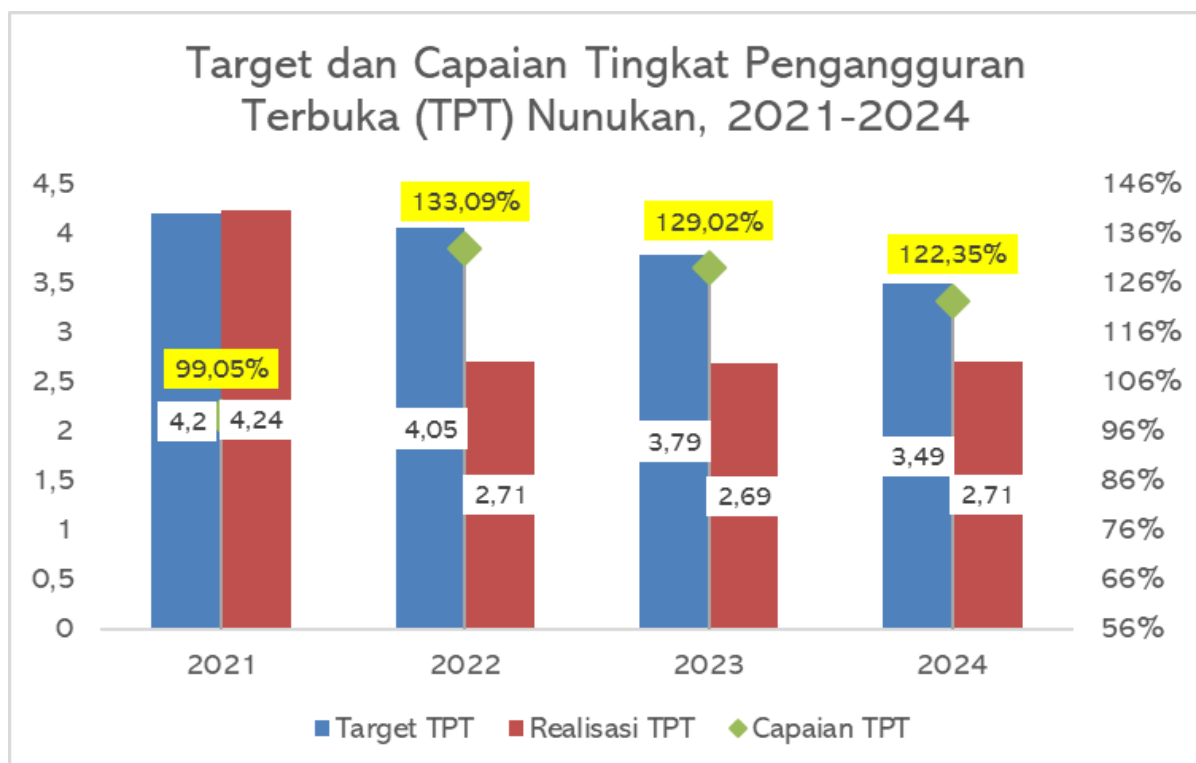
Angka kemiskinan di Nunukan tahun 2024 mencapai 5,73 persen. Hal ini cukup baik dibandingkan dengan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Kalimantan Utara. Angka kemiskinan Nunukan lebih rendah dibandingkan Malinau (6,94 persen)

dan Bulungan (8,76 persen), namun berada di atas angka kemiskinan Kota Tarakan (5,56 persen) dan Tana Tidung (4,47 persen).

Dari data tersebut, meskipun belum mencapai target pada 2024, namun secara umum terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Nunukan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah yang sudah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun masih menjadi tantangan untuk mencapai target RPJMD dan lebih baik dari Kota Tarakan dan Tana Tidung.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Gambar 41. Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nunukan Tahun 2021-2024



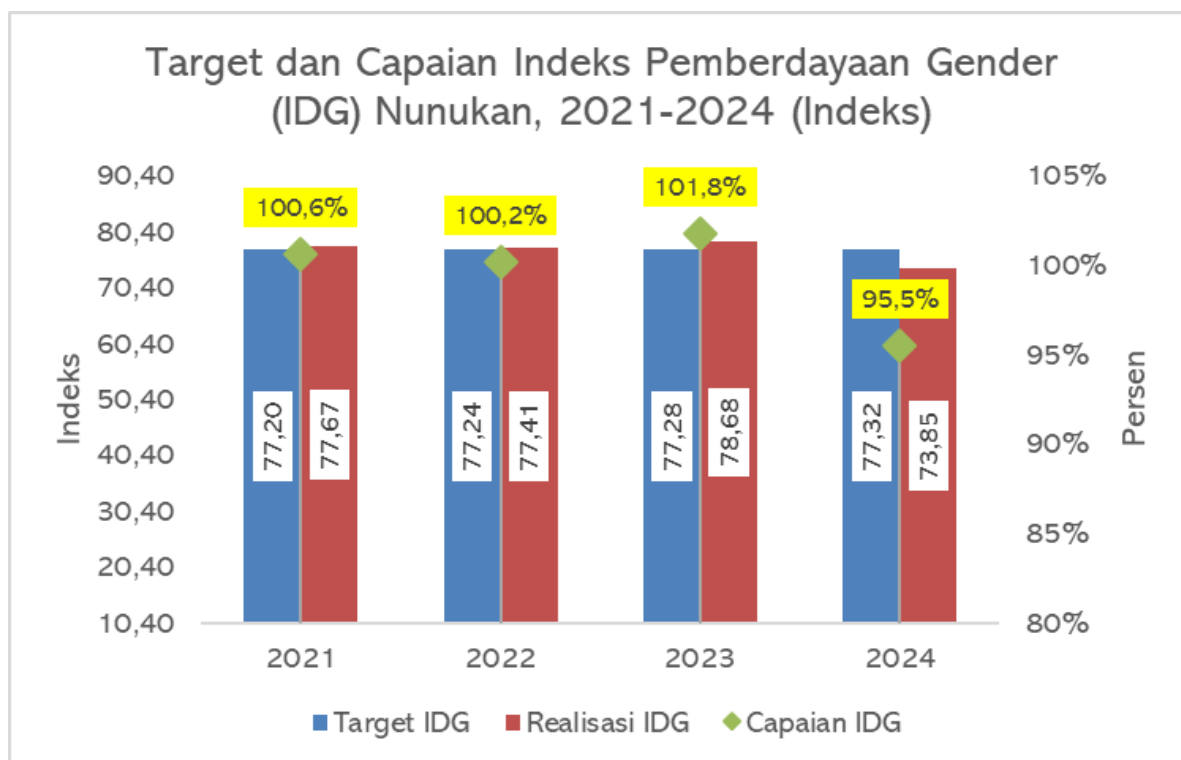
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan selama periode 2021-2024 menunjukkan tren yang positif dan membanggakan.

Target TPT yang ditetapkan pemerintah daerah secara konsisten menurun setiap tahun, dari 4,20% pada tahun 2021 menjadi 3,49% pada tahun 2024, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menekan angka pengangguran. Sedangkan realisasi capaian indikator kinerja TPT pada tahun 2021 sedikit melampaui target, yaitu 4,24%, yang berarti target belum tercapai. Capaian tahun 2021 sebesar 99,05 persen dari target yang ditetapkan. Namun, sejak tahun 2022-2024, realisasi indikator TPT berada jauh dibawah target, yakni masing-masing 2,71%, 2,69%, dan kembali 2,71% pada 2024.

Artinya, semua capaian pada tahun tersebut melampaui 100% selama tiga tahun terakhir, dengan angka tertinggi pada 2022 sebesar 133,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Meski demikian, realisasi TPT yang stagnan di kisaran 2,7% dalam tiga tahun terakhir menandakan bahwa diperlukan strategi baru agar angka pengangguran dapat terus ditekan secara berkelanjutan. Kabupaten Nunukan perlu memastikan bahwa pencapaian ini tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga merata antar wilayah dan kelompok masyarakat.

7) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta dalam pengambilan keputusan. IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama: keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan manajerial, serta sumbangan pendapatan perempuan.

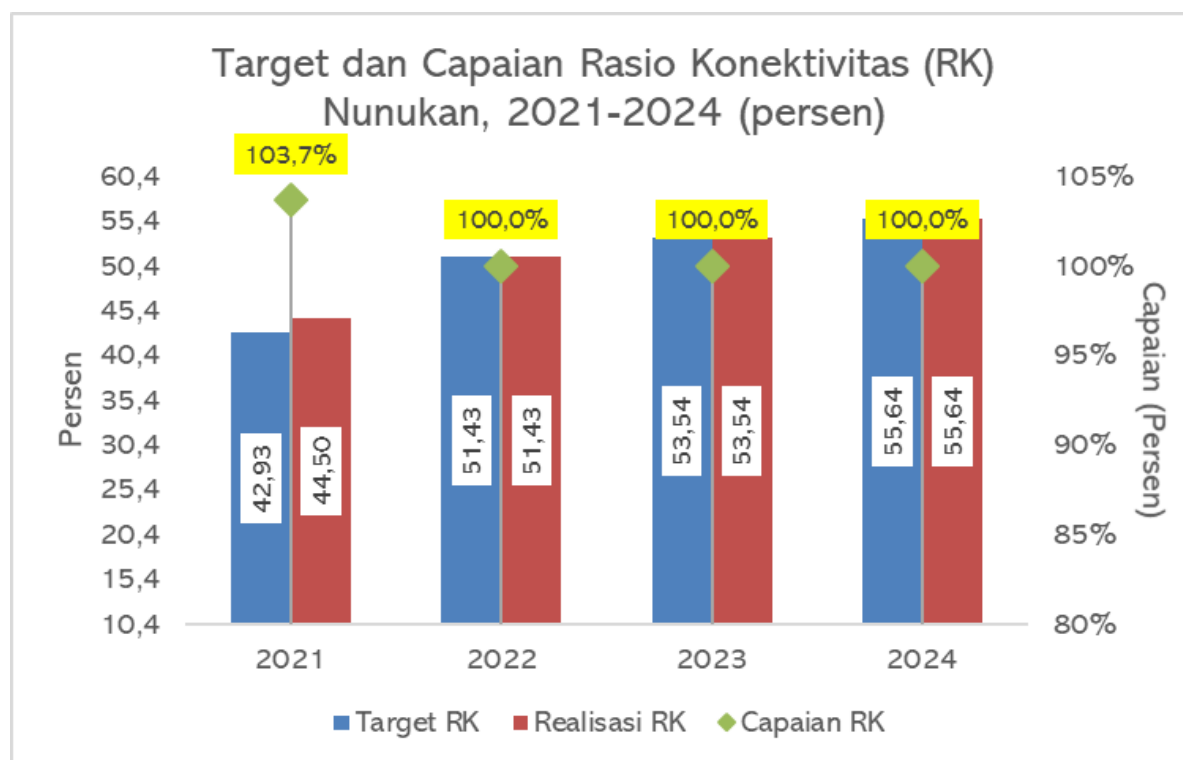
Gambar 42. Target dan Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Nunukan Tahun 2021-2024



Salah satu indikator sasaran dalam RPJMD Nunukan 2021-2026 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang berkontribusi atas IKU Tujuan Indeks Pembangunan Manusia. Tren capaian IDG Nunukan 2021-2024 cenderung menurun dan mengalami tantangan. Dimana data awal RPJMD Nunukan untuk indikator IDG sebesar 77,16 persen, sementara capaian tahun 2024 sebesar 73,85 persen atau turun -3,31 persen. Hal ini masih menjadi tantangan dalam memberikan akses partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan daerah. Indikator IDG telah mencapai dan melampaui target RPJMD pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan RPJMD untuk IDG sebesar 77,20 persen dengan realisasi 77,67 persen atau 100,6 persen dari target.

- 8) Rasio konektivitas kabupaten;** Rasio konektivitas adalah ukuran keterhubungan transportasi di suatu wilayah atau daerah yang dinyatakan dalam bentuk rasio dengan satuan persen. Rasio konektivitas menilai keterhubungan transportasi baik darat, sungai/danau dan laut.

Gambar 43. Target dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas (RK) Nunukan Tahun 2021-2024

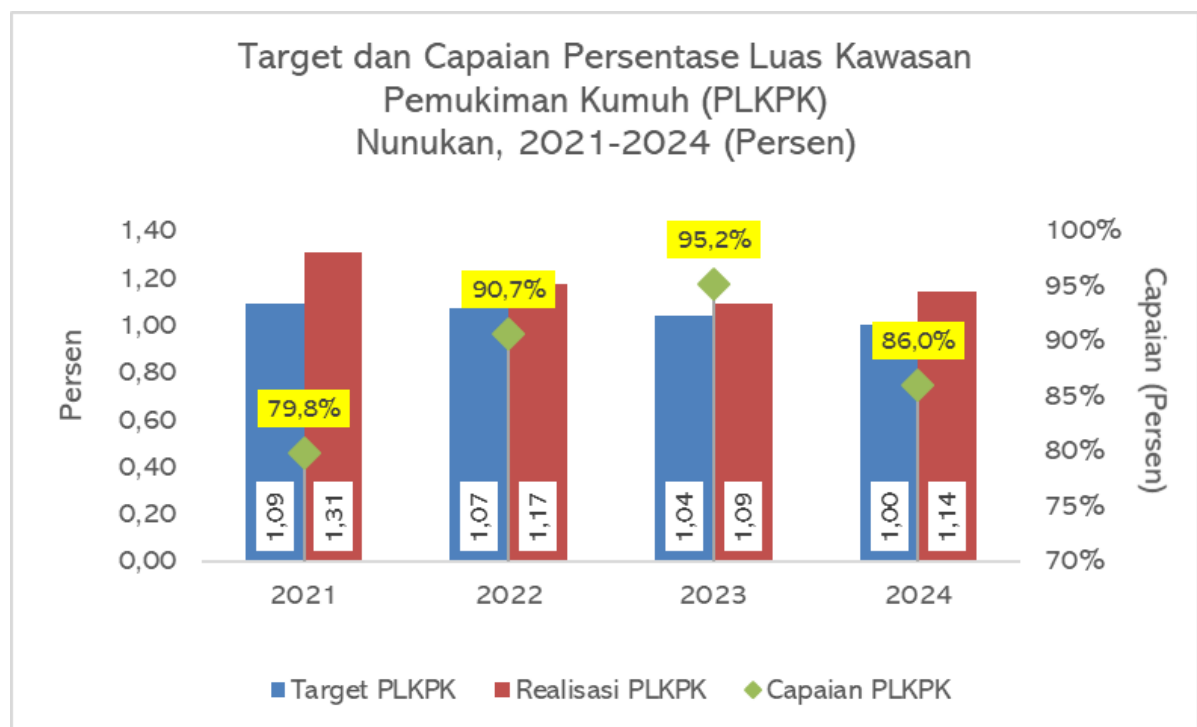


Capaian realisasi indikator kinerja rasio konektivitas kabupaten selalu meningkat setiap tahunnya, selalu mencapai target bahkan tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Data baseline awal rasio konektivitas dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 42,93 persen. Pada tahun 2021 rasio konektivitas berhasil melampaui target. Di mana target rasio konektivitas pada tahun 2021 adalah 42,93 persen dengan capaian realisasi rasio konektivitas sebesar 44,5 persen atau 103,7 persen dari target. Pada tahun 2022, rasio konektivitas meningkat 6,93 persen menjadi 51,43 persen atau 100 persen dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 51,43 persen. Tahun 2023, rasio konektivitas meningkat kembali menjadi 53,54 persen atau 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 53,54 persen. Sementara pada tahun 2024, target RPJMD ditetapkan sebesar 55,64 persen dengan realisasi capaian kinerja 55,64 persen atau berhasil mencapai target 100 persen.

9) Persentase luas kawasan permukiman kumuh;

Indikator sasaran kinerja ke-9 adalah Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh (PLKPK) menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menggambarkan kondisi lingkungan permukiman masyarakat. Indikator kinerja ini dihitung dengan norma negatif, di mana semakin kecil nilai PLKPK menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Gambar 44. Target dan Capaian Indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Nunukan Tahun 2021-2024



Berdasarkan data indikator sasaran PLKPK memperlihatkan hasil capaian yang masih fluktuatif, namun cenderung membaik terutama pada 2021-2023. Pada tahun 2021, target PLKPK ditetapkan sebesar 1,09%, namun realisasi justru lebih tinggi yakni 1,31%, atau hanya tercapai 79,8% dari target, yang mengindikasikan bahwa penanganan kawasan kumuh masih belum optimal pada awal periode RPJMD.

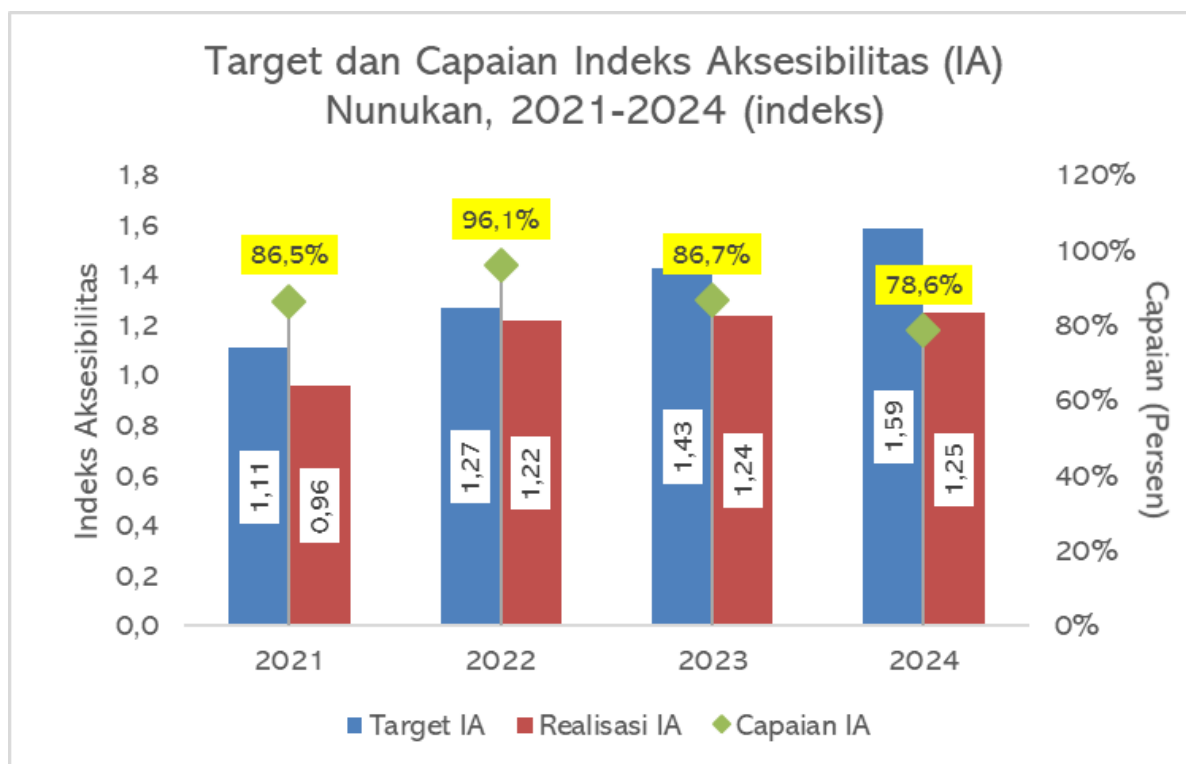
Memasuki tahun 2022 hingga 2023, capaian mulai menunjukkan perbaikan dengan penurunan persentase kawasan kumuh. Pada tahun 2022, realisasi PLKPK tercatat sebesar 1,17% dari target 1,07% dengan capaian 90,7%. Tahun 2023, capaian semakin mendekati target, dengan

realisasi 1,09% dari target 1,04% atau capaian 95,2%. Namun pada tahun 2024, terjadi sedikit kenaikan persentase kawasan kumuh menjadi 1,14%, lebih tinggi dari target 1,00%, sehingga capaian menurun menjadi 86,0%.

Secara umum, evaluasi hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun awal RPJMD, meskipun masih terdapat tantangan dalam menekan angka kawasan kumuh hingga mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kawasan kumuh perlu lebih diintensifkan, terutama dalam dua tahun terakhir RPJMD, agar tujuan pembangunan lingkungan yang layak dan sehat dapat tercapai sesuai rencana.

10) Indeks Aksesibilitas; Indeks Aksesibilitas (IA) menjadi salah satu indikator strategis untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan dan infrastruktur publik. Berdasarkan data capaian indikator sasaran hingga tahun 2024, terlihat bahwa capaian indeks aksesibilitas secara nilai indeks capaian realisasi indikator kinerja indeks aksesibilitas selalu meningkat, dari nilai indeks sebesar 0,96 pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,25 pada tahun 2024. Namun, secara prosentase cenderung fluktuatif dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Nunukan 2021-2026. Pada tahun 2021, target indeks aksesibilitas ditetapkan sebesar 1,11 namun realisasi hanya mencapai 0,96 atau 86,5% dari target. Meskipun belum sesuai harapan, terdapat perbaikan signifikan di tahun 2022, di mana capaian meningkat menjadi 96,1% dengan realisasi 1,22 dari target 1,27.

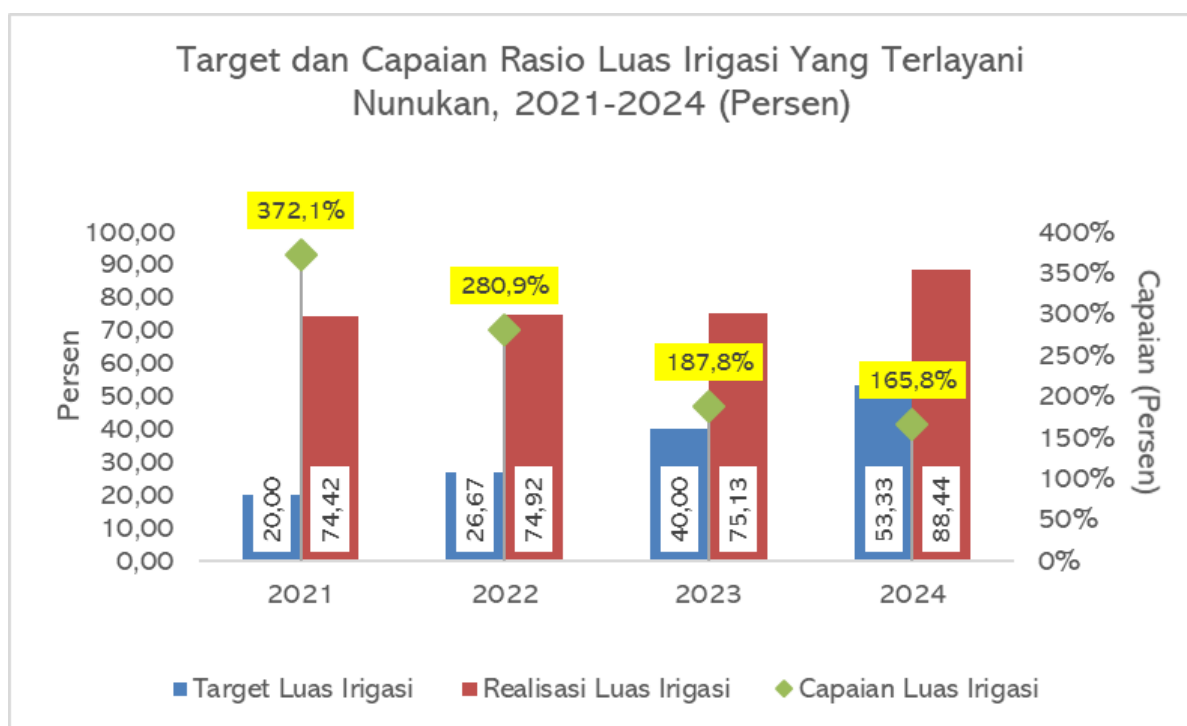
Gambar 45. Target dan Capaian Indikator Indeks Aksesibilitas Nunukan Tahun 2021-2024



Namun, perkembangan positif ini tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2023, meskipun target dinaikkan menjadi 1,43, realisasi hanya berada pada angka 1,24, sehingga capaian turun kembali menjadi 86,7%. Penurunan capaian semakin jelas pada tahun 2024, di mana target ditetapkan 1,59 tetapi realisasi masih stagnan di angka 1,25, menghasilkan capaian terendah dalam empat tahun terakhir yaitu 78,6%. Secara umum, evaluasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Nunukan. Kenaikan target yang agresif tidak diiringi dengan peningkatan realisasi yang sebanding, sehingga diperlukan upaya penguatan program dan intervensi yang lebih efektif agar target RPJMD dapat dicapai secara optimal hingga akhir periode 2026. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah Nunukan untuk pelayanan masyarakat dan distribusi barang jasa dalam rangka menghubungkan transportasi baik darat maupun sungai.

- 11) **Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi;** rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menjadi indikator kunci dalam mengukur kemajuan pembangunan infrastruktur pertanian. Berdasarkan data capaian hingga tahun 2024, kinerja pelayanan irigasi menunjukkan tren yang sangat positif dengan capaian realisasi yang jauh melampaui target. Pada tahun 2021, target luas irigasi hanya sebesar 20,00 namun realisasinya mencapai 74,42 atau 372,1% dari target. Capaian luar biasa ini berlanjut pada tahun 2022, meskipun target meningkat menjadi 26,67, realisasi tetap tinggi di angka 74,92 dengan capaian 280,9%.

Gambar 46. Target dan Capaian Indikator Rasio Luas Irigasi yang Terlayani Nunukan Tahun 2021-2024



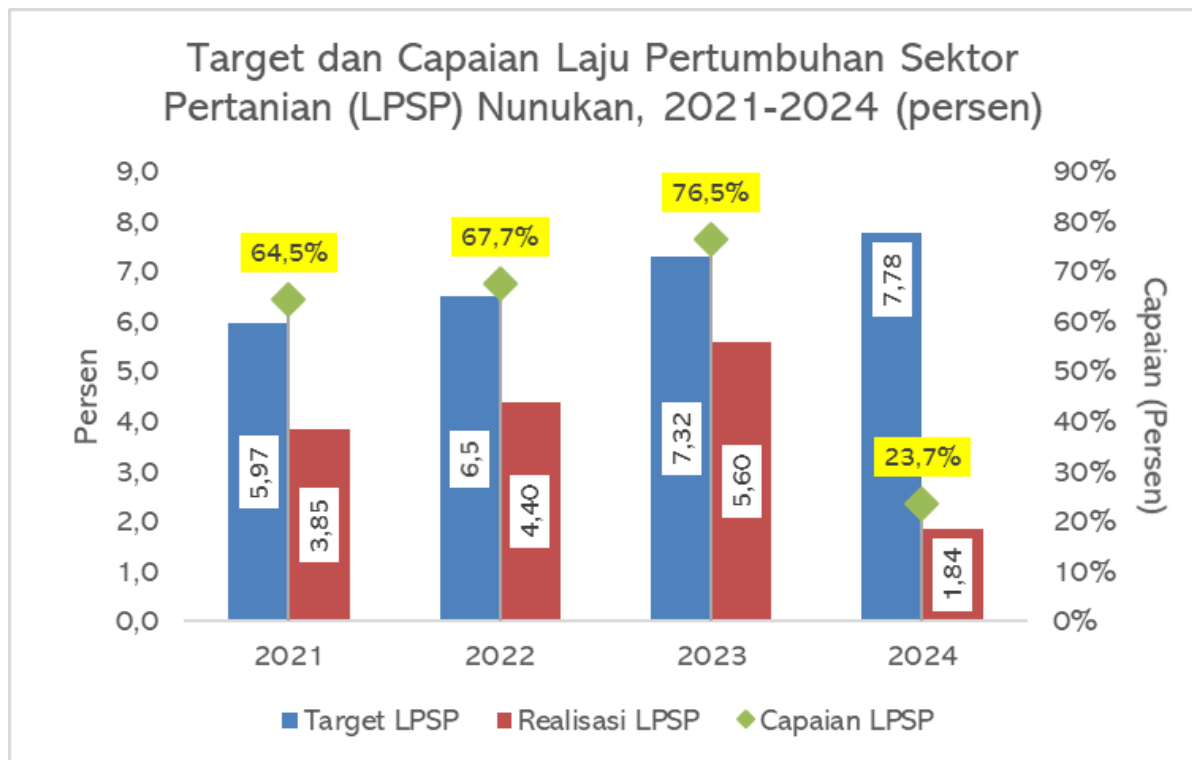
Namun, meskipun target terus dinaikkan setiap tahunnya, capaian persentasenya mengalami penurunan secara bertahap. Pada 2023, target ditingkatkan menjadi 40,00 dan realisasi mencapai 75,13 dengan capaian 187,8%. Begitu juga di tahun 2024, target sebesar 53,33 direalisasikan sebesar 88,44 atau capaian 165,8%. Secara umum, selama periode evaluasi hingga tahun 2024, pelayanan jaringan irigasi kabupaten Nunukan telah melebihi target yang ditetapkan, namun tren capaian

persentase mengalami penurunan akibat peningkatan target yang semakin ambisius. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan telah berhasil meningkatkan pelayanan jaringan irigasi secara konsisten, namun untuk menjaga persentase capaian tetap tinggi, perlu adanya penyesuaian target atau percepatan pengembangan jaringan irigasi di tahun-tahun berikutnya.

Namun, berdasarkan keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan, disebutkan bahwa data target yang ada dalam RPJMD Nunukan 2021-2026 terlalu rendah, yang menyebabkan capaian realisasinya cenderung tinggi. Hal ini menjadi catatan di mana perlu ada perumusan target yang lebih rasional berdasarkan konteks dan realisasi capaian tahun terakhir, tentu dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran juga faktor yang mendukung dan menghambat capaian indikator tersebut.

- 12) **Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian;** Laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang sangat strategis bagi perekonomian daerah, menunjukkan tren yang tidak stabil dan berujung pada capaian yang sangat rendah di 2024. Tahun 2021 pertumbuhan sektor pertanian tercatat 3,85%, jauh di bawah target 5,97%, atau capaian hanya 64,5%. Tahun 2022 membaik menjadi 4,4%, tetap di bawah target 6,5% (capaian 67,7%). Tahun 2023 capaian 5,6%, mendekati target 7,32% (76,5%), namun tahun 2024 justru anjlok menjadi 1,84% dari target 7,78%, atau hanya 23,7% capaian target.

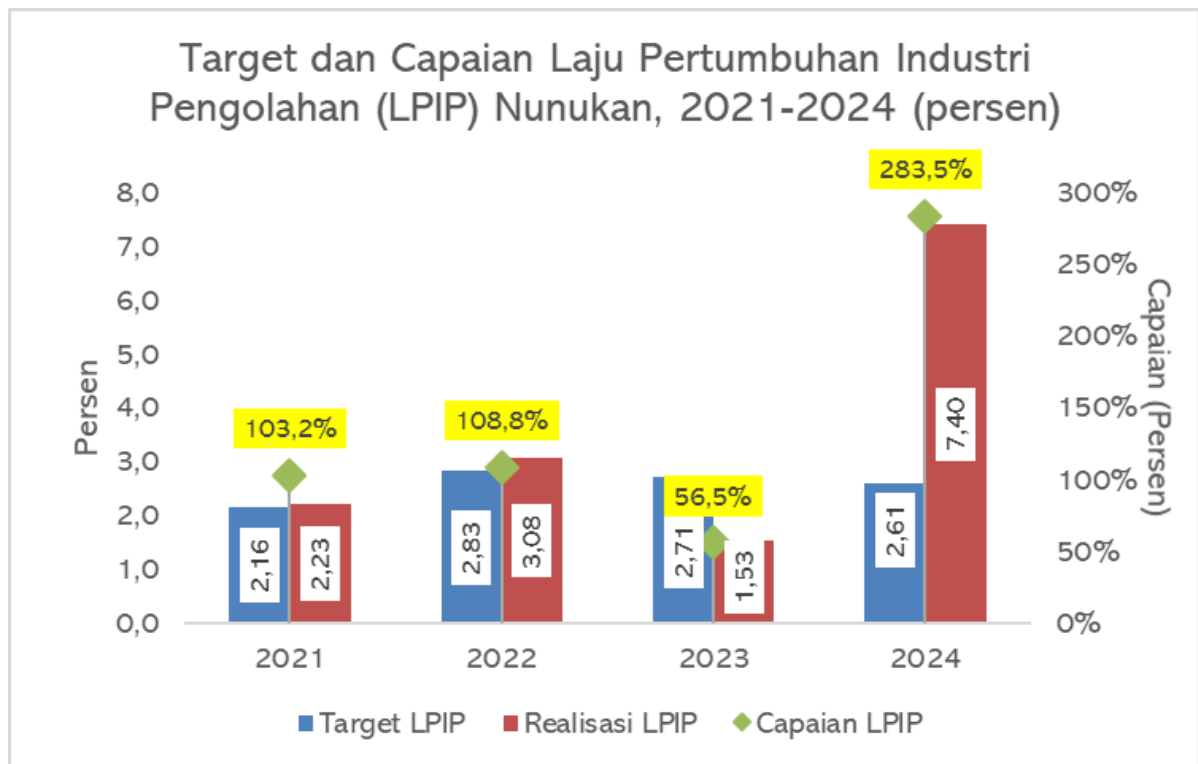
Gambar 47. Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Nunukan Tahun 2021-2024



Tren ini menunjukkan adanya masalah serius dalam produktivitas pertanian, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, gangguan iklim, alih fungsi lahan, serta lemahnya pembinaan dan inovasi teknologi pertanian. Dibutuhkan revitalisasi sektor pertanian melalui modernisasi alat produksi, perluasan irigasi fungsional, perlindungan lahan produktif, serta program pemberdayaan petani secara intensif.

- 13) **Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan**, sebaliknya, menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target secara konsisten. Tahun 2021 capaian sebesar 2,23%, lebih tinggi dari target 2,16% (103,2% capaian). Tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai 3,08% dan 1,53%, tetap melampaui target tahunan. Tahun 2024 terjadi lonjakan drastis menjadi 7,4%, jauh melampaui target 2,61%, atau 283,5% capaian target.

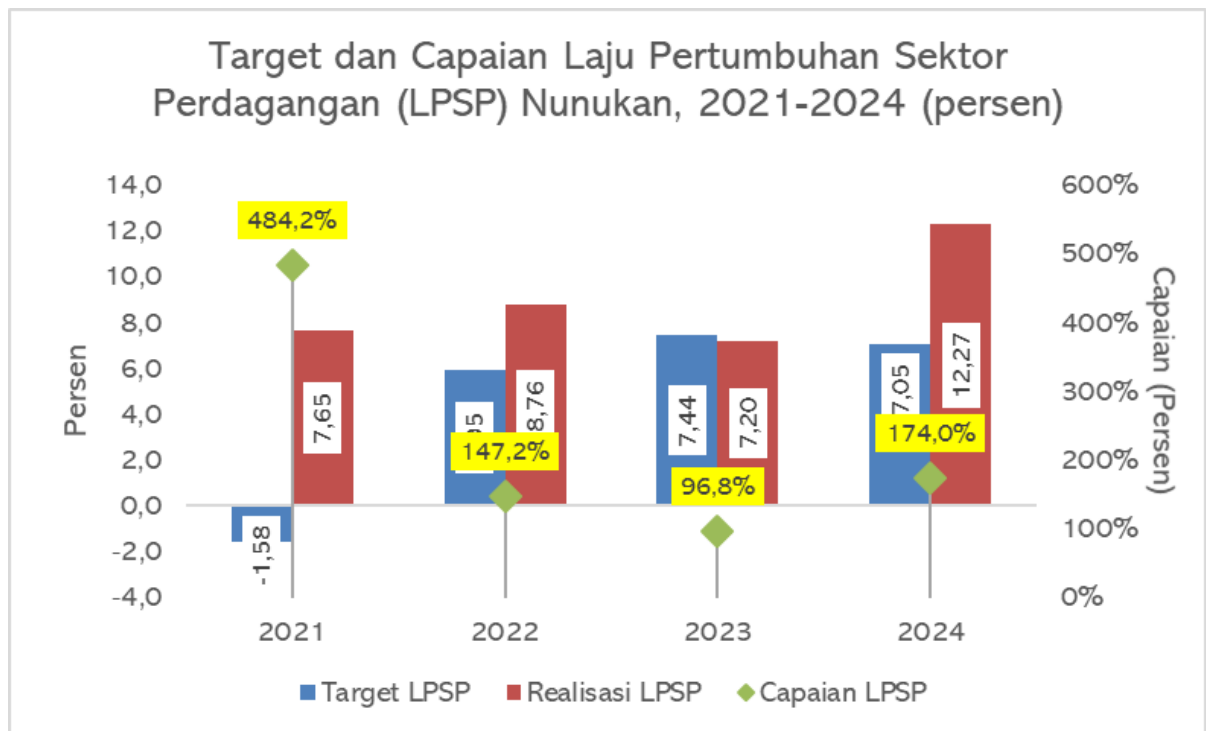
Gambar 48. Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Nunukan Tahun 2021-2024



Kondisi ini menunjukkan adanya akselerasi signifikan di sektor industri pengolahan, yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Namun, perlu dipastikan bahwa pertumbuhan ini bersifat inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, termasuk dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah produk daerah.

- 14) **Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan:** indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan menunjukkan dinamika yang sangat positif hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, target pertumbuhan sektor perdagangan dipatok rendah di angka -1,58% mengingat dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi. Namun demikian, realisasi menunjukkan lonjakan signifikan dengan pertumbuhan sebesar 7,65% atau capaian sebesar 484,2% dari target. Kinerja luar biasa ini menggambarkan pemulihan ekonomi daerah yang jauh lebih cepat dari perkiraan awal.

Gambar 49. Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Nunukan Tahun 2021-2024



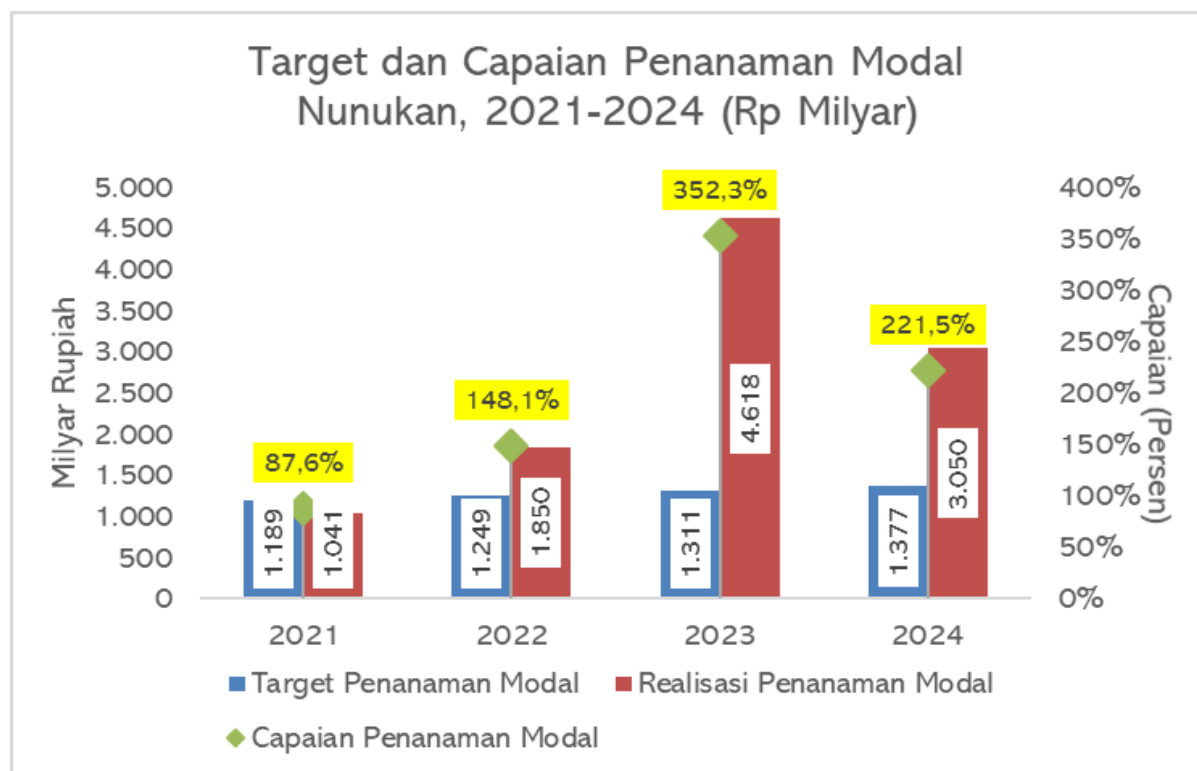
Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun target pertumbuhan sektor perdagangan dinaikkan secara bertahap, realisasi tetap mampu melampaui target di sebagian besar tahun. Pada 2022, target sebesar 5,95% berhasil terlampaui dengan realisasi 8,76% atau capaian 147,2%. Di tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian di mana target sebesar 7,44% hanya terealisasi sebesar 7,20% atau 96,8%, sedikit di bawah target. Namun pada 2024, pertumbuhan sektor perdagangan kembali melonjak dengan realisasi 12,27% dari target 7,05%, menghasilkan capaian 174,0%. Secara keseluruhan, sektor perdagangan di Kabupaten Nunukan menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang sangat baik. Kinerja ini memberikan kontribusi positif terhadap dinamika ekonomi daerah dan menjadi kekuatan pendorong dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Tren ini menandakan sektor perdagangan mulai pulih dan tumbuh pesat, didukung kemungkinan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan daya beli masyarakat, serta perbaikan infrastruktur distribusi. Agar pertumbuhan ini berkelanjutan, perlu didorong

peningkatan daya saing produk lokal, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pasar dan jaringan distribusi antarwilayah.

- 15) **Nilai Realisasi Penanaman Modal**, indikator realisasi penanaman modal merupakan indikator penting untuk mengukur iklim investasi daerah. Indikator nilai realisasi penanaman modal menunjukkan tren peningkatan signifikan hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, target penanaman modal ditetapkan sebesar Rp1,189 triliun, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp1,04 triliun atau 87,6% dari target. Meskipun capaian awal periode masih di bawah target, kondisi ini mengalami peningkatan drastis pada tahun 2022, di mana target sebesar Rp1,249 triliun dapat terlampaui dengan realisasi Rp1,85 triliun atau capaian mencapai 148,1%.

Gambar 50. Target dan Capaian Indikator Penanaman Modal Nunukan Tahun 2021-2024

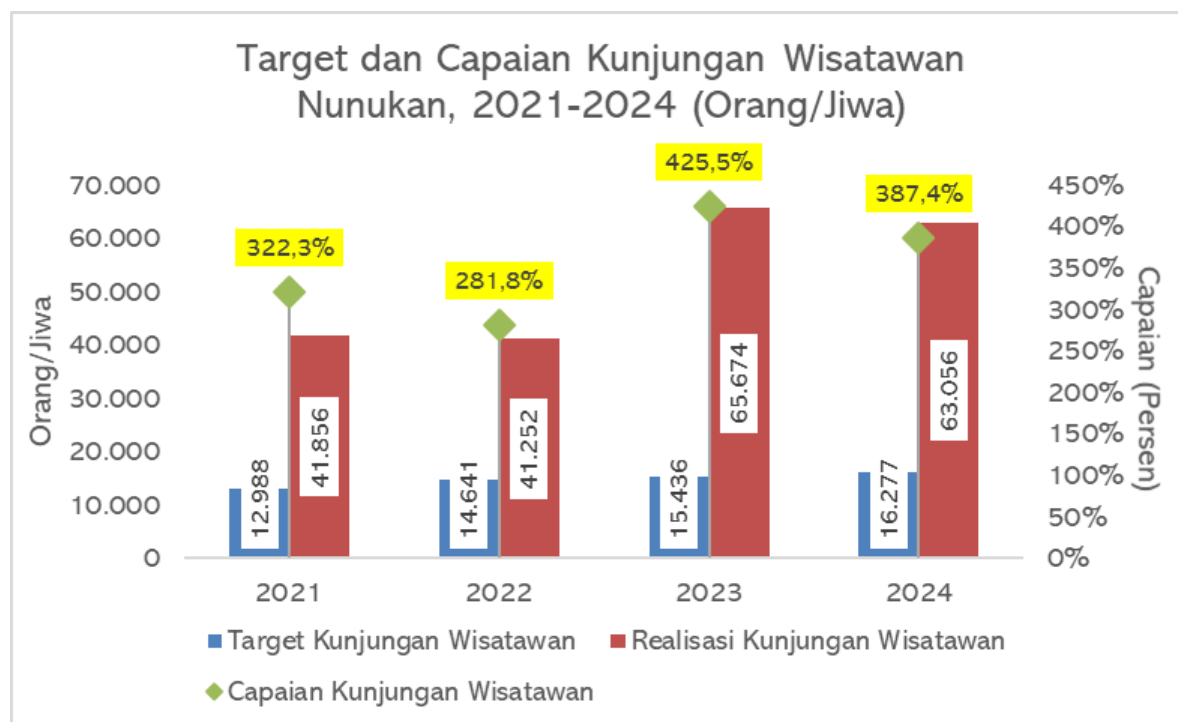


Kinerja investasi semakin membaik di tahun 2023, dengan lonjakan capaian yang sangat signifikan. Target penanaman modal sebesar Rp1,311 triliun berhasil dilampaui lebih dari tiga kali lipat dengan realisasi mencapai Rp4,62 triliun atau 352,3%. Meskipun pada tahun

2024 terdapat sedikit penurunan nilai realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp3,05 triliun, capaian tetap sangat baik dengan 221,5% dari target Rp1,377 triliun. Secara keseluruhan, perkembangan indikator penanaman modal selama empat tahun evaluasi RPJMD menunjukkan pertumbuhan investasi yang sangat positif, bahkan jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Nunukan serta perbaikan tata kelola layanan investasi di daerah. Tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor ke Kabupaten Nunukan, yang dapat didorong oleh perbaikan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan stabilitas daerah. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan memberi kontribusi riil bagi penciptaan lapangan kerja lokal.

- 16) **Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara):** indikator kunjungan wisatawan menunjukkan pencapaian yang sangat menggembirakan hingga tahun 2024. Data menunjukkan bahwa sepanjang periode 2021-2024, realisasi kunjungan wisatawan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, target kunjungan wisatawan ditetapkan sebesar 12.988, namun realisasinya jauh melebihi ekspektasi dengan jumlah kunjungan mencapai 41.856 wisatawan, atau setara dengan capaian 322,3%. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata mulai pulih dengan cepat pasca pandemi, didukung oleh geliat aktivitas pariwisata lokal.

Gambar 51. Target dan Capaian Indikator Kunjungan Wisatawan Nunukan Tahun 2021-2024



Tren positif terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2022, meskipun target dinaikkan menjadi 14.641, realisasi kunjungan tetap tinggi di angka 41.252, dengan capaian 281,8%. Lonjakan signifikan terjadi di tahun 2023, di mana kunjungan wisatawan melonjak menjadi 65.674 dari target 15.436, menghasilkan capaian 425,5%. Tahun 2024 menunjukkan tren stabil dengan realisasi kunjungan 63.056 wisatawan dari target 16.277 atau capaian sebesar 387,4%. Secara keseluruhan, hingga tahun keempat RPJMD, sektor pariwisata Kabupaten Nunukan berkembang sangat baik, melampaui target secara konsisten. Hal ini mencerminkan potensi wisata daerah yang terus meningkat dan mampu menjadi salah satu sektor andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun data capaian indikator ini meningkat signifikan, namun jika dilihat dari data dasar atau baseline indikator menunjukkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Nunukan 2021-2026 terlihat tidak optimis atau targetnya rendah. Hal tersebut terlihat dari data awal indikator ini sudah mencapai 49.214 kunjungan, dan target tahun 2021 ditetapkan sebesar

12.988 atau 26,4% lebih rendah dari data baseline, dengan realisasi mencapai 41.856 kunjungan.

17) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

Indikator SAKIP menunjukkan capaian yang stabil dan sesuai target. Tahun 2021 hingga 2024 secara konsisten berada di kategori “B”, capaian realisasi skor yang terus meningkat dari 61,71 menjadi 64,56 di kategori “B”. Realisasi capaian dari nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 mencapai target dengan nilai 100%. Sayangnya, dari target yang ditetapkan hanya menunjukkan kategori “B” saja, tanpa menyebutkan nilai dari kategori tersebut. Konsistensi ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Namun, untuk mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi, diperlukan upaya peningkatan efektivitas perencanaan, penguatan sistem pengukuran kinerja, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Sebagai pembelajaran dalam penentuan indikator seperti ini, sebaiknya diperjelas dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan capaiannya yang sudah disebutkan “nilai SAKIP” maka sebaiknya, target yang dirumuskan dimasukkan nilai dan kategorinya. Sehingga dapat diukur capaiannya secara kuantitatif. Pembelajaran ini juga dapat diterapkan pada indikator sejenis seperti maturitas SPIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

18) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan indikator untuk mengukur pengendalian dan kredibilitas birokrasi yang diharapkan dapat mencegah penyimpangan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Dalam RPJMD Nunukan 2021-2026 disebutkan bahwa target yang ditetapkan dalam satuan level SPIP dengan keterangan persentase OPD dengan status terdefinisi. Sementara realisasi capaiannya hanya menunjukkan level SPIP saja. Berdasarkan keterangan dari Inspektorat bahwa penilaian SPIP adalah penilaian daerah secara keseluruhan, tidak bisa dibuat parsial dalam perangkat daerah. Maka

tidak dimungkinkan untuk diukur persentase SPIP OPD terhadap total OPD.

Tabel 13. Target dan Realisasi Capaian Indikator Maturitas SPIP Nunukan Tahun 2021-2024

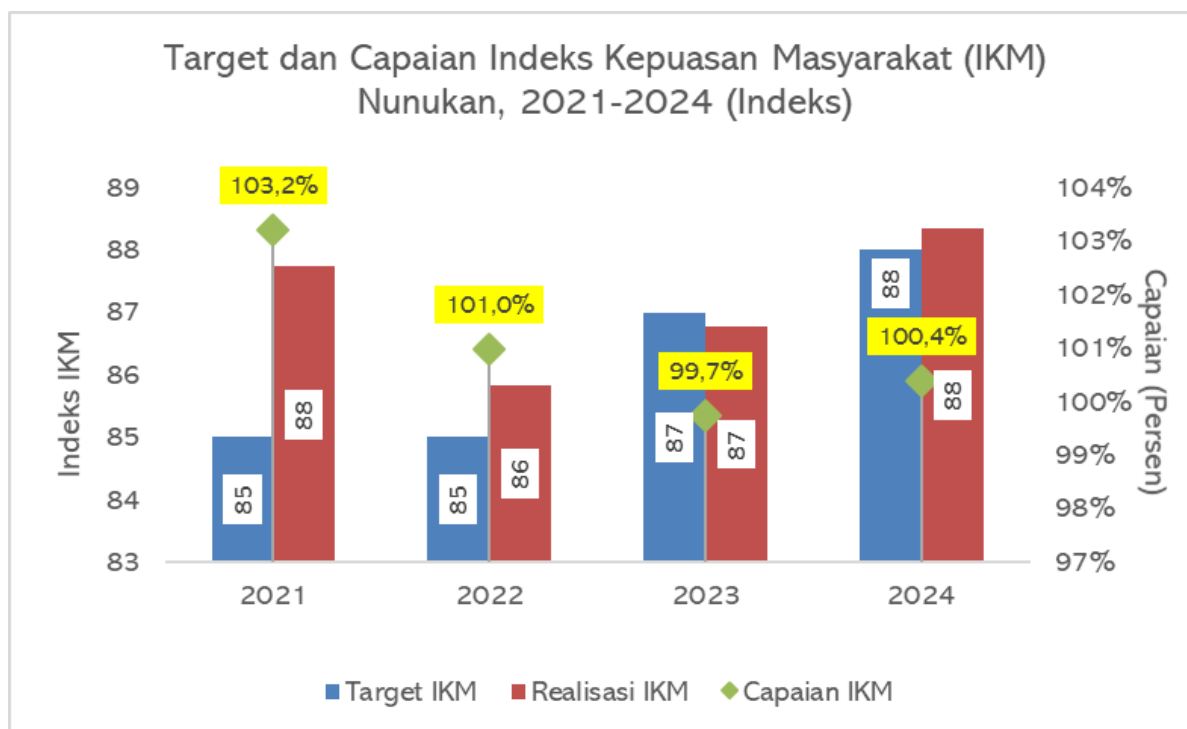
Maturitas SPIP

Uraian	2021	2022	2023	2024
Target	3	3	3	3
Realisasi	3	3	3	3
Capaian	100%	100%	100%	100%

Target dan capaian dari SPIP pada 2021-2024 menunjukkan level 3 dengan realisasi yang sama yaitu level 3, maka capaian kinerja dari indikator ini sebesar 100% dari 2021 sampai dengan tahun 2024. Meskipun secara level dapat dihitung, namun secara gradasinya tidak terlihat perkembangannya. Hal ini menjadi penting dalam evaluasi kinerja untuk merumuskan indikator kinerja yang sesuai dengan mekanisme konsep indikator penilaiannya. Agar pengukuran penilaian kinerja dapat dilakukan secara baik untuk melihat sejauh mana upaya dan capaian kinerja dari perangkat daerah yang berkontribusi atas indikator tersebut.

- 19) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data hingga tahun 2024, kinerja IKM menunjukkan capaian yang relatif stabil dan cukup baik. Pada tahun 2021, target IKM ditetapkan sebesar 85 dan realisasi mampu melampaui target dengan nilai 88 atau capaian sebesar 103,2%. Capaian positif ini berlanjut di tahun 2022 dengan realisasi IKM sebesar 86 dari target 85, sehingga capaian IKM berada pada angka 101,0%.

Gambar 52. Target dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021-2024

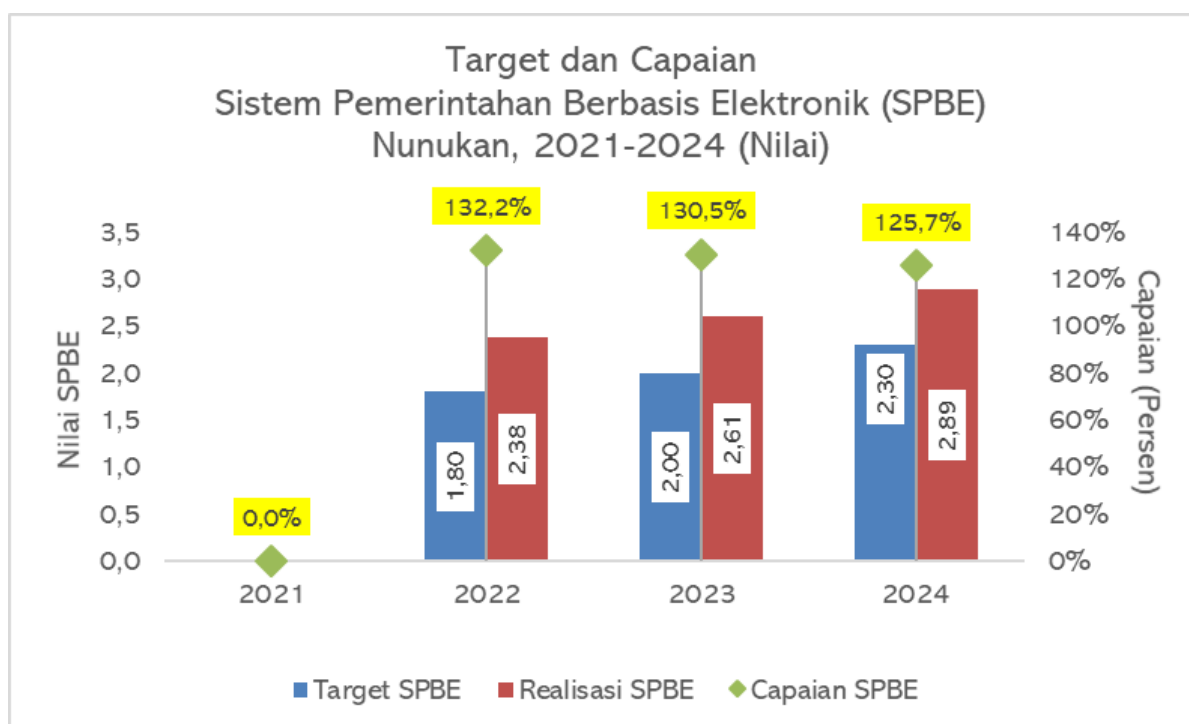


Namun, pada tahun 2023 capaian IKM sedikit menurun, di mana target IKM dinaikkan menjadi 87 namun realisasi hanya dapat memenuhi target secara nominal, sehingga capaian sedikit turun menjadi 99,7%. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 88 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kembali melampaui target tipis di angka 100,4%. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan publik Kabupaten Nunukan menunjukkan kecenderungan stabil dengan tingkat kepuasan masyarakat yang konsisten berada pada kategori baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa layanan publik secara umum mampu memenuhi harapan masyarakat, namun diperlukan penguatan kualitas layanan secara berkelanjutan agar peningkatan IKM dapat terus terjaga hingga akhir periode RPJMD. Namun, perlu diwaspadai penurunan di 2022-2023, dan dilakukan analisis lebih dalam terkait aspek layanan publik yang masih lemah, agar perbaikan lebih terarah.

- 20) **Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);** indikator Nilai Mandiri SPBE menunjukkan tren capaian yang sangat

positif pada periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2021 tidak terdapat data target maupun capaian, karena belum ada perhitungan SPBE sehingga tidak dapat dihitung capaian SPBE untuk tahun tersebut. Namun mulai tahun 2022, target SPBE ditetapkan sebesar 1,80 dan realisasi mampu mencapai 2,38 atau setara dengan capaian 132,2%, menunjukkan performa pengembangan layanan digital pemerintahan yang melebihi ekspektasi.

Gambar 53. Target dan Capaian Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2021-2024

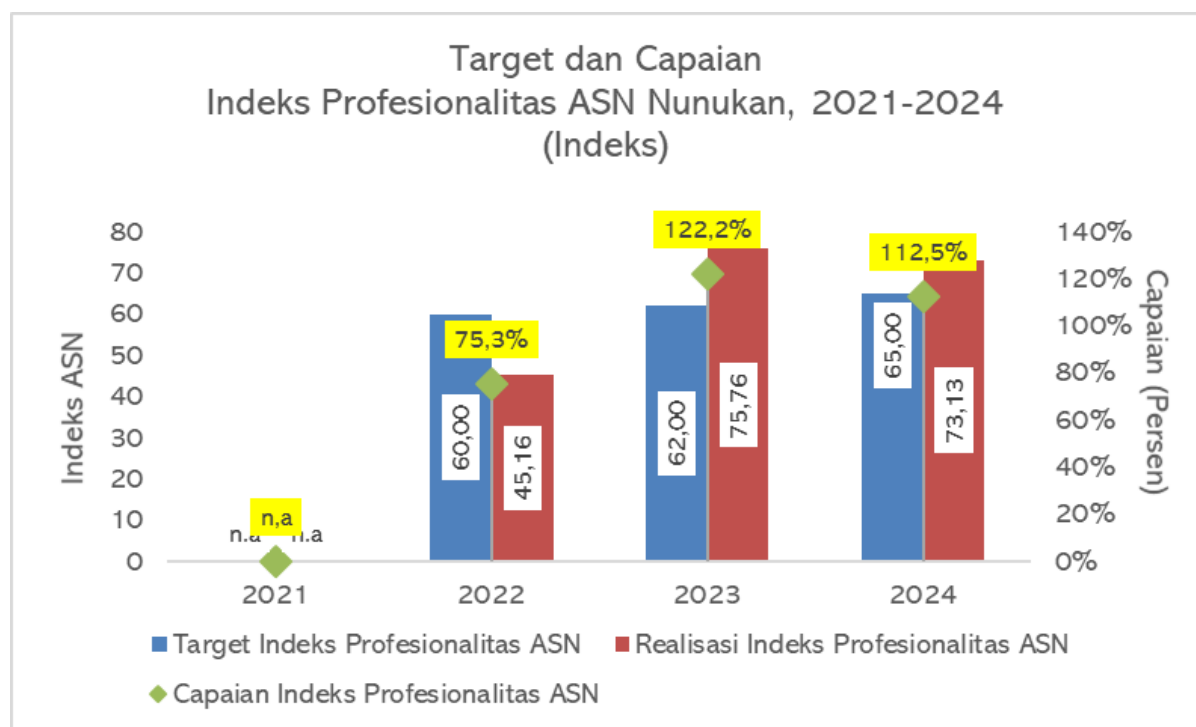


Perkembangan positif terus berlanjut di tahun 2023, di mana target SPBE naik menjadi 2,00 dan kembali terlampaui dengan realisasi sebesar 2,61 atau capaian 130,5%. Pada tahun 2024, meskipun target meningkat lebih tinggi menjadi 2,30, realisasi tetap mampu mengungguli target dengan capaian 125,7%. Secara keseluruhan, data capaian hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Nunukan berjalan cukup efektif dan konsisten melampaui target tahunan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa upaya peningkatan layanan berbasis elektronik terus berkembang secara

signifikan, yang diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan di masa mendatang.

- 21) **Indeks Profesionalitas ASN;** Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia birokrasi. Berdasarkan data yang tersedia sejak tahun 2022 hingga 2024, capaian indeks profesionalitas ASN menunjukkan tren kinerja yang cukup dinamis. Pada tahun 2022, target profesionalitas ASN ditetapkan sebesar 60 poin, namun realisasi hanya mencapai 45,16 poin atau sekitar 75,3% dari target yang ditetapkan, mencerminkan bahwa pada awal pengukuran indeks ini, profesionalisme ASN masih rendah kapasitas dan kinerja di bawah standar yang diharapkan.

Gambar 54. Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Nunukan Tahun 2021-2024



Namun, perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika realisasi meningkat tajam menjadi 75,76, jauh melampaui target sebesar 62,00, dengan capaian sebesar 122,2%. Kinerja positif ini sedikit menurun pada tahun 2024, di mana meskipun target dinaikkan menjadi 65,00, realisasi sebesar 73,13 tetap lebih tinggi dari target, dengan capaian 112,5%.

Secara keseluruhan, capaian indeks profesionalitas ASN menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama sejak 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN Kabupaten Nunukan, yang diharapkan mampu mendukung kualitas pelayanan publik yang lebih baik, meskipun tetap diperlukan penguatan konsistensi agar capaian tetap terjaga secara stabil hingga akhir periode RPJMD.

- 22) **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);** Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan suatu daerah. IPKD mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah dalam periode tertentu.

Tabel 14. Target dan Realisasi Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Nunukan Tahun 2021-2024

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

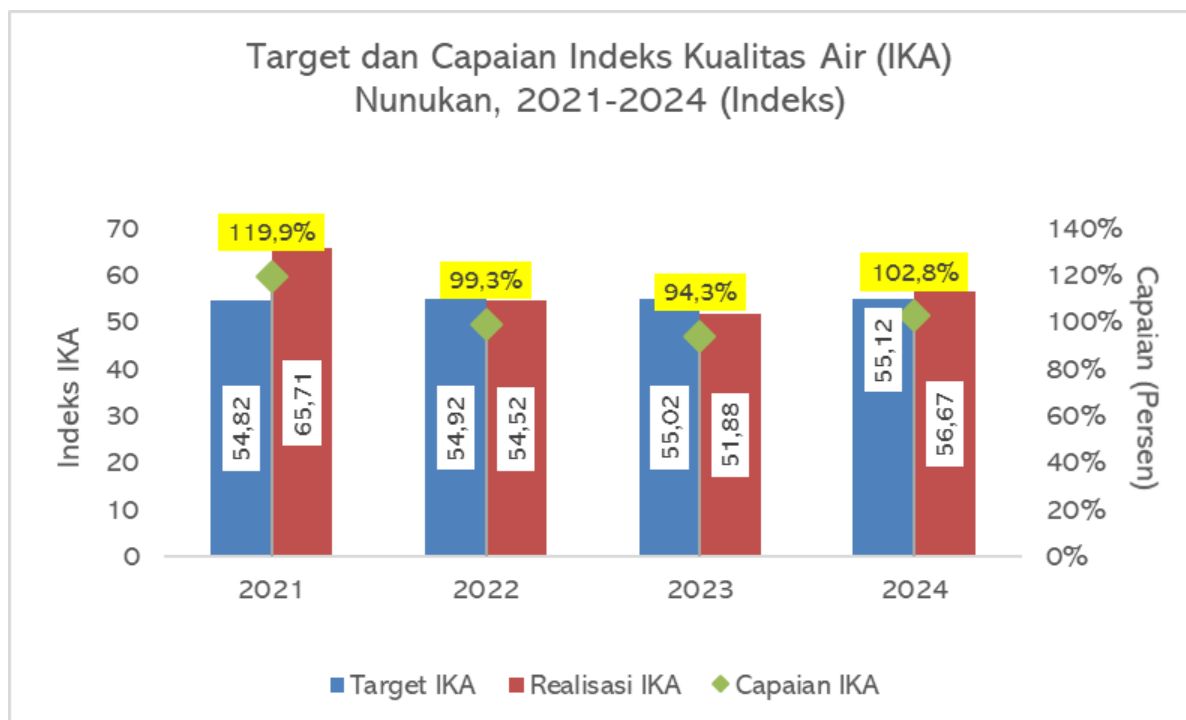
Uraian	2021	2022	2023	2024
Target	t.a.d	B	B	B
Realisasi	n.a	63,978 (B)	58,315 (C)	72,32 (B)
Capaian	n.a	100%	<90%	100%

Berdasarkan rekapitulasi data indikator sasaran dalam evaluasi RPJMD Nunukan menunjukkan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2024 yang cenderung stabil dengan status “B”. Sedangkan realisasi pelaksanaannya, capaian dari IPKD selama 2022-2024, capaian berada di kategori “B”, sesuai target, namun sempat menurun ke “C” pada tahun 2023, dan tahun 2024 kembali ke “B” dengan skor 72,32. Untuk mengukur capaiannya, tidak didasarkan pada nilainya tetapi pada status atau kategori dari IPKD, jadi capaian 2021 sebesar 100% atau mencapai target yang ditentukan, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi “C” dan target tidak tercapai, jika dihitung dengan capaian berkisar <90%, dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi “B” dengan capaian kembali

mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah, peningkatan kapasitas manajemen keuangan, serta pengawasan yang ketat untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- 23) **Indeks Kualitas Air (IKA);** Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, target IKA ditetapkan sebesar 54,82 dan berhasil terlampaui secara signifikan dengan realisasi mencapai 65,71 atau 119,9% dari target. Capaian tersebut menunjukkan kondisi kualitas air yang jauh lebih baik dibandingkan standar yang direncanakan, menjadi capaian terbaik sepanjang periode evaluasi.

Gambar 55. Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) Nunukan Tahun 2021-2024

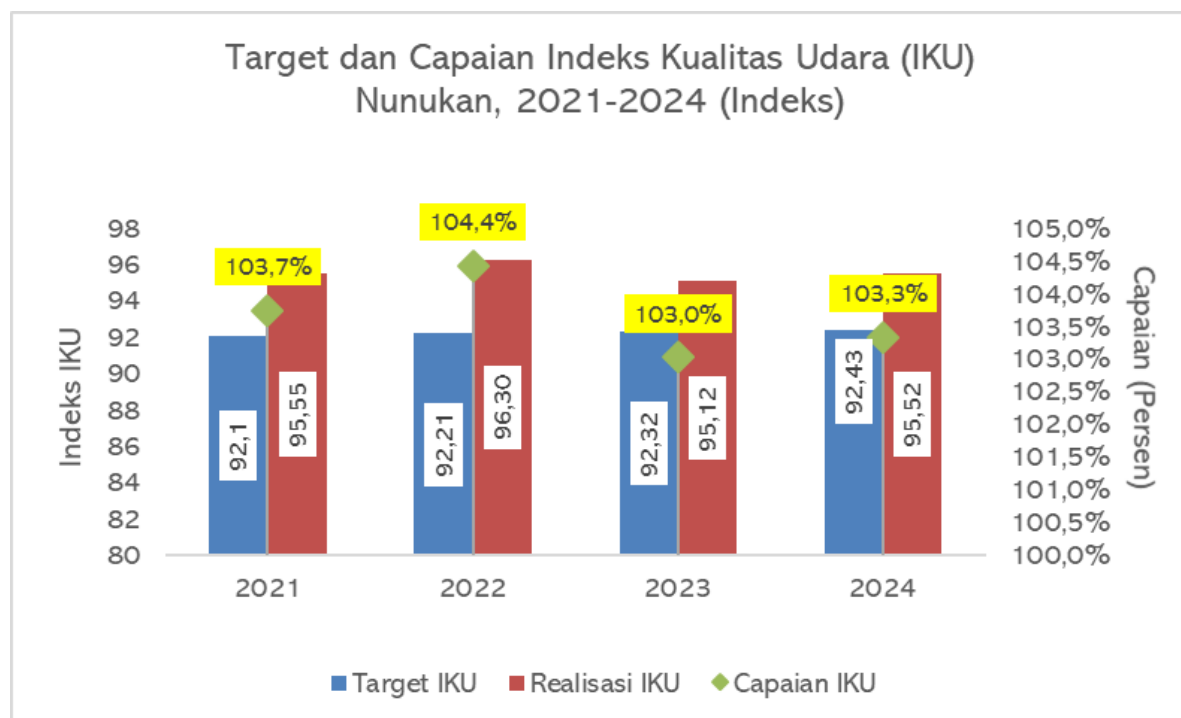


Namun, tren capaian menurun pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022, target sebesar 54,92 hanya terealisasi sebesar 54,52 dengan capaian 99,3%, sedikit di bawah target. Penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi menurun lagi menjadi 51,88 dari target 55,02 atau capaian 94,3%. Pada tahun 2024 terjadi perbaikan, di mana

realisasi meningkat menjadi 56,67, melampaui target sebesar 55,12 atau capaian 102,8%. Secara umum, fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas air yang konsisten dari tahun ke tahun. Walaupun sempat mengalami penurunan pada 2022-2023, perbaikan pada 2024 menunjukkan potensi peningkatan yang masih bisa dioptimalkan untuk menjaga lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

- 24) **Indeks Kualitas Udara (IKU);** Dalam evaluasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kinerja yang konsisten positif hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, target IKU ditetapkan sebesar 92,10 dan realisasi berhasil mencapai 95,55 atau capaian 103,7%, mengindikasikan kondisi kualitas udara yang lebih baik dibandingkan target awal. Tren positif ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2022 target naik sedikit menjadi 92,21 namun realisasi meningkat lebih tinggi menjadi 96,30, dengan capaian 104,4%.

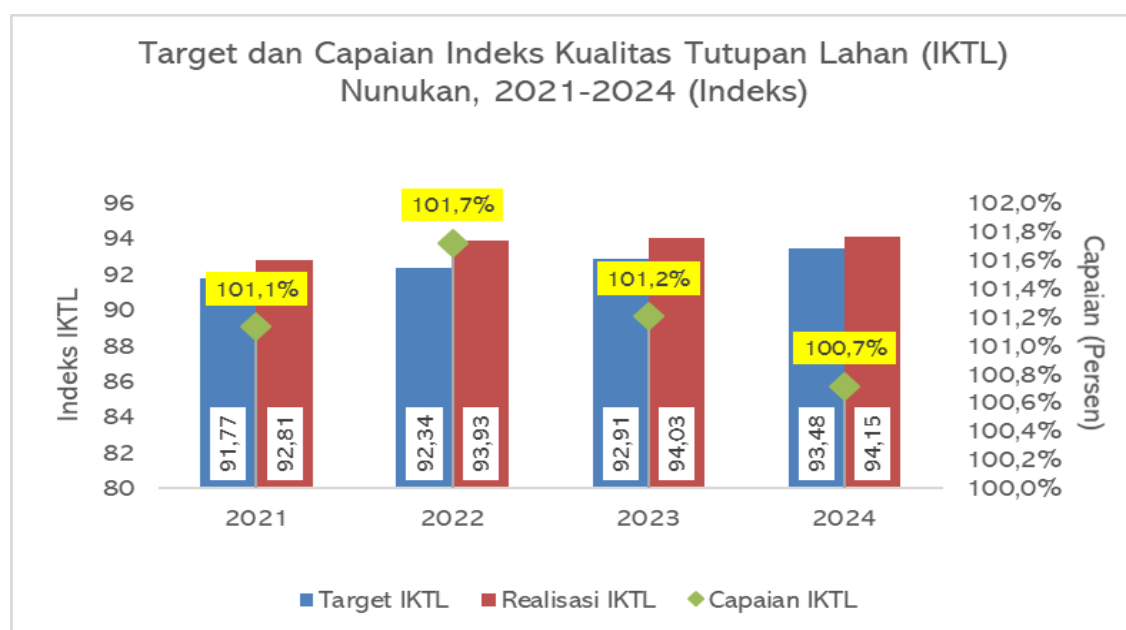
Gambar 56. Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) Nunukan Tahun 2021-2024



Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, pada tahun 2023 dan 2024, capaian IKU tetap konsisten melampaui target. Pada 2023, realisasi IKU sebesar 95,12 atau 103,0% dari target 92,32, dan tahun 2024 mencapai 95,52 atau 103,3% dari target 92,43. Secara umum, hingga tahun keempat RPJMD, Kabupaten Nunukan berhasil menjaga kualitas udara tetap berada pada kategori baik dan stabil melebihi standar yang direncanakan. Hasil ini menunjukkan efektivitas kebijakan lingkungan daerah dan pengelolaan sumber pencemar yang cukup baik, serta menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ke depan.

- 25) **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);** Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan positif hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, target IKTL ditetapkan sebesar 91,77 dengan realisasi mencapai 92,81 atau capaian 101,1%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan tutupan lahan berada dalam kondisi baik, dengan realisasi yang secara konsisten melampaui target yang telah ditentukan.

Gambar 57. Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Nunukan Tahun 2021-2024

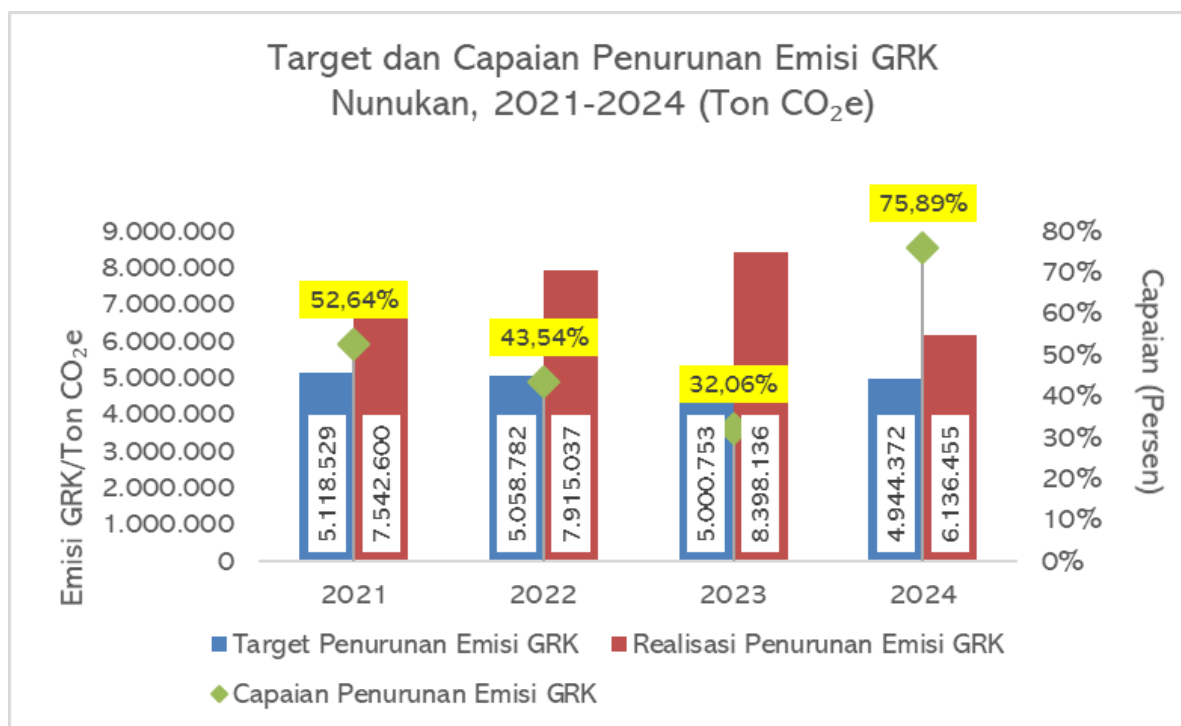


Tren capaian positif ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022, realisasi meningkat menjadi 93,93 dari target 92,34 atau capaian 101,7%. Di tahun 2023 dan 2024, capaian tetap berada di atas target masing-masing sebesar 101,2% dan 100,7%. Secara keseluruhan, data menunjukkan Kabupaten Nunukan berhasil menjaga keberlanjutan lingkungan hidup khususnya dalam menjaga kualitas tutupan lahan. Konsistensi capaian di atas target mencerminkan pengelolaan lahan yang efektif, yang sangat penting untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Namun demikian penurunan capaian pada 3 tahun terakhir menjadi tantangan dalam menjaga dan meningkatkan skor IKTL ke depan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan atas konversi lahan, berkolaborasi dan sinergi dengan pemerintahan desa dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti perhutanan sosial, baik hutan desa, hutan kemasyarakatan, maupun hutan adat, dan skema hutan sosial lainnya.

- 26) **Penurunan Emisi GRK;** indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) memiliki norma negatif, di mana semakin kecil realisasi emisi GRK mencerminkan kinerja lingkungan yang semakin baik. Berdasarkan data hingga tahun 2024, target penurunan emisi GRK secara bertahap ditetapkan semakin menurun, dari 5.118.529 ton CO₂e pada tahun 2021 menjadi 4.944.372 ton CO₂e di tahun 2024. Namun, realisasi justru menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding target, berkisar antara 6 juta hingga 8 juta ton CO₂e.

Gambar 58. Target dan Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK Nunukan Tahun 2021-2024

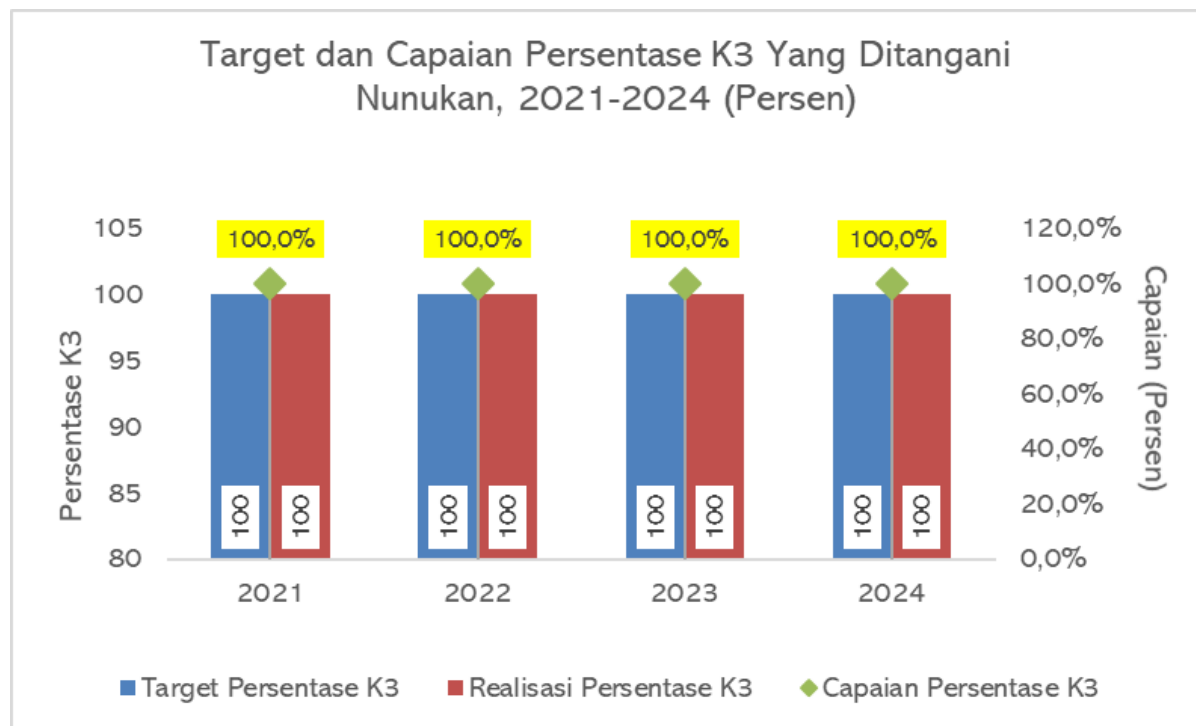


Capaian persentase menunjukkan tren kurang menggembirakan, yakni hanya 52,64% pada 2021 dan sempat turun signifikan hingga titik terendah 32,06% di tahun 2023, sebelum sedikit membaik menjadi 75,89% pada tahun 2024. Dengan pendekatan norma negatif, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian emisi GRK. Meskipun target tahunannya sudah diarahkan turun, pengurangan emisi belum optimal, bahkan realisasi seringkali jauh di atas target. Ke depan, perlu penguatan program pengendalian emisi, pengawasan aktivitas penyumbang emisi seperti penggunaan energi fosil dan konversi lahan, serta penguatan peran sektor kehutanan dan energi terbarukan agar target penurunan emisi lebih realistis dan efektif tercapai.

- 27) **Persentase Pelanggaran K3 yang Tertangani;** indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) menunjukkan kinerja yang sangat optimal selama empat tahun evaluasi. Sepanjang periode 2021 hingga 2024, target penanganan pelanggaran K3 setiap tahun ditetapkan sebesar 100%, dan realisasinya selalu tercapai

100% setiap tahunnya. Capaian penuh ini mengindikasikan bahwa seluruh pelanggaran K3 yang terdeteksi berhasil ditangani secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Gambar 59. Target dan Capaian Indikator Persentase K3 Yang Ditangani, Nunukan Tahun 2021-2024

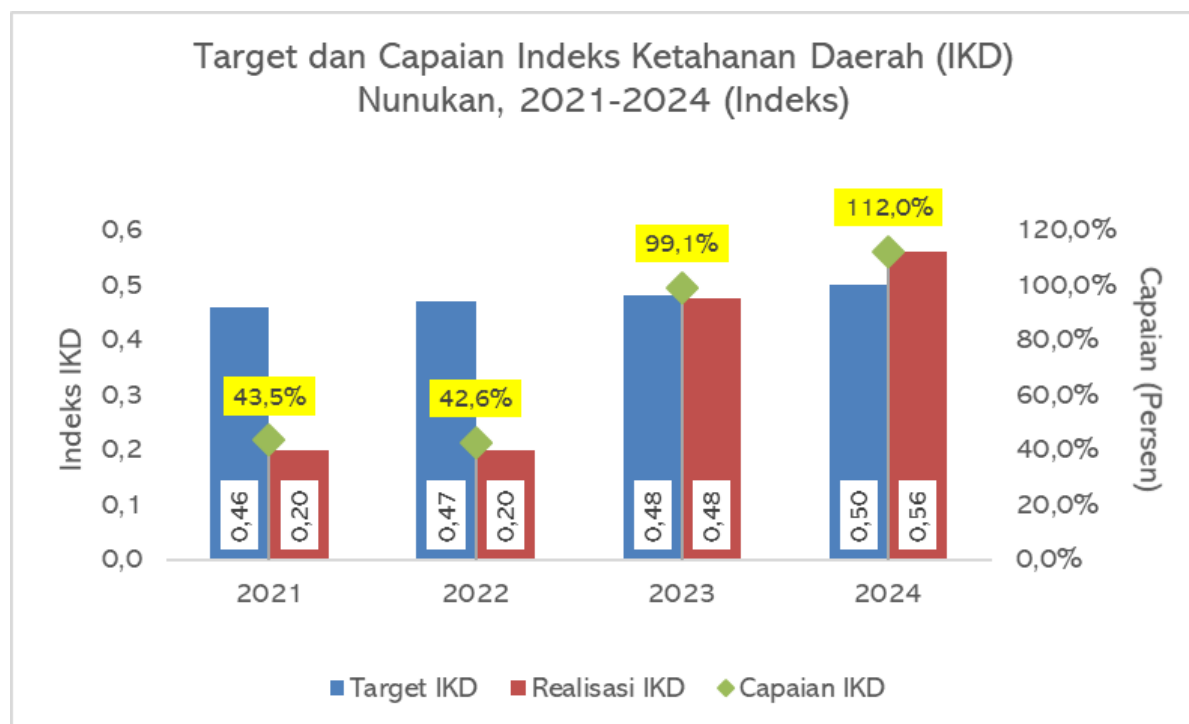


Kinerja yang konsisten ini menjadi cerminan adanya sistem pengawasan dan penegakan ketertiban umum yang berjalan efektif, serta respons cepat dari pihak berwenang dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan keindahan wilayah Kabupaten Nunukan. Capaian ini juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga capaian 100%, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan K3, termasuk penguatan upaya pencegahan pelanggaran, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan wilayah yang semakin tertib dan indah.

- 28) **Indeks Ketahanan Daerah;** Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menunjukkan pola capaian yang cukup dinamis, dengan peningkatan

signifikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, target IKD ditetapkan sebesar 0,46 namun realisasi hanya mencapai 0,20 atau setara dengan 43,5% dari target. Capaian serupa terjadi pada tahun 2022, di mana target meningkat menjadi 0,47 namun realisasi tetap stagnan di angka 0,20, sehingga capaian sedikit turun menjadi 42,6%. Dua tahun awal menunjukkan tantangan besar dalam upaya membangun ketahanan daerah, terutama dalam aspek pencegahan risiko bencana maupun penguatan kapasitas adaptasi daerah.

Gambar 60. Target dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Nunukan Tahun 2021-2024



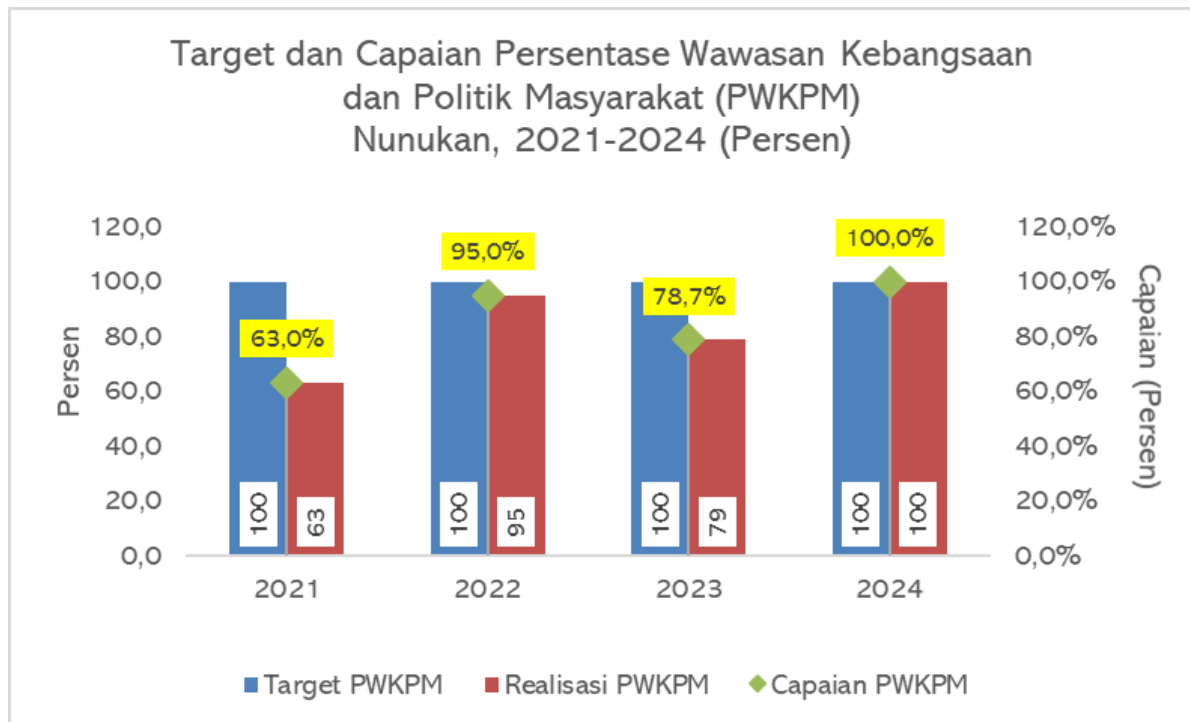
Namun, tren positif mulai terlihat sejak tahun 2023, di mana target sebesar 0,48 berhasil direalisasikan hampir sepenuhnya dengan capaian 99,1%. Bahkan pada tahun 2024, realisasi IKD mencapai 0,56, jauh melampaui target 0,50 atau sebesar 112,0%. Data ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada dua tahun terakhir evaluasi RPJMD. Secara umum, capaian IKD menggambarkan peningkatan ketahanan daerah yang signifikan, setelah periode awal yang cukup lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan dalam pengurangan risiko bencana, ketahanan sosial, dan ekonomi mulai menunjukkan

dampak yang positif. Ke depan, tren ini perlu dipertahankan dengan penguatan kebijakan adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana, serta penguatan kelembagaan ketahanan daerah.

Meskipun capaian IKD cenderung meningkat, namun berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa untuk mengoptimalkan capaian IKD, diperlukan kolaborasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, karena dalam sub indikator penilaian IKD tidak hanya dikonstruksikan dari kinerja BPBD saja, namun ada juga kontribusi capaian dari perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, harapannya perlu ada sinergitas dan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya yang dapat difasilitasi oleh perangkat yang berwenang, seperti BPBD, Bappeda atau Sekretariat Daerah.

- 29) **Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan;** indikator Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat (PPWKPM) menunjukkan kinerja yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 100% hanya terealisasi sebesar 63%, dengan capaian 63,0%. Capaian ini menunjukkan bahwa program-program peningkatan wawasan kebangsaan dan politik belum berjalan optimal pada awal periode RPJMD, kemungkinan karena berbagai kendala baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun efektivitas program sosialisasi.

Gambar 61. Target dan Capaian Indikator Persentase Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat 2021-2024



Perbaikan cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana realisasi meningkat menjadi 95%, mendekati target dengan capaian 95,0%. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan, di mana realisasi hanya 79% atau capaian 78,7%. Baru pada tahun 2024, capaian target berhasil maksimal dengan realisasi 100% sesuai target. Secara umum, data menunjukkan bahwa kinerja PPWKPM mengalami perkembangan positif meskipun sempat mengalami fluktuasi. Capaian 100% di tahun 2024 menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program di bidang wawasan kebangsaan semakin membaik. Ke depan, penting untuk menjaga konsistensi pencapaian ini dengan penguatan edukasi politik yang merata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

4.3.3. Evaluasi Kontribusi Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tujuan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi terhadap enam tujuan pembangunan Kabupaten Nunukan, dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan kecenderungan ketimpangan antar bidang. Beberapa tujuan seperti peningkatan daya saing ekonomi (melalui pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi) serta peningkatan ketertiban dan keamanan menunjukkan capaian indikator yang relatif baik dan konsisten, bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tujuan-tujuan lain seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan wilayah, penguatan tata kelola pemerintahan, dan perlindungan lingkungan, masih terlihat capaian yang belum optimal, bahkan beberapa indikator menunjukkan stagnasi, penurunan, atau ketiadaan data, seperti yang terjadi pada indikator pengeluaran per kapita, penurunan emisi GRK, dan sebagian indikator tata kelola.

Keterhubungan antara indikator sasaran dan tujuan pembangunan secara umum sudah logis sesuai prinsip *logical framework*, di mana indikator sasaran menjadi instrumen ukur operasional terhadap capaian indikator tujuan. Namun demikian, ketidakseimbangan capaian antar indikator sasaran, seperti lemahnya capaian pada sektor pertanian, aksesibilitas wilayah, pemberdayaan gender, dan sistem data statistik, berimplikasi pada belum optimalnya capaian indikator tujuan secara agregat. Hal ini sejalan dengan teori *systems thinking*, di mana pembangunan adalah sistem yang saling terkait, sehingga kelemahan pada satu komponen (indikator sasaran) dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem (indikator tujuan). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah untuk memperkuat indikator-indikator sasaran yang masih lemah, sekaligus memastikan ketersediaan data yang valid dan berkelanjutan sebagai basis pengambilan keputusan pembangunan daerah.

4.3.3.1. Kontribusi Indikator Sasaran terhadap Indikator IPM Kab. Nunukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara global maupun nasional dihitung berdasarkan tiga dimensi utama yang merepresentasikan kualitas pembangunan manusia. Dimensi pertama adalah dimensi pendidikan yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). ARLS mencerminkan capaian pendidikan penduduk usia dewasa, sementara HLS menggambarkan proyeksi lamanya waktu belajar anak-anak yang memasuki usia sekolah. Dimensi kedua adalah dimensi kesehatan yang diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang menunjukkan rata-rata usia harapan hidup penduduk sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran per Kapita, yang menjadi proksi untuk melihat tingkat daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. Di luar ketiga dimensi utama tersebut, terdapat indikator lain yang secara tidak langsung mempengaruhi capaian IPM, seperti Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ketiga indikator ini memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup dan penguatan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Tabel 15. Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan & Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Misi 1-Tujuan 1	Indek Pembangunan Manusia	66,46	67,16	68,43	69,27
Sasaran 1	Angka Rata Rata Lama Sekolah (Poin)	8,17	8,24	8,26	8,39
Sasaran 2	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Poin)	12,65	12,67	12,68	12,69

Sasaram 3	Angka Harapan Hidup (Poin)	71,4	71,41	71,42	73,13
Sasaran 4	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)				
Sasaram 5	Tingkat kemiskinan (%)	6,79	6,13	5,53	5,73
Sasaran 6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,24	2,71	2,69	2,71
Sasaran 7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,67	77,41	78,68	73,85

Berdasarkan data capaian pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini, yang secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara maupun nasional, sangat berkaitan erat dengan kinerja pencapaian indikator-indikator sasarannya yang belum optimal. IPM Nunukan pada tahun 2024 tercatat sebesar **69,27**, meningkat dari tahun sebelumnya, namun angka ini masih tergolong rendah dalam klasifikasi nasional, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional yang umumnya berada di atas 70 bahkan 72 poin.

Jika dilihat lebih rinci, terdapat beberapa faktor dari indikator sasaran yang secara langsung berkontribusi terhadap rendahnya IPM Nunukan. Pertama, pada dimensi **pendidikan**, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2024 hanya mencapai **8,39 tahun**, yang berarti rata-rata penduduk dewasa Nunukan hanya mengenyam pendidikan sekitar kelas 2 SMP. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) stagnan di angka **12,69 tahun**, menunjukkan harapan lama sekolah anak-anak di Nunukan belum mampu mencapai target ideal minimal setara dengan jenjang SMA. Rendahnya kedua indikator pendidikan ini menjadi penyumbang utama keterbatasan peningkatan IPM, karena salah satu fondasi utama pembangunan manusia adalah akses dan kualitas pendidikan.

Kedua, pada dimensi **standar hidup layak**, data pengeluaran per kapita selama empat tahun terakhir tidak tersedia. Ketidakhadiran data ini menjadi masalah serius, karena tanpa ukuran daya beli masyarakat yang valid, sulit untuk mengintervensi peningkatan kesejahteraan yang menjadi pilar ketiga dalam penghitungan IPM. Namun, dapat diasumsikan

keterbatasan daya beli turut memengaruhi stagnasi IPM, apalagi jika dikaitkan dengan indikator kemiskinan.

Ketiga, dari sisi **kesejahteraan**, Tingkat Kemiskinan di Nunukan selama 2021-2024 menunjukkan tren fluktuatif yang kurang menggembirakan. Meskipun sempat turun menjadi **5,53%** pada 2023, angka kemiskinan kembali naik menjadi **5,73%** pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan belum konsisten dan efektif, sehingga berdampak pada lambatnya akselerasi peningkatan IPM.

Keempat, dari indikator **kesehatan**, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami tren positif, dari **71,4 tahun** pada 2021 menjadi **73,13 tahun** pada 2024. Peningkatan ini patut diapresiasi, karena menunjukkan ada perbaikan pada aspek layanan dan kualitas kesehatan. Namun, peningkatan AHH ini belum mampu mendorong perbaikan signifikan IPM, karena dimensi pendidikan dan standar hidup masih tertinggal.

Kelima, pada aspek **partisipasi dan kesetaraan**, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Setelah sempat mencapai **78,68** pada 2023, capaian IDG justru turun drastis menjadi **73,85** di 2024. Penurunan IDG ini mengindikasikan memburuknya kondisi kesetaraan gender, partisipasi perempuan, dan peluang akses yang setara, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas pembangunan manusia dan capaian IPM.

Terakhir, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka cukup rendah, yakni **2,71%** pada 2024, hal ini tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup, terutama jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan yang konsisten.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya IPM Nunukan disebabkan oleh kombinasi dari rendahnya capaian di dimensi pendidikan, **tidak tersedianya data pengeluaran per kapita**, fluktuasi tingkat kemiskinan, lemahnya kesetaraan gender, dan ketimpangan antar

sektor pembangunan. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan peningkatan IPM Nunukan ke depan, perlu dilakukan penguatan serius pada sektor pendidikan (baik dari sisi akses maupun kualitas), percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga, perbaikan sistem statistik daerah untuk menjamin ketersediaan data pengeluaran per kapita, serta pemberdayaan gender secara lebih komprehensif. Tanpa intervensi terpadu pada faktor-faktor ini, sulit bagi Kabupaten Nunukan untuk mengejar ketertinggalan IPM dari rata-rata provinsi dan nasional.

4.3.3.2. Kontribusi Indikator Sasaran terhadap Kualitas Infrastruktur

Pencapaian kualitas infrastruktur di Kabupaten Nunukan selama periode 2021 hingga 2024, sebagaimana diukur melalui Indeks Infrastruktur, menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. Indeks Infrastruktur mengalami kenaikan dari 22,11 poin di tahun 2021, menjadi 23,16 poin di 2022, kemudian meningkat lebih signifikan menjadi 28,35 poin di 2023, dan mencapai 29,98 poin pada tahun 2024. Peningkatan yang cukup tajam terutama terjadi pada periode 2022 ke 2023, yang mengindikasikan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur di tahun-tahun tersebut.

Jika ditelusuri lebih dalam, pencapaian Indeks Infrastruktur ini tidak terlepas dari kontribusi indikator-indikator kinerja di tingkat sasaran yang saling terkait. Pertama, dari sisi Rasio Konektivitas Kabupaten, capaian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 44,5% di 2021, naik menjadi 51,43% di 2022, 53,54% di 2023, dan 55,64% di 2024. Artinya, pembangunan konektivitas antar wilayah di Nunukan secara bertahap berhasil ditingkatkan, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan Indeks Infrastruktur secara keseluruhan.

Kedua, terkait Indeks Aksesibilitas, meskipun sempat mengalami kenaikan cukup signifikan dari 0,96 di tahun 2021 menjadi 1,22 di 2022, namun peningkatannya cenderung stagnan di tahun 2023 dan 2024, yaitu masing-masing 1,24 dan 1,25. Artinya, meski aksesibilitas wilayah sudah mulai membaik, namun perbaikan di aspek ini berjalan lambat dan belum

seiring dengan peningkatan konektivitas wilayah. Ketiga, Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi, sayangnya tidak tersedia data yang dapat dianalisis selama periode ini. Ketidakhadiran data ini menjadi catatan penting karena infrastruktur irigasi merupakan komponen krusial dalam mendukung ketahanan pangan, sektor pertanian, dan pemerataan layanan infrastruktur di kawasan pedesaan.

Keempat, indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh menunjukkan perbaikan di awal periode, yaitu menurun dari 1,31% di 2021 menjadi 1,17% di 2022, lalu 1,09% di 2023, namun kembali meningkat menjadi 1,14% di tahun 2024. Peningkatan kawasan kumuh di tahun terakhir ini perlu menjadi perhatian serius, karena secara logis, peningkatan kawasan kumuh dapat berdampak negatif terhadap persepsi dan kualitas infrastruktur, terutama di wilayah perkotaan. Dari seluruh indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Indeks Infrastruktur di Nunukan cukup dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan konektivitas wilayah dan sebagian perbaikan aksesibilitas. Namun demikian, adanya stagnasi aksesibilitas dan peningkatan kembali kawasan kumuh menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal secara merata. Selain itu, ketidaksediaan data terkait irigasi membuat evaluasi kualitas infrastruktur sektor pertanian menjadi tidak komprehensif.

Tabel 16. Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peningkatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Tujuan & Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Misi 2-Tujuan 1	Indeks Infrastruktur	22,11	23,16	28,35	29,98
Sasaran 1	Rasio konektivitas kabupaten	44,5	51,43	53,54	55,64
Sasaran 2	Indeks aksesibilitas	0,96	1,22	1,24	1,25
Sasaran 3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,42	74,92	75,13	88,44
Sasaran 4	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	1,31	1,17	1,09	1,14

Ke depan, untuk memperkuat kontribusi indikator sasaran terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain: percepatan pembangunan aksesibilitas wilayah yang lebih inklusif, pengendalian kawasan kumuh secara konsisten, dan perbaikan sistem data serta pembangunan jaringan irigasi yang terintegrasi. Tanpa perbaikan aspek-aspek tersebut, peningkatan Indeks Infrastruktur berpotensi stagnan dan kurang mampu memberikan dampak optimal terhadap pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

4.3.3.3. Kontribusi Indikator Sasaran terhadap Tujuan Pembangunan Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata

Berdasarkan data capaian indikator pembangunan Kabupaten Nunukan untuk tujuan peningkatan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder, dan pariwisata, dapat disimpulkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Nunukan selama periode 2021-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Nunukan tercatat sebesar 4,04%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 5,24% pada 2022. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 4,16%, dan sedikit membaik di tahun 2024 menjadi 4,28%. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5% lebih, capaian Nunukan masih berada di bawah rata-rata nasional. Demikian pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang umumnya lebih tinggi, capaian Nunukan menunjukkan bahwa akselerasi ekonominya masih perlu ditingkatkan.

Dari analisis per sektor, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Nunukan banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan sangat impresif, dari 7,65% pada 2021, meningkat menjadi 8,76% di 2022, meski sempat melambat ke 7,2% di 2023, tetapi kemudian melonjak tajam menjadi 12,27%

di 2024. Begitu pula sektor industri pengolahan, yang meski sempat tumbuh relatif rendah di 2021 dan 2022, bahkan turun ke 1,53% di 2023, namun berhasil melesat ke angka 7,4% pada 2024. Capaian sektor ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan adanya perbaikan struktur ekonomi melalui penguatan sektor hilirisasi dan nilai tambah industri.

Sebaliknya, sektor pertanian yang merupakan sektor primer andalan Nunukan menunjukkan kinerja yang kurang stabil. Pertumbuhan sektor ini relatif moderat di 2021-2023, masing-masing 3,85%, 4,4%, dan 5,6%, namun mengalami penurunan drastis menjadi hanya 1,84% pada 2024. Hal ini patut menjadi perhatian serius, mengingat sektor pertanian masih menjadi basis mata pencaharian utama masyarakat di banyak wilayah Nunukan. Lemahnya pertumbuhan sektor pertanian ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, baik dalam distribusi pendapatan maupun penguatan ekonomi pedesaan.

Dari sisi investasi, nilai realisasi penanaman modal Nunukan menunjukkan tren yang cukup baik, dengan kenaikan signifikan dari Rp 1,041 miliar pada 2021 menjadi Rp 4,618 miliar di 2023. Namun, di tahun 2024 justru mengalami penurunan menjadi Rp 3,05 miliar. Penurunan ini bisa menjadi alarm dini, karena keberlanjutan investasi sangat menentukan stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Tabel 17. Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata

Tujuan & Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Misi 3-Tujuan 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,04	5,24	4,16	4,28
Sasaran 1	Laju pertumbuhan sektor pertanian	3,85	4,4	5,6	1,84
Sasaran 2	Laju pertumbuhan industri pengolahan	2,23	3,08	1,53	7,4
Sasaran 3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	7,65	8,76	7,2	12,27
Sasaran 4	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,041	1,85	4,618	3,05

Secara umum dapat disimpulkan, capaian pertumbuhan ekonomi Nunukan saat ini masih belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan nasional maupun provinsi. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan saat ini berasal dari sektor perdagangan dan industri pengolahan. Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar pada sektor pertanian yang perlu segera diperbaiki. Ke depan, penguatan sektor pertanian, percepatan hilirisasi industri, serta perbaikan iklim investasi menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Nunukan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat sektoral, tetapi mampu berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

4.3.3.4. Kontribusi Indikator Sasaran Terhadap Tujuan Pembangunan Reformasi Birokrasi

Pembangunan reformasi birokrasi di Kabupaten Nunukan dalam empat tahun terakhir memperlihatkan langkah-langkah perbaikan yang perlahan namun pasti, meskipun belum sepenuhnya merata di semua aspek. Jika melihat capaian Indeks Reformasi Birokrasi, ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Di tahun 2021 dan 2022, posisi Kabupaten Nunukan masih di kategori CC, yang artinya birokrasi masih dalam tahap awal pembenahan. Namun, memasuki 2023, indeks ini naik menjadi B, lalu meningkat lagi ke level BB di 2024. Artinya, perubahan mulai terasa, ada perbaikan nyata dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, meski perjalanan menuju birokrasi yang profesional dan melayani sepenuhnya masih panjang.

Dari sisi Nilai SAKIP, Kabupaten Nunukan juga menunjukkan peningkatan konsisten. Mulai dari B (61,71) di 2021, sedikit demi sedikit naik menjadi B (64,56) di 2024. Kenaikan ini mencerminkan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pemerintahan mulai berjalan lebih baik, meski masih ada ruang besar untuk meningkatkan

kualitas akuntabilitas secara keseluruhan. Namun, ada catatan penting di aspek pengendalian internal pemerintah daerah. Maturitas SPIP, yang seharusnya mengukur sejauh mana sistem pengawasan internal berjalan, hingga kini datanya belum tersedia. Ketiadaan data ini tentu jadi kekhawatiran tersendiri, karena tanpa pengawasan yang kuat, sulit memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik mengalami fluktuasi. Di 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 87,73, lalu sedikit turun ke 85,83 di 2022, naik lagi menjadi 88,35 di 2024. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan pemerintah, tapi tentunya masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya memastikan layanan publik lebih cepat, mudah diakses, dan merata ke semua wilayah. Di bidang digitalisasi, ada kemajuan meskipun belum sepenuhnya optimal. Nilai Mandiri SPBE meningkat dari 2,38 di 2022 menjadi 2,61 di 2023. Ini pertanda bahwa pemerintah daerah sudah mulai berbenah dan mengembangkan layanan berbasis elektronik. Namun, capaian ini masih tergolong sedang. Ke depan, digitalisasi perlu terus dipercepat agar pelayanan publik semakin efisien dan masyarakat lebih mudah mengakses informasi serta layanan pemerintahan.

Hal positif juga terlihat dari peningkatan signifikan Indeks Profesionalitas ASN, yang melonjak dari 45,16 di 2022 menjadi 75,76 di 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 73,13 di 2024. Ini menunjukkan adanya upaya serius dalam meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur, meski tantangan menjaga konsistensi pembinaan tetap besar. Terkait pengelolaan keuangan daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengalami dinamika naik turun. Setelah sempat turun ke kategori C di 2023, IPKD kembali membaik ke kategori B (72,32) di 2024. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah mulai stabil, meski masih perlu penguatan agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar transparan dan efisien.

Tabel 18. Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Reformasi Birokrasi

Tujuan & Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Misi 4-Tujuan 1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	BB
Sasaran 1	Nilai SAKIP	B (61,71)	B (63,00)	B (64,3)	B (64,56)
Sasaran 2	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Sasaran 3	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,73	85,83	86,77	88,35
Sasaran 4	Nilai Mandiri SPBE	n.a	2,38	2,61	
Sasaran 5	Indeks Profesionalitas ASN	n.a	45,16	75,76	73,13
Sasaran 6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	n.a	63,978 (B)	58,315 (C)	72,32 (B)

Melihat keseluruhan capaian ini, jelas bahwa reformasi birokrasi di Nunukan memang sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Tapi jalan yang harus ditempuh masih panjang. Penguatan pengawasan internal, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembinaan ASN harus terus dilakukan secara konsisten. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, ke depan birokrasi di Nunukan bisa semakin profesional, bersih, dan benar-benar hadir untuk melayani masyarakat.

4.3.3.5. Kontribusi Indikator Sasaran Terhadap Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup untuk periode 2021 hingga 2024, terlihat dinamika kinerja yang beragam, dengan kecenderungan masih adanya ketimpangan antar indikator serta kelemahan dari sisi konsistensi dan ketersediaan data.

Tabel 19. Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup

Tujuan & Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Misi 5-Tujuan 1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,73	80,07	78,62	80,61
Sasaran 1	Indeks Kualitas Air	65,71	54,52	51,88	56,67
Sasaran 2	Indeks Kualitas Udara	95,55	96,3	95,12	95,52
Sasaran 3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92,81	93,93	94,03	94,15
Sasaran 4	Penurunan emisi GRK: Total Emisi (Juta ton)	7,542	7,915	8,398	6,136
	Emisi Bersih	n.a	n.a	n.a	n.a
	Total Sekuestrasi	n.a	n.a	n.a	n.a

Secara umum, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang menjadi indikator utama untuk tujuan pembangunan lingkungan hidup, mengalami fluktuasi cukup tajam. Pada tahun 2021 capaian indeks ini berada di angka 83,73, namun terjadi penurunan signifikan pada 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 80,07 dan 78,62. Penurunan ini mengindikasikan terjadinya degradasi kualitas lingkungan dalam dua tahun berturut-turut. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan menjadi 80,61, namun angka ini belum sepenuhnya pulih ke capaian awal tahun 2021. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah masih belum konsisten dan memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing indikator sasaran terhadap capaian tujuan tersebut, terlihat adanya ketidakseimbangan antar komponen penyusun. Pada Indeks Kualitas Air, capaian tahun 2021 sempat cukup tinggi di angka 65,71, namun mengalami penurunan drastis di tahun-tahun berikutnya, dengan capaian tahun 2022 sebesar 54,52, tahun 2023 turun lagi menjadi 51,88, dan pada 2024 sedikit membaik di angka 56,67.

Penurunan tajam ini berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong turunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan, mengingat kualitas air menjadi elemen krusial dalam ekosistem lingkungan dan kesehatan masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek pengelolaan kualitas air, baik dari sisi pengendalian pencemaran maupun konservasi sumber daya air, masih belum optimal dan perlu diperkuat secara serius.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara cenderung stabil dan relatif baik sepanjang periode 2021–2024. Capaian indeks ini berkisar antara 95,12 hingga 96,3, menunjukkan bahwa aspek kualitas udara sudah cukup terjaga dan berkontribusi positif terhadap capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Meski demikian, tetap dibutuhkan upaya preventif untuk menjaga agar kualitas udara tidak mengalami penurunan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti peningkatan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan potensi kebakaran hutan.

Pada sisi Indeks Kualitas Tutupan Lahan, terlihat tren capaian yang relatif stabil dan bahkan mengalami sedikit peningkatan. Capaian tahun 2021 sebesar 92,81, kemudian meningkat menjadi 93,93 di 2022, 94,03 di 2023, dan 94,15 di 2024. Stabilitas dan peningkatan ini menunjukkan adanya progres dalam upaya perlindungan dan konservasi kawasan hutan, lahan hijau, dan ekosistem penyangga lainnya. Namun demikian, peningkatan ini masih tergolong moderat dan perlu dipastikan bahwa pertumbuhan tutupan lahan ini tidak hanya sekadar angka administratif, melainkan juga berkorelasi dengan peningkatan fungsi ekosistem dan penurunan laju deforestasi.

Catatan khusus perlu diberikan terhadap indikator penting lainnya, yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). terdiri dari total emisi, Emisi Bersih, dan Total Sekuestrasi, yang jauh dari target yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, total emisi di Kabupaten Nunukan adalah 6,134 juta ton CO₂eq. Sedangkan pemerintah daerah belum memiliki data mengenai emisi bersih dan sekuestrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat indikator-indikator tersebut merupakan komponen strategis dalam mengukur

kontribusi daerah terhadap mitigasi perubahan iklim, sekaligus menjadi bagian dari komitmen nasional untuk mencapai target penurunan emisi sebagaimana diatur dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia. Tanpa data yang memadai, pengukuran kinerja daerah terhadap isu perubahan iklim menjadi tidak dapat diverifikasi secara ilmiah dan akuntabel. Hal ini juga menghambat penyusunan strategi intervensi yang tepat sasaran dan berbasis bukti.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan lingkungan hidup di daerah ini masih menunjukkan ketimpangan antar indikator. Beberapa indikator seperti kualitas udara dan tutupan lahan menunjukkan kinerja yang stabil dan cukup baik, namun indikator lainnya, terutama kualitas air, mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu, ketiadaan data pada indikator perubahan iklim menjadi celah besar yang harus segera dibenahi. Diperlukan upaya serius untuk memperkuat sistem pemantauan lingkungan, integrasi data lintas sektor, serta peningkatan efektivitas program-program pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim agar tujuan peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dicapai secara konsisten dan berkelanjutan.

4.3.3.6. Kontribusi Indikator Sasaran Terhadap Tujuan Pembangunan Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram

Berdasarkan data pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ketertiban dan keamanan, dapat dilihat perkembangan yang cukup bervariasi dari tahun 2021 hingga 2024. Indeks Rasa Aman sebagai indikator utama tujuan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, belum terdapat data yang tersedia. Kemudian pada tahun 2022 tercatat sebesar 84,78, namun mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 82,15. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan capaian yang cukup baik hingga mencapai 96,84, yang dapat diartikan adanya peningkatan signifikan persepsi masyarakat terhadap rasa aman di daerah.

Untuk indikator sasaran pertama, yaitu Persentase Pelanggaran K3 yang tertangani, pencapaian menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Selama empat tahun terakhir, capaian indikator ini stabil di angka 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terjadi berhasil ditangani. Hal ini menjadi cerminan positif terkait kesiapsiagaan dan respons pemerintah daerah terhadap isu-isu keselamatan masyarakat.

Indikator sasaran kedua, yaitu Indeks Ketahanan Daerah, menunjukkan adanya tren peningkatan meskipun capaian awalnya masih cukup rendah. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian indeks ini hanya berada di angka 0,2, yang menunjukkan tingkat ketahanan daerah yang masih sangat minim. Namun, di tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,4759, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,56. Meski trennya positif, nilai indeks ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar ideal, sehingga perlu ada upaya serius dalam meningkatkan ketahanan daerah, baik dari sisi kelembagaan, sistem penanggulangan bencana, maupun partisipasi masyarakat.

Sementara itu, indikator sasaran ketiga yaitu Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2021, belum tersedia data capaian. Kemudian pada tahun 2022, capaian berada di angka 63 persen, meningkat menjadi 78,69 persen pada tahun 2023, namun justru mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 66,89 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan politik masih belum konsisten. Penurunan ini dapat menjadi indikator adanya kelemahan dalam program edukasi kebangsaan atau penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran politik dan nasionalisme.

Tabel 20. Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Ketertiban dan Keamanan

Tujuan & Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi/Pencapaian			
		2021	2022	2023	2024
Misi 6-Tujuan 1	Indeks Rasa Aman	n.a	84,78	82,15	96,84
Sasaran 1	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100
Sasaran 2	Indeks Ketahanan Daerah	0,2	0,2	0,4759	0,56
Sasaram 3	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	n.a	63	78,69	66,89

Secara umum, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan tren positif, namun capaian di bidang ketertiban dan keamanan masih menunjukkan ketimpangan. Kinerja sangat baik terlihat pada aspek penanganan pelanggaran K3, namun ketahanan daerah dan kesadaran kebangsaan masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, lonjakan Indeks Rasa Aman di tahun 2024 menjadi sinyal positif yang perlu dipertahankan dengan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi dan penguatan partisipasi masyarakat.





BAB V. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS DAN KINERJA PERANGKAT DALAM RPJMD 2021- 2026

5.1. Evaluasi Program dan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2024

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja utama pembangunan yang berkontribusi terhadap terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, telah ditetapkan sejumlah program prioritas daerah. Program-program ini disusun secara sistematis berdasarkan dua pertimbangan utama: pertama, program yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran utama pembangunan daerah; dan kedua, program yang bersifat mandatory sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tabel 21. Prognosis Program dan Pagu Anggaran dalam RPJMD 2021-2026

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN/BIDANG	Indikasi RPJMD				
			Jumlah Program	Total Pagu Indikatif Anggaran Program			
				2021 (Juta Rp.)	2022 (Juta Rp.)	2023 (Juta Rp.)	2024 (Juta Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN	6	264.969,36	316.943,85	304.595,77	296.934,83
2	DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9	321.211,41	221.842,10	223.549,52	223.101,52
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG PEKERJAAN UMUM, BIDANG PENATAAN RUANG	12	131.962,19	78.792,99	40.486,72	28.944,46
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	3.156,64	15.238,83	12.245,22	10.435,25
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	34.594,70	34.540,74	37.275,45	42.145,27
6	DINAS SATPOL PP						
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA						
8	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	4.731,88	8.014,22	8.103,16	8.104,81
9	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	BIDANG TENAGA KERJA, BIDANG TRANSMIGRASI	7	4.786,48	4.792,05	5.210,75	5.305,23
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	BIDANG PANGAN, BIDANG PERTANIAN	11	22.640,22	25.521,44	22.465,80	22.229,28
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	23.982,51	21.526,59	21.978,28	22.329,49
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	6.490,26	6.193,54	6.424,32	6.471,99
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	7.641,98	5.654,26	5.884,07	5.791,18
14	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG PERHUBUNGAN	3	26.481,01	17.381,55	19.956,51	18.747,19
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	4.970,57	4.052,57	4.060,32	4.060,32
16	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	16	11.632,27	8.723,95	8.499,43	8.590,95
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	BIDANG PENANAMAN MODAL	6	5.137,89	5.064,05	4.951,26	4.954,22
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	7.040,16	6.644,21	8.285,85	9.309,44
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	BIDANG PERPUSTAKAAN DAN	6	4.285,12	3.987,63	4.369,02	4.226,52

		ARSIP					
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	7.287,51	9.827,28	11.270,69	10.781,04
21	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	3	53.634,35	53.202,88	57.443,78	57.222,88
22	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	2	35.890,61	31.317,38	32.666,75	33.413,65
23	BAPPEDALITBANG	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	8.329,17	7.029,88	8.079,07	7.907,70
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	4	294.240,23	278.893,58	281.939,14	279.648,58
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPEGAWAIAN	2	1000	1.409,77	1.420,53	1.452,04
27	BADAN PERBATASAN	PENGELOLAAN PERBATASAN	2	3.654,94	3.485,52	3.625,95	3.707,70
28	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	3	9.162,02	9.150,43	9.412,94	9.532,65
29	KECAMATAN	KECAMATAN	6	64.407,43	62.339,47	63.047,72	63.157,54
30	BADAN KESEBANGPOL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	5.242,78	6.098,95	8.164,64	38.641,16
TOTAL			176	1.368.563,6	1.247.669,7	1.215.412,	1.227.146

Sumber: RPJMD Kab. Nunukan 2021-2026

Sebagai dokumen acuan pembangunan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 menetapkan sebanyak 41 urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh 29 perangkat daerah (dinas dan badan) serta 21 kecamatan. Dalam kerangka pelaksanaannya, terdapat 176 program pembangunan yang telah dirancang lengkap dengan pagu indikatif anggaran, terdiri atas 146 program utama yang secara langsung terkait dengan indikator kinerja sasaran pembangunan daerah, serta 30 program penunjang yang mencakup belanja operasional, dukungan manajerial, dan kegiatan rutin perangkat daerah. Penyusunan program tersebut mencerminkan upaya sistematis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan mandat legal, kebutuhan pembangunan sektoral, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Dalam periode RPJMD 2021–2024, terdapat 176 program pembangunan yang dilaksanakan oleh 29 perangkat daerah dan 21 Kecamatan, dengan total pagu indikatif mencapai lebih dari Rp 5,058 triliun dalam empat tahun. OPD dengan alokasi anggaran terbesar secara konsisten adalah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang menjalankan 9 program dengan total anggaran tahunan rata-rata sekitar Rp

222–321 miliar, menunjukkan prioritas tinggi terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Menyusul adalah Dinas Pendidikan, yang menjalankan 6 program dengan alokasi anggaran tahunan mencapai sekitar Rp 264–316 miliar, sejalan dengan pentingnya sektor pendidikan sebagai pilar pembangunan manusia. Di sisi lain, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman serta Pertanahan, meskipun memiliki 8 program, hanya memperoleh alokasi sekitar Rp 3–15 miliar per tahun, menunjukkan masih rendahnya proporsi belanja untuk perumahan dan permukiman yang sangat strategis bagi kualitas hidup masyarakat miskin.

Terdapat pula ketimpangan antara jumlah program dan alokasi anggaran. Misalnya, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki program terbanyak (16 program) namun anggarannya tergolong kecil, yakni hanya sekitar Rp 8–11 miliar per tahun. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah yang tidak langsung menjalankan fungsi pelayanan publik, menerima anggaran sangat besar, mencapai Rp 294 miliar pada 2021, bahkan melampaui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua alokasi anggaran dikaitkan langsung dengan jumlah program atau sasaran pembangunan yang bersifat pelayanan dasar. Ketimpangan serupa terlihat pada alokasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengalami penurunan drastis dari Rp 131 miliar (2021) menjadi hanya Rp 28 miliar (2024), yang bisa berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan seperti Nunukan.

Secara umum, hubungan antara alokasi anggaran dan tujuan pembangunan daerah menunjukkan bahwa prioritas tetap diberikan pada sektor kesehatan dan pendidikan, yang selaras dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, sektor-sektor pendukung seperti perumahan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai, meskipun programnya cukup banyak dan relevan dengan kondisi daerah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan alokasi sumber daya, yang perlu ditinjau ulang untuk

memperkuat efektivitas pencapaian visi daerah. Selain itu, bila dikaitkan dengan kondisi geografis Nunukan yang merupakan daerah perbatasan, terpencil, dan terdiri dari banyak pulau, maka minimnya anggaran untuk infrastruktur dasar, perumahan, dan konektivitas antar kawasan dapat menghambat pelayanan publik, akses ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penyesuaian strategi penganggaran dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program perlu dilakukan agar pembangunan di Nunukan lebih merata, responsif terhadap kondisi daerah, dan sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan.

Secara keseluruhan, dalam implementasinya menunjukkan konsistensi yang sangat baik antara program yang direncanakan dalam RPJMD, terhadap program yang diimplementasikan dalam RKPD. Table dibawah ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidaksesuaian kecil, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD. Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, penting untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menggunakan RPJMD sebagai acuan utama dalam penyusunan program tahunan dan melakukan penyesuaian yang terdokumentasi secara jelas jika terjadi perubahan. Monitoring tahunan atas konsistensi ini juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja perencanaan di setiap perangkat daerah.

Tabel 22. Konsistensi Program dalam RPJMD dan RKPD 2021-2024

PERANGKAT DAERAH/URUSAN PEMERINTAHAN	Total dalam RPJMD	2021		2022		2023		2024	
		RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD
BIDANG PENDIDIKAN	6					6	6	6	6
BIDANG KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9					8	8	9	8
BIDANG PEKERJAAN UMUM, BIDANG PENATAAN RUANG	12					11	11	11	11
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8					7	6	7	6

BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4					4	4	4	4
BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13					13	13	13	13
BIDANG TENAGA KERJA, BIDANG TRANSMIGRASI	7					6	7	7	7
BIDANG PANGAN, BIDANG PERTANIAN	11					11	11	11	11
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11					11	11	11	11
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5					5	5	5	5
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5					5	5	5	5
BIDANG PERHUBUNGAN	3					3	3	3	3
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5					5	5	5	5
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	16					15	15	15	15
BIDANG PENANAMAN MODAL	6					6	6	6	6
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11					12	12	12	12
BIDANG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	6					6	6	6	6
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6					5	5	5	5
SEKRETARIAT DAERAH	3					3	3	3	3
SEKRETARIAT DPRD	2					2	2	2	2
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4					3	3	3	3
KEUANGAN	4					3	3	3	3
KEPEGAWAIAN	2					2	2	2	2
PENGELOLAAN	2					2	2	2	2

PERBATASAN									
INSPEKTORAT DAERAH	3					3	3	3	3
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6					4	4	4	4
JUMLAH	170	0	0	0	0	161	161	163	161

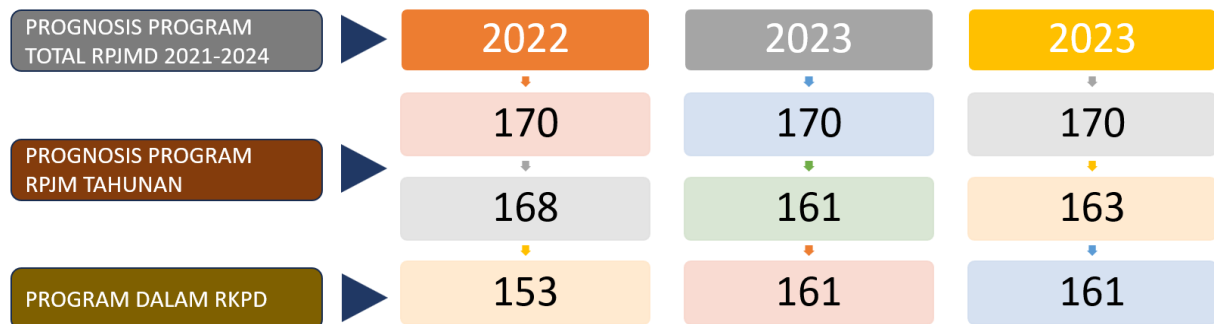
Tabel diatas menunjukkan hubungan antara jumlah program yang dirancang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jumlah program yang kemudian direalisasikan dalam dokumen tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selama periode 2021–2024. RPJMD Kabupaten mencantumkan total 170 program pembangunan di seluruh perangkat daerah. Namun, pada tahun 2021 tidak ada data jumlah program yang teridentifikasi dalam RKPD, yang menunjukkan kemungkinan belum adanya pemetaan atau pencatatan sistematis antara RPJMD dan RKPD pada tahun tersebut.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, jumlah program yang termuat dalam RKPD menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup baik terhadap RPJMD. Pada tahun 2022, dari 170 program dalam RPJMD, terdapat 161 program yang direalisasikan dalam RKPD. Di tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 163 program, kemudian kembali ke angka 161 program pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program prioritas dalam RPJMD telah ditranslasikan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan tahunan, meskipun terdapat sedikit variasi. Secara umum, terdapat konsistensi yang cukup tinggi antara jumlah program yang direncanakan dalam RPJMD dan pelaksanaannya dalam RKPD tahunan, khususnya mulai tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah dalam menyusun RKPD tahunan, sehingga perencanaan pembangunan terarah dan sesuai dengan visi-misi kepala daerah. Konsistensi ini penting karena menjadi indikator efektivitas sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa terdapat ketidaksesuaian minor dalam beberapa urusan, seperti di bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman serta Pertanahan yang jumlah programnya lebih sedikit di RKPD dibanding RPJMD, serta bidang Kepemudaan dan Olahraga yang justru

mencatat jumlah program di RKPD melebihi RPJMD. Ini bisa mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan daerah yang dinamis atau redistribusi program ke perangkat daerah lain, tetapi juga bisa menjadi indikasi lemahnya mekanisme kontrol atau updating dalam proses perencanaan.

Gambar 62. Perbandingan Keseluruhan Program Perangkat Daerah (diluar Kecamatan) dalam RPJM dan RKPD 2021-2024



Gambar diatas menunjukkan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan—yakni RPJMD, RPJM Tahunan, dan RKPD—mengalami dinamika selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, dari total 170 program dalam RPJMD, hanya 168 program yang tercantum dalam RPJM Tahunan, dan 153 program yang masuk dalam RKPD, menunjukkan selisih cukup besar sebanyak 15 program dari target tahunan. Pada tahun 2023, meskipun jumlah program RPJMD tetap 170, RPJM Tahunan hanya memuat 161 program. Namun, capaian RKPD berhasil menyamai jumlah tersebut, menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik, bahkan sempurna antara rencana tahunan dan pelaksanaan faktual. Tahun 2024 mencatat jumlah program RPJM meningkat sedikit menjadi 163, namun RKPD hanya mengakomodasi 161 program, mencerminkan selisih dua program.

Tren ini memperlihatkan bahwa konsistensi antar dokumen perencanaan mengalami perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Setelah deviasi cukup besar pada 2022, tahun 2023 menunjukkan konsistensi penuh (100%), dan tahun 2024 meskipun sedikit menurun, masih menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi (sekitar 98,8%). Peningkatan ini mengindikasikan semakin membaiknya integrasi antara dokumen strategis dan operasional,

serta kapasitas perencanaan teknis perangkat daerah. Namun demikian, adanya selisih program pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa penyelarasan dan penyesuaian program masih perlu ditingkatkan agar seluruh prioritas RPJMD dapat direalisasikan secara optimal dalam dokumen tahunan RKPD.

Selain urusan dan program diatas, juga terdapat program yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Terdapat 124 program yang tersebar di 21 kecamatan se Kabupaten Nunukan yang juga menunjukkan tidak semua program yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diimplementasikan dalam RKPD. Seperti digambarkan pada tabel dibawah ini, pada tahun 2023-2024 dari 124 Program di 21 Kecamatan, terdapat 110 program yang dilaksanakan. Selisih jumlah program antara RPJMD dengan RKPD terdapat di 8 kecamatan, yang signifikan selisih antara RPJMD dengan RKPD di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis Ogong, dari 6 program di RPJMD hanya 2 program yang di implementasi 2023-2024. Sedangkan tiga kecamatan lainnya Krayan Selatan, Krayan Barat dan Lumbis Hulu masing-masing mengalami selisih 2 program (6 program dalam RPJMD, 4 Program di RKPD).

Tabel 23. Konsistensi Program Urusan Kewilayahan (Kecamatan) 2021-2024

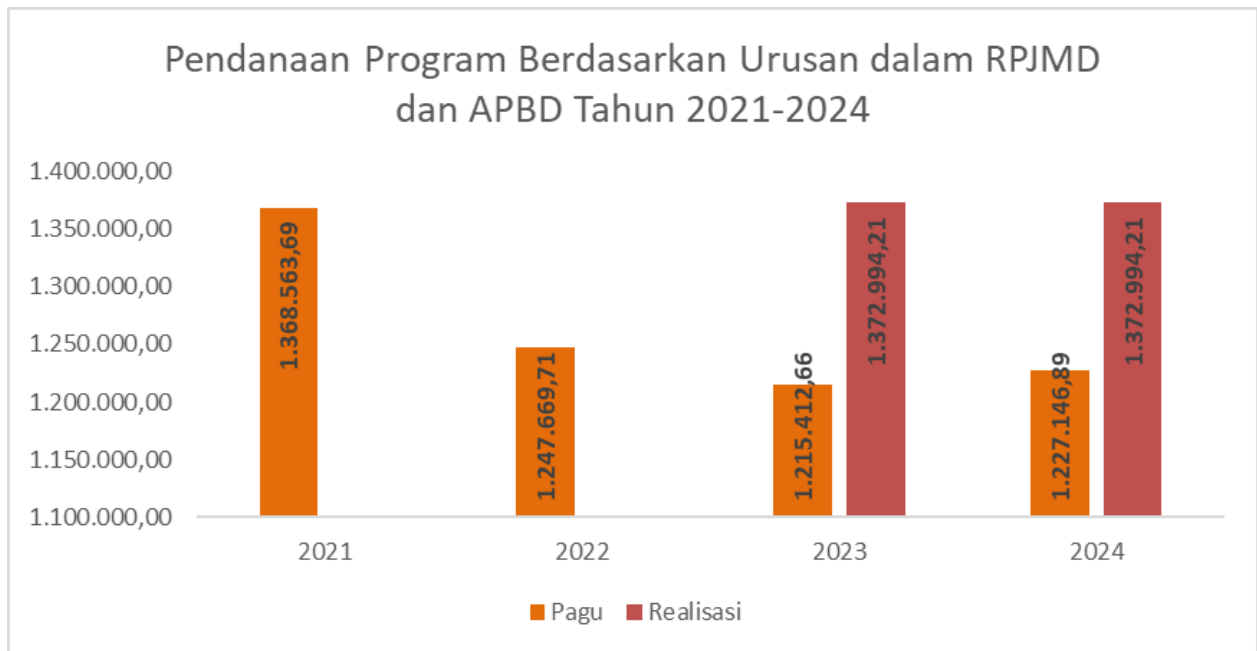
Urusan Kewilayahan/Kecamatan	2023		2024	
	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD
Nunukan	6	6	6	6
Nunukan selatan	5	5	5	5
Sebatik	6	6	6	6
Sebatik Barat	6	6	6	6
Sebatik Timur	6	6	6	6
Sebatik Utara	5	5	5	5
Sebatik Tengah	6	6	6	6
Seimenggaris	6	5	6	5
Sebuku	6	6	6	6
Tulin Onsoi	6	5	6	5
Sembakung	6	6	6	6
Sembakung Atulai	6	6	6	6
Lumbis	6	6	6	6
Lumbis Ogong	6	2	6	2

Krayan	6	5	6	5
Krayan Selatan	6	4	6	4
Krayan Barat	6	4	6	4
Krayan Timur	6	6	6	6
Krayan Tengah	6	6	6	6
Lumbis Hulu	6	4	6	4
Lumbis Pansiangan	6	5	6	5
TOTAL	124	110	124	110

Sumber: Bappeda Nunukan, Dokumen Evaluasi RKPD 2023-2024

Kesuksesan implementasi program pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran sebagai penunjang pelaksanaan. Penetapan program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan visi-misi daerah selalu disertai dengan penyusunan prognosa kebutuhan pembiayaan berdasarkan target keluaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Secara umum, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk 41 urusan pemerintahan dalam RPJMD menunjukkan tren penurunan, dari Rp 1,3 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2024 (lihat grafik). Namun demikian, realisasi anggaran dalam APBD justru melebihi pagu yang direncanakan dalam RPJMD. Pada tahun 2023–2024, rata-rata anggaran program yang ditetapkan dalam APBD mengalami peningkatan sebesar 12–15 persen dibandingkan dengan pagu dalam RPJMD. Hal ini terjadi karena penyusunan RPJMD dilakukan di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19, sehingga proyeksi kerangka pendanaan dirancang secara sangat realistis dan konservatif. Dalam praktiknya, melalui proses penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD tahunan, alokasi anggaran disesuaikan dan ditingkatkan secara signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan riil pelaksanaan program pembangunan.

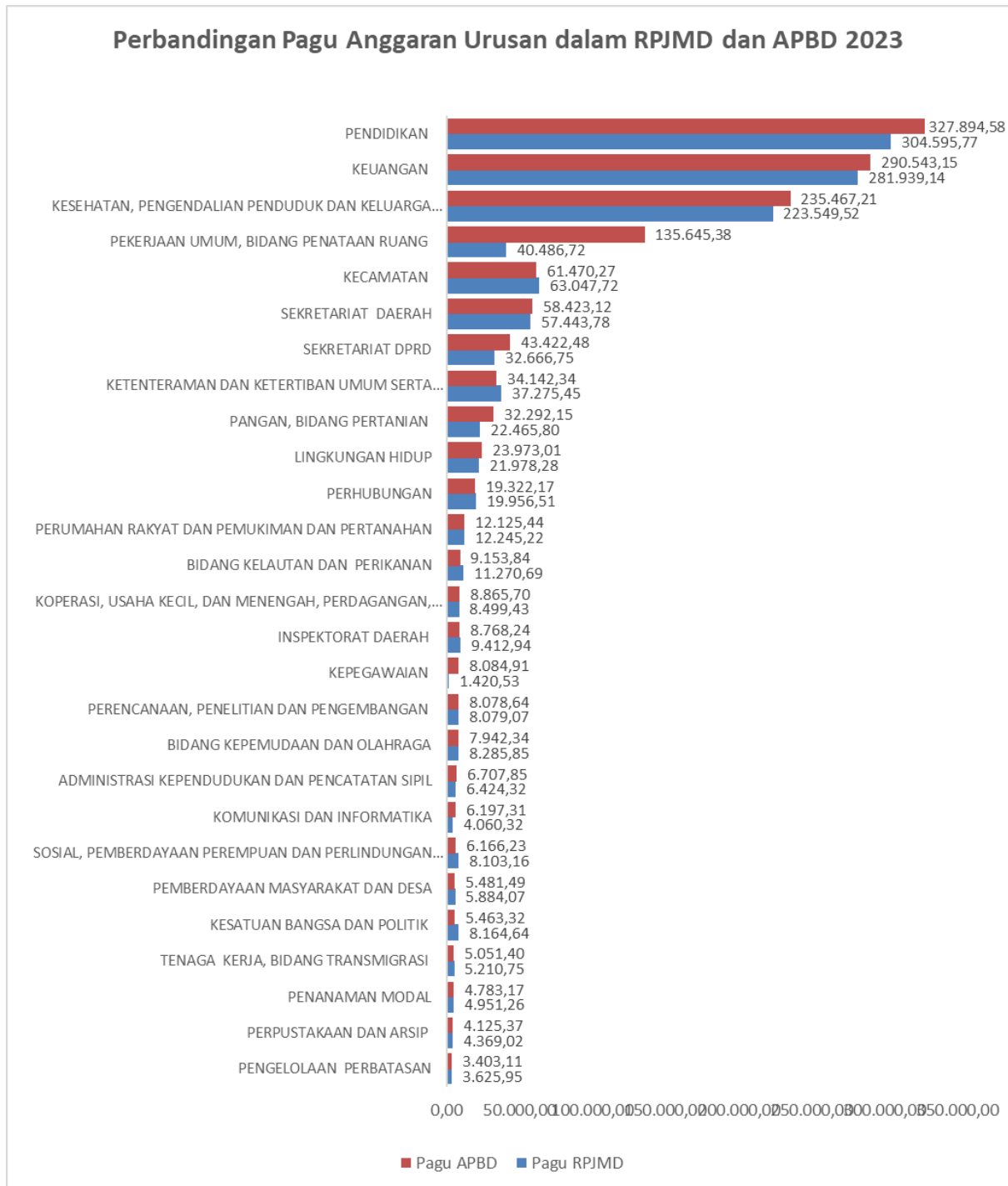
Gambar 63. Perbandingan Pagu Anggaran Program Pembangunan dalam RPJMD dan APBD 2021-2024



Note: Data realisasi tahun 2021 - 2022 tidak tersedia untuk dianalisis.

Prioritas belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Ketiga urusan ini mendapatkan proporsi alokasi terbesar dalam RPJMD dan juga dalam implementasinya di APBD. Grafik dibawah ini memperlihatkan perbandingan antara anggaran program urusan pemerintah dalam RPJMD dan APBD tahun 2023. Sebagian besar anggaran urusan dalam APBD melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Meskipun sebagian lainnya khususnya pada urusan pemerintah non pelayanan dasar pagu dalam APBD lebih rendah dari proyeksi pagu yang ditetapkan dalam RPJMD. Perbandingan ini menegaskan bahwa penyusunan RPJMD telah menetapkan arah pembangunan yang memprioritaskan sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, fleksibilitas pelaksanaan anggaran dalam APBD menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan tahunan, terutama dalam urusan non-prioritas yang cenderung mengalami pemangkasan anggaran. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi visi pembangunan daerah dan efektivitas pencapaian target RPJMD.

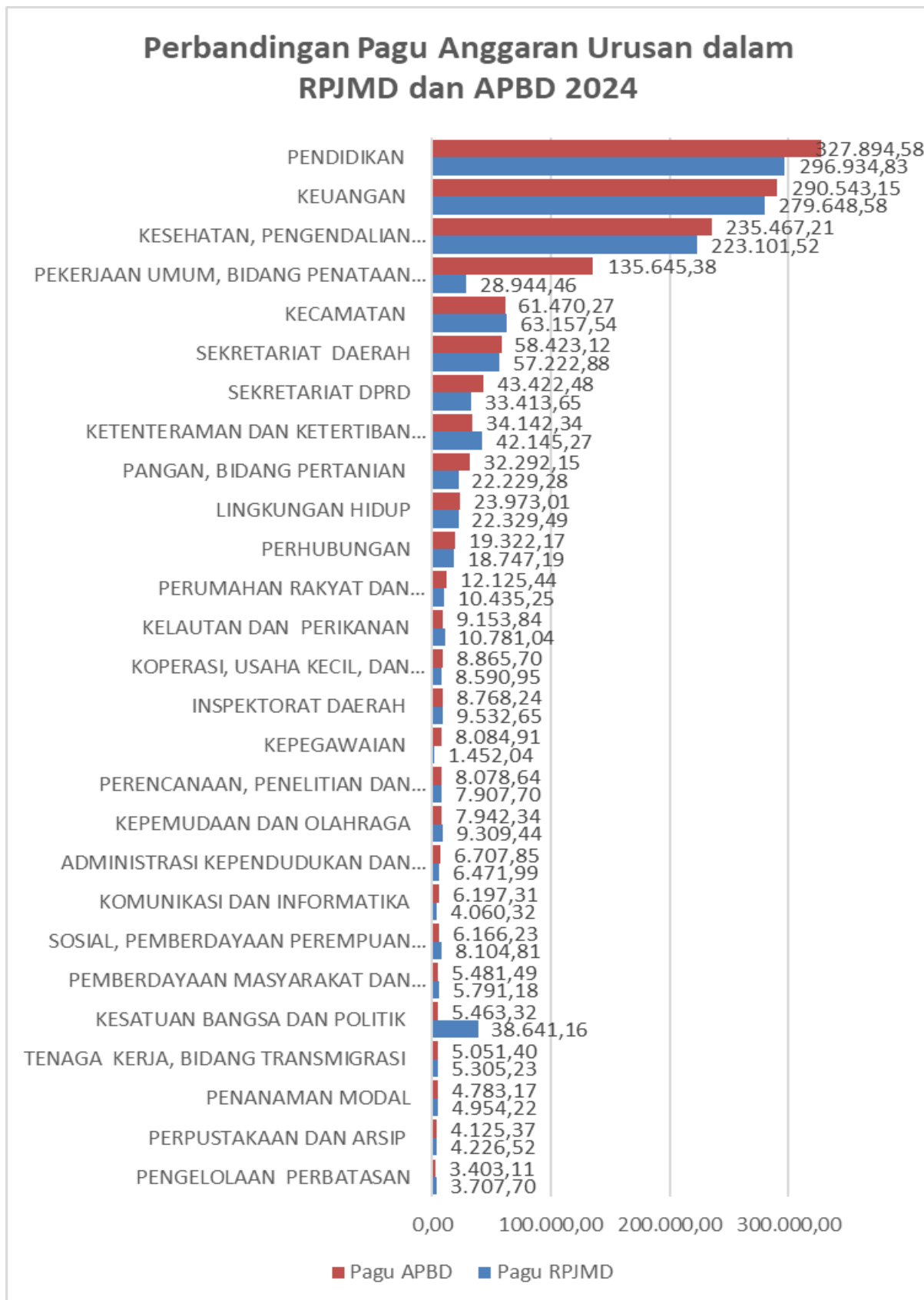
Gambar 64. Perbandingan Pagu Anggaran Urusan dalam RPJMD dan APBD tahun 2023



Tidak jauh berbeda dengan tahun 2024, yang menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan antara perencanaan anggaran dalam RPJMD dan realisasi anggaran dalam APBD pada berbagai urusan pemerintahan. Secara umum, sebagian besar urusan mengalami peningkatan alokasi anggaran dalam APBD dibandingkan pagu yang ditetapkan dalam RPJMD, yang

menandakan adanya penyesuaian kebutuhan aktual di lapangan. Dari sisi efisiensi perencanaan, ketidaksesuaian antara RPJMD dan APBD ini menandakan bahwa perencanaan awal dalam RPJMD terlalu konservatif atau tidak mampu memprediksi dinamika kebutuhan aktual daerah secara akurat. Penyusunan RPJMD di tengah pandemi Covid-19 juga menjadi faktor pembatas dalam menetapkan proyeksi anggaran. Oleh karena itu, penyempurnaan pada mekanisme perencanaan dan proyeksi fiskal menjadi penting agar RPJMD dapat lebih mencerminkan kebutuhan riil dan meminimalkan deviasi dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perencanaan makro yang tertuang dalam RPJMD, realitas penganggaran tahunan di APBD sangat dipengaruhi oleh dinamika fiskal, prioritas baru, serta kebutuhan operasional yang berkembang. Pemerintah daerah perlu terus menyelaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran agar efektivitas pembangunan tetap terjaga dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Gambar 65. Perbandingan Pagu Anggaran Urusan dalam RPJMD dan APBD tahun 2024



Namun, terdapat beberapa sektor dengan peningkatan anggaran yang sangat signifikan, seperti urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dalam RPJMD hanya dialokasikan sekitar Rp135,65 miliar, namun dalam APBD hanya direalisasikan Rp28,94 miliar—menunjukkan penurunan drastis. Hal ini bisa mengindikasikan pergeseran prioritas, efisiensi pembiayaan, atau alokasi anggaran ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Sebaliknya, ada anomali mencolok pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang mengalami lonjakan sangat besar dari hanya Rp5,46 miliar dalam RPJMD menjadi Rp38,64 miliar dalam APBD. Ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai dasar penyesuaian anggaran, terutama jika tidak sejalan dengan urgensi program. Hal serupa terjadi pada beberapa sektor teknis seperti kelautan dan perikanan, koperasi dan UMKM, serta ketertiban umum yang mengalami peningkatan moderat namun tetap signifikan.

5.2. Evaluasi Capaian Program Prioritas Pembangunan dan Kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi RPJMD 2021-2024

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara keseluruhan terdapat 176 program berbasis urusan yang direncanakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 program atau sekitar 40,3% dikategorikan sebagai program prioritas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja sasaran, tujuan, dan misi pembangunan daerah. Penetapan program prioritas ini didasarkan pada tingkat relevansi, dampak terhadap indikator makro pembangunan, serta dukungan terhadap agenda strategis daerah.

Pada bagian ini, evaluasi RPJMD 2021–2026 difokuskan pada analisis capaian kinerja program-program prioritas tersebut, baik dari aspek realisasi anggaran maupun output yang dihasilkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program prioritas mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Evaluasi juga mencakup identifikasi kendala dan pembelajaran yang dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

Gambar 66. Kerangka Logis Prioritas Pembangunan Daerah Nunukan
RPJMD 2021-2026



Sumber: Dokumen RPJMD 2021-2026

Dalam RPJMD 2021-2026, ditetapkan 6 Misi utama dengan 6 Tujuan dan 6 Indikator Tujuan dengan 17 sasaran yang diukur dengan 29 indikator sasaran. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut ditetapkan program prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sasaran, yang diukur dengan indikator kinerja program prioritas yang ditetapkan. Terdapat 72 program prioritas yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran dengan 95 indikator kinerja yang ditetapkan.

5.2.1. Evaluasi Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Nunukan 2021-2024

Evaluasi terhadap capaian program-program prioritas ini menjadi bagian penting untuk menilai sejauh mana efektivitas intervensi pembangunan yang telah dilakukan, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis daerah. Selain itu juga untuk melihat kontribusi dari masing-masing program prioritas terhadap capaian indikator sasaran pemerintah daerah yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menelusuri hubungan antara pelaksanaan program prioritas dan tingkat keberhasilan indikator sasaran yang telah ditetapkan berbasis data capaian dari masing-masing program. Tabel 5.5 dibawah ini mendeskripsikan bagaimana program-program prioritas diimplementasikan

dan dicapai pada tahun 2022-2024. Evaluasi ini tidak dapat memunculkan data capaian tahun 2021, karena hanya sebagai kecil indikator yang tersedia datanya, yang disebabkan masa transisi RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD sebelumnya.

Secara umum dari 72 program dengan 95 indikator ukuran keberhasilan, menunjukkan kinerja yang baik pada pencapaian akhir periode RPJMD (2024). Tahun 2024 akumulasi capaian kinerja tahun 2024 adalah 93,9% atau dengan kategor “Sangat Tinggi” berdasarkan Permendagri 86 tahun 2027. Begitu juga jika dilihat dari rata-rata akumulasi 2022-2024, juga menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan rasio pencapaian jauh melampaui target yang ditetapkan. Meskipun, pencapaian sangat anomali pencapaian khususnya pada tahun 2023, pencapaian rata-rata seluruh indikator mencapai 2.954%, yang disebabkan oleh beberapa indikator kinerja yang target yang ditetapkan sangat rendah. Seperti pencapaian bidang keuangan dengan dengan indikator rasio pertumbuhan pendapatan daerah, dengan pencapaian puluhan ribu persen.

Tabel 24. Rekapitulasi Predikat Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program Perioritas 2022-2024

Predikat	2022		2023		2024		Rata-Rata	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Satangan Tinggi	62	65%	66	69%	70	74%	66	69%
Tinggi	6	6%	4	4%	7	7%	8	8%
Sedang	1	1%	2	2%	2	2%	3	3%
Rendah	2	2%	2	2%	1	1%	4	4%
Sangat Rendah	24	25%	21	22%	15	16%	14	15%
Jumlah	95	100%	95	100%	95	100%	95	100%

Secara lebih spesifik, tabel 5.4 mendeskripsikan pencapaian program berdasarkan indikator tahun 2022-2024. Pencapaian program meskipun secara umum menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, namun terdapat kinerja dengan kategori sangat rendah dengan jumlah indikator yang signifikan. Pencapaian indikator program prioritas dengan predikat kinerja sangat tinggi rata-rata 2022-2024 adalah 66 indikator atau 69% dari total indikator, 8 indikator (8%) kinerja tinggi, 3 indikator (3%) sedang , kinerja kategori rendah 4 indikator (4%), dan 14 indiktor (15%) dengan kategori sangat rendah.

Tabel 25. Realisasi Kinerja Program Perioritas, Capaian Kinerja dan Prediket Kinerja

Program Perioritas 2022-2024`

N o	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembanguna n Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintah an	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Sasaran1: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat															
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan dasar	Bidang Pendidikan	98,26	98,86	96,93	98,0	99,5%	100,0%	98,0%	99,1%	ST	ST	ST	ST
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Bidang Pendidikan	98,26	96,83	95,76	97,0	102,0%	100,0%	98,4%	100,1%	ST	ST	ST	ST
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpatispasi dalam PAUD	Bidang Pendidikan	81,72	49,89	75,25	69,0	179,8%	100,0%	137,4 %	139,1%	ST	ST	ST	ST
		Tingkat patisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidkkan dasar dan menengah yang berpastisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Bidang Pendidikan	74,04	68,01	8,93	50,3	155,1%	130,2%	15,6%	100,3%	ST	ST	SR	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembanguna n Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintah an	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	Bidang Pendidikan	13,8	14,08	12,01	13,3	117,4%	118,6%	100,0 %	112,0%	ST	ST	ST	ST
		Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar	Bidang Pendidikan	1,36	1,39	1,42	1,4	128,1%	129,9%	132,7 %	130,3%	ST	ST	ST	ST
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Bidang Perpustaka an	t.a.d	t.a.d	80,38	26,8			321,5 %	107,2%	SR	SR	ST	ST
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Bidang Perpustaka an	15,04	69,56	44,83	43,1	100,3%	347,8%	179,3 %	209,1%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat															
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Bidang Kesehatan	137,3	167,6	91,94	132,3	142,3%	120,6%	150,3 %	137,7%	ST	ST	ST	ST
		Angka Kematian Bayi	Bidang Kesehatan	7,96	17,06	15,94	13,7	132,0%	50,4%	56,4%	79,6%	ST	SR	R	T
		Persentase Puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional	Bidang Kesehatan	88	105,9	100	98,0	92,6%	111,5%	100,0 %	101,4%	ST	ST	ST	ST
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi	Bidang Kesehatan	85	100	100	95,0	85,0%	100,0%	100,0 %	95,0%	T	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Bidang Kesehatan	80,8	90,8	100	90,5	107,7%	114,9%	117,6 %	113,4%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 3: Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM															
7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Bidang Tenaga Kerja	0,52	0,9	0,6	0,7	1,6%	2,5%	1,5%	1,9%	SR	SR	SR	SR
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Bidang Tenaga Kerja	0,00	0,712	0,712	0,5	0,0%	0,7%	0,7%	0,5%	SR	SR	SR	SR
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Bidang Tenaga Kerja	7%	8,2	25,12	11,1	0,6%	54,6%	119,5 %	58,2%	SR	R	ST	R
9	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bidang Sosial	2,96	10,67	84,24	32,6	6,8%	18,3%	116,8 %	47,3%	SR	SR	ST	SR
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bidang Sosial	1,52	19,08	100	40,2	3,5%	32,9%	140,9 %	59,1%	SR	SR	ST	R

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
		Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bidang Sosial	6,25	2,5	100	36,3	8,3%	3,1%	114,3 %	41,9%	SR	SR	ST	SR
		Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bidang Sosial	1,4	11,21	27,57	13,4	6,4%	26,7%	44,5%	25,8%	SR	SR	SR	SR
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bidang Sosial	0	100	100	66,7	0,0%	100,0%	100,0 %	66,7%	SR	ST	ST	S
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Bidang Sosial				0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SR	SR	SR	SR
		Cakupan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial*	Bidang Sosial				0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SR	SR	SR	SR
11	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,003	0,072	2,41	0,8	0,9%	18,0%	482,0 %	167,0%	SR	SR	ST	ST
Sasaran 4: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah															

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28,65	59,70	46,52	45,0	52,1%	108,0%	83,7%	81,3%	R	ST	T	T
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56,65	57,13	58,98	57,6	101,0%	100,0%	101,3%	100,8%	ST	ST	ST	ST
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	Bidang Perhubungan	21,43	22,29	23,00	22,2	100,0%	100,0%	99,4%	99,8%	ST	ST	ST	ST
15	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Bidang Perhubungan	35,00	31,25	32,50	32,9	116,7%	100,0%	100,0%	105,6%	ST	ST	ST	ST
	Sasaran 5: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal														
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51,16		62,65	37,9	85,7%	0,0%	90,3%	58,7%	T	SR	T	R

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SR	SR	SR	SR
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100		100	66,7	392,2%	0,0%	359,5%	250,5%	ST	SR	ST	ST
19	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5,14	5,25	5,49	5,3	142,1%	135,7%	127,0%	135,0%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 6: Meningkatnya kinerja sektor pertanian															
20	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Bidang Pangan	42,86	42,86	52,38	46,0	100,0%	90,0%	100,0%	96,7%	ST	T	ST	ST
21	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)	Bidang Pangan	81,54	83,93	88,17	84,5	93,3%	96,0%	95,0%	94,7%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
22	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	Bidang Pangan	43,72	88,32	44,6	58,9	100,0%	200,0%	100,0%	133,3%	ST	ST	ST	ST
23	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	Bidang Pangan	20	20	20	20,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman pangan	Bidang Pertanian	0,0395	0,00375	0,35	0,1	243,3%	0,6%	50,9%	98,3%	ST	SR	SR	ST
		Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman hortikultura	Bidang Pertanian	-1,2	2,2	2,4	1,1	-722,4%	84,6%	92,3%	-181,8%	SR	T	ST	SR
		Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman perkebunan	Bidang Pertanian	9	9	9	9,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laju pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	Bidang Pertanian	164	2	3	56,3	8200,0%	100,0%	150,0%	2816,7%	ST	ST	ST	ST
26	Program Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase luas wilayah yang terkendali bencana pertaniannya	Bidang Pertanian	36,52	100,41	100,54	79,2	40,6%	111,6%	111,7%	88,0%	SR	ST	ST	T

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembanguna n Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintah an	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	an Bencana Pertanian														
27	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio peningkatan kapasitas Poktan	Bidang Pertanian	1,91	4,91	8,05	5,0	100,0%	100,0%	100,0 %	100,0%	ST	ST	ST	ST
		Rasio peningkatan kapasitas BPP	Bidang Pertanian	100	100	100	100,0	100,0%	100,0%	100,0 %	100,0%	ST	ST	ST	ST
28	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Bidang Perikanan	4,95	6,1	33,73	14,9	123,8%	101,7%	421,6 %	215,7%	ST	ST	ST	ST
		Cakupan binaan kelompok nelayan	Bidang Perikanan	9,2	8,4	7,2	8,3	153,3%	140,0%	120,0 %	137,8%	ST	ST	ST	ST
29	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Bidang Perikanan	73,84	126,0 8	76,62	92,2	1230,7 %	1576,0 %	766,2 %	1191,0%	ST	ST	ST	ST
		Cakupan binaan kelompok pembudidaya	Bidang Perikanan	53,48	66,21	92,95	70,9	560,0%	693,3%	973,3 %	742,2%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 7: Meningkatkan kinerja sektor industri															
30	Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Peningkatan jumlah sentra IKM	Bidang Perindustri an	3	6,48	7,14	5,5	86,2%	186,2%	185,5 %	152,6%	T	ST	ST	ST
31	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase hasil pemamtauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) industri kecil dan menengah yang	Bidang Perindustri an	111	100	100	103,7	111,0%	212,8%	100,0 %	141,3%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
		dikeluarkan oleh instansi terkait													
32	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	7,29	26,73	9,6	14,5	87,4%	264,9%	81,5%	144,6%	T	ST	T	ST
33	Program Pengembangan UMKM	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2,63	2,70	3,60	3,0	55,6%	53,1%	66,2%	58,3%	R	R	S	R
Sasaran 8: Meningkatkan kinerja sektor perdagangan															
34	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Bidang Perdagangan	0,32	1,37	2,31	1,3	188,1%	146,3%	100,0 %	144,8%	ST	ST	ST	ST
35	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan	Bidang Perdagangan	1.737 ,8	4.877 ,8	2.528 ,3	3048,0	401%	1121%	578%	700,3%	ST	ST	ST	ST
36	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Bidang Perdagangan	62,76	72,31	94,75	76,6	125,5%	131,5%	157,9 %	138,3%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
37	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya	Bidang Perdagangan		50	50	33,3	0,0%	100,0%	100,0%	66,7%	SR	ST	ST	S
Sasaran 9: Meningkatkan kinerja investasi di daerah															
38	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal/Pelaku Usaha	Bidang Penanaman Modal	260	-2,96	-3,01	84,7	2600,0%	-14,8%	-12,0%	857,7%	ST	SR	SR	ST
39	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Bersakal Nasional	Bidang Penanaman Modal	0		21,09	7,0	0,0%	0,0%	81,1%	27,0%	SR	SR	T	SR
40	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kepatuhan Penanaman Modal terhadap ketentuan perizinan berusaha	Bidang Penanaman Modal	B	B	B	0,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
41	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Bidang PTSP	60	80	100	80,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 10: Meningkatkan kinerja sektor pariwisata															
42	Program Peningkatan Daya Tarik	Persentase pengembangan DTW yang	Bidang Pariwisata	1,25	44	46	30,4	2,9%	99,1%	99,5%	67,2%	SR	ST	ST	S

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	Destinasi Pariwisata	dibangun sarana dan prasarananya													
43	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	Bidang Pariwisata	20	40	80	46,7	100,0%	100,0%	133,3 %	111,1%	ST	ST	ST	ST
44	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	Bidang Pariwisata	16,97	18	41	25,3	100,0%	71,3%	122,4 %	97,9%	ST	S	ST	ST
	Sasaran 11: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah														
45	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Bidang Inspektorat Daerah	67,34	69,82	76,71	71,3	82,1%	83,1%	88,2%	84,5%	T	T	T	T
		Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	Bidang Inspektorat Daerah	100	100,0 0	100	66,7	100,0%	100,0%	100,0 %	100,0%	ST	ST	ST	ST
46	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan SPIP	Bidang Inspektorat Daerah	64	68,00	100	54,7	106,7%	97,1%	125,0 %	109,6%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
47	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan unit pelayanan publik yang bernilai baik (%)	Bidang Sekretariat Daerah	n.a	100	123,44	74,5		114,9%	140,3%	85,1%	SR	ST	ST	T
48	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ)	Bidang Sekretariat Daerah	40,2	67,9	77,17	61,8	100,5%	107,8%	105,7%	104,7%	ST	ST	ST	ST
49	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penilaian Kinerja PTSP	Bidang PTSP	n.a	n.a	n.a	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SR	SR	SR	SR
		Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Bidang PTSP	n.a	n.a	n.a	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SR	SR	SR	SR
50	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,07	97,19	93,89	96,1	105,5%	102,3%	96,8%	101,5%	ST	ST	ST	ST
51	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,42	96,83	99,97	98,7	99,4%	96,8%	100,0%	98,7%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yg memiliki KIA	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52,91	49,24	61,61	54,6	117,6%	89,5%	94,8%	100,6%	ST	T	ST	ST
52	Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	Bidang Komunikasi dan Informatika	34	60	76	56,7	68,0%	100,0%	108,6%	92,2%	S	ST	ST	ST
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah nasional	Bidang Komunikasi dan Informatika	64,71	76,47	82,38	74,5	129,4%	127,5%	117,7%	124,9%	ST	ST	ST	ST
53	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Bidang Kearsipan	3,47	35,16	46,62	28,4	34,7%	234,4%	233,1%	167,4%	SR	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
54	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Kecamatan	86	100	97	94,3	86,0%	100,0%	97,0%	94,3%	T	ST	ST	ST
Sasaran 12: Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN															
55	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai dengan kualitas pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Bidang Kepegawaian	147	155,23	177,32	159,9	106,4%	102,2%	106,1%	104,9%	ST	ST	ST	ST
56	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Bidang Kepegawaian	8,68	6,26	14,24	9,7	266,3%	174,4%	360,5%	267,0%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 13: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah															
57	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	Bidang Perencanaan	100	75	80	85,0	100,0%	75,0%	80,0%	85,0%	ST	S	T	T
58	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPd	Bidang Perencanaan	100	100	100	100,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	Pembangunan Daerah														
59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Bidang Keuangan	7,26	7,02	17,5	10,6	-42,0%	-151,0%	-675,0%	-289,3%	SR	SR	SR	SR
		Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	Bidang Pendapatan	100	100	100	100,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
60	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase manajemen aset	Bidang Keuangan	100	100	100	100,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
61	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	Bidang Keuangan	34,52	269,14	-63,11	80,2	5850,8%	269140,0%	-2651,7%	90779,7%	ST	ST	SR	ST
	Sasaran 14: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim														
62	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)	Bidang Lingkungan Hidup	66,5	81,82	88,07	78,8	100,0%	122,1%	130,5%	117,5%	ST	ST	ST	ST
63	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penanganan RTH	Bidang Lingkungan Hidup	84,19	91,22	100	91,8	112,3%	91,2%	100,0%	101,2%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
64	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Bidang Lingkungan Hidup	22,22	36,36	20	26,2	111,1%	163,6%	80,0%	118,2%	ST	ST	T	ST
65	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	Bidang Lingkungan Hidup	0	0	0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SR	SR	SR	SR
66	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	73	77,9	84,19	78,4	97,3%	101,2%	106,6%	101,7%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban															

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
67	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	100	100	100,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 16: Meningkatkan kualitas penanganan bencana															
68	Program Penanggulangan Bencana	Persentase upaya penanggulanga n bencana melalui pelaksanaan kegiatan penanggulanga n bencana	Bidang Penanggulanga n Bencana	100	100	100	100,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
69	Program Pencegahan Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	88,8	88,69	88,58	88,7	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ST	ST	ST	ST
Sasaran 17: Memperkuat karakter kebangsaan															
70	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta sosialisasi pembauran kebangsaan, pendidikan wawasan	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00072	0,00069	0,00071	0,0	98,6%	143,4%	102,9%	115,0%	ST	ST	ST	ST

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	Realisasi Kinerja Program Tahun Ke:			Rata- Rata Realiasi (Akum) 2022- 2024)	Persentase Capaian Kinerja Program Tahun ke:			Rata-rata Capaian (Akum) 2022- 2024) %	Predikat Pencapaian Indikator Program Prioritas Tahun Ke			Rata- Rata Predikat Capain (Akum) 2022- 2024
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
		kebangsaan dan bela negara													
71	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase peran masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	98,75	94,67	70	87,8	98,8%	94,7%	70,0%	87,8%	ST	ST	S	T
72	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase wawasan nusantara untuk NKRI	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	42,86	81,0	100,0%	100,0%	42,9%	81,0%	ST	ST	SR	T
Rata-rata Capaian dan Prediket Kinerja akumulatif seluruh Indikator Program Perioritas pertahun dan akumulatif 2022-2024								270,2%	2954,7 %	93,9 %	1106,3%	ST	ST	ST	ST

Keterangan:

- ✓ Kolom rata-rata Kinerja program dihitung berdasarkan akumulasi masing-masing indikator kinerja sasaran setiap tahun
- ✓ Kolom rata-rata prediket kinerja sasaran adalah interpretasi kategori kinerja rata-rata persentase capaian kinerja sasaran setiap tahun dan atau interpretasi kategori kinerja akumulasi persentase capaian seluruh indikator sasaran
- ✓ Data yang tidak tersedia untuk setiap indikator tetap dihitungkan sebagai bilangan pembagi dalam menghitung rata-rata persentase capaian kinerja sasaran
- ✓ Interpretasi prediket kinerja menggunakan standar Peremendagri 86 tahun 2017, dengan interval dan kategori sebagai berikut:
 - ST = Sangat Tinggi (91%-100%)
 - T = Tinggi (76%-90%)
 - S = Sedang (65%-75%)
 - R = Rendah (51%-65%)
 - SR = Sangat Rendah (<50%)

Dibawah ini diuraikan secara lebih detail mengenai pencapaian indikator program dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5.2.1.1. Program Prioritas Mendukung Sasaran Pembangunan Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat

Peningkatan taraf pendidikan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan. Sasaran ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Ukuran keberhasilan dari sasaran ini tercermin melalui dua indikator utama, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan taraf pendidikan masyarakat.

Tabel 26. Capaian Program Prioritas pada Sasaran Meningkatnya Taraf pendidikan Masyarakat

No	Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 1: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)	8,00	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,17	8,24	8,26	8,39	101%	100%	100%	100%
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	12,64	12,74	12,84	12,94	13,04	12,65	12,67	12,7	12,7	99%	99%	98%	97%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,68	98,68	98,68	98,77	98,86	98,95		98,26	98,9	96,9	0%	99%	100%	98%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,39	95,39	95,87	96,35	96,83	97,31		98,26	96,8	95,8	0%	102%	100%	98%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	42,32	42,32	41,40	45,45	49,89	54,76		81,72	49,9	75,3	0%	180%	100%	137%

No	Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	51,75	51,75	43,65	47,75	52,24	57,14		74,04	68	8,93	0%	155%	130%	16%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	11,53	11,53	11,59	11,75	11,87	12,01	13,8	13,8	14,1	12	119%	117%	119%	100%
		Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,39	1,36	1,39	1,42	131%	128%	130%	133%
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	0	10	15	20	25	7,56	t.a.d	t.a.d	80,4	1%			322%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	0	15	20	25		15,04	69,6	44,8		100%	348%	179%

Selama periode evaluasi tahun 2021 hingga 2024, capaian indikator sasaran ARLS menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan konsistensi pencapaian target sebesar 100% setiap tahunnya. Sementara itu, capaian indikator HLS mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 99% pada tahun 2021 menjadi 97% pada tahun 2024. Capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, didukung oleh tiga program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan serta Program Pembinaan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada tahun 2024, dua program yakni Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Program Pembinaan Perpustakaan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian indikator program yang telah dan bahkan melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek peningkatan kapasitas pendidik serta ketersediaan dan akses informasi melalui perpustakaan, upaya pembangunan telah berjalan optimal. Namun demikian, pada Program Pengelolaan Pendidikan, terdapat ketimpangan capaian, khususnya pada salah satu indikator penting, yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Capaian indikator ini mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dari 155% di tahun 2022, turun menjadi 130% pada tahun 2023, dan semakin turun drastis hingga 16% di tahun 2024. Penurunan yang signifikan ini berkontribusi langsung terhadap penurunan capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dua tahun terakhir, meskipun secara persentase penurunannya hanya sebesar 1% per tahun, yaitu dari 99% menjadi 98% pada 2023, dan 97% pada 2024.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain adalah belum akuratnya data pendidikan di Kabupaten Nunukan, terutama terkait peserta didik yang melanjutkan pendidikan di luar daerah namun masih terdata sebagai siswa aktif di Nunukan. Selain itu, terdapat realitas sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi pendidikan, seperti

banyaknya anak usia sekolah yang memilih untuk bekerja membantu keluarga, khususnya sebagai pengait bibit rumput laut, yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan formal maupun mengikuti program pendidikan kesetaraan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar komponen pendukung sasaran pendidikan telah berjalan baik, masih terdapat tantangan signifikan pada aspek akses dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok usia sekolah yang rentan putus sekolah.

5.2.1.2. Program Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan cerminan dari kualitas hidup dan kesejahteraan yang dicapai suatu daerah. Peningkatan kesehatan penduduk tidak hanya berdampak pada produktivitas individu, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Di Kabupaten Nunukan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui berbagai intervensi program prioritas yang diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan, memperbaiki mutu pelayanan, serta memperkuat upaya promotif dan preventif. Untuk mengukur capaian sasaran ini, digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu perkiraan rata-rata usia hidup seseorang sejak lahir. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 27. Capaian Program Prioritas pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,34	71,34	71,37	71,4	71,42	71,45	71,4	71,41	71,4	73,1	100%	100%	100%	102%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	265	265	265	238	211	185	212	137,3	168	91,9	120%	142%	121%	150%
		Angka Kematian Bayi	11,9	11,9	11,9	11,7	11,4	11,1	11,6	7,96	17,1	15,9	103%	132%	50%	56%
		Persentase Puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional	84	84	84	95	95	100	100	88	106	100	119%	93%	111%	100%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi	90	90	90	100	100	100	100	85	100	100	111%	85%	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	73	73	73	75	79	85	35	80,8	90,8	100	48%	108%	115%	118%

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Sejak tahun 2021 hingga 2023, AHH secara konsisten mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2024, capaian AHH mengalami peningkatan yaitu 102%, dengan realisasi sebesar 73,1 tahun dan telah melebihi target sebesar 71,45 tahun.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tiga program prioritas di sektor kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Nunukan, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Ketiga program ini telah berkontribusi terhadap perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan individu dan lingkungan. Namun, capaian indikator pada masing-masing program tidak selalu selaras.

Secara khusus, terdapat catatan penting pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Selama dua tahun terakhir, capaian kinerja indikator ini relatif rendah, yaitu 50% pada tahun 2023 dan 56% pada tahun 2024. Realisasi angka kematian bayi mengalami lonjakan dari 7,96 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 17,1 pada tahun 2023 yang mana angka ini jauh di atas target yaitu sebesar 11,4. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 15,9, capaian ini masih belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan, yaitu 11,1.

Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks dalam kinerja indikator kesehatan di Kabupaten Nunukan. Di satu sisi, AHH menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, namun di sisi lain, tingginya angka kematian bayi justru menjadi peringatan akan adanya tantangan serius dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kenaikan AHH dipengaruhi oleh

perbaikan layanan kesehatan secara umum dan peningkatan kualitas hidup kelompok usia produktif dan lansia, sementara permasalahan spesifik seperti kematian bayi masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif.

Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka pernikahan usia dini, yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yaitu suatu kondisi yang memiliki risiko tinggi terhadap kematian bayi. Selain itu, tingginya angka kelahiran bayi kembar (gemelli) juga memperbesar risiko BBLR. Faktor lain yang turut berperan adalah banyaknya ibu hamil dari luar daerah yang melahirkan di Nunukan dengan riwayat Antenatal Care (ANC) yang tidak teratur, akibat tingginya arus urbanisasi. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya angka anemia pada ibu hamil, kelainan kongenital, serta keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Belum optimalnya edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir dan tanda-tanda bahaya, serta adanya penolakan dari ibu atau keluarga untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi angka kematian bayi di daerah ini.

Secara umum dari tiga program prioritas penunjang pencapaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan dengan baik. Dari lima indikator impact yang dihasilkan dari pelaksanaan program hingga akhir periode RPJMD ini (2024), 4 indikator diantaranya telah tercapai dan bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Hanya satu indikator impact dari program yang tidak tercapai pada tahun 2024 yaitu Angka Kematian Bayi (AKB). Terhadap pencapaian kinerja tersebut, didukung dengan terdapat beberapa faktor pendukung sebagai pembelajaran sebagai berikut:

- Dukungan Anggaran dan Program dari Eksternal. Komitmen anggaran yang optimal untuk membiayai program pada urusan ini menjadi salah satu pendukung untuk pencapaian program. Selain itu, pencapaian program juga tidak mutlak berasal dari inisiatif daerah,

melainkan dukungan program yang berasal dari luar seperti Provinsi dan program dari Kementerian Nasional.

- Pemanfaatan Momentum Pandemi. Krisis pandemi covid 19, selain menjadi tantangan dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi, disisi lain justru menjadi momentum dalam konteks kesehatan untuk meningkatkan **kesadaran masyarakat** terhadap pentingnya kesehatan, yang secara tidak langsung meningkatkan partisipasi dan pencapaian indikator.
- Inovasi Layanan. Inovasi layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Nunukan, juga menjadi pendorong keberhasilan program dan pencapaian kinerja. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Rujukan Dini Berencana (SIRUDITAMA), khususnya dalam agenda menekan angka AKI dan AKB khususnya diwilayah -wilayah perbatasan.
- Pendekatan Target Realistis dan Bertahap. Pencapaian kinerja ini juga dipengaruhi dari perencanaan yang sistematis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang menyesuaikan kondisi real di lapangan yang lebih realistis dan memungkinkan untuk tercapai dan stabil.
- Peran Partisipasi Masyarakat juga menjadi pendukung dalam pencapaian kinerja ini khususnya untuk mendukung pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang hingga saat ini telah tercapai 100%.
- Pemanfaatan Pustu untuk Jangkauan Layanan. Aktivasi Puskesmas Pembantu untuk mendukung layanan kesehatan bagi warga yang jauh dari akses Puskesmas.

Meskipun demikian, dalam melakukan penguatan layanan sosial dasar sebagai kewajiban utama pemerintah daerah, juga menghadapi tantangan, diantaranya:

- Minimnya Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi kendala utama, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan. Beasiswa sudah diberikan tetapi belum cukup memenuhi kebutuhan jangka pendek.

- Aksesibilitas dan Kondisi Geografis. Wilayah Nunukan yang luas dan terpencil mengakibatkan kendala koordinasi dan komunikasi, baik antar fasilitas layanan maupun antara dinas dengan pusat.
- Tingginya Mobilitas dan Migrasi Penduduk. Tingkat migrasi penduduk yang tinggi ke wilayah Nunukan mempengaruhi indikator AKI dan AKB karena ada beban tambahan layanan, termasuk risiko persalinan tanpa kontrol kesehatan memadai.
- Budaya dan Pola Pikir Masyarakat. Kepercayaan tradisional tertentu dan pola pikir masyarakat yang masih terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan program, termasuk dalam aspek pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi.
- Pernikahan dini dan perempuan bekerja juga disebut sebagai pemicu masalah kesehatan ibu dan bayi, karena kurangnya kesiapan fisik dan sosial dalam menjalani kehamilan dan peran ibu.

Capaian program Dinas Kesehatan Nunukan dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, mulai dari tingginya ketergantungan terhadap dukungan eksternal dari provinsi dan kementerian yang dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan tergantung pada konsistensi kebijakan dan respons program, hingga adopsi inovasi seperti SIRUDITAMA dan pemanfaatan Pustu yang menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi geografis yang menantang. Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi berupa kesenjangan sistemik seperti kekurangan tenaga kesehatan, hambatan komunikasi, dan infrastruktur layanan yang belum merata. Di sisi lain, kompleksitas faktor sosial-budaya seperti pernikahan dini dan kepercayaan tradisional juga menjadi penghambat yang memerlukan pendekatan penyuluhan berbasis komunitas dan dialog lintas budaya yang lebih strategis. Sebagai langkah kedepan, beberapa hal sebagai pertimbangan untuk memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan

- Percepat distribusi dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, dengan memperluas skema beasiswa dan penugasan khusus.
- Kembangkan sistem informasi dan koordinasi digital untuk memperbaiki komunikasi antar wilayah.
- Integrasikan pendekatan budaya dalam strategi kesehatan masyarakat, melalui pelibatan tokoh adat dan agama dalam kampanye kesehatan.
- Kembangkan program intervensi untuk menekan angka pernikahan dini, misalnya melalui pendidikan reproduksi dan perlindungan anak.
- Perluas jangkauan inovasi layanan berbasis komunitas, seperti perluasan SIRUDITAMA dan revitalisasi peran Pustu.

5.2.1.3. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dan Kapasitas SDM

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan pondasi penting dalam mendorong kesejahteraan jangka panjang di Kabupaten Nunukan. Sasaran ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menekankan pada pengurangan kesenjangan sosial dan penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, termasuk kelompok rentan dan perempuan. Untuk mengukur kemajuan sasaran ini, digunakan beberapa indikator strategis, yaitu: Pengeluaran per Kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Keempat indikator ini mencerminkan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat, efektivitas penciptaan lapangan kerja, dan kemajuan dalam pemberdayaan kelompok perempuan. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kapasitas SDM.

Tabel 28. Capaian Program prioritas pada Sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dan Kapasitas SDM

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 3: Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM	Pengeluaran per kapita (Rp. Juta)	1,263	1,263	1,327	1,387	1,438	1,494	1,303	1,429	1,494	1,506	98%	103%	104%	101%
		Tingkat kemiskinan	6,36	6,36	6,06	5,89	5,72	5,55	6,79	6,13	5,53	5,73	88%	96%	103%	97%
		Tingkat pengangguran terbuka	4,14	4,14	4,20	4,05	3,79	3,49	4,24	2,71	2,69	2,71	99%	133%	129%	122%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,16	77,16	77,2	77,24	77,28	77,32	77,67	77,41	78,68	73,85	101%	100%	102%	96%
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	29,63 (2019)	29,63 (2019)	30,52	32,96	36,26	39,88	0,00	0,52	0,9	0,6	0%	2%	2%	2%
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100	100	100	100	100	100	0,06	0,00	0,712	0,712	0%	0%	1%	1%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	8,75	8,75	9,52	11,55	15,02	21,02	14%	7%	8,2	25,12	1%	1%	55%	120%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20,88	20,88	33,27	43,55	58,19	72,12	10,28	2,96	10,67	84,24	30,9%	6,80%	28,3%	116%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	14,84	14,84	27,74	43,87	58,06	70,97	15,26	1,52	19,08	100	55%	3%	33%	141%
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	46,88	46,88	65,63	75,00	81,25	87,50	6,875	6,25	2,5	100	10%	8%	3%	114%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	8	8	16	22	42	62	9,34	1,4	11,21	27,57	58%	6%	27%	44%
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0	0	33,33	77,78	100	100	100	100	100	100	300%	100%	100%	100%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26,63	50	30	40	45	50					0%	0%	0%	0%
		Cakupan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial*	0,65	59	25	47	52	59	78				312%	0%	0%	0%
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,26	0,5	0,3	0,35	0,4	0,5	0	0,003	0,072	2,41	0%	1%	18%	482%

Secara umum kinerja sasaran ini diukur dengan empat indikator telah tercapai dengan kategori sangat tinggi. Dua indikator sasaran (Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Perkapita) pencapaian melampaui target yang ditetapkan, sedangkan dua indikator lainnya (Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Gender) meskipun belum mencapai 100%, namun termasuk pencapaian yang sangat tinggi di angka 97% dan 96%. Sasaran ini dirancang dikontribusikan dari lima program prioritas yang tersebar di dua perangkat daerah. Yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (spesifik urusan tenaga kerja) terdiri dua program prioritas dengan tiga indikator keberhasilan. Kemudian Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tiga program prioritas, dengan 8 indikator keberhasilan (impact).

Secara umum, terdapat hubungan positif namun parsial antara pencapaian indikator program dengan indikator sasaran. Keberhasilan program penempatan tenaga kerja dan bantuan sosial terbukti berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, lemahnya capaian pada program pelatihan tenaga kerja dan kurang efektifnya anggaran responsif gender menunjukkan perlunya peningkatan kualitas intervensi agar hasil program benar-benar mendorong capaian sasaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pencapaian hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa tiga program utama—yakni *program penempatan tenaga kerja*, *program rehabilitasi sosial*, dan *program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan*—telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian yang melampaui target RPJMD. Hal ini mencerminkan adanya hubungan positif antara pelaksanaan program dengan pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya dalam menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Capaian yang melampaui target juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program ini memiliki kualitas yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan respons terhadap dinamika sosial.

Namun demikian, capaian akhir tahun RPJMD menyimpan dinamika yang perlu dicermati lebih lanjut, khususnya terkait *konsistensi tahunan*. Beberapa program menunjukkan capaian tahunan yang fluktuatif dan di bawah target selama beberapa tahun, namun berhasil diakselerasi secara signifikan di tahun 2024. Misalnya, pada *program penempatan tenaga kerja*, capaian tahun 2023 hanya sebesar 8,5% (di bawah target RPJMD), namun melonjak menjadi 25,1% pada 2024, jauh melampaui target akhir. Pola serupa juga terlihat pada *program rehabilitasi sosial*, di mana berbagai indikator seperti pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan (anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, dan gelandangan/pengemis) meningkat tajam di tahun 2024 setelah pencapaian rendah dalam tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya dukungan anggaran dari Kementerian Sosial untuk yatim piatu dan ABH. Rendahnya capaian kinerja di tahun 2021-2023 disebabkan karena kurangnya anggaran, namun pelaksanaan program tetap diupayakan berjalan dengan beberapa bantuan anggaran yang diperoleh dari lembaga-lembaga luar seperti baznas atau paguyuban. Selain itu beberapa sumber dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Kementerian Sosial atau sumbangan pribadi.

Fenomena ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, adanya potensi *akselerasi capaian* yang besar bila strategi pelaksanaan program dilakukan secara adaptif dan intensif pada tahun-tahun akhir. Kedua, mencerminkan kemungkinan adanya *penumpukan pelaksanaan* atau efektivitas pelaksanaan yang tidak merata selama periode RPJMD, yang mengindikasikan tantangan dalam hal kesinambungan dan konsistensi implementasi program. Oleh karena itu, meskipun capaian indikator sasaran secara agregat dapat terpenuhi atau melampaui target, penting untuk memastikan bahwa pencapaian tersebut tidak bersifat temporer, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan dan merata antar tahun.

Selain beberapa program yang menunjukkan kinerja tinggi, terdapat dua program yang justru menunjukkan capaian sangat rendah hingga akhir periode RPJMD 2024, yaitu *program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga*

kerja (oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja) serta *program perlindungan dan jaminan sosial* (oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kinerja dua program ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perlindungan kelompok rentan—dua aspek penting dalam pencapaian sasaran pembangunan sosial ekonomi daerah.

Pada *program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja*, terdapat dua indikator utama: persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, yang hanya mencapai rata-rata 2% dari target, dan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, yang juga menunjukkan capaian sangat rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan sistem pendataan ketenagakerjaan yang menyeluruh di Kabupaten Nunukan. Pemerintah hanya mencatat data output dari program yang mereka fasilitasi secara langsung, bukan data riil seluruh tenaga kerja di sektor formal maupun informal. Misalnya, indikator tenaga kerja bersertifikat hanya dihitung dari peserta pelatihan pemerintah, tanpa memasukkan data dari tenaga kerja bersertifikasi yang mungkin difasilitasi oleh sektor swasta atau lembaga independen. Akibatnya, capaian indikator tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya dan justru memperlihatkan under-reporting atas potensi yang ada.

Lebih lanjut, rendahnya capaian pelatihan kewirausahaan juga mencerminkan tumpang tindih antara urusan ketenagakerjaan dan urusan pemberdayaan UMKM. Pelatihan kewirausahaan yang seharusnya menjadi domain lintas sektor justru belum dikelola secara terintegrasi, menyebabkan efektivitas program menjadi lemah dan kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi minimal.

Sementara itu, *program perlindungan dan jaminan sosial* juga mengalami stagnasi kinerja yang serius. Tidak tersedianya data yang valid dan terdokumentasi dengan baik menyebabkan indikator seperti persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, maupun indikator perlindungan sosial tenaga kerja, tidak dapat dinilai secara kuantitatif. Ketidadaan data ini mencerminkan lemahnya

sistem pemantauan dan evaluasi internal di tingkat OPD, serta rendahnya prioritas terhadap pencatatan dan pelaporan data kinerja program sosial secara sistematis.

Kedua program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok usia produktif dan rentan. Namun lemahnya tata kelola data dan koordinasi lintas sektor menyebabkan kontribusi program terhadap pencapaian sasaran pembangunan menjadi minimal. Kondisi ini berpotensi menciptakan *blind spot* dalam evaluasi capaian RPJMD, karena beberapa indikator makro seperti tingkat pengangguran atau kemiskinan bisa saja membaik, tetapi tidak ditopang oleh fondasi program yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi strategi intervensi dan penguatan sistem data, termasuk integrasi sistem informasi ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang berbasis data riil lintas sektor (pemerintah, swasta, dan komunitas). Tanpa perbaikan sistemik, capaian program-program ini akan tetap rendah dan sulit memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Nunukan.

Berikutnya untuk program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, indikator kinerja program ini diukur melalui persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD, yang selama empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan signifikan, meskipun belum seluruhnya mencerminkan pemerataan pemahaman dan implementasi di seluruh perangkat daerah. Pada tahun 2021, capaian masih 0%, kemudian meningkat menjadi 1% pada 2022, 18% pada 2023, dan melonjak secara signifikan menjadi 482% pada 2024. Kenaikan tajam ini, secara nominal, mencerminkan peningkatan alokasi anggaran dari sekitar Rp50 juta menjadi Rp 47,6 miliar. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan mendasar yang perlu dicermati. Pada tiga tahun pertama, target tidak tercapai karena sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menerapkan ARG secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman terkait konsep ARG, dampak dari rotasi dan mutasi pegawai, serta belum optimalnya tindak lanjut

dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Hingga tahun 2024, tercatat baru 9 OPD yang telah mengintegrasikan ARG dalam perencanaan dan penganggaran, itupun masih terbatas pada satu program dan satu kegiatan di masing-masing OPD. Meskipun demikian, capaian ini patut diapresiasi sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya responsivitas gender dalam kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai rekomendasi strategi untuk penguatan pembangunan kinerja pembangunan sosial di Kabupaten Nunukan, beberapa hal yang perlu dilakukan:

- Penguatan sistem data dan monitori. Penguatan Konsistensi Implementasi Program Tahunan. Terdapat inkonsistensi pelaksanaan program selama periode RPJMD, dengan lonjakan capaian hanya di tahun akhir (2024). Perlu dirancang *roadmap tahunan* yang jelas dan realistis untuk setiap program prioritas, dengan indikator tahunan yang terukur dan mekanisme pengawasan yang kuat agar capaian tidak bersifat “dikejar di akhir periode.
- Reformulasi program pelatihan kerja. Capaian program pelatihan kerja sangat rendah dan tidak menggambarkan kondisi riil tenaga kerja karena hanya mengandalkan data output program. Untuk itu perlu kembangkan *sistem pendataan tenaga kerja yang komprehensif*, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha (perusahaan, BLK swasta, dan lembaga sertifikasi). Sesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan sektor industri lokal. Integrasikan pelatihan kerja dengan program pemberdayaan UMKM agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam penyaluran program.
- Penguatan substansi program jaminan sosial. Wajibkan *pelaporan data berbasis kinerja* oleh OPD pelaksana, dengan dukungan sistem informasi sosial yang dapat diakses lintas unit. Perlu meningkatkan *verifikasi dan validasi data PMKS* secara periodik agar intervensi lebih tepat sasaran.

- Integrasi perspektif gender secara substantif. Perlu memastikan bahwa belanja ARG berkontribusi langsung terhadap perbaikan layanan dasar perempuan dan anak. Evaluasi kualitas belanja ARG, bukan hanya besaran anggarannya.
- Sinergi program lintas sektor. Perlu membentuk *tim koordinasi lintas sektor* untuk menyusun program yang terintegrasi, khususnya di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Gunakan pendekatan *holistik berbasis siklus hidup* untuk kelompok rentan, agar program tidak berjalan sektoral dan terfragmentasi.
- Penguatan SDM perencanaan dan evaluator. Perlu meningkatkan kapasitas ASN di bidang perencanaan, penganggaran berbasis gender, dan manajemen data melalui pelatihan rutin dan kolaborasi dengan lembaga nasional (BPSDM, Bappenas, dan lainnya).
- Menyusun pedoman teknis ARG yang disesuaikan dengan karakteristik dan isu strategis Kabupaten Nunukan agar memudahkan OPD dalam menerapkan pendekatan responsif gender dalam perencanaan program dan kegiatan.

5.2.1.4. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta menjamin akses pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan. Di Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan wilayah daratan yang tersebar, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas fisik wilayah, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar kecamatan. Untuk menilai kemajuan sasaran ini, digunakan tiga indikator utama, yaitu: Rasio Konektivitas Kabupaten, Indeks Aksesibilitas, dan Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian

kinerja sasaran peningkatan pemerataan pembangunan pembangunan infrastruktur wilayah.

Tabel 29. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan pembangunan infrastruktur wilayah

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 4: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Rasio konektivitas kabupaten	42,93	42,93	42,93	51,43	53,54	55,64	44,5	51,43	53,54	55,64	104%	100%	100%	100%
		Indeks aksesibilitas	0,96	0,96	1,11	1,27	1,43	1,59	0,96	1,22	1,24	1,25	86%	96%	87%	79%
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	20,00	20,00	20,00	26,67	40,00	53,33	74,42	74,92	75,13	88,44	372%	281%	188%	166%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	54,31	54,31	54,63	54,95	55,27	55,59		28,65	59,70	46,52	0%	52%	108%	84%
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,41	54,41	55,22	56,10	57,13	58,23		56,65	57,13	58,98	0%	101%	100%	101%
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	20,57	20,57	20,57	21,43	22,29	23,14		21,43	22,29	23,00	0%	100%	100%	99%
4	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	22,36	22,36	22,36	30,00	31,25	32,50		35,00	31,25	32,50	0%	117%	100%	100%

Selama periode 2021 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah sebagai salah satu pondasi utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, terluar, dan perbatasan. Capaian pada Rasio Konektivitas Kabupaten menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi kinerja yang konsisten mencapai 100% selama empat tahun berturut-turut. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan serta sarana transportasi pendukung lainnya.

Adapun Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi memperlihatkan capaian kinerja yang sangat tinggi, yakni sebesar 372% pada tahun 2021, 281% di tahun 2022, 188% di tahun 2023, dan 166% di tahun 2024. Meskipun secara angka terlihat sangat melebihi target, evaluasi menunjukkan bahwa tingginya capaian ini lebih disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penetapan target awal, yang tidak berbasis pada data dan kondisi eksisting di lapangan. Hal ini menjadi catatan penting agar ke depan penentuan target indikator dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data teknis yang valid.

Sementara itu, Indeks Aksesibilitas belum mencapai target selama periode evaluasi. Meskipun mengalami peningkatan dari 86% di tahun 2021 menjadi 96% di tahun 2022, capaian kembali menurun menjadi 87% di tahun 2023 dan turun lebih lanjut ke angka 79% di tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), khususnya dalam intervensi wilayah rawan banjir. Dari 32 hektar area banjir yang telah ditetapkan oleh BPBD, baru sekitar 15 hektar yang ditangani hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara wilayah prioritas yang ditetapkan dan lokasi usulan masyarakat dalam forum Musrenbang, yang mayoritas berada di luar wilayah 32 hektar tersebut. Selain itu, Program Penyelenggaraan Jalan menunjukkan kinerja yang konsisten mencapai dan bahkan melampaui target hal ini dapat tercapai berkat dukungan anggaran yang signifikan.

Namun, alokasi anggaran yang dominan untuk aspek kemantapan jalan menyebabkan aspek lain yang berkontribusi terhadap indeks aksesibilitas belum memperoleh perhatian yang cukup.

Selain dua program utama yang diampu oleh Dinas PUPR, capaian sasaran ini juga turut didukung oleh program prioritas yang diampu oleh Dinas Perhubungan, yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain terkait status kepemilikan lahan terminal yang masih berstatus pinjam pakai milik PT. Inhutani, tanpa adanya pembaruan dokumen legal seperti surat perjanjian atau MoU. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan terminal dan berpotensi menghambat pengembangan fasilitas layanan angkutan umum. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum, terutama di wilayah ibukota kabupaten, cenderung rendah, sehingga berdampak pada rendahnya utilisasi moda transportasi publik. Pada wilayah 2 dan 3, tantangan yang dihadapi lebih kompleks, mencakup masalah perizinan dan belum terpenuhinya persyaratan administrasi yang menghambat operasional layanan angkutan di kawasan tersebut. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah berencana untuk melakukan pembangunan terminal baru di wilayah 3 dan 4, yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan akan diusulkan penganggarannya pada tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sistem transportasi lintas wilayah.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pelayaran selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil positif dengan capaian 117% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Tercapainya kinerja pada program ini salah satu faktor pendukungnya yaitu adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pelayaran. Meskipun tetap mencapai target, penurunan kinerja dari tahun sebelumnya mencerminkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan antusias pemilik kapal untuk mengurus perizinan trayek, baik karena keterbatasan pemahaman, maupun

karena proses perizinan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga menjadi kurang terjangkau bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, belum adanya kejelasan regulasi terkait kewenangan daerah dalam pengurusan izin trayek juga memperlambat proses pelayanan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembagian kewenangan dan penyederhanaan proses perizinan trayek angkutan perairan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pemilik kapal terkait pentingnya legalitas operasional serta manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, perlu disusun mekanisme pendampingan perizinan bagi pelaku usaha pelayaran lokal agar mereka lebih mudah mengakses informasi dan pelayanan perizinan yang saat ini masih terpusat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pelayaran, memperkuat layanan transportasi perairan yang andal, serta mendukung pemerataan konektivitas wilayah di Kabupaten Nunukan secara berkelanjutan. Sebagai rekomendasi untuk perbaikan kedepan, beberapa hal yang perlu dilakukan:

- Perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target indikator, khususnya pada Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi, agar berbasis pada data teknis yang valid dan kondisi riil di lapangan, sehingga hasil capaian lebih mencerminkan kinerja aktual.
- OPD terkait perlu mulai mengusulkan kegiatan yang bersifat teknokratik, berbasis pada analisis kebutuhan dan permasalahan strategis wilayah, bukan semata-mata hasil usulan Musrenbang. Misalnya, intervensi pengelolaan banjir diarahkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh BPBD seluas 32 hektar, agar intervensi pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
- Reformulasi Alokasi Anggaran yang Lebih Proporsional. Meskipun capaian kemandapan jalan sangat baik, namun disarankan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran secara lebih seimbang agar aspek-aspek lain yang mendukung aksesibilitas (seperti pengelolaan

SDA dan layanan transportasi umum) juga mendapat dukungan yang cukup.

5.2.1.5. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal

Pemenuhan infrastruktur permukiman yang memadai merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan layak huni mencerminkan keberhasilan pembangunan wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Di Kabupaten Nunukan, tantangan dalam penataan permukiman tidak terlepas dari dinamika urbanisasi, keterbatasan lahan, serta tekanan terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi, drainase, dan akses air bersih. Untuk mengukur sejauh mana intervensi pembangunan telah berhasil mengurangi kondisi permukiman yang tidak layak, digunakan indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Permukiman secara Optimal.

Tabel 30. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Permukiman secara Optimal

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 5: Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	1,11	1,11	1,09	1,07	1,04	1,00	1,31	1,17	1,09	1,14	80%	91%	95%	86%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	45,45	45,45	54,83	59,67	64,51	69,35		51,16		62,65	0%	86%	0%	90%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	72,20	72,20	72,47	72,73	73,00	73,26				0	0%	0%	0%	0%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	23,00	23,00	25,50	25,50	26,82	27,82		100		100	0%	392%	0%	359%
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	9,64	9,64	9,35	8,88	8,17	7,52	3,72	5,14	5,25	5,49	160%	142%	136%	127%

Selama periode 2021 hingga 2024, capaian kinerja indikator sasaran Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh ini mengalami fluktuasi yaitu 80% pada tahun 2021, meningkat menjadi 91% pada 2022, 95% pada 2023, namun kembali menurun menjadi 86% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya penataan permukiman berjalan progresif, tetapi belum konsisten dan masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan. Pencapaian indikator ini didukung oleh empat program utama, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPAL), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Kawasan Permukiman.

Namun demikian, sejumlah tantangan signifikan menghambat pencapaian sasaran ini. Program SPAM, misalnya, menunjukkan capaian yang belum optimal dengan realisasi 86% pada 2022 dan 90% pada 2024, sementara data tahun 2021 dan 2023 tidak tersedia. Ketiadaan data pada dua tahun tersebut mengindikasikan belum optimalnya sistem pelaporan atau monitoring program. Program SPAL, yang seharusnya menjadi komponen penting dalam mendukung sanitasi permukiman, tidak dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator sasaran yaitu:

- Pandemi COVID-19 pada tahun 2021, yang membatasi pelaksanaan kegiatan lapangan.
- Pada 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) baru terbentuk, sehingga kapasitas fiskal dan kelembagaan masih terbatas. Selain itu, beberapa kewenangan teknis masih berada di Dinas PUPR dan belum sepenuhnya dilimpahkan ke Dinas Perkim.
- Kegiatan rehabilitasi rumah belum terlaksana, serta rotasi atau mutasi pegawai yang terjadi beberapa kali menyebabkan kurangnya kesinambungan pelaksanaan program.
- Pada tahun 2023, perhatian terhadap pencapaian target tahunan dinilai masih kurang, yang berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan program.

- Program SPAL yang masih diampu oleh Dinas PUPR juga menghadapi kendala. Salah satu program pembangunan septic tank yang seharusnya mendukung sistem sanitasi tidak dilaksanakan sejak 2021/2022 karena terjerat masalah hukum. Hal ini turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian SPAL dan bahkan berpengaruh pada indikator lain seperti indeks aksesibilitas pada sasaran infrastruktur wilayah.

Melihat capaian indikator sasaran yang mengalami fluktuasi serta adanya ketidaktercapaian pada sejumlah program prioritas, khususnya Program SPAM dan SPAL, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan efektivitas pelaksanaan program, yaitu:

- Pemerintah daerah perlu memastikan pelimpahan kewenangan secara penuh dari Dinas PUPR ke Dinas Perkim sesuai mandat kelembagaannya, khususnya terkait program SPAL dan rehabilitasi rumah. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memperkuat efektivitas pelaksanaan program permukiman.
- Perlu disusun mekanisme pelaporan kinerja yang lebih sistematis dan terintegrasi, sehingga data capaian dapat tersedia secara lengkap dan akurat setiap tahun, khususnya untuk Program SPAM dan SPAL yang selama ini tidak tercatat utuh
- Mengingat SPAL menjadi penunjang utama sanitasi permukiman, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala pelaksanaannya, termasuk penyelesaian kasus hukum yang menghambat proyek-proyek sebelumnya. Selain itu, ke depan perlu disusun ulang prioritas lokasi intervensi berbasis kebutuhan dan risiko sanitasi.

5.2.1.6. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Nunukan, baik sebagai penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) maupun sebagai sumber utama mata

pencabarian masyarakat di wilayah pedesaan. Peningkatan kinerja sektor ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kemajuan sasaran ini, digunakan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, yang mencerminkan sejauh mana sektor pertanian mampu tumbuh secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Kinerja pertanian yang baik ditandai dengan peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan petani, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sarana produksi. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kinerja sektor pertanian

Tabel 31. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja sektor pertanian

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 6: Meningkatnya kinerja sektor pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4,82	4,82	5,97	6,50	7,32	7,78	7,78	3,85	5,6	1,84	130%	59%	77%	24%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangan	53,68	53,68	42,86	42,86	47,62	52,38	0	42,86	42,86	52,38	0%	100%	90%	100%
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)	85,77	85,77	87,43	87,44	87,45	92,79	75,09	81,54	83,93	88,17	86%	93%	96%	95%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	42,86	42,86	43,29	43,72	44,16	44,60	43,29	43,72	88,32	44,6	100%	100%	200%	100%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20	20	20	20	100%	100%	100%	
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman pangan (padi adab organik, padi lokal, jagung, ubi kayu): - Padi Adab Organik - Padi - Jagung - Ubi Kayu	- Padi = 5,90 - Jagung = 0,00 - Ubi Kayu = 0,00	- Padi = 5,90 - Jagung = 0,00 - Ubi Kayu = 0,00	56,25 0,12 0,00 0,00	0,00 0,015 0,00 0,00	0,05 0,05 0,65 0,65	0,09 0,10 1,28 1,28	0,16 0,17 2,48 2,48	0,007 0,063 0,065 0,023	0,00 0,015 0,00 0,00	0,05 0,05 0,65 0,65	9,38%	243,33%	0,55%	50,91%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman hortikultura (durian, pisang, nanas Krayan, cabai, semangka/melon, sayuran daun): - Durian - Cabai - Pisang - Nanas Krayan - Cabai - Semangka/Melon - Sayuran daun	- Durian = 0,00 - Cabai = 0,00 - Semangka = 0,00	- Durian = 0,00 - Cabai = 0,00 - Semangka = 0,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	-17,21 1,31 2,2 2,2 2,2 2,2	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	150,00%	-722,35%	84,62%	92,31%
		Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman perkebunan (kelapa dalam, kopi dan kakao): - Kelapa Dalam - Kopi - Kakao Dalam - Kopi Krayan - Kakao	- Kelapa Dalam = 53,82 - Kopi = 11,95 - Kakao = -8,32	- Kelapa Dalam = 53,82 - Kopi = 11,95 - Kakao = -8,32	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laju pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	-0,13	-0,13	1	2	2	2		164	2	3	0%	8200%	100%	150%
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas wilayah yang terkendali bencana pertaniannya	59,80	59,80	90	90	90	90	102,78	36,52	100,41	100,54	114%	41%	112%	112%
8	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio peningkatan kapasitas Poktan	14,63	14,63	1,50	1,91	4,91	8,05	1,5	1,91	4,91	8,05	100%	100%	100%	100%
		Rasio peningkatan kapasitas BPP	40	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	-	-	2	4	6	8	2,89	4,95	6,1	33,73	145%	124%	102%	422%
		Cakupan binaan kelompok nelayan	41,70	41,70	6	6	6	6	10	9,2	8,4	7,2	167%	153%	140%	120%
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	-	-	4	6	8	10	23,24	73,84	126,08	76,62	581%	1231%	1576%	766%
		Cakupan binaan kelompok pembudidaya	26,42	26,42	9,55	9,55	9,55	9,55	13,61	53,48	66,21	92,95	143%	560%	693%	973%

Ketidakstabilan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan teknis dalam mempertahankan momentum pertumbuhan sektor pertanian, baik dari sisi produktivitas, investasi, maupun keberlanjutan dukungan program. Selain itu, hal ini juga mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas intervensi program dan alokasi pendanaan yang telah dilakukan, serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap faktor eksternal seperti iklim, harga komoditas, dan ketersediaan infrastruktur penunjang.

Dalam kerangka pembangunan, sasaran ini di topang dengan 10 program prioritas yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu Dinas ketahanan pangan dan pertanian sebanyak 8 program dengan 11 indikator keberhasilan yang terdiri dari urusan pangan dan urusan pertanian. Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 2 program prioritas dengan 4 indikator keberhasilan. Secara umum, data capaian menunjukkan kinerja keseluruhan program sangat baik. Dua belas indikator keberhasilan program berhasil tercapai dan bahkan melampaui target. Sedangkan ada 3 indikator keberhasilan yang tidak berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Lihat tabel).

Hampir seluruh program dengan pencapaian kinerja yang baik dan bahkan jauh melampaui dari target yang ditetapkan. Akan tetapi, justru tidak sejalan dengan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang berjalan tidak stabil. Keberhasilan sasaran pembangunan dalam meningkatkan perekonomian sektor pertanian, yang diukur melalui indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, menunjukkan pola kinerja yang fluktuatif dan kurang stabil selama periode RPJMD 2021–2024. Pada tahun 2021, kinerja sektor ini menunjukkan capaian yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 7,78%, melampaui target 5,97% atau setara dengan pencapaian 130%. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan sektor pertanian menurun drastis menjadi 3,85%, hanya mencapai 59% dari target yang ditetapkan sebesar 6,50%. Tahun 2023 sempat menunjukkan perbaikan dengan laju pertumbuhan mencapai 5,6%, atau sekitar 77% dari

target 7,32%. Sayangnya, pada tahun terakhir RPJMD yaitu 2024, kinerja kembali mengalami penurunan yang cukup tajam, dengan pertumbuhan hanya 1,84% dibandingkan target 7,78%, yang berarti pencapaian hanya sebesar 24%.

Salah satu faktornya adalah program dengan ukuran keberhasilan yang paling mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi pertanian justru tidak tercapai. Seperti program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan indikator keberhasilan yang substantif, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi pada tiga jenis sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan). Kinerja rendah ditunjukkan pada laju pertumbuhan ekonomi pada jenis pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berhasil tumbuh namun jauh dibawah target yang ditetapkan (pencapaiannya 50%). Sementara untuk jenis perkebunan secara data menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik (tercapai 100%).

Ada beberapa faktor penyebab yang menghambat terhadap pencapaian program, yaitu:

- Ketersediaan anggaran yang sangat terbatas, pelaksanaan anggaran untuk program tersebut jauh dari pagu RPJMD yang ditetapkan. Hal itu, akibat dari kondisi keuangan daerah, serta tingkat penyerapan anggaran dari perangkat daerah yang tidak baik.
- Desain program yang tidak fokus pada pengungkit kinerja ekonomi: Sebagian besar program lebih bersifat pendukung administratif atau kegiatan jangka pendek yang tidak secara langsung mengakselerasi produksi atau nilai tambah ekonomi pertanian dan perikanan. Misalnya, program ketahanan pangan yang lebih menitikberatkan pada distribusi dan konsumsi, tidak cukup memberi dampak terhadap peningkatan produksi komoditas.
- Kelemahan dalam tata kelola program dan sistem data: Validitas dan keakuratan data capaian indikator masih menjadi tantangan serius, diperburuk oleh keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur sistem pelaporan. Hal ini menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Oleh itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mendorong upaya peningkatan perekonomian daerah khususnya di sektor pertanian ini yaitu:

- Reformulasi pendekatan program berbasis hasil (result-based programming) Perlu pergeseran dari pendekatan berbasis kegiatan ke pendekatan berbasis hasil, dengan prioritas program yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah subsektor pertanian unggulan lokal. Penguatan tata kelola fiskal sektoral: Menjamin konsistensi antara pagu indikatif dalam RPJMD dan realisasi anggaran tahunan, serta memperkuat instrumen monitoring belanja berbasis kinerja agar alokasi benar-benar selaras dengan sasaran strategis.
- Integrasi sistem data sektoral yang akurat dan terhubung dengan evaluasi kinerja: Perlu pengembangan sistem informasi sektoral yang mampu menyediakan data real-time dan berkualitas, serta memperkuat kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pelaporan data pembangunan. Penataan ulang prioritas intervensi berbasis spasial dan komoditas: Mengembangkan strategi pembangunan berbasis potensi wilayah dan rantai nilai komoditas utama, seperti tanaman pangan lokal unggulan dan hortikultura bernilai ekspor, dengan dukungan kebijakan dan investasi yang terarah.
- Penguatan kelembagaan dan kemitraan: Mendorong pelibatan aktif kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha agribisnis lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memperkuat fungsi kelembagaan penyuluhan dan pendampingan teknis. Dengan mengatasi hambatan struktural ini dan mengarahkan kebijakan ke program yang lebih berdampak langsung pada sektor produktif, diharapkan pertumbuhan sektor pertanian ke depan dapat lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2.1.7. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri

Penguatan sektor industri, khususnya industri pengolahan, menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong hilirisasi ekonomi daerah dan

meningkatkan nilai tambah produk lokal. Di Kabupaten Nunukan, sektor industri memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama yang berbasis pada sumber daya alam pertanian, kelautan, dan perikanan. Meningkatnya kinerja sektor ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas basis ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Kemajuan dalam sasaran ini diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pertumbuhan industri terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan sektor industri yang stabil dan positif menjadi tanda bahwa proses transformasi ekonomi dari sektor tradisional ke sektor sekunder mulai berlangsung. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kinerja sektor industri.

Tabel 32. Capaian Program Prioritas pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 7: Meningkatnya kinerja sektor industri	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	-1,30	-1,30	0,98	4,83	5,50	4,97	2,23	3,08	1,53	7,4	228%	64%	28%	149%
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peningkatan jumlah sentra IKM	3,33	3,33	3,33	3,48	3,48	3,85		3	6,48	7,14	0%	86%	186%	185%
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	47	100		111	100	100	0%	111%	213%	100%
3	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,66	98,66	6,82	8,34	10,09	11,78		7,29	26,73	9,6	0%	87%	265%	81%
4	Program Pengembangan UMKM	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	0,90	0,90	4,38	4,73	5,08	5,44		2,63	2,70	3,60	0%	56%	53%	66%

Empat program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi sektor industri di Kabupaten Nunukan 2021-2024, yaitu program perencanaan dan pengembangan industri, program pengendalian usaha industri, program pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan program pengembangan UMKM. Keempat program ini diampu oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Secara umum, pencapaian kinerja program optimal pada dua program prioritas yaitu program perencanaan dan pengembangan industri dengan pencapaian akhir periode 2024 adalah 185%, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 3,85% sedangkan realisasinya adalah 7,4% untuk pertumbuhan sentra IKM untuk tahun 2024. Program lainnya yang mencapai target adalah program pengendalian Izin Usaha Industri yang menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi yaitu 100%. Sementara itu, dua program lainnya yaitu pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, namun pencapaian relatif baik. Masing-masing pencapaiannya 66% untuk pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan usaha mikro pencapaiannya 81%. Sedangkan tahun 2021, kinerja program masih menggunakan indikator RPJMD tahun sebelumnya (2016-2020). Meskipun secara nomenklatur program tidak berubah, namun indikator capaian sebagai impact program berbeda. Sehingga tidak tersedia data pencapaian tahun 2021 yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk pencapaian program khususnya UMKM pencapaiannya relatif rendah. Hal itu disebabkan oleh akurasi data yang digunakan untuk perhitungan kinerja. Covid 19 yang melanda Indonesia, mendorong pemerintah melakukan kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha UMKM. Pada tahun tersebut data UMKM melonjak, karena banyak warga yang mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan sebanyak 22.000 UMKM. Namun, tidak semua yang terdata dalam daftar UMKM tersebut memiliki usaha UMKM secara riil. Tahun 2025 dilakukan pendataan berdasarkan data riil sebanyak 11.000 UMKM. Hambatan lainnya dalam pencapaian kinerja UMKM juga berkaitan dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia di OPD. saat ini untuk bidang yang menangani UMKM hanya ada 4

personel terdiri dari 1 kepala bidang, 1 staf berstatus ASN dan 2 orang honorer. Rendahnya kuantitas sumber daya tersebut berdampak tidak dapat menjangkau layanan pemberdayaan UMKM di semua wilayah di Kabupaten Nunukan. Konsentrasi program dan kegiatan UMKM masih terfokus pada wilayah ibu kota kabupaten (pulau Nunukan) sementara di pulau-pulau lainnya mendapatkan perhatian secara serius.

Hasil kinerja program berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian. Meskipun dalam rentang tahun 2021-2024 terjadi fluktuatif pertumbuhan ekonomi, akan tetapi kinerja ekonomi di sektor tersebut tumbuh positif. Strategi untuk peningkatan industri di daerah adalah dengan adanya dokumen rencana induk pembangunan kawasan industri (RIPIK) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah . Kebijakan sangat strategis untuk menumbuhkan kembangkan industri di daerah Kabupaten Nunukan. Meskipun peran pemerintah sangat penting untuk memastikan inklusivitas pembangunan sektor industri yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Dari hasil evaluasi, analisis terhadap aspek program dan implementasi pembangunan di sektor industri ini beberapa hal yang perlu diperkuat untuk pelaksanaan pembangunan ke depan yaitu:

- Perkuat Akurasi dan Validasi Data UMKM: Pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pelaku UMKM secara berkala untuk memastikan intervensi program berbasis pada pelaku usaha yang benar-benar eksis dan aktif. Hal ini penting untuk menghindari distorsi data seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19, di mana data UMKM melonjak karena pendaftaran untuk bantuan, bukan karena pertumbuhan usaha riil.
- Perluasan Jangkauan Program UMKM: Saat ini konsentrasi program UMKM masih terpusat di wilayah ibu kota kabupaten (Pulau Nunukan), sementara wilayah pulau lainnya belum terjangkau secara optimal. Maka, perluasan jangkauan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM ke seluruh wilayah Kabupaten Nunukan

menjadi krusial, termasuk strategi berbasis wilayah pesisir dan perbatasan.

- Penguatan Kelembagaan dan SDM OPD: Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembinaan UMKM, sangat mendesak untuk menambah jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pada bidang UMKM di dinas terkait. Jumlah personel saat ini (hanya empat orang) tidak memadai untuk menjangkau dan mendampingi ribuan pelaku UMKM di wilayah yang luas dan tersebar.
- Optimalisasi Implementasi RIPIK: Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah harus dioperasionalisasikan secara konsisten dan menjadi acuan dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri berbasis potensi lokal. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan industri bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok usaha besar, melainkan juga melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri daerah.
- Perlu Integrasi Program UMKM dan Industri: Pemberdayaan UMKM harus diarahkan agar dapat terkoneksi dengan pengembangan industri, termasuk melalui program inkubasi bisnis, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas produksi. Integrasi ini akan mempercepat transformasi UMKM dari usaha subsisten menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berorientasi pasar.
- Penguatan Dukungan Anggaran: Untuk meningkatkan capaian target, terutama pada program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, perlu adanya peningkatan dukungan anggaran secara proporsional dan berkelanjutan. Kinerja yang rendah sebagian disebabkan keterbatasan pendanaan, yang berdampak langsung terhadap jangkauan dan kualitas layanan pemberdayaan.

5.1.2.8. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penggerak penting dalam dinamika ekonomi daerah, terutama dalam mendistribusikan hasil produksi, memperlancar arus barang dan jasa, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Di Kabupaten Nunukan, sektor perdagangan memiliki peran strategis mengingat posisinya sebagai wilayah perbatasan yang memiliki potensi besar dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dan lintas negara. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, yang mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, baik grosir maupun eceran. Pertumbuhan sektor ini menjadi salah satu barometer penting terhadap daya beli masyarakat, kelancaran distribusi barang, dan keberhasilan integrasi pasar lokal dengan regional. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kinerja sektor perdagangan.

Tabel 33. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja sektor Perdagangan

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 8: Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	0,65	0,65	-1,58	5,95	7,44	7,05	7,65	8,76	7,2	12,27	-484%	147%	97%	174%
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	4,31	4,31	3,40	2,68	2,55	2,31		0,32	1,37	2,31	0%	12%	54%	100%
2	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan	428,58	428,58	430,72	432,87	435,04	437,21		1.737,80	4.877,83	2.528,35	0,0%	401%	1121%	578%
3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	30,19	30,19	44,75	47,73	50,72	53,70	52,27	62,76	72,31	94,75	117%	131%	143%	176%
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya	37,50	37,50	50,00	50,00	50,00	50,00			50	50	0%	0%	100%	100%

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) di sektor perdagangan sebagai ukuran impact atas sasaran pembangunan peningkatan kinerja sektor perdagangan, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Meskipun pada awal tahun RPJMD 2021-2026 ditargetkan pertumbuhannya negatif (-1,58) namun pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan yang jauh melampaui target yaitu berhasil tumbuh mencapai 7,44%. Bahkan, pada akhir RPJMD (2024) pertumbuhan ekonomi perdagangan di Kabupaten Nunukan berhasil mencapai 12,27%, melampaui target yang ditetapkan hingga 174% dari target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu 7,05%. Penetapan target RPJMD pada sasaran pembangunan ini rendah, karena pertimbangan pada saat perencanaan RPJMD Indonesia sedang mengalami krisis Covid 19. Akan tetapi implementasinya jauh melampaui target yang ditetapkan.

Terdapat empat program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kinerja sektor perdagangan. Program-program tersebut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan. Seperti stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, dengan realisasi pencapaian indikator program mencapai 100% dari target. Meskipun tercapai, namun persentase barang kebutuhan pokok yang beredar yang mampu diawasi masih sangat terbatas. Program pengembangan ekspor yang diukur dengan jumlah ekspor bersih yang tercapai ribuan persen dari target yang ditetapkan. Angka target ekspor bersih ditetapkan dengan rata-rata Rp. 437 Miliar, namun pencapaiannya tahun 2024 mencapai Rp. 2,5 Triliun. Begitu juga program standarisasi dan perlindungan konsumen, pencapaiannya jauh melampaui target yang ditetapkan. Begitu halnya dengan program penggunaan dan pemasaran dalam negeri juga juga demikian pada akhir tahun 2024 pencapaiannya 100% dari target yang ditetapkan.

Meskipun kinerja program telah menunjukkan pencapaian yang signifikan, namun ada beberapa catatan khususnya dalam program pendukung sasaran ini. Sebagai berikut:

- Realisasi kinerja program tercapai dari target yang sangat minim. Seperti program pengembangan ekspor, program pengawasan barang kebutuhan pokok, target yang ditetapkan sangat rendah.
- Inkonsistensi implementasi program, ditunjukkan pada program penggunaan dan pemasaran barang dalam produk dalam negeri. Tahun 2022 dan 2023, program ini tidak dilaksanakan karena tidak adanya pembiayaan untuk melaksanakan program.
- Inkonsistensi pertumbuhan target yang ditetapkan dalam RPJMD, yang seharusnya dirancang dengan hati-hati. Contongnya pada indikator capaian program pengawasan barang, justru target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah dari tahun 2023.

Implementasi program untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi di sektor perdagangan Kabupaten Nunukan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hingga saat ini, Kabupaten Nunukan belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menangani pelanggaran di sektor perdagangan. Akibatnya, temuan hasil pengawasan terhadap praktik perdagangan yang melanggar regulasi tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.

Selain aspek penegakan hukum, keterbatasan peralatan teknis untuk kegiatan pengawasan dan pengujian barang, seperti pengukuran atau tera ulang terhadap alat ukur pada komoditas strategis (misalnya SPBU), turut menjadi hambatan dalam menjamin perlindungan konsumen dan mendorong keadilan dalam transaksi perdagangan. Situasi ini diperburuk oleh minimnya tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang metrologi legal. Saat ini, hanya terdapat satu pegawai dengan keahlian tersebut, yang bahkan telah mendekati usia pensiun. Ketimpangan kapasitas ini menunjukkan lemahnya upaya regenerasi dan penguatan kelembagaan teknis yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pengelolaan sektor perdagangan modern yang berbasis tata kelola baik (good governance).

Dari sisi performa makro, tantangan lain yang mencuat adalah lemahnya kinerja ekspor daerah. Komoditas ekspor utama Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam primer, seperti kelapa sawit dan batu bara. Ketergantungan terhadap komoditas ini menimbulkan kerentanan tinggi terhadap dinamika kebijakan nasional maupun global. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah pusat yang sempat menghentikan sementara ekspor batu bara memiliki dampak langsung terhadap turunnya nilai ekspor daerah, yang selanjutnya akan mempengaruhi neraca perdagangan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Hingga saat ini, diversifikasi komoditas ekspor belum menjadi agenda strategis yang terstruktur di Kabupaten Nunukan. Padahal, secara geografis, kabupaten ini memiliki posisi strategis sebagai wilayah lintas perdagangan dan perbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia), yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekosistem perdagangan internasional berbasis produk lokal bernilai tambah tinggi. Tanpa strategi diversifikasi dan penguatan rantai nilai produk unggulan lokal, posisi Nunukan hanya akan menjadi jalur transit, bukan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk investasi dalam peningkatan kapasitas SDM, pengadaan infrastruktur pendukung perdagangan, serta penciptaan insentif untuk mendorong ekspor produk lokal non-tradisional. Pendekatan ini juga perlu disertai dengan reformasi kelembagaan dalam bentuk penguatan fungsi pengawasan, perlindungan konsumen, dan integrasi sistem logistik perdagangan yang efisien dan berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan kedepan yaitu:

- Perencanaan dan Target Kinerja; Evaluasi dan revisi metodologi penetapan target kinerja RPJMD agar lebih realistis dan adaptif. Susun target tahunan yang konsisten untuk mengukur progres program secara tepat

- Penguatan Program Prioritas dan Pendanaan; Pastikan kesinambungan program strategis seperti penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Tambah alokasi anggaran untuk program berdampak tinggi seperti standardisasi dan perlindungan konsumen.
- Penguatan Kelembagaan dan SDM; Percepat pembentukan dan pengangkatan PPNS perdagangan. Lakukan regenerasi dan pelatihan teknis untuk tenaga metrologi dan pengawas perdagangan dan melakukan penambahan SDM teknis untuk memperluas jangkauan pengawasan dan pelayanan.
- Penguatan Infrastruktur Teknis; pemerintah perlu melengkapi sarana dan prasarana pengukuran seperti peralatan tera ulang (misalnya untuk SPBU). Selain itu juga mengembangkan laboratorium pengujian produk untuk mendukung kualitas perdagangan.
- Penguatan diversifikasi dan Hilirisasi Ekspor, dengan cara menyusun roadmap ekspor komoditas unggulan non tradisional daerah. Mengoptimalisasi Letak Strategis Wilayah Perbatasan dengan mendorong Nunukan sebagai hub perdagangan lintas batas dengan Malaysia.
- Perlu mendorong digitalisasi dan Integrasi Sistem Perdagangan, dengan membangun sistem logistik perdagangan yang efisien dan berbasis digital yang juga dapat digunakan untuk sistem informasi perdagangan dan pemantauan real-time terhadap barang kebutuhan pokok dan UMKM.

5.1.2.9. Program Prioritas Sasaran Meningkatkan Kinerja Investasi di Daerah

Investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan basis penerimaan daerah. Oleh karena itu, peningkatan iklim investasi yang kondusif menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan Kabupaten Nunukan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal, yang

mencerminkan jumlah investasi yang benar-benar terealisasi dalam wilayah kabupaten selama periode tertentu. Indikator ini menjadi gambaran konkret terhadap tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi dan efektivitas pelayanan perizinan serta promosi investasi yang dilakukan pemerintah daerah. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kinerja investasi di daerah.

Tabel 34. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja investasi di daerah

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 9: Meningkatnya kinerja investasi di daerah	Nilai realisasi penanaman modal	682	682	1,189	1,249	1,311	1,377	1,041	1,850	4,618	3,050	88%	148%	352%	221%
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal/Pelaku Usaha	5	5	5	10	20	25	n.a	260	-2,96	-3,01		2600%	-15%	-12%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional	20	20	20	22	24	26	n.a	0		21,09		0%	0%	81%
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kepatuhan Penanaman Modal terhadap ketentuan perizinan berusaha	t.a.d	t.a.d	Cukup	Baik	Baik	Baik	n.a	Baik	Baik	Baik		100%	100%	100%
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	t.a.d	t.a.d	30	60	80	100	30	60	80	100	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal sebagai ukuran kinerja investasi di Kabupaten Nunukan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian berada di angka 88%, lalu melonjak pada tahun 2022 menjadi 148%, kemudian mengalami lonjakan drastis pada 2023 hingga 352%, sebelum akhirnya menurun menjadi 221% pada tahun 2024. Meskipun nilai capaian melebihi target dalam tiga tahun terakhir, variasi yang tinggi ini mencerminkan adanya dinamika pelaporan dan faktor eksternal yang cukup memengaruhi performa indikator. Pencapaian indikator ini didukung oleh empat program prioritas, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Di antara keempat program tersebut, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjukkan fluktuasi capaian paling ekstrem. Pada tahun 2022, capaian program ini melonjak sangat tinggi hingga 2600%, yang kemudian turun drastis menjadi -15% pada tahun 2023 dan -12% pada tahun 2024. Lonjakan pada tahun 2022 dipicu oleh pengaktifan kembali pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui sistem OSS, serta adanya pembinaan kepada pelaku usaha untuk mendorong kepatuhan pelaporan. Sementara itu, lonjakan realisasi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM sebagaimana diumumkan pada akhir 2022, yang memicu peningkatan pelaporan pada tahun berikutnya.
- Penambahan jumlah pelaku usaha baru yang juga ikut berkontribusi pada nilai realisasi investasi.
- Target realisasi investasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, mendorong intensifikasi pelaporan dari pelaku usaha.

Adapun penurunan pada tahun 2024 terjadi karena sebagian besar realisasi investasi yang dilaporkan pada 2023 merupakan akumulasi dari pelaporan tahun-tahun sebelumnya yang tertunda, sehingga tidak mencerminkan aktivitas baru secara penuh di tahun berjalan. Fenomena ini

menggambarkan bahwa fluktuasi capaian indikator lebih banyak dipengaruhi oleh aspek administratif pelaporan dan kebijakan pusat, bukan sepenuhnya mencerminkan dinamika investasi riil secara tahunan di daerah. Oleh sebab itu, perbaikan sistem monitoring, pembinaan yang konsisten, dan validasi data investasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan investasi di Kabupaten Nunukan.

Berikutnya untuk Program Promosi Penanaman Modal bertujuan untuk menarik minat investor melalui berbagai bentuk kegiatan promosi. Namun, program ini menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam pelaksanaannya. Sejak tahun 2021 hingga 2023, capaian kinerja program ini tercatat 0% karena tidak tersedianya data, dan baru pada tahun 2024 terdapat capaian sebesar 81%, dengan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2.129. Adapun indikator yang digunakan sebelumnya adalah *Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional*. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, istilah "berskala nasional" sudah tidak relevan digunakan karena klasifikasi investasi kini hanya dibedakan berdasarkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Oleh karena itu, indikator dan pengukuran program ini perlu segera disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Dalam pelaksanaannya, bentuk promosi yang selama ini direncanakan dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan pameran, baik di tingkat regional maupun nasional. Namun, kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara optimal karena keterbatasan anggaran. Program ini selalu mengalami refocusing dan efisiensi anggaran, sehingga alokasi untuk promosi tidak tersedia. Padahal, mengikuti pameran membutuhkan biaya yang cukup besar untuk transportasi, logistik, dan penyediaan materi promosi. Selain kendala anggaran, program ini juga menghadapi hambatan struktural. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019, setiap kegiatan promosi penanaman modal wajib didasarkan pada dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal. Namun hingga tahun 2024, Kabupaten Nunukan belum memiliki dokumen tersebut, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan belum memiliki dasar perencanaan yang memadai dan belum dapat dikategorikan sebagai promosi yang strategis dan terukur.

Berbeda dari 2 program diatas, program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menunjukkan capaian yang meningkat, terutama pada tahun-tahun terakhir, seiring adanya tambahan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja investasi di daerah diantaranya:

- Meningkatkan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan LKPM untuk memastikan data realisasi investasi mencerminkan aktivitas ekonomi yang riil dan terkini.
- Menyusun *Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah* sesuai amanat Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2019, sebagai landasan pelaksanaan promosi yang terarah, terukur, dan sesuai potensi daerah.
- Menyesuaikan indikator kinerja program promosi dengan regulasi terbaru, pasca UU Cipta Kerja, dengan memisahkan klasifikasi antara PMDN dan PMA, serta menghapus istilah “berskala nasional” yang sudah tidak relevan.
- Mendorong kerja sama dengan mitra strategis (pemerintah provinsi, BUMD, asosiasi, lembaga donor) untuk mendukung pendanaan kegiatan promosi investasi, termasuk partisipasi dalam pameran dan misi dagang.
- Melanjutkan dan memperluas kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam pelaporan LKPM dan pemenuhan regulasi perizinan.

5.1.2.10. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif dan sumber pendapatan baru bagi daerah. Di Kabupaten Nunukan, kekayaan alam, budaya lokal, dan letak geografis strategis sebagai wilayah perbatasan memberikan peluang besar untuk pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing. Pengembangan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan pelaku UMKM, komunitas budaya, dan pelaku industri pariwisata lainnya. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara, yang menggambarkan tingkat daya tarik destinasi wisata serta efektivitas promosi dan penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata. Peningkatan kunjungan wisatawan juga mencerminkan terbangunnya ekosistem pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kinerja sektor pariwisata.

Tabel 35. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kinerja sektor pariwisata

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 10: Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	49,214	49,214	12,988	14,641	15,436	16,277	41.856	41.252	65.674	63.056	322%	425%	425%	387%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarannya	t.a.d	t.a.d	36,88	42,5	44,38	46,25		1,25	44	46	0%	3%	99%	99%
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	-83,39	-83,39	10,00	20,00	40,00	60,00		20	40	80	0%	100%	100%	133%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	27,67	27,67	8,72	16,97	25,23	33,49		16,97	18	41	0%	100%	71%	122%

Keberhasilan peningkatan kinerja pariwisata ditandai dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang masuk ke wilayah kabupaten Nunukan. Periode 2022 - 2024 data kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan jumlahnya jauh melebihi dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 kunjungan wisatawan mencapai 63.056 orang, atau mencapai 387% dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 16.277 orang. Faktor pencapaian signifikan terhadap pencapaian sasaran ini, yaitu penetapan target sangat minimalis, jika berdasarkan baseline tahun 2020 kunjungan wisatawan ke kabupaten Nunukan. Akan tetapi tahun 2021 justru angkanya diturunkan jauh lebih rendah yaitu 12.988. Catatan lainnya, kunjungan wisatawan tersebut bukan dalam rangka berwisata namun sebagian besar orang berkunjung untuk melintas (khususnya wisatawan mancanegara). Nunukan sebagai daerah perbatasan banyak warga asing dari negara tetangga yang melintas di wilayah tersebut berdasarkan data imigrasi.

Peningkatan aktivitas pariwisata di Kabupaten Nunukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, baik dari sisi penyelenggaraan kegiatan maupun dampaknya terhadap perekonomian lokal. Hal ini tercermin dari banyaknya event-event yang digelar oleh Dinas Pariwisata, didukung dengan meningkatnya alokasi anggaran sektor ini. Event tersebut tidak hanya bersifat seremonial, namun menjadi katalis yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk turut ambil bagian dalam menggerakkan ekonomi kreatif.

Upaya untuk mendorong wisata yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah dilaksanakan dengan beberapa program prioritas. Diantaranya program pengembangan destinasi wisata, program pemasaran wisata, dan program ekonomi kreatif. Kinerja program menunjukkan kinerja yang baik, semua program pada tahun 2024 tercapai dan bahkan melampaui dari target. Namun demikian, keberlanjutan dan konsistensi implementasi program menjadi hambatan. Khususnya untuk pengembangan destinasi wisata, dukungan anggaran yang minim tidak mampu mengelola destinasi wisata dengan baik.

Langkah untuk mendorong pariwisata dan kunjungan wisatawan yang dilakukan adalah memperbanyak event bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Nunukan. Khususnya event budaya dan iven olahraga. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian program adalah rasio antara jumlah event promosi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan dengan jumlah yang direncanakan. Capaian indikator ini menjadi penting karena secara langsung mencerminkan intensitas dan kontinuitas kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah daerah.

Jenis-jenis event yang diselenggarakan mencakup berbagai sektor seperti olahraga (misalnya Bupati Cup), budaya (IRAU dan ILAW), serta peringatan HUT Kabupaten Nunukan yang berlangsung selama dua bulan. Event peringatan HUT Kabupaten, misalnya, terbukti mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp 4,8 miliar dan mendatangkan 26.392 wisatawan.

Beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja pariwisata adalah:

- Terbatasnya fasilitas dan aksesibilitas destinasi wisata. Ketersediaan infrastruktur penunjang menuju objek-objek wisata di Kabupaten Nunukan masih tergolong minim. Kondisi ini menyulitkan wisatawan untuk menjangkau lokasi-lokasi potensial, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau wilayah kepulauan. Kurangnya akses transportasi, kondisi jalan yang belum memadai, dan fasilitas publik yang terbatas menjadi hambatan utama dalam mendorong mobilitas wisatawan secara luas.
- Objek wisata belum memiliki daya saing yang kuat. Destinasi wisata yang dimiliki Nunukan belum mampu bersaing dengan destinasi di daerah lain yang telah lebih dulu dikenal dan dikelola secara profesional. Minimnya inovasi dalam pengelolaan destinasi serta keterbatasan promosi dan pemasaran membuat potensi wisata daerah belum sepenuhnya dikenal oleh pasar wisata nasional maupun regional. Hal ini menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan tetap rendah meskipun beberapa event telah rutin dilaksanakan.

- Potensi wisata budaya belum dimaksimalkan secara optimal. Wisata budaya sebenarnya menjadi kekuatan khas yang dimiliki Nunukan, terutama melalui festival-festival adat dan tradisi lokal. Namun potensi ini belum diolah menjadi produk wisata unggulan yang mampu menarik wisatawan secara berkelanjutan. Belum ada paket wisata budaya yang sistematis, promosi masih sporadis, dan belum terintegrasi dengan industri kreatif serta keterlibatan masyarakat lokal secara aktif.
- Kabupaten Nunukan telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Rippar), tetapi dokumen tersebut belum dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan arah pengembangan dengan kebutuhan dan tren terbaru. Tanpa evaluasi, arah pengembangan pariwisata cenderung bersifat rutinitas dan tidak berbasis pada pencapaian target yang jelas, sehingga efektivitas kebijakan menjadi rendah dan sulit diukur dampaknya.
- Fokus pembangunan belum menyentuh penguatan destinasi secara menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pembangunan pariwisata lebih banyak difokuskan pada penyelenggaraan event seperti olahraga, budaya, dan ekonomi kreatif. Meskipun hal ini berdampak pada peningkatan kunjungan jangka pendek, namun penguatan aspek destinasi seperti fasilitas, kualitas layanan, atraksi wisata baru, dan sistem informasi digital belum menjadi prioritas. Akibatnya, dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan pariwisata belum maksimal.

Untuk meningkatkan ekonomi sektor pariwisata kedepan, beberapa hal yang mesti dipertimbangan dalam rencana pembangunan daerah kedepan yaitu:

- Prioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata utama, terutama akses jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum pendukung
- Mendorong inovasi pengelolaan objek wisata melalui kerja sama dengan pelaku swasta, pelatihan SDM pariwisata, dan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran digital.

- Mengembangkan Paket Wisata Budaya Unggulan Formulasikan paket wisata berbasis budaya lokal yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif dan partisipasi masyarakat, serta promosikan melalui jejaring nasional dan regional.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap Rippar untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan dengan perkembangan tren wisata dan kebutuhan lokal.
- Penyeimbangan agenda Event dengan Penguatan Destinasi. Perlu memperkuat dan meningkatkan intensitas penyelenggaraan event-event strategis, namun pastikan juga alokasi anggaran yang proporsional untuk penguatan fisik destinasi, peningkatan layanan, dan atraksi baru.
- Konsistensi dan Keberlanjutan Program. Pastikan keberlanjutan program prioritas pariwisata dengan perencanaan anggaran yang konsisten, serta sinergi antar-perangkat daerah dan stakeholder lokal.

5.1.2.11. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan akuntabilitas tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan pelaporan, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dijalankan oleh perangkat daerah. Capaian sasaran ini dievaluasi melalui sejumlah indikator strategis, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keempat indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai integritas sistem manajemen kinerja, efektivitas pengendalian internal, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 36. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 11: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B (61,71)	B (63,00)	B (64,3)	B (64,56)	100%	100%	100%	100%
		Maturitas SPIP	3	3	3 (50% OPD terdefinisi)	3 (60% OPD Terdefinisi)	3 (70% OPD Terdefinisi)	3 (80% OPD terdefinisi)	Level 3	Level 3 (3,188)	Level 3 (3,151)	Level 3 (3,075)	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat	85,00	85,00	85,00	85	87	88,00	87,73	85,83	86,77	88,35	103%	101%	100%	100%
		Nilai mandiri SPBE	t.a.d	t.a.d	t.a.d	Cukup (1,80)	Cukup (2,00)	Baik (2,30)	n.a		2,38	2,61			100%	100%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	77,00	77,00	80,00	82,00	84,00	87,00	78,93	67,34	69,82	76,71	99%	82%	83%	88%
		Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	t.a.d	t.a.d	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan SPIP	t.a.d	t.a.d	50	60	70	80		64	68	100	0%	107%	97%	125%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan unit pelayanan publik yang bernilai baik (%)	85	85	85	85	87	88			100	123,44	0%	0%	115%	140%
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ)	t.a.d	t.a.d	20	40	63	73	33,5	40,2	67,9	77,17	168%	101%	108%	106%
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penilaian Kinerja PTSP	t.a.d	t.a.d	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	t.a.d	t.a.d	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran	88,57	88,57	90	92	95	97	96,41	97,07	97,19	93,89	107%	106%	102%	97%
7	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan	99	99	99	100	100	100	98,66	99,42	96,83	99,97	100%	99%	97%	100%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yg memiliki KIA	20	20	35	45	55	65		52,91	49,24	61,61	0%	118%	90%	95%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8	Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	15	15	35	50	60	70	3,92	34	60	76	11%	68%	100%	109%
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah nasional	30	30	40	50	60	70	5,84	64,71	76,47	82,38	15%	129%	127%	118%
9	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0	0	5	10	15	20	45,99	3,47	35,16	46,62	920%	35%	234%	233%
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100		86	100	97	0%	86%	100%	97%

Berdasarkan data capaian program prioritas pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Nunukan selama periode RPJMD 2021–2024, terlihat adanya dinamika dan capaian yang cukup beragam di berbagai program. Secara umum, indikator-indikator utama seperti nilai SAKIP dan maturitas SPIP berhasil dipertahankan pada level yang baik (nilai “B” dan Level 3), meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Namun demikian, keberhasilan mempertahankan nilai tersebut di tengah keterbatasan kapasitas menunjukkan stabilitas tata kelola pemerintahan.

Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan tren positif, bahkan melebihi target hingga mencapai 103% pada tahun 2021. Capaian ini menjadi indikator bahwa pelayanan publik di Kabupaten Nunukan mulai menunjukkan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Hal yang serupa juga tercermin dalam nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang menunjukkan peningkatan dari nilai “cukup” ke “baik” dalam dua tahun terakhir, menandakan progres transformasi digital dalam pemerintahan.

Di sisi lain, beberapa program teknis mengalami hambatan. Program penyelenggaraan pengawasan masih menghadapi tantangan dengan persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang cenderung fluktuatif dan belum mencapai target maksimal (tertinggi hanya 88%). Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan mekanisme perbaikan belum berjalan secara optimal. Sementara itu, program pencatatan sipil menunjukkan capaian yang baik, seperti tingginya persentase anak yang memiliki akta kelahiran (mencapai 97%) dan kepemilikan KTP elektronik hampir mencapai target maksimal, menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan cukup berhasil menjangkau masyarakat.

Kinerja paling menonjol terdapat pada program pengelolaan arsip dan pengadaan barang dan jasa. Tingkat ketersediaan arsip melampaui target dengan sangat signifikan (hingga 920% pada tahun 2021), yang mengindikasikan adanya upaya luar biasa dalam penyelamatan dokumen pemerintahan sebagai alat bukti dan akuntabilitas. Begitu pula dengan

indeks tata kelola pengadaan barang/jasa yang terus meningkat, mencerminkan peningkatan dalam kualitas sistem informasi, SDM, dan kelembagaan pengadaan (UKPBJ).

Namun, sejumlah program lainnya masih menunjukkan stagnasi atau data tidak tersedia (N/A), seperti program pelayanan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha. Ini menandakan perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta keterbukaan data untuk mengukur dampak program terhadap investasi dan iklim usaha. Program Aplikasi Informatika juga menunjukkan capaian positif terutama dalam integrasi sistem layanan publik, yang menandai kemajuan digitalisasi di lingkungan pemerintahan.

Secara keseluruhan, program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Nunukan memperlihatkan kecenderungan membaik, terutama pada aspek pelayanan dasar, digitalisasi, dan tata kelola. Namun demikian, perlu strategi yang lebih sistematis untuk memperkuat kualitas pengawasan, meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta memperluas transformasi digital agar berdampak merata ke seluruh OPD. Evaluasi berkala dan penguatan kapasitas aparatur juga harus menjadi prioritas dalam menjaga konsistensi peningkatan kinerja birokrasi.

Implementasi SPIP di Kabupaten Nunukan menunjukkan capaian yang cukup signifikan, terutama setelah terjadi perubahan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menerapkan SPIP secara menyeluruh. Pendampingan intensif oleh Inspektorat kepada seluruh perangkat daerah menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembinaan menyeluruh ketimbang sekadar menarget OPD tertentu. Penilaian SPIP yang dilakukan oleh BPKP didahului oleh penilaian mandiri Inspektorat, dan hasil akhirnya sangat ditentukan oleh evaluasi BPKP. Dalam praktiknya, perubahan indikator, termasuk penekanan pada manajemen risiko dan aspek tindak lanjut, menambah kompleksitas dalam pelaksanaan SPIP. Selain itu, dinamika kasus-kasus baru di daerah juga turut mempengaruhi skor SPIP tahun 2023–2024.

Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya untuk mencapai target level 3, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran memadai, menunjuk personel kompeten dalam manajemen risiko, dan mendorong keterlibatan aktif pimpinan. Identifikasi terhadap risiko kemitraan juga menjadi salah satu langkah preventif dalam penguatan sistem pengendalian. Kendati begitu, tantangan masih dihadapi, terutama karena manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja. Belum adanya kesesuaian dalam mekanisme penerapannya di tingkat perangkat daerah menjadikan proses ini berjalan lambat. Selain itu, budaya SPIP belum sepenuhnya terbentuk—banyak pihak masih memandang SPIP sebagai kegiatan administratif semata, bukan sebagai bagian dari budaya kerja yang melekat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk membangun budaya SPIP di masing-masing perangkat daerah. SPIP tidak hanya perlu dipahami sebagai alat pengawasan, tetapi harus diinternalisasi sebagai sistem kontrol internal yang menyatu dengan proses kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pengendalian intern dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Nunukan.

5.1.2.12. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapasitas ASN menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Di tengah dinamika perubahan kebijakan nasional dan tantangan pelayanan di daerah, ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan manajerial dan teknisnya. Capaian sasaran ini diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN, yang mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi, pemenuhan kualifikasi pendidikan, integritas, serta kinerja aparatur secara umum. Indeks ini juga menjadi cerminan keberhasilan pembinaan kepegawaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya seperti pelatihan, pengembangan karier, sistem merit, dan penguatan budaya kerja. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas

dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas dan kapasitas ASN.

Tabel 37. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 12: Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	t.a.d	t.a.d	t.a.d	60	62	65	t.a.d	29,99	45,69	73,13		49,98	73,69%	112,5%
1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai dengan kualitas pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS termasuk guru dan tenaga kesehatan)	t.a.d	t.a.d	125,57	138,19	151,94	167,13	100	147	155,23	177,32	80%	106%	102%	106%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	t.a.d	t.a.d	2,96	3,26	3,59	3,95	t.a.d	8,68	6,26	14,24	t.a.d	266%	174%	361%

Peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN, yang selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2022, capaian berada pada angka 49,98%, meningkat menjadi 73,69% di tahun 2023, dan mencapai 112,5% pada tahun 2024, melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator sasaran ini didukung oleh dua program prioritas, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selama empat tahun terakhir, Program Kepegawaian Daerah menunjukkan fluktuasi capaian, yakni 80% (2021), 106% (2022), 102% (2023), dan 106% (2024). Sementara itu, Program Pengembangan SDM secara konsisten menunjukkan performa baik dengan capaian melebihi 100% selama tiga tahun terakhir.

Namun demikian, tingginya capaian kinerja program belum sepenuhnya sejalan dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada awal periode. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas program berjalan, efektivitasnya terhadap substansi penguatan kapasitas ASN belum optimal di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor pendukung capaian kinerja di antaranya adalah semakin banyaknya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan pelatihan, seperti tercatat sebanyak 1.121 pegawai yang mengikuti pelatihan dalam dimensi kompetensi, yang turut memberikan kontribusi pada nilai indeks profesionalitas. Sementara itu, sejumlah tantangan dan hambatan yang masih dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya pengumpulan data ASN yang mengikuti pelatihan di luar BKPSDM, sehingga mempengaruhi kelengkapan data penilaian.
- Ketiadaan mekanisme pengukuran profesionalisme secara mandiri, sehingga dimensi-dimensi indeks belum dapat dipantau secara menyeluruh.
- Keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial yang masih dialami sebagian ASN.
- Perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya diarahkan pada sasaran strategis, menyebabkan ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan peningkatan kapasitas.

- Standar kebutuhan pelatihan minimal (20 JP per ASN) belum sepenuhnya terpenuhi.
- Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN.
- Belum tersusunnya profil pengembangan kompetensi ASN, sehingga belum terpetakan secara sistematis jenis pelatihan yang dibutuhkan tiap individu ASN.

Melihat dinamika capaian Indeks Profesionalitas ASN selama tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan signifikan, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan kapasitas ASN di Kabupaten Nunukan telah menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, ketidaksesuaian antara capaian program dengan indikator sasaran di awal periode, serta masih adanya sejumlah hambatan struktural dan teknis, menjadi sinyal perlunya penguatan sistem dan strategi pengelolaan ASN secara menyeluruh. Upaya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN tidak hanya cukup dengan banyaknya pelatihan yang dilaksanakan, tetapi juga harus memastikan bahwa pelatihan tersebut tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan berdampak nyata terhadap profesionalisme individu maupun kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian langkah strategis yang terintegrasi agar reformasi manajemen ASN di Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur. Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kedepannya:

- Menyusun Profil Pengembangan Kompetensi ASN untuk memetakan gap kompetensi secara individual dan kelembagaan, sebagai dasar dalam menyusun rencana pelatihan yang lebih terarah.
- Membangun dan mengintegrasikan sistem pendataan ASN yang mengikuti pelatihan, baik yang difasilitasi oleh BKPSDM maupun oleh instansi lain, agar seluruh aktivitas kompetensi tercatat secara komprehensif.

- Menyusun instrumen evaluasi internal berbasis dimensi profesionalitas (kompetensi, kinerja, disiplin, dan etika), sehingga dapat dilakukan pemantauan berkala oleh perangkat daerah.
- Mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal pelatihan 20 JP per ASN setiap tahunnya, termasuk dengan memanfaatkan kerja sama dengan instansi pelatihan non-pemerintah.
- Meningkatkan sinergi antara perencanaan program dan kebutuhan penguatan kapasitas ASN yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah

5.1.2.13. Sasaran Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari seberapa besar anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu didukung oleh sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi. Untuk menilai capaian sasaran ini, digunakan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang mengukur kinerja daerah dalam enam aspek utama: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, transparansi keuangan, akuntabilitas, serta inovasi pengelolaan keuangan. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 38. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 13: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	t.a.d	t.a.d	t.a.d	B	B	B		B	C	B		100%	50%	100%
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	75	80	100%	100%	75%	80%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPd	88,57	88,57	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	3,20	3,20	2,00	3,00	2,00	2,00	2,7	7,26	7,02	17,5	65%	-42%	-151%	-675%
		Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	t.a.d	t.a.d	100	100	100	100	98,92	100	100	100	99%	100%	100%	100%
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase manajemen aset	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	t.a.d	t.a.d	-40,02	0,59	0,10	2,38	-31,54	34,52	269,14	-63,11	79%	5851%	269140%	-2652%

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dalam tiga tahun terakhir, capaian IPKD menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2022 dan 2024 IPKD mencapai target 100%, namun sempat menurun pada tahun 2023 dengan capaian hanya sebesar 50%. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan lintas perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam tata kelola keuangan. Capaian indikator IPKD ini didukung oleh lima program prioritas, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kelima program tersebut dikelola oleh tiga perangkat daerah, yakni Bappedalitbang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Khusus pada Bapenda, dua program utama yang mendukung pencapaian indikator sasaran adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator *Persentase Penerimaan Dana Transfer ke Daerah*, menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan tinggi. Dalam empat tahun terakhir, capaian program ini bertahan pada level 99% di tahun 2021, dan mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024. Berikutnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang diukur melalui *Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah*, menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif. Tahun 2021 capaian berada di angka 79%, melonjak drastis menjadi 5.851% di tahun 2022, kemudian meningkat tajam lagi menjadi 269.140% di tahun 2023, sebelum mengalami penurunan menjadi -2.652% pada tahun 2024. Lonjakan dan penurunan ini disebabkan oleh dinamika pelaporan, basis data yang berubah, serta pengaruh kebijakan dan peristiwa spesifik. Adapun faktor pendukung tercapainya kinerja yaitu:

- Integrasi sistem host-to-host dengan BPN dalam konfirmasi status WP untuk layanan publik.

- Perpanjangan HGU perusahaan yang berdampak pada penerimaan BPHTB.
- Inovasi dalam metode pemungutan seperti penagihan di luar jam kerja.
- Bertambahnya WP restoran, terutama catering perusahaan.
- Pemasangan *tapping box* pada sejumlah objek pajak.
- Pemberian insentif berupa penghapusan denda tunggakan.
- Pemutakhiran data wajib pajak yang berkesinambungan.

Sedangkan beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu disebabkan karena:

- Proses perpanjangan HGU yang tertunda
- Ketidakjujuran Wajib pajak dalam melaporkan omset.
- Ketiadaan alat ukur khusus untuk objek pajak air tanah
- Belum optimalnya penerapan tarif pajak sesuai regulasi
- Sulitnya mengakses informasi transaksi sarang burung walet
- Fluktuasi harga pasar sarang walet tanpa standar harga resmi
- Rendahnya partisipasi Wajib Pajak dalam pendaftaran objek PBB dan pajak lainnya
- Data objek pajak yang tidak mutakhir dan adanya perbedaan antara SPPT dan kondisi aktual
- Perbedaan mencolok antara NJOP dan harga pasar tanah.
- Nilai transaksi pada AJB yang tidak sesuai dengan nilai riil.
- Rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam sosialisasi perpajakan.

Program pada urusan perencanaan dan keuangan juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari seluruh program yang ditetapkan diimplementasikan dan berhasil mencapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Program urusan perencanaan, yang fokus pada upaya mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan serta evaluasi terhadap konsistensi perencanaan dan implementasinya telah berjalan dengan baik. Meskipun masih menghadapi kendala mengenai ketepatan waktu dalam proses penyusunan dokumen, namun masih dalam ambang kewajaran. Catatan lainnya untuk perencanaan, belum terintegrasinya pelaksanaan kajian perencanaan antar OPD. masing-masing OPD masih melakukan kajian

secara sektoral, meskipun telah ada Penelitian dan Pengembangan yang seharusnya dapat menjadi central atau pusat studi perencanaan untuk seluruhnya.

Meskipun Kabupaten Nunukan telah memiliki sejumlah dokumen strategis dan mulai mengembangkan fungsi litbang, integrasi antara perencanaan, riset, dan penganggaran masih lemah. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran penelitian, serta kurang optimalnya peran Bappeda Litbang menjadi tantangan utama. Upaya pembaruan dokumen seperti RISPAM patut diapresiasi, namun diperlukan transformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas agar perencanaan daerah benar-benar berbasis data, riset, dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya perbaikan kedepan yaitu:

- Perkuat Pendekatan Bottom-Up. Meningkatkan kualitas Musrenbang agar lebih merefleksikan kebutuhan riil masyarakat dan terhubung dengan visi daerah.
- Fokus pada Produk Unggulan Daerah, mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang belum tergarap, seperti sektor perikanan dan pertanian.
- Mendorong Inovasi Kajian oleh Bappeda Litbang, perlu aktif melakukan kajian potensi daerah secara strategis dan mencegah duplikasi kajian oleh OPD.
- Integrasikan Hasil Kajian dalam Program OPD, memastikan hasil kajian menjadi rujukan penyusunan program dan kebijakan lintas sektor.

Sementara pada aspek pengelolaan keuangan yang diemban oleh BPKAD, kendala utama dalam pencapaian kinerja adalah pengendalian SILPA tahunan. SILPA menjadi indikator tata kelola keuangan yang baik, namun dalam implementasinya di Kabupaten Nunukan, SILPA cenderung meningkat setiap tahun. Tahun 2024 SILPA mencapai 17% dari total keuangan daerah pada tahun tersebut. Faktor SILPA salah satunya adalah proyeksi pendapatan daerah yang tidak akurat, serta mekanisme transfer

pemerintah pusat ke daerah yang tidak terjadwal dengan baik, seperti tunda bayar pusat yang disalurkan pada akhir tahun yang tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. SILPA juga disebabkan dari proses efisiensi keuangan pada saat implementasi. Meskipun, penyebab SILPA ini juga dapat ditengarai sebagai perencanaan penganggaran yang kurang baik. Seharusnya jika proyeksi belanja dapat dirancang dengan baik dengan alokasi anggaran yang real, maka anggaran dapat dioptimalkan untuk kebutuhan program yang lainnya.

Oleh karenanya diperlukan upaya perbaikan kedepan dengan cara (1) memperkuat pengendalian keuangan pada tahun berjalan, penyisihan dari implementasi belanja yang tidak terserap dapat dioptimalkan penggunaannya untuk memenuhi anggaran pada program lainnya. (2) akurasi proyeksi pendapatan baik PAD maupun dana Transfer.

5.1.2.14. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim

Pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata, Kabupaten Nunukan perlu memperkuat kebijakan dan tindakan yang mendukung perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk menilai capaian sasaran ini, digunakan sejumlah indikator strategis, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), serta tiga indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang mencakup Total Emisi, Emisi Bersih, dan Total Sekuestrasi. Indikator-indikator ini mencerminkan kondisi lingkungan secara menyeluruh serta efektivitas upaya mitigasi terhadap emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

Tabel 39. Capaian Program prioritas pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 14: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Indeks kualitas air (IKA)	51,05	51,05	54,82	54,92	55,02	55,12	65,71	54,52	51,88	56,67	120%	99%	94%	103%
		Indeks kualitas udara (IKU)	95,91	95,91	92,10	92,21	92,32	92,43	95,55	96,3	95,12	95,52	104%	104%	103%	103%
		Indeks kualitas lahan (IKL)	91,84	91,84	91,77	92,34	92,91	93,48	92,81	93,93	94,03	94,15	101%	102%	101%	101%
		Penurunan emisi GRK: Total Emisi	5.180.067	5.180.067	5.118.529	5.058.782	5.000.753	4.944.372	7.542.600	7.915.037	8.398.136	8.398.136	147%	156%	168%	170%
		Penurunan emisi GRK: Emisi Bersih	1.924.444	1.924.444	1.901.582	1.879.385	1.857.827	1.836.881	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta
		Penurunan emisi GRK: Total Sekuestrasi	3.255.623	3.255.623	3.216.947	3.179.396	3.142.926	3.107.491	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)	65,45	65,45	66,00	66,50	67,00	67,50	65,45	66,5	81,82	88,07	99%	100%	122%	130%
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penanganan RTH	75	75	75	75	100	100	72,78	84,19	91,22	100	97%	112%	91%	100%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	18,18	18,18	18,18	20,00	22,22	25	25	22,22	36,36	20	138%	111%	164%	80%
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	0	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
5	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	71,17	71,17	73	75	77	79	72,5	73	77,9	84,19	99%	97%	101%	107%

Program prioritas yang berkontribusi terhadap pencapaian IKLH di kabupaten Nunukan terdiri dari 5 program prioritas dengan 5 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilannya. Dari lima program yang dilaksanakan 4 program berhasil mencapai target kinerja, satu program tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan (0%) yaitu program Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu kontrol terhadap pencapaian kinerja MHA tersebut adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan memberikan rekomendasi dan menyiapkan perangkat kebijakan yang mendukung pengakuan MHA di Kabupaten Nunukan. Terdapat 9 target MHA menjadi sasaran untuk pengakuan masyarakat hukum adat, namun alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung program tersebut sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan mulai melakukan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sejak tahun 2023. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah kendala utama, yaitu kesulitan dalam pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun pihak eksternal, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Dalam isu pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan (SK) Bupati, serta melakukan pemetaan wilayah adat dan kegiatan sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pengakuan formal belum dapat diterbitkan karena identifikasi dan verifikasi oleh tim terpadu di tingkat pusat belum dilakukan, terutama akibat keterbatasan sumber daya nasional yang tersedia untuk proses tersebut.

Terkait pengelolaan sampah, target pengurangan sampah di Kabupaten Nunukan adalah sebesar 30% dan penanganan sebesar

70%. Namun, implementasi terhadap target ini masih menghadapi hambatan, terutama karena rendahnya pemahaman terhadap indikator-indikator teknis yang digunakan dalam pengukuran capaian.

Di bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH), saat ini hanya seluas 34,16 hektar lahan yang dikelola sebagai RTH, dan hal ini masih jauh dari target ideal. Permasalahan lainnya juga muncul dalam konteks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), di mana penetapan indikator membutuhkan koordinasi lintas sektor. Meskipun tim IKLH telah dibentuk, efektivitasnya belum optimal karena lemahnya sinergi antar sektor, keterbatasan SDM, dan dukungan anggaran yang masih belum mencukupi.

Oleh karena itu beberapa rekomendasi penting yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi emisi GRK yang dimulai sejak 2023 menghadapi tantangan pendataan lintas instansi dan keterbatasan anggaran, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas teknis, kerjasama multipihak, dan dukungan pendanaan yang memadai.
- Pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) memerlukan percepatan melalui koordinasi aktif dengan kementerian terkait agar proses identifikasi dan verifikasi oleh tim terpadu nasional segera dilakukan.
- Rendahnya capaian program MHA menunjukkan perlunya integrasi ke dalam perencanaan daerah serta dukungan anggaran dan pendampingan teknis lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan.
- Masih terdapat kesenjangan pemahaman teknis terhadap indikator pengelolaan sampah di lapangan, sehingga dibutuhkan pelatihan dan asistensi bagi petugas guna mendukung pencapaian target nasional.
- Ruang terbuka hijau (RTH) seluas 34,16 hektar perlu dioptimalkan melalui perluasan dan peningkatan kualitas, termasuk sinergi dengan program CSR, KPBU, dan integrasi dalam RTRW daerah.

- Pengawasan izin lingkungan perlu dikonsolidasikan secara sistematis melalui sistem informasi terpadu agar pengendalian usaha berjalan lebih efektif dan kepatuhan meningkat.
- Pelaporan data lingkungan di DLH perlu diperkuat melalui integrasi basis data digital lintas program dan tahun, mencakup GRK, sampah, kualitas air, udara, tanah, dan RTH.
- Alokasi anggaran program lingkungan perlu berbasis pada indikator kinerja yang jelas dan manfaat ekologis, agar mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terukur.

5.1.2.15. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi kehidupan masyarakat serta keberlangsungan pembangunan daerah. Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat merasa aman, tertib, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penguatan fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Pelanggaran Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan (K3) yang Tertangani, yang mencerminkan efektivitas respons pemerintah daerah dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, seperti ketidaktertiban di ruang publik, pelanggaran jam operasional, penumpukan sampah liar, hingga gangguan ketentraman masyarakat. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban.

Tabel 40. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 15: Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021–2024), capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi 100% setiap tahunnya. Konsistensi ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Nunukan. Capaian sasaran ini didukung oleh satu program prioritas, yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Program ini juga menunjukkan capaian kinerja 100% selama empat tahun berturut-turut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberadaan tim kerja yang solid dan terbangunnya pola kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, khususnya lintas perangkat daerah, TNI, dan Polri dalam penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan patroli ketertiban umum.

Namun, di balik capaian maksimal tersebut, terdapat sejumlah tantangan penting yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Jumlah personel Satpol PP saat ini masih belum memadai, yakni sekitar 200 orang (terdiri atas 70 PNS dan 130 non-PNS), sementara idealnya dibutuhkan lebih dari 300 personel agar pelayanan dan pengawasan dapat menjangkau seluruh 21 kecamatan secara optimal. Bahkan, saat ini masih terdapat empat kecamatan yang belum terlayani secara penuh karena keterbatasan personel. Selain dari aspek jumlah, kualitas SDM juga masih menjadi persoalan. Persyaratan minimal untuk mengikuti Pelatihan PPNS adalah status PNS dan minimal pendidikan sarjana (S1). Namun, dari keseluruhan personel PNS yang ada, mayoritas masih berpendidikan SMA dan hanya dua orang yang memenuhi syarat sebagai PPNS. Ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lebih terstruktur dan sah secara prosedural.

Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi saat ini juga masih belum memadai jika dibandingkan dengan standar minimal operasional. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam mobilisasi, pengawasan, dan pengendalian ketertiban umum yang efektif. Selain itu, keberadaan 25 Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi target penegakan juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa kolaborasi yang kuat dan terstruktur dengan perangkat daerah pengampu masing-masing perda,

maka implementasi aturan akan sulit dijalankan secara optimal. Saat ini, kolaborasi antar-OPD masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan baik, sebagian disebabkan oleh keterbatasan anggaran di beberapa instansi teknis. Salah satu upaya yang mulai diarahkan adalah pengembangan pilot project penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bentuk konkrit peningkatan layanan ketertiban di ruang publik. Namun inisiatif ini memerlukan dukungan lintas sektor dan keberpihakan anggaran yang kuat agar dapat direplikasi ke wilayah lain.

Meskipun capaian kinerja indikator dan program telah menunjukkan hasil maksimal dalam empat tahun terakhir, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi ideal di lapangan. Tantangan-tantangan yang muncul, baik dari sisi keterbatasan personel, kualitas SDM, sarana prasarana, hingga belum optimalnya kolaborasi antar-perangkat daerah menunjukkan bahwa pencapaian 100% masih membutuhkan penguatan fondasi secara kelembagaan dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis sebagai rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan kinerja serta memperkuat kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban ke depan. Adapun rekomendasi untuk perbaikan kedepan yaitu:

- Menyusun rencana pengembangan SDM yang berkelanjutan, termasuk pelatihan teknis, bela negara, dan peningkatan kompetensi untuk seluruh anggota Satpol PP, baik PNS maupun non-PNS.
- Mendorong peningkatan jenjang pendidikan personil agar memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), minimal S1, terutama bagi PNS aktif yang berpotensi.
- Mengusulkan formasi tambahan tenaga Satpol PP melalui mekanisme ASN, khususnya untuk mengisi kekosongan petugas di empat kecamatan yang belum terjangkau layanan Satpol PP secara langsung.
- Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sesuai standar minimal operasional Satpol PP, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, seragam, serta perlengkapan pengamanan personil.
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan perda prioritas serta menyesuaikan strategi penanganannya dengan kapasitas personel dan dukungan OPD lain.

- Mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap perda demi menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

5.1.2.16. Program Prioritas Sasaran Meningkatnya kualitas penanganan bencana

Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik geografis yang beragam serta potensi risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana non-alam. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penanganan bencana menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga keselamatan jiwa, perlindungan aset, serta kesinambungan pembangunan daerah. Penanganan bencana yang baik menuntut kesiapsiagaan yang tinggi, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat. Capaian sasaran ini diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Indeks ini juga mengukur seberapa efektif sistem manajemen risiko bencana diimplementasikan, termasuk aspek perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sumber daya, serta dukungan sosial dan lingkungan. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas penanganan bencana.

Tabel 41. Capaian Program prioritas pada Sasaran meningkatnya kualitas penanganan bencana

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 16: Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks ketahanan daerah	t.a.d	t.a.d	0,46	0,47	0,48	0,5	0,2	0,2	0,4759	0,56	43%	43%	99%	112%
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase upaya penanggulangan bencana melalui pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	t.a.d	t.a.d	100	100	100	100	99	100	100	100	99%	100%	100%	100%
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	73,17	73,17	88,92	88,80	88,69	88,58	88,92	88,8	88,69	88,58	100%	100%	100%	100%

Capaian Indeks Ketahanan Daerah sebagai indikator utama dalam menilai kualitas penanganan bencana di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian berada di angka 43%, kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 99%, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 112% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencapaian sasaran ini didukung oleh dua program utama yaitu Program Penanggulangan Bencana yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang diampu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kedua program tersebut berperan penting dalam penguatan sistem penanggulangan bencana, mulai dari peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, hingga respons cepat terhadap kejadian bencana dan kebakaran.

Salah satu penyebab rendahnya capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2022 karena tidak terlibatnya BPBD Kabupaten Nunukan dalam proses penilaian IKD. Hal ini terjadi akibat keterlambatan informasi dari pemerintah provinsi terkait pelaksanaan penilaian, sehingga BPBD tidak sempat mempersiapkan bukti pendukung dan dokumen yang diperlukan. Akibatnya, nilai IKD tahun tersebut tidak merepresentasikan sepenuhnya kondisi kapasitas ketahanan daerah. Namun, kondisi ini mulai membaik pada tahun berikutnya. BPBD melakukan evaluasi internal dan memperbaiki koordinasi antar bidang, sehingga pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan capaian IKD secara signifikan. Hal ini tidak terlepas dari langkah strategis BPBD dalam memaksimalkan pemenuhan 71 indikator IKD yang menjadi instrumen penilaian, termasuk dengan melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan OPD lainnya yang juga memiliki peran dalam urusan kebencanaan.

Dinas Pemadam Kebakaran mengalami perkembangan positif dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi anggaran, sarana

prasarana, maupun sumber daya manusia. Perubahan orientasi anggaran dari dominasi belanja pegawai menuju penguatan sarpras pada tahun 2024 mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas layanan. Penurunan jumlah kejadian kebakaran hingga triwulan III tahun 2024 menjadi indikasi keberhasilan preventif dan responsif yang lebih baik, didukung oleh SDM bersertifikat dan pembentukan relawan kebakaran. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, seperti belum terpenuhinya seluruh indikator Minimum Wajib Kebakaran, keterbatasan akses ke wilayah tertentu, dan belum meratanya pembentukan RENKAR di semua kecamatan. Tingginya intensitas kejadian non-kebakaran juga memperlihatkan pentingnya diversifikasi kapasitas layanan Damkar. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan kinerja Damkar memerlukan perhatian pada penguatan sistem pelatihan dan sertifikasi SDM, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta perluasan jangkauan layanan hingga ke tingkat kecamatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan kedepan sebagai berikut:

- Pemerintah daerah perlu memastikan keterlibatan aktif seluruh instansi teknis, seperti BPBD, dalam proses penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) agar capaian indikator benar-benar mencerminkan kondisi faktual dan tidak terhambat oleh persoalan administratif.
- Strategi penguatan kelembagaan BPBD yang telah terbukti meningkatkan capaian IKD perlu dilanjutkan dan direplikasi, terutama dalam hal pemenuhan indikator, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran OPD yang terlibat dalam urusan kebencanaan.
- Keberhasilan peningkatan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran perlu diikuti dengan penyelesaian tantangan struktural, khususnya dalam pemenuhan indikator Minimum Wajib Kebakaran, pemerataan RENKAR, dan akses ke wilayah rentan.
- Perlu ditingkatkan investasi pada pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia Damkar secara berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana agar layanan kebencanaan lebih profesional dan menjangkau seluruh kecamatan.

- Diversifikasi fungsi layanan Damkar terhadap kejadian non-kebakaran perlu direspons melalui kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas multifungsi lembaga serta memperkuat sistem kolaborasi dengan instansi dan masyarakat.
- Pemerintah daerah sebaiknya menyusun peta jalan (roadmap) penguatan sistem penanggulangan bencana secara komprehensif yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, SDM, anggaran, dan manajemen risiko untuk memastikan ketahanan daerah yang berkelanjutan.

5.1.2.17. Program Prioritas Sasaran Menguatnya Karakter Kebangsaan

Penguatan karakter kebangsaan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang berjiwa nasionalis, toleran, dan berorientasi pada persatuan dalam keberagaman. Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial-politik yang cepat, nilai-nilai kebangsaan perlu terus ditanamkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memperoleh pemahaman serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Peningkatan indikator ini menjadi gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program-program pendidikan politik, sosialisasi nilai Pancasila, serta penguatan partisipasi warga dalam proses pembangunan yang demokratis. Berikut ini adalah tabel capaian program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran penguatan karakter kebangsaan

Tabel 42. Capaian Program prioritas pada Sasaran menguatnya karakter kebangsaan

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Sasaran/Program)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Persentase Capaian Kinerja Program dan Pendanaan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Sasaran 17: Menguatnya karakter kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	100	100	100	100	100	100		63	78,69	66,89	0%	63%	79%	67%
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta sosialisasi pembauran kebangsaan, pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	0	0	0,00063	0,00073	0,00048	0,00069		0,00072	0,00069	0,00071	0%	99%	143%	103%
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase peran masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya	100	100	100	100	100	100		98,75	94,67	70	0%	99%	95%	70%
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase wawasan nusantara untuk NKRI	100	100	100	100	100	100		100	100	42,86	0%	100%	100%	43%

Capaian kinerja pada indikator ini menunjukkan fluktuasi selama tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 63% pada tahun 2022, meningkat menjadi 79% pada tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi 67% pada tahun 2024. Pencapaian indikator ini didukung oleh tiga program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik selama tiga tahun terakhir, yakni sebesar 99% pada tahun 2022, meningkat signifikan menjadi 143% pada tahun 2023, dan tetap tinggi pada tahun 2024 sebesar 103%. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dalam membangun kesadaran ideologis masyarakat. Berikutnya, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengalami tren penurunan capaian dari 99% di tahun 2022, menjadi 95% di tahun 2023, dan turun lebih signifikan menjadi 70% pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perbedaan data baseline peserta yang hadir dibandingkan dengan total target peserta. Pada tahun 2023, peserta yang hadir sebanyak 142 orang dari target 150 orang, sedangkan pada tahun 2024 hanya 40 orang dari target 50 orang.

Terakhir, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial tercatat mencapai target secara penuh pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 100%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 43%. Penurunan ini dipicu oleh tidak terlaksananya kegiatan yang direncanakan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), sehingga berdampak langsung pada output program.

5.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2024

Evaluasi terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021-2024 merupakan bagian krusial dalam menilai sejauh mana efektivitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program

pembangunan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, berbagai dinamika kebijakan, tantangan anggaran, dan perubahan lingkungan strategis turut mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi dasar penting untuk melihat keselarasan antara target RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan di lapangan oleh masing-masing OPD, serta menjadi tolok ukur efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Program prioritas merupakan program yang mendukung prioritas capaian pembangunan daerah, yang dalam *“logical framing”* berkontribusi langsung atas indikator sasaran pembangunan daerah. Dalam permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur mengenai kriteria penilaian realisasi kinerja yang dicapai kinerja, yang dibuat dalam range interval nilai yang dikategorisasi berdasarkan status kinerja, seperti “sangat tinggi”, “tinggi”, “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”. Berikut ini adalah skala atau range penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam permendagri 86 tahun 2017.

Dari 30 OPD, hanya sedikit yang menunjukkan konsistensi capaian optimal secara menyeluruh, dengan kombinasi indikator melampaui dan mencapai target. Sebaliknya, sebagian besar perangkat daerah menunjukkan kombinasi antara indikator yang dicapai dan tidak dicapai, menunjukkan adanya ketimpangan internal dalam pelaksanaan program prioritas. Selain itu, sejumlah perangkat seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta DPM-PTSP masih belum melampaui satu pun indikator, dan hanya mencapai sebagian target yang direncanakan.

Tabel 43. Rekapitulasi Keberhasilan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pelaksanaan Program 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program Prioritas	Jumlah Indikator	Capaian 2024				Rata-rata Capaian Program Prioritas 2024	Predikat Program
				Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data		
1	Dinas Pendidikan	2	6	2	1	3	0	97,0%	ST
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	5	2	2	1	0	104,9%	ST
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	5	2	0	2	1	127,0%	ST
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman serta Pertanahan	1	1	1	0	0	0	127,0%	ST
5	Dinas Pemadam Kebakaran	1	1	0	1	0	0	100,0%	ST
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1	1	0	1	0	0	100,0%	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	1	0	0	100,0%	ST
8	Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak	3	8	4	1	1	2	124,8%	ST
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	3	1	0	2	0	40,6%	SR
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	11	2	6	3	0	100,0%	ST
11	Dinas Lingkungan Hidup	5	5	2	1	1	1	83,4%	T
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	3	0	0	3	0	97,2%	ST
13	Dinas Perhubungan	2	2	0	1	1	0	99,7%	ST
14	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	1	2	2	0	0	0	113,1%	ST
15	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	8	8	3	3	2	0	171,2%	ST
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM-PTSP)	5	6	0	2	2	2	67,3%	S
17	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3	3	2	0	1	0	118,4%	ST
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	3	3	0	0	0	224,7%	ST
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	4	4	0	0	0	570,3%	ST
20	Sekretariat Daerah	2	2	2	0	0	0	123,0%	ST
21	Bappedalitbang	2	2	0	1	1	0	90,0%	T
22	Badan Pendapatan Daerah	2	2	0	1	1	0	-1275,8%	SR
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2	2	0	1	1	0	-287,5%	SR
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	2	2	0	0	0	233,3%	ST
25	Inspektorat	2	3	1	1	1	0	104,4%	ST
26	Kecamatan	1	1	0	0	1	0	97,0%	ST
27	Badan Kesebangpol	3	3	1	0	2	0	71,9%	S
		73*	95	36	24	29	6	63,8%	R

Keterangan:

* jumlah program prioritas dalam RPJMD Nunukan 2021-2026 sebanyak 72 program, namun dalam rekapitulasi capaian berdasarkan perangkat daerah terhitung 73 program, dikarenakan ada 1 program yang memiliki 2 indikator capaian program dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah (Bappeda dan BPKAD)

Peringkat Capaian Program

ST : Sangat Tinggi
T : Tinggi
S : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

Seluruh perangkat daerah berkontribusi atas capaian pembangunan daerah. Namun berdasarkan logfram dalam tabel program pembangunan daerah dalam RPJMD Nunukan Tahun 2021-2026 terdapat 72 program prioritas dengan 95 indikator capaian program yang dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah, namun terdapat 3 perangkat daerah yang tidak berkontribusi secara langsung, seperti dinas pemberdayaan masyarakat desa, sekretariat dprd, dan badan perbatasan.

Secara umum, rata-rata capaian program prioritas tahun 2024 menunjukkan performa yang beragam di antara 30 perangkat daerah. Dari total 30 perangkat daerah yang dievaluasi, sebagian besar memperoleh predikat "Sangat Tinggi (ST)", menunjukkan bahwa program-program mereka

berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari nilai capaian yang berada di atas 100%, seperti terlihat pada Dinas Kelautan dan Perikanan (570,28%), Dinas Perpustakaan dan Arsip (224,65%), serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (171,17%). Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini perlu dikritisi lebih lanjut, karena terdapat indikasi bahwa target program terlalu rendah, sehingga pencapaian terlihat sangat besar secara persentase.

Sebaliknya, ada juga beberapa perangkat daerah yang menunjukkan kinerja sangat rendah (SR), yaitu dengan capaian negatif atau jauh di bawah target. Misalnya, Badan Pendapatan Daerah memiliki capaian rata-rata sebesar -1.275,84%, hal ini disebabkan realisasi indikator capaian pertumbuhan pajak daerah mengalami minus pada tahun 2024, yaitu -2.651,68%, sementara pertumbuhan pajak tahun sebelumnya meningkat sangat tinggi sebesar 269.140% dari 0,1% menjadi 269,14%. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) juga mengalami pertumbuhan negatif dengan mencatat -287,50% untuk indikator rasio SILPA terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan adanya realisasi yang tidak hanya gagal mencapai target tetapi bahkan mengalami kontraksi signifikan. Hal ini menandakan permasalahan struktural dalam perencanaan atau pelaksanaan program di perangkat daerah tersebut.

Perangkat daerah yang memperoleh predikat "Sedang (S)" dan "Tinggi (T)" juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup (83,41%) dan Bappedalitbang (90,00%) meskipun cukup mendekati target, masih perlu memperkuat efektivitas program agar capaian bisa optimal. Sementara itu, perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perbatasan, dan Sekretariat DPRD tidak memiliki data capaian yang dapat dievaluasi karena program mereka tidak memiliki indikator yang secara langsung terhubung ke sasaran pembangunan, perangkat daerah merupakan perangkat penunjang atas capaian pembangunan daerah.

Secara agregat, rata-rata capaian seluruh perangkat daerah sebesar **63,80%** atau **predikat rendah** mengindikasikan bahwa meskipun banyak dinas yang berkinerja sangat tinggi, namun masih terdapat disparitas signifikan antar dinas. Hal ini terlihat dari adanya nilai ekstrem baik tinggi maupun negatif, yang menurunkan nilai rata-rata total capaian program prioritas.





BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS

6.1. Kesimpulan

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan periode 2021-2024 menunjukkan bahwa meskipun ada pencapaian yang signifikan di beberapa sektor, tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan masih tetap ada. Kabupaten Nunukan, yang terletak di wilayah perbatasan dan memiliki karakteristik geografis serta demografis yang khas, mengalami kemajuan di beberapa indikator pembangunan, seperti penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan di sektor infrastruktur. Meskipun demikian, terdapat ketimpangan yang signifikan antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah perbatasan atau pedalaman, yang memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat tetap menjadi masalah utama dalam mencapai kemandirian fiskal. Dominasi belanja operasional dalam struktur APBD menggambarkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin birokrasi, sedangkan belanja modal yang lebih produktif dan berorientasi pada investasi jangka panjang masih terbatas. Proses perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan terintegrasi juga menunjukkan pentingnya

penyusunan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan berbasis hasil.

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, pencapaian pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Dalam hal indikator makro pembangunan daerah, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan meskipun belum stabil, dengan capaian 4,28% pada 2024, masih berada di bawah target 5,93% di tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan yang sempat tercapai pada 2023, kemudian meningkat kembali pada 2024, menunjukkan ketidakstabilan dalam pengentasan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif yang stabil, meskipun IPM Kabupaten Nunukan masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan secara signifikan, mencapai 2,71% pada 2024, lebih rendah dari target yang ditetapkan. Berikutnya untuk capaian terhadap indikator-indikator kunci pembangunan memberikan gambaran adanya kemajuan di beberapa sektor, namun juga mengungkapkan masih banyaknya tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari total 29 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah, sebagian menunjukkan perkembangan yang sangat baik, sementara sebagian lainnya belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan realitas umum di banyak daerah, di mana keberhasilan pembangunan tidak selalu berlangsung merata antar sektor.

Berikutnya, pada Pencapaian Program Prioritas dan Kinerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2021-2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat pencapaian yang signifikan dalam beberapa sektor, tantangan besar masih ada, terutama dalam keselarasan antara anggaran dan program yang dilaksanakan. Beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, menunjukkan hasil yang positif, namun sektor lain seperti pertanian, UMKM, dan sektor industri masih menghadapi hambatan terkait anggaran terbatas, perencanaan yang kurang fokus, dan kesenjangan data yang menghambat evaluasi yang efektif. Selain itu, banyak program yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai target, dengan beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Secara keseluruhan, evaluasi ini mengidentifikasi perlunya penyesuaian lebih lanjut dalam hal anggaran, sistem pelaporan, serta penguatan kapasitas SDM di perangkat daerah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pembangunan di masa depan.

6.2. Rekomendasi

Berikut ini beberapa rekomendasi umum untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan berikutnya, guna memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang lebih efektif dan berkelanjutan:

1. Penyusunan target harus lebih realistis dan mempertimbangkan data dan kondisi aktual yang ada. Target yang ditetapkan dalam RPJMD harus mencerminkan tantangan yang dihadapi daerah, serta mempertimbangkan potensi dan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu, target ambisius harus disertai dengan strategi dan kebijakan yang jelas, agar pencapaiannya dapat lebih terukur dan terarah.
2. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi RPJMD adalah ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data yang digunakan dalam perencanaan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan real-time. Hal ini akan membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dengan evidence base (berbasi bukti) yang kuat.
3. RPJMD berikutnya perlu mengedepankan integrasi kebijakan dan program antar sektor yang lebih kuat. Hal ini akan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan secara menyeluruh, menghindari duplikasi program, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Sinergi antara sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan sangat penting untuk menciptakan dampak yang lebih luas.
4. Proses pemantauan dan evaluasi harus lebih sering dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan kebijakan dan program yang tidak berjalan sesuai harapan, serta meningkatkan responsivitas terhadap tantangan yang muncul di lapangan.

5. RPJMD berikutnya harus mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Program-program yang dikembangkan perlu memperhatikan kesetaraan dan inklusivitas, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan dan tertinggal, seperti masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman.
6. Pemanfaatan teknologi dan inovasi harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pendidikan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
7. Penyusunan anggaran dalam RPJMD berikutnya perlu lebih efisien, dengan alokasi dana yang jelas dan berbasis prioritas. Transparansi anggaran juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan secara tepat sasaran.

Lampiran

Lampiran 1

Target dan Realisasi dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, Tahun 2021-2024

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Tiap Tahun				Persentase Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	INDIKATOR MAKRO																	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,96	Persen	4,12	4,65	5,47	5,93	6,48	6,99	6,99	4,04	5,24	4,16	4,28	98,10 %	112,70 %	76,10%	72,20%
2	Tingkat kemiskinan	6,36	Persen	6,06	5,89	5,72	5,55	5,38	5,21	5,21	6,79	6,13	5,53	5,73	88,00 %	95,90%	103,30 %	96,80%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,79	Indeks	66,88	67,98	69,1	70,24	71,4	72,58	72,58	66,46	67,16	68,43	69,27	99,40 %	98,80%	99,00%	98,60%
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,14	Persen	4,2	4,05	3,79	3,49	3,21	2,95	2,95	4,24	2,71	2,69	2,71	99,00 %	133,10 %	129,00 %	122,30 %

Lampiran 2

Target, Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2024

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Tiap Tahun				Persentase Capaian			
				2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA															
	INDIKATOR TUJUAN															
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,79	Indeks	66,88	67,98	69,10	70,24	72,58	66,46	67,16	68,43	69,27	99,4%	98,8%	99,0%	98,6%
2	Indeks infrastruktur	30,18	Persen	30,56	31,74	32,30	32,88	33,67	22,11	23,16	28,35	29,98	72,3%	73,0%	87,8%	91,2%
3	Laju pertumbuhan ekonomi	-0,96	Persen	4,12	4,65	5,47	5,93	6,99	4,04	5,24	4,16	4,28	98,1%	112,7%	76,1%	72,2%
4	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	Indeks	CC	CC	B	B	B	CC	CC	B	BB	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,15	Indeks	78,01	78,22	78,42	78,63	79,05	83,73	80,07	78,62	80,61	107,3%	102,4%	100,3%	102,5%
6	Indeks Rasa Aman	100,00	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a	84,78	82,15	96,84	n.a	84,8%	82,2%	96,8%

Lampiran 3

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2024

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Tiap Tahun				Persentase Capaian			
				2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	INDIKATOR SASARAN															
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)	8,00	Tahun	8,10	8,20	8,30	8,40	8,40	8,17	8,24	8,26	8,39	100,9%	100,5%	99,5%	99,9%
2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	Tahun	12,74	12,84	12,94	13,04	13,04	12,65	12,67	12,68	12,69	99,3%	98,7%	98,0%	97,3%
3	Angka Harapan Hidup	71,34	Tahun	71,37	71,4	71,42	71,45	71,45	71,4	71,41	71,42	73,13	100,0%	100,0%	100,0%	102,4%
4	Pengeluaran per kapita	1.263.537	Rupiah	1.327.122	1.382.748	1.438.374	1.494.001	1.494.001	1.303.983	1.429.621	1.494.540	1.506.582	98,3%	103,4%	103,9%	100,8%
5	Tingkat kemiskinan	6,36	Persen	6,06	5,89	5,72	5,55	5,55	6,79	6,13	5,53	5,73	88,0%	95,9%	103,3%	96,8%
6	Tingkat pengangguran terbuka	4,14	Persen	4,20	4,05	3,79	3,49	3,49	4,24	2,71	2,69	2,71	99,0%	133,1%	129,0%	122,3%
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,16	Persen	77,20	77,24	77,28	77,32	77,32	77,67	77,41	78,68	73,85	100,6%	100,2%	101,8%	95,5%
8	Rasio konektivitas kabupaten	42,93	Persen	42,93	51,43	53,54	55,64	55,64	44,5	51,43	53,54	55,64	103,7%	100,0%	100,0%	100,0%
9	Indeks aksesibilitas	0,96	Indeks	1,11	1,27	1,43	1,59	1,59	0,96	1,22	1,24	1,25	86,5%	96,1%	86,7%	78,6%
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	20,00	Persen	20,00	26,67	40,00	53,33	53,33	74,42	74,92	75,13	88,44	372,1%	280,9%	187,8%	165,8%
11	Persentase luas kawasan pemukiman kumuh	1,11	Persen	1,09	1,07	1,04	1,00	1,00	1,31	1,17	1,09	1,14	79,8%	90,7%	95,2%	86,0%
12	Laju pertumbuhan sektor pertanian	4,82	Persen	5,97	6,50	7,32	7,78	7,78	3,85	4,4	5,6	1,84	64,5%	67,7%	76,5%	23,7%
13	Laju pertumbuhan industri pengolahan	-1,30	Persen	2,16	2,83	2,71	2,61	2,61	2,23	3,08	1,53	7,4	103,2%	108,8%	56,5%	283,5%
14	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	0,65	Persen	-1,58	5,95	7,44	7,05	7,05	7,65	8,76	7,2	12,27	584,2%	147,2%	96,8%	174,0%
15	Nilai Realisasi Penanaman Modal	682	Milyar Rp	1,189	1,249	1,311	1,377	1,377	1,041	1,85	4,618	3,05	87,6%	148,1%	352,3%	221,5%
16	Jumlah kunjungan wisatawan (mananegara dan nusantara)	49,214	Orang	12.988	14.641	15.436	16.277	16.277	41.856	41.252	65.674	63.056	322,27%	281,76%	425,46%	387,39%
17	Nilai SAKIP	B	Kategori	B	B	B	B	B	B (61,71)	B (63,00)	B (64,3)	B (64,56)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Tiap Tahun				Persentase Capaian			
				2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
18	Maturitas SPIP	3	Level	3 (50% OPD dengan status terdefinisi)	3 (60% OPD dengan status terdefinisi)	3 (70% OPD dengan status terdefinisi)	3 (80% OPD dengan status terdefinisi)	3 (80% OPD dengan status terdefinisi)	3	3	3	3	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Persen	85,00	85,00	87,00	88,00	88,00	87,73	85,83	86,77	88,35	103,2%	101,0%	99,7%	100,4%
20	Nilai Mandiri SPBE	t.a.d	Kategori	t.a.d	Cukup (1,80)	Cukup (2,00)	Baik (2,30)	Baik (2,30)	t.a.d	2,38	2,61	2,89	t.a.d	132,2%	130,5%	125,7%
21	Indeks Profesionalitas ASN	t.a.d	Persen	t.a.d	60,00	62,00	65,00	65,00	t.a.d	29,99	45,69	73,13	t.a.d	49,98%	73,69%	112,5%
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	t.a.d	Indeks	t.a.d	B	B	B	B	t.a.d	63,978 (B)	58,315 (C)	72,32 (B)	t.a.d	100,0%	<90%	100,0%
23	Indeks Kualitas Air	51,05	Indeks	54,82	54,92	55,02	55,12	55,12	65,71	54,52	51,88	56,67	119,9%	99,3%	94,3%	102,8%
24	Indeks Kualitas Udara	95,91	Indeks	92,10	92,21	92,32	92,43	92,43	95,55	96,3	95,12	95,52	103,7%	104,4%	103,0%	103,3%
25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91,84	Indeks	91,77	92,34	92,91	93,48	93,48	92,81	93,93	94,03	94,15	101,1%	101,7%	101,2%	100,7%
26	Penurunan emisi GRK: Total Emisi	5.180.066,50	Ton	5.118.528,55	5.058.781,65	5.000.752,71	4.944.372,48	4.944.372,48	7.542.600	7.915.037	8.398.136	6.136.455	52,6%	43,5%	32,1%	75,9%
	Emisi Bersih	1.924.443,84		1.901.581,90	1.879.385,37	1.857.827,06	1.836.881,28	1.836.881,28	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d
	Total Sekuestrasi	3.255.622,66		3.216.946,64	3.179.396,28	3.142.925,64	3.107.491,21	3.107.491,21	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d
27	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100,00	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
28	Indeks Ketahanan Daerah	t.a.d	Indeks	0,46	0,47	0,48	0,50	0,50	0,2	0,2	0,4759	0,56	43,5%	42,6%	99,1%	112,0%
29	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	100,00	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	t.a.d	63	78,69	66,89	t.a.d	63,0%	78,7%	66,9%

Lampiran 4

Target, Reaisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2024

No	Misi/Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Misi 1 - Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing															
	Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing															
	Indikator Tujuan Misi 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		65,79	66,88	67,98	69,10	70,24	66,46	67,16	68,43	69,27	99,37 %	98,79 %	99,03 %	98,62%	Bidang Pendidikan
	Sasaran1: Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,17	8,24	8,26	8,39	100,86%	100,49%	99,52 %	99,88%	Bidang Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	12,74	12,84	12,94	13,04	12,65	12,67	12,68	12,69	99,29 %	98,68 %	97,99 %	97,32%	Bidang Pendidikan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan dasar	98,68	98,68	98,77	98,86	98,95		98,26	98,86	96,93	0,00 %	99,48 %	100,00%	97,96%	Bidang Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,39	95,87	96,35	96,83	97,31		98,26	96,83	95,76	0,00 %	101,98%	100%	98,41%	Bidang Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun	42,32	41,40	45,45	49,89	54,76		81,72	49,89	75,25	0,00 %	179,80%	100,00%	137,42 %	Bidang Pendidikan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		yang berpartisipasi dalam PAUD														
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	51,75	43,65	47,75	52,24	57,14		74,04	68,01	8,93	0,00 %	155,06 %	130,19 %	15,63 %	Bidang Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	11,53	11,59	11,75	11,87	12,01	13,8	13,8	14,08	12,01	118,89 %	117,45 %	118,62 %	100,00 %	Bidang Pendidikan
		Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,39	1,36	1,39	1,42	130,73 %	128,14 %	129,91 %	132,71 %	Bidang Pendidikan
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	7,56 %	t.a.d	t.a.d	80,38	0,76 %			321,52 %	Bidang Perpustakaan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00	0,00	15,00	20,00	25,00		15,04	69,56	44,83		100,27 %	347,80 %	179,32 %	Bidang Perpustakaan
	Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,34	71,37	71,4	71,42	71,45	71,4	71,41	71,42	73,13	100,04 %	100,01 %	100,00 %	102,35 %	Bidang Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	265	265,00	238,00	211,00	185,00	212	137,32	167,6	91,94	120%	142%	121%	150%	Bidang Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	11,9	11,9	11,7	11,4	11,1	11,6	7,96	17,06	15,94	103%	132%	50%	56%	Bidang Kesehatan
		Persentase Puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional	84,00	84,00	95,00	95,00	100,00	100	88	105,9	100	119,05%	92,63%	111,47%	100,00%	Bidang Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100	85	100	100	111,11%	85,00%	100,00%	100,00%	Bidang Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	73,00	73,00	75,00	79,00	85,00	35	80,8	90,8	100	47,95%	107,73%	114,94%	117,65%	Bidang Kesehatan
	Sasaran 3: Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM	Pengeluaran per kapita (Rp. Juta)	1,263	1,327	1,382	1,438	1,494	1,303	1,429	1,494	1,506	98,26%	103,39%	103,90%	100,84%	Bidang Ekonomi
		Tingkat kemiskinan	6,36	6,06	5,89	5,72	5,55	6,79	6,13	5,53	5,73	88%	96%	103%	97%	Bidang Sosial (Leading Sector)
		Tingkat pengangguran terbuka	4,14	4,20	4,05	3,79	3,49	4,24	2,71	2,69	2,71	99%	133%	129%	122%	Bidang Tenaga Kerja
		Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	77,16	77,2	77,24	77,28	77,32	77,67	77,41	78,68	73,85	100,61%	100,22%	101,81%	95,51%	Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Pelatihan Kerja dan	Persentase tenaga kerja yang	29,63 (2019)	30,52	32,96	36,26	39,88	0,00	0,52	0,9	0,6	0,00%	1,58%	2,48%	1,50%	Bidang Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Produktivitas Tenaga Kerja	mendapatkan pelatihan kewirausahaan														
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,06	0,00	0,712	0,712	0,06 %	0,00%	0,71%	0,71%	Bidang Tenaga Kerja
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	8,75	9,52	11,55	15,02	21,02	14%	7%	8,2	25,12	1,47 %	0,61%	54,59 %	119,51 %	Bidang Tenaga Kerja
9	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20,88	33,27	43,55	58,19	72,12	10,28	2,96	10,67	84,24	30,90 %	6,80%	18,34 %	116,81 %	Bidang Sosial
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	14,84	27,74	43,87	58,06	70,97	15,26	1,52	19,08	100	55,01 %	3,46%	32,86 %	140,90 %	Bidang Sosial
		Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	46,88	65,63	75,00	81,25	87,50	6,875	6,25	2,5	100	10,48 %	8,33%	3,08%	114,29 %	Bidang Sosial
		Persentase lanjut usia	8,00	16,00	22,00	42,00	62,00	9,34	1,4	11,21	27,57	58,38 %	6,36%	26,69 %	44,47%	Bidang Sosial

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti														
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,00	33,33	77,78	100,00	100,00	100	0	100	100	300,03%	0,00%	100,00%	100,00%	Bidang Sosial
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26,63	30	40	45	50					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Bidang Sosial
		Cakupan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial*	0,65	25	47	52	59	78				312,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Bidang Sosial
11	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,26	0,3	0,35	0,4	0,5	0	0,003	0,072	2,41	0,00%	0,86%	18,00%	482,00%	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 2 - Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi																
Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur																
Indikator Tujuan Misi 2: Indeks infrastruktur			30,18	30,56	31,74	32,30	32,88	22,11	23,16	28,35	29,98	72,35%	72,97%	87,77%	91,18%	
	Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Rasio konektivitas kabupaten	42,93	42,93	51,43	53,54	55,64	44,5	51,43	53,54	55,64	103,66%	100,00%	100,00%	100,00%	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perhubungan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Indeks aksesibilitas	0,96	1,11	1,27	1,43	1,59	0,96	1,22	1,24	1,25	86,49 %	96,06 %	86,71 %	78,62%	Bidang Perhubungan
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	20,00	20,00	26,67	40,00	53,33	74,42	74,92	75,13	88,44	372,10 %	280,91 %	187,83 %	165,84 %	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	54,31	54,63	54,95	55,27	55,59		28,65	59,70	46,52	0,00 %	52,14 %	108,02 %	83,68%	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,41	55,22	56,10	57,13	58,23		56,65	57,13	58,98	0,00 %	100,98 %	100,00 %	101,29 %	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	20,57	20,57	21,43	22,29	23,14		21,43	22,29	23,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %	99,39%	Bidang Perhubungan
15	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	22,36	22,36	30,00	31,25	32,50		35,00	31,25	32,50	0,00 %	116,67 %	100,00 %	100,00 %	Bidang Perhubungan
	Sasaran 2: Meningkatnya pemenuhan infrastruktur	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	1,11	1,09	1,07	1,04	1,00	1,31	1,17	1,09	1,14	80%	91%	95%	86%	Bidang Perumahan Rakyat dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	permukiman secara optimal															Kawasan Permukiman
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	45,45	54,83	59,67	64,51	69,35		51,16		62,65	0,00 %	85,74 %	0,00%	90,34%	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	72,20	72,47	72,73	73,00	73,26				0	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	23,00	25,50	25,50	26,82	27,82		100		100	0,00 %	392,16%	0,00%	359,45 %	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	9,64	9,35	8,88	8,17	7,52	3,72	5,14	5,25	5,49	160%	142%	136%	127%	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal																
Tujuan: Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata																
Indikator Tujuan Misi 3: Laju pertumbuhan ekonomi			-0,96	4,12	4,65	5,47	5,93	4,04	5,25	4,16	4,28	98,06 %	112,90%	76,05 %	72,18%	Bidang Pertanian, Bidang Perikanan, Bidang Pariwisata, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran 1: Meningkatnya kinerja sektor pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4,82	5,97	6,50	7,32	7,78	7,78	3,85	5,6	1,84	130,32%	59,23%	76,50%	23,65%	Bidang Pertanian, Bidang Perikanan
20	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangan	53,68	42,86	42,86	47,62	52,38	0	42,86	42,86	52,38	0,00%	100,00%	90,00%	100,00%	Bidang Pangan
21	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)	85,77	87,43	87,44	87,45	92,79	75,09	81,54	83,93	88,17	85,89%	93,25%	95,97%	95,02%	Bidang Pangan
22	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	42,86	43,29	43,72	44,16	44,60	43,29	43,72	88,32	44,6	100,00%	100,00%	200,00%	100,00%	Bidang Pangan
23	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20	20	20	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bidang Pangan
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman pangan (padi adab organik, padi lokal, jagung, ubi kayu): - Padi Adan Organik - Padi	- Padi = 5,90 - Jagung = 0,00 - Ubi Kayu = 0,00	56,25 0,12 0,00 0,00	0,00 0,015 0,00 0,00	0,05 0,05 0,65 0,65	0,09 0,10 1,28 1,28	0,16 0,17 2,48 2,48	0,007 0,063 0,065 0,023	0,00 0,015 0,00 0,00	0,05 0,05 0,65 0,65	9,38%	243,33%	0,55%	50,91%	Bidang Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		- Jagung - Ubi Kayu														
		Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman hortikultura (durian, pisang, nanas Krayan, cabai, semangka/melon, sayuran daun): - Durian - Pisang - Nanas Krayan - Cabai - Semangka/Melon - Sayuran daun	- Durian = 0,00 - Cabai = 0,00 - Semangka = 0,00	2,00 2,00 2,00 2,00 0,00	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	-17,21 1,31 2,2 2,2 2,2	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	150,0 0%	- 722,3 5%	84,62 %	92,31%	Bidang Pertanian
		Laju pertumbuhan produktivitas pertanian tanaman perkebunan (kelapa dalam, kopi dan kakao):- Kelapa Dalam- Kopi Krayan- Kakao	- Kelapa Dalam= 53,82- Kopi=11,95- Kakao =-8,32	10,001 5,002,00	10,001 5,002,00	10,00 15,00 2,00	10,001 5,002,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	10,00 15,00 2,00	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 %	Bidang Pertanian
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laju pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	-0,13	1,00	2,00	2,00	2,00		164	2	3	0,00 %	8200,00%	100,00%	150,00%	Bidang Pertanian
26	Program Pengendalian	Persentase luas wilayah yang	59,80	90,00	90,00	90,00	90,00	102,78	36,52	100,41	100,54	114,20%	40,58%	111,57%	111,71%	Bidang Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dan Penanggulangan Bencana Pertanian	terkendali bencana pertaniannya														
27	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio peningkatan kapasitas Poktan	14,63	1,50	1,91	4,91	8,05	1,5	1,91	4,91	8,05	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bidang Pertanian
		Rasio peningkatan kapasitas BPP	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bidang Pertanian
27	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	-	2,00	4,00	6,00	8,00	2,89	4,95	6,1	33,73	144,50%	123,75%	101,67%	421,63%	Bidang Perikanan
		Cakupan binaan kelompok nelayan	41,70	6,00	6,00	6,00	6,00	10	9,2	8,4	7,2	166,67%	153,33%	140,00%	120,00%	Bidang Perikanan
28	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	-	4,00	6,00	8,00	10,00	23,24	73,84	126,08	76,62	581,00%	1230,67%	1576,00%	766,20%	Bidang Perikanan
		Cakupan binaan kelompok pembudidaya	26,42	9,55	9,55	9,55	9,55	13,61	53,48	66,21	92,95	142,51%	560,00%	693,30%	973,30%	Bidang Perikanan
	Sasaran 2: Meningkatkan kinerja sektor industri	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	-1,30	0,98	4,83	5,50	4,97	2,23	3,08	1,53	7,4	227,55%	63,77%	27,82%	148,89%	Bidang Perindustrian
29	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peningkatan jumlah sentra IKM	3,33	3,33	3,48	3,48	3,85		3	6,48	7,14	0,00%	86,21%	186,21%	185,45%	Bidang Perindustrian
30	Program Pengendalian	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan	100	100,00	100,00	47,00	100,00		111	100	100	0,00%	111,00%	212,77%	100,00%	Bidang Perindustrian

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Izin Usaha Industri	dengan jumlah izin usaha industri (IUI) industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait														
31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,66	6,82	8,34	10,09	11,78		7,29	26,73	9,6	0,00 %	87,41 %	264,92 %	81,49 %	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
32	Program Pengembangan UMKM	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	0,90	4,38	4,73	5,08	5,44		2,63	2,70	3,60	0,00 %	55,60 %	53,15 %	66,18 %	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Sasaran 3: Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	0,65	-1,58	5,95	7,44	7,05	7,65	8,76	7,2	12,27	-484,18 %	147,23 %	96,77 %	174,04 %	Bidang Perdagangan
33	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	4,31	3,40	2,68	2,55	2,31		0,32	1,37	2,31		188,06 %	146,27 %	100,00 %	Bidang Perdagangan
34	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan (Rp. Miliar)	428,58	430,72	432,87	435,04	437,21		1.737,800	4.877,83	2.528,3	0,00 %	401,46 %	1121,24 %	578,29 %	Bidang Perdagangan
35	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	30,19	47,73	50	55	60	52,27	62,76	72,31	94,75	109,51 %	125,52 %	131,47 %	157,92 %	Bidang Perdagangan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
36	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkatkan Penjualannya	37,50	50,00	50,00	50,00	50,00			50	50	0,00 %	0,00%	100,00 %	100,00 %	Bidang Perdagangan
	Sasaran 4: Meningkatnya kinerja investasi di daerah	Nilai realisasi penanaman modal	682	1,189	1,249	1,311	1,377	1,041	1,850	4,618	3,050	87,55 %	148,12 %	352,25 %	221,50 %	Bidang Penanaman Modal
37	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal/Pelaku Usaha	5	5	10	20	25	n.a	260	-2,96	-3,01		2600 %	-14,80 %	-12,04%	Bidang Penanaman Modal
38	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Bersakal Nasional	20	20	22	24	26	n.a	0		21,09		0,00%	0,00%	81,12%	Bidang Penanaman Modal
39	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kepatuhan Penanaman Modal terhadap ketentuan perizinan berusaha	t.a.d	Cukup	Baik	Baik	Baik	n.a	Baik	Baik	Baik		100%	100%	100%	Bidang Penanaman Modal
40	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	t.a.d	30	60	80	100	30	60	80	100	100,00 %	100%	100%	100%	Bidang PTSP
	Sasaran 5: Meningkatnya	Jumlah kunjungan	49.214	12.988	14.641	15.436	16.277	41.856,00	41.252,00	65.674,00	63.056,00	322,27 %	281,76 %	425,46 %	387,39 %	Bidang Pariwisata

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	kinerja sektor pariwisata	wisatawan mancanegara dan nusantara														
41	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarannya	t.a.d	36,88	42,5	44,38	46,25		1,25	44	46	0,00 %	2,94%	99,14 %	99,46%	Bidang Pariwisata
42	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	-83,39	10,00	20,00	40,00	60,00		20	40	80	0,00 %	100%	100%	133,33 %	Bidang Pariwisata
43	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	27,67	8,72	16,97	25,23	33,49		16,97	18	41	0,00 %	100%	71,34 %	122,42 %	Bidang Pariwisata
Misi 4 - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi																
Tujuan 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif																
Indikator Tujuan Misi 4: Indeks Reformasi Birokrasi			CC	CC	CC	B	B									
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP		B	B	B	B	B	B (61,71)	B (63,00)	B (64,3)	B (64,56)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Maturitas SPIP		3	3 (50% OPD terdefinisi)	3 (60% OPD Terdefinisi)	3 (70% OPDT erdefinisi)	3 (80% OPD terdefinisi)	Level 3	Level 3 (3,188)	Level 3 (3,151)	Level 3 (3,075)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Bidang Inspektorat Daerah
	Indeks kepuasan masyarakat		85,00	85,00	85	87	88,00	87,73	85,83	86,77	88,35	103,21 %	100,98 %	99,74 %	100,40 %	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Nilai mandiri SPBE		t.a.d	t.a.d	Cukup (1,80)	Cukup (2,00)	Baik (2,30)	n.a		2,38	2,61			100,00 %	100,00 %	Bagian Komunikasi dan Informatika

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
44	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	77,00	80	82	84	87	78,93	67,34	69,82	76,71	98,66 %	82,12 %	83,12 %	88,17%	Bidang Inspektorat Daerah
		Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	t.a.d	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100%	100%	100%	100,00 %	Bidang Inspektorat Daerah
45	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan SPIP	t.a.d	50	60	70,00	80		64	68,00	100	0,00 %	106,67 %	97,14 %	125,00 %	Bidang Inspektorat Daerah
46	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan unit pelayanan publik yang bernilai baik (%)	85	85	85	87,00	88			100	123,44	0,00 %	0,00%	114,94 %	140,27 %	Bidang Sekretariat Daerah
47	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ)	t.a.d	20	40,00	63	73	33,5	40,2	67,9	77,17	167,50 %	100,50 %	107,78 %	105,71 %	Bidang Sekretariat Daerah
48	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penilaian Kinerja PTSP	t.a.d	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik									Bidang PTSP
		Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	t.a.d	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik									Bidang PTSP

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
49	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran	88,57	90,00	92,00	95,00	97,00	96,41	97,07	97,19	93,89	107,12%	105,51%	102,31%	96,79%	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	98,66	99,42	96,83	99,97	99,66%	99,42%	96,83%	99,97%	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yg memiliki KIA	20,00	35,00	45,00	55,00	65,00		52,91	49,24	61,61	0,00%	117,58%	89,53%	94,78%	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51	Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	15,00	35,00	50,00	60,00	70,00	3,92	34	60	76	11,20%	68,00%	100,00%	108,57%	Bidang Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah nasional	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	5,84	64,71	76,47	82,38	14,60%	129,42%	127,45%	117,69%	Bidang Komunikasi dan Informatika
52	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	45,99	3,47	35,16	46,62	919,80%	34,70%	234,40%	233,10%	Bidang Kearsipan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan														
53	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		86	100	97	0,00 %	86,00 %	100,00 %	97,00 %	Kecamatan
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	t.a.d	t.a.d	60,00	62,00	65,00	t.a.d	45,16	75,76	73,13		75,27 %	122,19 %	112,51 %	Bidang Kepegawaian
54	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai dengan kualitas pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS termasuk guru dan tenaga kesehatan)	t.a.d	125,57	138,19	151,94	167,13	100	147	155,23	177,32	79,64 %	106,38 %	102,17 %	106,10 %	Bidang Kepegawaian
55	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	t.a.d	2,96	3,26	3,59	3,95	t.a.d	8,68	6,26	14,24		266,26 %	174,37 %	360,51 %	Bidang Kepegawaian
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	t.a.d	t.a.d	B	B	B		B	C	B		100%	50%	100%	Bidang Perencanaan, Bidang Keuangan Daerah

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	keuangan daerah															
56	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	75	80	100%	100%	75,00%	80,00%	Bidang Perencanaan
57	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPd	88,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100%	100%	100%	100,00%	Bidang Perencanaan
58	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,20	2,00	3,00	2,00	2,00	2,7	7,26	7,02	17,5	65,00%	42,00%	151,00%	675,00%	Bidang Keuangan
		Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	t.a.d	100,00	100,00	100,00	100,00	98,92	100	100	100	98,92%	100%	100%	100,00%	Bidang Pendapatan
59	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase manajemen aset	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00%	100%	100%	100,00%	Bidang Keuangan
60	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	t.a.d	-40,02	0,59	0,10	2,38	-31,54	34,52	269,14	-63,11	78,81%	5851%	269140%	-2652%	Bidang Keuangan
Misi 5 - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan																
Tujuan 1: Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup																
Indikator Tujuan Misi 5: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			78,15	78,01	78,22	78,42	78,63	83,73	80,07	78,62	80,61	107,33%	102,37%	100,26%	102,52%	Bidang Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Indeks kualitas air (IKA)	51,05	54,82	54,92	55,02	55,12	65,71	54,52	51,88	56,67	119,87%	99,27%	94,29%	102,81%	Bidang Perumahan & Permukiman
		Indeks kualitas udara (IKU)	95,91	92,10	92,21	92,32	92,43	95,55	96,3	95,12	95,52	103,75%	104,44%	103,03%	103,34%	Bidang Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas lahan (IKL)	91,84	91,77	92,34	92,91	93,48	92,81	93,93	94,03	94,15	101,13%	101,72%	101,21%	100,72%	Bidang Lingkungan Hidup
		Penurunan emisi GRK: Total Emisi	5.180,07	5.118,53	5.058,78	5.000,75	4.944,37	7.543	7.915	8.398	8.398	147,36%	156,46%	167,94%	169,85%	Bidang Lingkungan Hidup
		Penurunan emisi GRK: Emisi Bersih	1.924,44	1.901,58	1.879,39	1.857,83	1.836,88	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	Bidang Lingkungan Hidup
		Penurunan emisi GRK: Total Sekuestrasi	3.255,62	3.216,95	3.179,40	3.142,93	3.107,49	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	Bidang Lingkungan Hidup
61	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)	65,45	66,00	66,50	67,00	67,50	65,45	66,5	81,82	88,07	99,17%	100,00%	122,12%	130,47%	Bidang Lingkungan Hidup
62	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penanganan RTH	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	72,78	84,19	91,22	100	97,04%	112,25%	91,22%	100,00%	Bidang Lingkungan Hidup
63	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	18,18	18,18	20,00	22,22	25,00	33,3	22,22	36,36	20	183,17%	111,10%	163,64%	80,00%	Bidang Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Prioritas Tahun Ke:				Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Lingkungan Hidup (PPLH)	pemerintah daerah														
64	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	Bidang Lingkungan Hidup
65	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	71,17	73,00	75,00	77,00	79,00	72,5	73	77,9	84,19	99,32 %	97,33 %	101,17 %	106,57 %	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Misi 6 - Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram																
Tujuan 1: Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram																
Indikator Tujuan Misi 6: Indeks rasa aman			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	dta	84,78	82,15	96,84	dta	84,78 %	82,15 %	96,84%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban		Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
66	Program Peningkatan Ketenteraman	Persentase gangguan trantibum yang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	Bidang Ketenteraman dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dan Ketertiban Umum	dapat diselesaikan														Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks ketahanan daerah	t.a.d	0,46	0,47	0,48	0,5	0,2	0,2	0,4759	0,56	43,48 %	42,55 %	99,15 %	112,00 %	Bidang Penanggulangan Bencana
67	Program Penanggulangan Bencana	Persentase upaya penanggulangan bencana melalui pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	t.a.d	100	100	100	100	99	100	100	100	99%	100%	100%	100%	Bidang Penanggulangan Bencana
68	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	73,17	88,92	88,80	88,69	88,58	88,92	88,8	88,69	88,58	100%	100%	100%	100%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Sasaran 3: Menguatnya karakter kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		63	78,69	66,89	0,00 %	63,00 %	78,69 %	66,89%	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
69	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta sosialisasi pembauran kebangsaan, pendidikan wawasan	0,00	0,00063	0,00073	0,00048	0,00069		0,00072	0,00069	0,00071	0,00 %	98,63 %	143,40%	102,90 %	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke:				Realisasi Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke				Persentase Capaian Kinerja Program Program Prioritas Tahun Ke: (%)				Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		kebangsaan dan bela negara														
70	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase peran masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya	100	100	100	100	100		98,75	94,67	70	0,00 %	98,75 %	94,67 %	70,00%	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
71	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase wawasan nusantara untuk NKRI	100	100	100	100	100		100	100	42,86	0,00 %	100%	100%	42,86%	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 5

Perbandingan Pagu Anggaran Perangkat daerah and Urusan antara RPJMD, RKPD dan APBD 2023-2024

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN/BIDANG						
			2023			2024		
			RPJMD	RKPD	APBD	RPJMD	RKPD	APBD
			Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta
1	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN	304.596	216.005.218.657	327.894.584.620	296.935	216.005.218.657	327.894.584.620
2	DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	223.550	239.517.464.150	235.467.212.650	223.102	239.517.464.150	235.467.212.650
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG PEKERJAAN UMUM, BIDANG PENATAAN RUANG	40.487	138.188.412.866	135.645.377.974	28.944	138.188.412.866	135.645.377.974
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.245	12.372.354.201	12.125.441.121	10.435	12.372.354.201	12.125.441.121
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.275	34.326.719.341	34.142.338.863	42.145	34.326.719.341	34.142.338.863
6	DINAS SATPOL PP							
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA							
8	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.103	6.400.902.286	6.166.231.647	8.105	6.400.902.286	6.166.231.647
9	DINAS TRANMIGRASI DAN TENAGA KERJA	BIDANG TENAGA KERJA, BIDANG TRANSMIGRASI	5.211	151.151.050	5.051.396.841	5.305	151.151.050	5.051.396.841
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	BIDANG PANGAN, BIDANG PERTANIAN	22.466	28.926.101.481	32.292.145.934	22.229	28.926.101.481	32.292.145.934
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.978	17.113.611.956	23.973.006.040	22.329	17.113.611.956	23.973.006.040

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN/BIDANG						
			2023			2024		
			RPJMD	RKPD	APBD	RPJMD	RKPD	APBD
			Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.424	5.749.451.476	6.707.846.138	6.472	5.749.451.476	6.707.846.138
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.884	5.304.293.585	5.481.494.062	5.791	5.304.293.585	5.481.494.062
14	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG PERHUBUNGAN	19.957	19.888.193.430	19.322.169.654	18.747	19.888.193.430	19.322.169.654
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMASITIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.060	4.496.199.184	6.197.311.338	4.060	4.496.199.184	6.197.311.338
16	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	8.499	7.950.413.622	8.865.697.610	8.591	7.950.413.622	8.865.697.610
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	BIDANG PENANAMAN MODAL	4.951	4.541.525.171	4.783.172.602	4.954	4.541.525.171	4.783.172.602
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDYAAAN DAN PARIWISATA	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.286	6.861.116.113	7.942.336.962	9.309	6.861.116.113	7.942.336.962
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	BIDANG PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4.369	3.683.478.619	4.125.370.339	4.227	3.683.478.619	4.125.370.339
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.271	8.848.400.219	9.153.841.594	10.781	8.848.400.219	9.153.841.594
21	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	57.444	57.240.646.915	58.423.120.016	57.223	57.240.646.915	58.423.120.016
22	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	32.667	42.951.804.886	43.422.482.894	33.414	42.951.804.886	43.422.482.894
23	BAPPEDALITBANG	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.079	8.372.464.500	8.078.635.808	7.908	8.372.464.500	8.078.635.808
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	281.939	276.006.064.435	290.543.152.802	279.649	276.006.064.435	290.543.152.802
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH							
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	KEPEGAWAIAN	1.421	7.524.453.680	8.084.907.990	1.452	7.524.453.680	8.084.907.990

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN/BIDANG						
			2023			2024		
			RPJMD	RKPD	APBD	RPJMD	RKPD	APBD
			Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta	Rp. Juta
	PENGEMBANGAN SDM							
27	BADAN PERBATASAN	PENGELOLAAN PERBATASAN	3.626	3.386.844.687	3.403.106.021	3.708	3.386.844.687	3.403.106.021
28	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	9.413	10.209.031.956	8.768.241.142	9.533	10.209.031.956	8.768.241.142
29	KECAMATAN	KECAMATAN	63.048	61.470.266.041	61.470.266.041	63.158	61.470.266.041	61.470.266.041
30	BADAN KESEBANGPOL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.165	3.680.081.708	5.463.320.421	38.641	3.680.081.708	5.463.320.421
TOTAL			1.215.412,66	1.231.166.666.215	1.372.994.209.124	1.227.146,89	1.231.166.666.215	1.372.994.209.124

Lampiran 6

Rekapitulasi Capaian Program Prioritas berdasarkan Perangkat Daerah, Nunukan 2021-2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program Prioritas	Jumlah Indikator	Capaian 2024				Capaian 2023				Capaian 2022				Capaian 2021			
				Mela mpau i	Mencapai Targe t	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampai	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampai	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampai	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data
1	Dinas Pendidikan	2	6	2	1	3	0	3	3	0	0	5	0	1	0	1	0	0	5
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	5	2	2	1	0	3	1	1	0	3	0	2	0	4	0	1	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	5	2	0	2	1	1	1	0	3	2	0	2	1	0	0	0	5
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman serta Pertanahan	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5	Dinas Pemadam Kebakaran	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak	3	8	3	1	2	2	0	1	5	2	0	0	5	3	2	0	4	2
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	3	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	2	1
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	11	2	6	3	0	2	5	4	0	2	6	3	0	2	5	2	2
11	Dinas Lingkungan Hidup	5	5	2	1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	1	0	3	1

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program Prioritas	Jumlah Indikator	Capaian 2024				Capaian 2023				Capaian 2022				Capaian 2021			
				Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	3	0	0	3	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	1
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dinas Perhubungan	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	1	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
16	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	8	8	3	3	2	0	6	1	1	0	4	0	3	1	1	0	0	7
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM-PTSP)	5	6	0	2	2	2	0	2	2	2	1	2	0	3	0	1	0	5
18	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3	3	2	0	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	3
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	3	3	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
21	Sekretariat Daerah	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
22	Sekretariat DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bappedalitbang	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0
24	Badan Pendapatan Daerah	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program Prioritas	Jumlah Indikator	Capaian 2024				Capaian 2023				Capaian 2022				Capaian 2021			
				Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data	Melampaui	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Tidak ada data
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
27	Badan Perbatasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Inspektorat	2	3	1	1	1	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	1	1
29	Kecamatan	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
30	Badan Kesebangpol	3	3	1	0	2	0	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Jumlah		73	95	35	24	30	6	33	26	26	9	34	21	28	12	20	12	22	41

